



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1638, 2019

KEMENPU-PR. Renstra. Tahun 2015-2019.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PRT/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2015–2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015–2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 607) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini meliputi uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan, peran, kondisi saat awal perencanaan dan kondisi hingga semester satu tahun 2019, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis berupa *outcome* atau *impact*, indikator kinerja utama, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, program, sasaran program berupa *outcome*, kegiatan dan sasaran kegiatan berupa *outcome* yang terdiri atas *output*, target capaian, serta pendanaan.
- (2) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan bagi penyusunan rencana strategis unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis.
- (3) Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan acuan untuk menyusun Renja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan lebih lanjut oleh setiap unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke dalam program tahunan masing-masing.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 18/PRT/M/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
13.1/PRT/M/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN
2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian PUPR yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Peraturan Menteri (Permen) Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2015-2019.

Penyusunan dokumen Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L), Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), dan evaluasi pelaksanaan/pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR mengacu kepada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PUPR juga merupakan salah satu komponen dalam siklus sistem manajemen kinerja Kementerian PUPR yang meliputi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan

Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 juga disusun berlandaskan pada tugas dan fungsi Kementerian PUPR, amanat undang-undang sektor bidang PUPR, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan yang terus berkembang, dan isu-isu strategis yang dinamis dan harus diakomodir serta mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015–2019 maupun RPJPN Tahun 2005–2025. Substansi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015–2019 meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi; (ii). Potensi dan permasalahan penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR; 2. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR; 3. Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Dalam waktu periode pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019, dari tahun 2015 hingga awal tahun 2019 dipandang perlu untuk melakukan Revisi Renstra mengingat adanya perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, diantaranya yaitu ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengakibatkan perubahan beberapa tugas, fungsi maupun struktur unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Demikian juga direktif presiden terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil pembangunan maupun kebijakan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), penanggulangan kemiskinan (*pro poor*), penciptaan lapangan kerja (*pro jobs*), serta upaya mempertahankan daya dukung lingkungan (*pro green*) terkait dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Disamping itu upaya untuk meningkatkan kinerja/produktivitas organisasi yang sejalan dengan upaya reformasi birokrasi.

Dokumen hasil Revisi Renstra ini meliputi pemaparan tentang: 1. Pendahuluan: (i). Kondisi Saat Awal Periode Perencanaan; (ii). Kondisi hingga Tahun 2018 (Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran); (iii). Potensi dan Permasalahan Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR; (iv). Perubahan Lingkungan Strategis (termasuk perubahan tugas, fungsi maupun struktur unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR); 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemen PUPR; 3. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; 4. Target Kinerja serta Kerangka Pendanaan; 5. Penutup.

Di dalam Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bidang PUPR revisi Renstra ini dijabarkan strategi pencapaian sisa target sasaran hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi hingga Tahun 2018 serta mengakomodir isu-isu dan perubahan lingkungan strategis yang mengharuskan terjadinya penyesuaian sebagaimana telah dijelaskan. Hasil revisi Renstra ini digunakan sebagai acuan perencanaan,

pemrograman, penganggaran tahunan, dan evaluasi pelaksanaan atau pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR hingga akhir periode Perencanaan Tahun 2019, sekaligus menjadi baseline yang akan menjadi acuan masing-masing unit organisasi dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020 – 2024 serta penyusunan RENJA K/L dan RKA K/L di lingkungan Kementerian PUPR mulai tahun 2019.

1.1 KONDISI SAAT AWAL PERIODE PERENCANAAN

Kementerian PUPR, yang menangani infrastruktur bidang PUPR, berkewajiban untuk mendukung terwujudnya pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan gender, pembangunan yang berkelanjutan, serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Setiap penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR akan diintegrasikan dengan aspek gender dalam mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan melalui keterpaduan 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan serta diperkuat dengan dimensi kelembagaan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Kemudian penyelenggaraan tata kelola infrastruktur bidang PUPR dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi, secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan hal tersebut, tugas dan fungsi Kementerian PUPR mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergisasi pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

1.1.1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Adapun untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan energi pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 28 (dua puluh delapan) waduk dan 3 (tiga) diantaranya telah selesai yaitu Bendungan Jatibarang, Bendungan Pandanduri, dan Bendungan Gondang. Sehingga total jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 menjadi sebanyak 208 (dua ratus delapan) buah. Sedangkan untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 (seribu tiga ratus tiga puluh dua) buah. Di samping itu juga dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan kapasitas tampung sumber air sampai akhir tahun 2014 menjadi 12,8 (dua belas koma delapan) miliar m^3 (termasuk bendungan, embung, dan situ), serta memberikan dukungan bagi peningkatan ketersediaan air untuk irigasi yang bersumber dari waduk menjadi 761.542 (tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) ha.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak pada tahun 2015 sebesar 68,87 (enam puluh delapan koma delapan puluh tujuh) %, pada periode 2010-2014 telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) m^3 /detik serta dilakukan rehabilitasi dan operasi pemeliharaan sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tahun 2005-2014 sebanyak 64 (enam puluh empat) m^3 /detik. Namun demikian, Kapasitas IPA PDAM sampai akhir tahun 2013 hanya sebesar 36,83 (tiga puluh enam koma delapan puluh tiga) m^3 /detik sehingga terdapat *idle capacity* sebanyak 6,41 (enam koma empat puluh satu) m^3 /detik.

Untuk mendukung ketahanan pangan pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya yang meliputi pembangunan jaringan irigasi permukaan seluas 429.739 (empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) ha, jaringan irigasi rawa seluas 202.386 (dua ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) ha, dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 14.020 (empat belas ribu dua puluh) ha, serta upaya rehabilitasi Irigasi permukaan seluas

2.021.439 (dua juta dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan) ha, Jaringan irigasi rawa seluas 655.437 ha (enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh), dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) seluas 42.131 (empat puluh dua ribu seratus tiga puluh satu) ha. Kondisi jaringan permukaan yang menjadi kewenangan pusat sampai tahun 2014, yang dalam kondisi baik telah mencapai 77,46 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh enam) % dan yang dalam kondisi rusak sebesar 22,54 (dua puluh dua koma lima puluh empat) %.

Selanjutnya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada periode 2010-2014 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.447,94 (seribu empat ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh empat) km, serta rehabilitasi sepanjang 1.131,72 (seribu seratus tiga puluh satu koma tujuh puluh dua) km. Pada periode itu pula, untuk prasarana dan sarana pengendali lahar dan sedimen telah dibangun sebanyak 180 (seratus delapan puluh) buah dan direhabilitasi sebanyak 140 (seratus empat puluh) buah, pengaman pantai sepanjang 279,36 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh enam) km dan direhabilitasi sepanjang 18,10 (delapan belas koma sepuluh) km, serta operasi dan pemeliharaan sepanjang 142,03 (seratus empat puluh dua koma nol tiga) km.

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan dan pengelolaan SDA di tingkat Nasional, selama kurun waktu 2010-2014 telah diterbitkan banyak peraturan dalam pengelolaan SDA. Namun demikian, dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2015), pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Implikasinya, praktek pengelolaan SDA tidak memiliki payung hukum, sehingga perlu dilakukan *review* dan dibuatkan payung hukumnya, sementara rancangan UU pengganti sedang disusun. Hal ini perlu dilakukan mengingat pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, sehingga lembaga pengelolaan yang sudah ada saat ini tetap harus ada, dan kesepakatan/kontrak dengan pihak ketiga harus tetap berjalan sampai akhir kontrak.

1.1.2 PENYELENGGARAAN JALAN

Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 (empat puluh lima koma lima puluh sembilan) km, dan jembatan sepanjang 41.640 (empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh) m. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dioperasikan sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/*fly over/underpass/terowongan* sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 (enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) m. Sedangkan jalan bebas hambatan yang telah dioperasikan sampai akhir

tahun 2014 mencapai 1.030,56 (seribu tiga puluh koma lima puluh enam) km. Selanjutnya pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis, perbatasan serta wilayah terluar dan terdepan pada tahun 2010-2014 adalah sepanjang 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) km (Jalan: 2.660 km dan Jembatan: 4.341 m). Untuk kawasan perbatasan, antara lain Perbatasan Kalimantan telah direncana sepanjang 1.755 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) km, Jalan Perbatasan NTT (Nusa Tenggara Timur) – RDTL (Republic Demokrat Timor Leste) telah dilakukan penanganan sepanjang 54,2 (lima puluh empat koma dua) km dari rencana sepanjang 176,2 (seratus tujuh puluh enam koma dua) km dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat termasuk Jalan perbatasan Papua sepanjang 102 (seratus dua) km. Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95 (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh lima) % (untuk total panjang jalan nasional 38.569 km) dan utilitas jalan nasional 97,56 (sembilan puluh tujuh koma lima puluh enam) km miliar kendaraan. Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km, sehingga kemantapan pada tahun 2015 menurun menjadi 86 (delapan puluh enam) %. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 (empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70 (tujuh puluh) % untuk jalan provinsi dan untuk Jalan Kabupaten atau Kota mencapai 59 (lima puluh sembilan) %.

1.1.3 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Pembangunan Infrastruktur Permukiman periode 2010-2014 pada dasarnya difokuskan pada perumusan kebijakan dan standardisasi teknis bidang permukiman serta perluasan akses pelayanan prasarana dan sarana bidang permukiman. Pada periode tersebut terjadi peningkatan cakupan pelayanan yang signifikan. Cakupan pelayanan air minum layak meningkat dari 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) % pada tahun 2009 menjadi 68,38 (enam puluh delapan koma tiga puluh delapan) % pada tahun 2014. Peningkatan cakupan pelayanan ini dipengaruhi pembangunan infrastruktur permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR seperti pembangunan SPAM IKK di 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) lokasi serta pembangunan SPAM perdesaan di 10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas) desa. Di samping itu, cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi yang layak juga mengalami peningkatan dari 51 % (lima puluh satu persen) pada tahun 2009 menjadi 61,04 (enam puluh satu koma nol empat) % pada tahun 2014. Kegiatan pembangunan infrastruktur sanitasi dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur air limbah terpusat skala kota di 13 (tiga belas) kabupaten/kota dan pembangunan TPA Sampah di 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Kabupaten/Kota. Luas permukiman kumuh juga mengalami penurunan dari 57.800 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus) ha pada tahun 2009 menjadi

38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha pada tahun 2014 yang dipengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di 11.066 (sebelas ribu enam puluh enam) kelurahan/desa. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan dalam hal kualitas lingkungan permukiman di tanah air menuju kondisi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur permukiman memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena turut mendukung pencapaian sasaran dalam hal penanggulangan kemiskinan, pengembangan kota hijau, dan penataan kawasan strategis. Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Kementerian PUPR turut berkontribusi dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (P2KP, PPIP, Pamsimas, dan Sanimas), serta program pro rakyat klaster 4 sesuai dengan Direktif Presiden RI. Dalam hal pengembangan kota hijau, Kementerian PUPR turut berperan dengan menginisiasi penerapan teknologi mutakhir melalui penyelenggaraan *green waste* (TPA *Sanitary landfill* dan TPST 3R), *green water* (IPA Reverse Osmosis dan Pamsimas), *green building* dan *green open space* (revitalisasi kawasan). Kementerian PUPR juga mendapatkan mandat membangun infrastruktur permukiman pada kawasan strategis seperti daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pada kawasan tersebut telah dilaksanakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pembangunan prasarana air minum dan sanitasi.

1.1.4 PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Sementara itu, untuk mendukung capaian pembangunan bidang perumahan, pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 (delapan ratus empat puluh tiga) *Twin Block/Tower Block* atau 18.216 (delapan belas ribu dua ratus enam belas) unit dengan total daya tampung 143.072 (seratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh dua) jiwa, Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 (dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan) unit rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 (sembilan ratus dua belas koma lima) ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 (enam ribu tiga ratus delapan puluh empat) unit; (3) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya sebanyak 64.757 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 (lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh dua) unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 (enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan) unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan

capaian sebanyak 44.242 (empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua) bidang; dan (4) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 361.113 (tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga belas) unit melalui pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

1.1.5 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Sebagai upaya untuk mendorong diakuiinya Kota Pusaka Indonesia sebagai Kota Pusaka Dunia oleh UNESCO dan sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) yang konsisten pada tema-tema budaya atau pusaka berbasis penataan ruang, telah difasilitasi 29 (dua puluh sembilan) kota atau kawasan perkotaan di kabupaten melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Melalui program ini diharapkan Pemda akan melakukan penyusunan rencana aksi P3KP dan mengimplementasikannya sehingga kota yang bersangkutan dapat mempertahankan atau mengembalikan identitas maupun ciri khas sesuatu secara berkelanjutan yang pada gilirannya dapat di promosikan pada tingkat internasional sebagai *World Heritage City*.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada tahun 2013 telah diinisiasi Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi terhadap 28 (dua puluh delapan) Kawasan Perdesaan melalui Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan, fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan, Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, Penguatan Peran Pemangku Kepentingan, Penyusunan *Road Map*, Pemantauan Pelaksanaan P2KPB, dan Pembangunan/Pengembangan Fisik yang dominan. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan strategis nasional berbasis rencana tata ruang.

1.1.6 PEMBINAAN KONSTRUKSI

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PDB-nya. Namun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDB sektor konstruksi hanya sebesar 6,65 % (enam koma enam puluh lima persen), menurun secara signifikan dari PDB tahun 2006 sebesar 8,34 % (delapan koma tiga puluh empat persen). Akan tetapi laju pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Nasional.

Di sisi lain, sektor konstruksi juga sangat erat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan oleh karenanya sektor konstruksi berperan besar di dalam peningkatan daya saing infrastruktur. Menurut WEF, *Global*

Competitiveness Index untuk daya saing infrastruktur Indonesia, terus mengalami peningkatan, dari peringkat 82 (delapan puluh dua) pada tahun 2010 menjadi peringkat 56 (lima puluh enam) pada tahun 2014. Ke depan daya saing ini masih perlu ditingkatkan.

Peran penting sektor konstruksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun memang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan jumlah investasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas BUKK dalam penyelenggaraan konstruksi; ketersediaan material, peralatan dan teknologi yang memadai; dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Dari aspek investasi pembangunan infrastruktur, sampai saat ini sebagian besar masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari APBN dan juga dari APBD. Adapun pembiayaan dari sektor swasta, baik melalui perusahaan swasta, BUMN/BUMD relatif masih tergolong rendah. Jumlah BUKK dari tahun ke tahun juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak saja secara kuantitas namun harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi juga telah mengalami peningkatan, namun jumlah tenaga kerja yang kompeten relatif masih rendah. Pada tahun 2014 jumlahnya kurang lebih 6,9 (enam koma sembilan) juta pekerja, di mana 60 % (enam puluh persen) merupakan tenaga tidak terampil, 30 (tiga puluh) % tenaga terampil, dan hanya 10 (sepuluh) % tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang lebih 10 (sepuluh) % yang telah disertifikasi. Ketersediaan material dan peralatan konstruksi sampai tahun 2015 masih memadai bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun demikian masih diperlukan upaya kepastian dan ketepatan waktu pengiriman (*delivery system*) dalam memenuhi pasokan dan permintaan (*supply and demand*). Sementara dari aspek pengembangan teknologi konstruksi juga semakin banyak teknologi baru yang telah diadopsi bagi pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka pembinaan sektor konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan investasi konstruksi untuk infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan alternatif, peningkatan daya saing saing badan usaha secara keseluruhan, peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi, maupun peningkatan peranserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Upaya pembinaan perlu dilakukan secara proporsional dan sinergis antar fungsi, baik fungsi pengaturan, pemberdayaan maupun fungsi pengawasan.

1.1.7 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS

Pada era reformasi birokrasi ini, publik beropini bahwa penyelenggara negara melakukan pelayanan yang buruk, pemborosan, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta kurangnya pengawasan dalam penyelenggaraan negara. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada instansi pusat menunjukkan adanya upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang merupakan sub indikator memiliki nilai di bawah 6. Kementerian Pekerjaan

Umum pada tahun 2011 mulai masuk dalam penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi KPK (PIAK KPK), berdasarkan capaian pada awal tahun 2013 sebesar 6,3 (enam koma tiga), sehingga tidak termasuk lagi dalam program penilaian PIAK KPK.

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi ini merupakan kegiatan KPK dalam mendorong K/L/Pemda untuk membangun sistem anti korupsi di dalam instansinya dengan cara melakukan *self assessment* terhadap inisiatif anti korupsi yang telah dilakukannya yang kemudian diverifikasi oleh KPK.

Sumber daya manusia Auditor Kementerian Pekerjaan Umum saat ini adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang pendidikan teknik dan 88 (delapan puluh delapan) orang non Teknik, kondisi tersebut berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan kompetensi di bidang pengawasan infrastruktur masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi di bidang keteknikan dan non keteknikan melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) maupun lembaga lainnya. Selain itu untuk mengetahui kompetensi SDM dilakukan *assesment* untuk masing-masing bidang.

Pengendalian dan pengawasan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan secara bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang telah mengembangkan implementasi dan penilaian maturitas SPIP di 4 (empat) unit organisasi, yaitu: Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan BPSDM. Melalui implementasi SPIP ini diharapkan mampu mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.1.8 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pencapaian kinerja penelitian dan pengembangan selama kurun waktu 2010 – 2014 antara lain: (1) Menghasilkan teknologi litbang sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) teknologi; (2) NSPM litbang sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) NSPM; (3) Melayani 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) advis teknis; (4) Melayani pengujian sebanyak 3.170 (tiga ribu seratus tujuh puluh); dan (5) Melakukan 72 (tujuh puluh dua) *joint cooperation program*.

Beberapa hasil Litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain, Produk Teknologi Sumber Daya Air: (1) Teknologi Revitalisasi Bangunan Air Utama; (2) Pengkajian korelasi alat *Dynamic Penetrom* (DP) dan alat *Static Penetrom* (sondir) pada bendungan tipe urugan; (3) Pengkajian pemanfaatan tinggi tekan untuk energi pada pintu-pintu air bendung gerak. (4) Teknologi Pengendalian Banjir Perkotaan (Teknologi Pemodelan Banjir Perkotaan); (5) Teknologi Pondasi Tanggul Lepas Pantai; (6) Teknologi Banjir Perkotaan Lingkungan Keairan; dan (7) R-0 Pedoman Pengelolaan Polder. Selain itu produk Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan meliputi: (1) Teknologi Bahan Perkerasan dengan bahan lokal dan bahan sub standar (batu karang dan pasir laut) meliputi spesifikasi, pedoman

perancangan dan pelaksanaannya; (2) Teknologi preservasi jalan berupa tambalan cepat mantap, *microsurfacing*, *slurry seal*, *chip seal*, *fog seal*; (3) Teknologi *Thin Overlay*; (4) Teknologi Perkerasan Kaku, dan (5) Teknologi Jalan ramah Lingkungan (antara lain *warmmix*, pemanfaatan bahan daur ulang dan bahan limbah). Untuk Produk Teknologi Permukiman meliputi: (1) Prototipe *Green Building* di Turangga, Bandung; (2) Aplikasi Tekno *Green Building* berbasis hasil Litbang Permukiman di Medan; (3) Prototipe Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Sistem Mobile; (4) Pengembangan Prototipe Sistem Sambungan Rumah dan Model Daur Ulang Limbah Komunal; (5) Prototipe Penerapan Teknologi Bidang Permukiman (Tongkonan) di Toraja; (6) Penataan kawasan berbasis *eco-settlement*; (7) Model Fisik Daur Ulang Air Limbah Di Kawasan Pesisir; (8) Aplikasi Teknologi Bahan Bangunan Lokal Pada Model Bangunan Tradisional di Wilayah Kerja di NTB (*Techno Village*); (9) Penerapan Panel Struktur Risha pada Bangunan fasilitas Umum dengan Dinding Pengisi Bata Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

1.1.9 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, serta sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Perhatian terhadap SDM bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya. Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke belakang rata-rata hanya 2 (dua) permil dari anggaran pembangunan infrastruktur. Sementara itu peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan maupun pelatihan juga tersebar di berbagai unit kerja dan tidak terkoordinasi dengan baik serta kurang fokus pada kompetensi substansi teknis. Sedangkan dilihat dari faktor kelembagaan juga kurang mempunyai kewenangan yang memadai untuk pengembangan SDM secara integral. Pengembangan SDM tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh mulai dari pengembangan karir, evaluasi kompetensi, dan pemantauan kinerja sampai dengan pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi terabaikan atau kurang perhatian, padahal di satu sisi peran SDM sangat penting terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut. Secara kuantitas jumlah SDM PUPR yang ada saat ini sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) pegawai yang terdiri dari 3.800 (tiga ribu delapan ratus) orang K1 K2 K3, berdasarkan pendidikan berlatar belakang teknik untuk pendidikan teknik SLTP hingga SMA atau D3 sebesar 9.466 (sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) orang atau 45,10 (empat puluh lima koma sepuluh) %, pendidikan S1 atau D4 sebesar 8.438 (delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan) orang atau 40,20 % (empat puluh koma dua puluh persen), pendidikan teknik S2 sebesar 2.997 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) orang atau 14,28 % (empat belas koma dua puluh delapan persen) dan pendidikan S3 sebesar 87 (delapan puluh tujuh) orang

atau 0,4 % (nol koma empat persen).

Hal ini belum memadai apabila dilihat dari beban kerja atau anggaran yang diberikan pada tahun 2015 yaitu sebesar kurang lebih Rp 118,5 (seratus delapan belas koma lima) triliun. Selain itu secara kualitas juga lebih tidak memadai lagi hal ini disebabkan faktor pendidikan yang tidak sesuai, mengingat SDM PUPR didominasi oleh yang berpendidikan tingkat SLTA atau SLTP. Selain itu kondisi pegawai saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan akan berkurang akibat purnabakti/pensiun rata-rata sekitar 300 – 500 orang.

1.1.10 DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA, DAN PRASARANA

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit atas LK TA 2013. Hal ini menunjukkan ada perbaikan dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan kinerja keuangan di Kementerian PU dibandingkan periode-periode sebelumnya, yang artinya pembinaan, pendampingan dan fasilitasi penatausahaan, pelaporan keuangan, serta penataan Barang Milik Negara (BMN) cukup berhasil.

Dalam aspek penyusunan rencana kebijakan dan strategi Kementerian Pekerjaan Umum diantaranya telah disusun dan revidi Renstra Kementerian PU Tahun 2010-2014. Selain itu telah disusun RKP dan Nota Keuangan, pelaporan *E-Monitoring* Satker Kementerian PU, pembinaan bendahara, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, BUMN, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyelesaian perkara hukum pendapat hukum dan pendampingan hukum, pengamanan kepemilikan dan pemrosesan BMN, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN, sistem dan *database* BMN, pendidikan dan pelatihan prajab serta teknis dan fungsional, pembuatan *datacenter*, pembuatan peta tematik, penyusunan buku informasi statistik PUPR, peliputan dan pemberitaan di media masa, publikasi melalui media, peliputan kunjungan kerja dan rapat, pembangunan, dan perbaikan.

Untuk capaian target dukungan manajemen, sarana dan prasarana periode 2010- 2014 pada Kementerian Perumahan Rakyat meliputi antara lain (1). 3 RPP yang masih menunggu persetujuan para menteri dan kepala lembaga terkait, yaitu: RPP Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; serta RPP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman); dan (2) 2 RPP yang masih dalam tahap harmonisasi Kementerian dan Lembaga terkait yang meliputi: RPP Tentang Pengerahan dan Pemupukan Dana Serta Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan; dan RPP Tentang Badan Pelaksana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan SAKIP Kementerian Perumahan Rakyat telah mensejajarkan diri pada peringkat B (Baik) di tingkat Kementerian/Lembaga. Sedangkan Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun tahun 2013 kembali meraih status predikat WTP.

Pelaporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan

Rakyat Kepada UKP4 dan Bappenas berupa Laporan Triwulan Capaian Rencana Aksi Prioritas Nasional dan Laporan Triwulan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dari hasil polling Pemberitaan Program Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II selama masa polling dari Januari hingga Mei 2014 yang dilakukan oleh Forum Jurnalis Jakarta (FJJ) tercatat telah mendapat perhatian dari pers. Ketertarikan media pada 10 (sepuluh) Kementerian teratas dikarenakan memiliki program-program kehumasan yang efektif dalam merangsang para jurnalis untuk melakukan liputan pemberitaan. Penyediaan *Media Center* untuk memfasilitasi pemberitaan tentang Kementerian Perumahan Rakyat.

Hasil Survei kepuasan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 70,66 (tujuh puluh koma enam puluh enam) % (kategori Baik) pada tahun 2013. Survei ini didasarkan pada kriteria: (1) Kesesuaian Kebijakan; (2) Sistem Prosedur; (3) Sumber Daya Manusia (SDM); dan (4) Kepuasan Total Terhadap Layanan dan Operasionalisasi Kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat.

1.2 KONDISI TAHUN 2018 HASIL EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia telah mengalami berbagai peningkatan kondisi pembangunan nasional, namun kondisi ini belum dapat memperlihatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih belum dapat memberi hasil seperti target yang diproyeksikan ingin dicapai pada saat awal periode perencanaan.

Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi belum dapat mencapai target sasaran RPJMN 2015-2019 yang diharapkan ditahun 2018 akan mencapai 5,4 (lima koma empat) %. Hingga diakhir tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 (lima koma tujuh belas) %, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi ditahun 2017 sebesar 5,07 (lima koma nol tujuh) % (data BPS). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan keempat tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) %, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,20 (delapan koma dua puluh) % (data BPS). Hal ini berarti bahwa sasaran makro ekonomi Indonesia saat ini masih belum dapat memenuhi target RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di segala bidang, maka efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi harus dilakukan serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan kata lain, multiplier effect dari hasil pembangunan nasional belum signifikan berimbas terhadap penurunan % tingkat kemiskinan. Data dari

BPS hingga triwulan akhir tahun 2018 menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan belum terjadi secara signifikan, yaitu sebesar 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) %, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya 10,12 (sepuluh koma dua belas) %. Pelaksanaan program-program pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program intervensi seperti subsidi (subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dsb) serta dalam bentuk bentuk lainnya, dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat, terus dilakukan namun belum dapat optimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati lajunya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian PUPR telah berupaya keras untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bersinergi dan terpadu antarsektor (terpadu dengan sektor-sektor lainnya), antarpemerintahan, dan antardaerah (sinergi pusat dan daerah) berbasis penataan ruang, di mana infrastruktur bidang PUPR merupakan tulang punggung serta kebutuhan dasar yang meliputi Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Infrastruktur Jalan dan Jembatan, serta Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (*multiplier effects*) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur ditinjau dari sektor konstruksi telah dapat menciptakan kesempatan kerja dan usaha bagi tenaga kerja produktif sehingga akan mengurangi pengangguran meskipun tidak signifikan. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil suatu wilayah dan pembuka daerah terisolasi sehingga dapat mengatasi persoalan kesenjangan antarperkotaan dan perdesaan, antarkawasan, maupun antarwilayah. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berbasis pengembangan wilayah telah dilaksanakan lebih merata dan seimbang sehingga diharapkan kelak di kemudian hari akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah sebagaimana masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, diharapkan juga akan mampu mengurangi *urban sprawl* terutama di kota-kota metropolitan dan besar, serta akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan antarwilayah/daerah di Indonesia.

Kementerian PUPR juga telah melakukan penataan pengelolaan manajemen yang dicerminkan melalui penerapan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, penegakan regulasi, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar peranan yang sangat penting bagi tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional dapat terwujud serta dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang memadai, serta telah melaksanakan

peningkatan kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan pelayanan publik sesuai kemampuan kapasitas yang dimiliki.

Memasuki empat tahun pelaksanaan Renstra hingga akhir tahun 2018, sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, yang pada Pasal 2 mengamanatkan panduan dalam melakukan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Renstra K/L, dan RPJMN, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019.

Tahun pertama pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 masih merupakan upaya konsolidasi dan membangun pondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, sedangkan pada pelaksanaan tahun kedua Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 sudah dapat berjalan sesuai rencana meskipun ada beberapa yang masih harus ditingkatkan. Dalam perjalanan selama hampir lima tahun pelaksanaan.

Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, telah terjadi beberapa perubahan lingkungan strategis terkait kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika kondisi global dan domestik, yang tentunya berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang telah dituangkan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Beberapa diantaranya adalah Permen Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Permen Nomor 04/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Permen Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR dan Permen Nomor 06/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum

Revisi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2018 ditujukan untuk: (1). Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan bidang PUPR, identifikasi permasalahan dan tindak lanjut yang direkomendasikan sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan Renstra Kementerian PUPR; (2). Menentukan langkah-langkah akselerasi upaya percepatan pencapaian target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, terutama untuk sasaran-sasaran yang memerlukan kerja-kerja serta yang sulit tercapai; (3) Penyesuaian nomenklatur (sasaran output dan outcome) Renstra Kementerian PUPR 2015 – 2019 sebagai konsekuensi perubahan SOTK; dan (4) Update capaian Renstra Kementerian PUPR sampai dengan 2018. Oleh karena itu, tahun keempat pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah melakukan akselerasi pencapaian target Renstra dengan mengawal yang sudah *on track*, mengupayakan yang dapat tercapai namun dengan kerja keras serta mengurangi yang sulit tercapai. Revisi Renstra Kementerian PUPR tahun

2015-2019 ini dilakukan dengan fokus pada tujuan dan sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung semua dimensi pembangunan yang terkait bidang PUPR yang menjadi prioritas nasional, serta menguraikan kondisi dan capaian yang meliputi: (1) Kebijakan; (2). Capaian; (3) Permasalahan yang dihadapi; serta (4) Rekomendasi tindak lanjut.

Pelaksanaan Revisi Renstra Kementerian PUPR ini dilaksanakan melalui evaluasi pengukuran kinerja, yang dilakukan untuk melihat capaian kinerja strategis atau program kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dengan metode *gap analysis*, evaluasi kebijakan strategis atau program besar yang dilakukan untuk penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan strategis atau program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan strategis atau program menggunakan kriteria yang meliputi memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; mendukung pencapaian prioritas nasional; dan merupakan arahan direktif Presiden dan pertimbangan lain, serta memperhatikan trend beberapa tahun terakhir.

1.2.1 CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PUPR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS

Sesuai dengan Tujuan 1 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019; menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui sasaran strategis, "Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor, dan antartingkat pemerintahan"

Dukungan Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan difokuskan pada sasaran pembangunan infrastruktur bidang pengembangan infrastruktur wilayah selama periode tahun 2015-2018 yang diarahkan untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

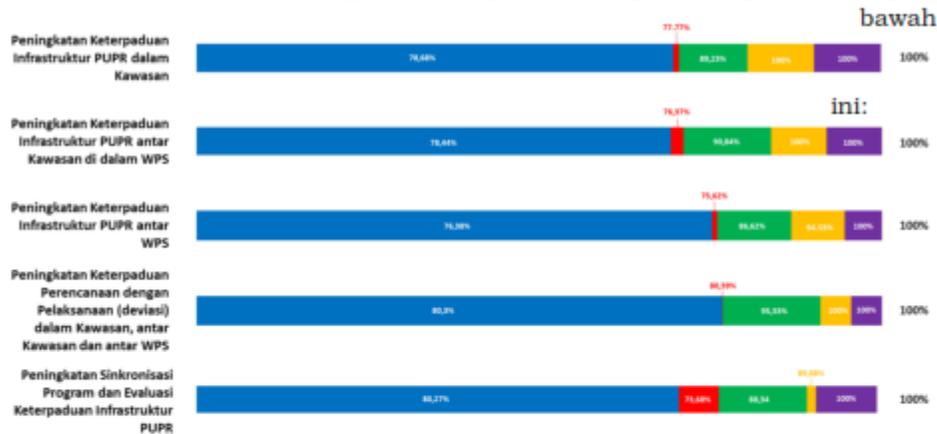
A. CAPAIAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Peningkatan keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah dilakukan melalui keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR.

Adapun untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kesinkronan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir semester dua tahun 2018 telah dilakukan upaya-upaya antara

lain: (1) tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan telah tercapai 100 (seratus) %, (2) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antarkawasan di dalam WPS yang sudah tercapai 100 (seratus) % dan (3) Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS dengan target 95 (sembilan puluh lima) % telah dicapai sebesar 94,53 (sembilan puluh empat koma lima puluh tiga) %.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan, yang ditandai dengan terkonsentrasinya berbagai program pembangunan di perkotaan, pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2018 telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana pengembangan WPS berbasis rencana tata ruang. Capaian Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bidang PUPR dapat dilihat pada diagram batang di bawah



Gambar 1.1 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

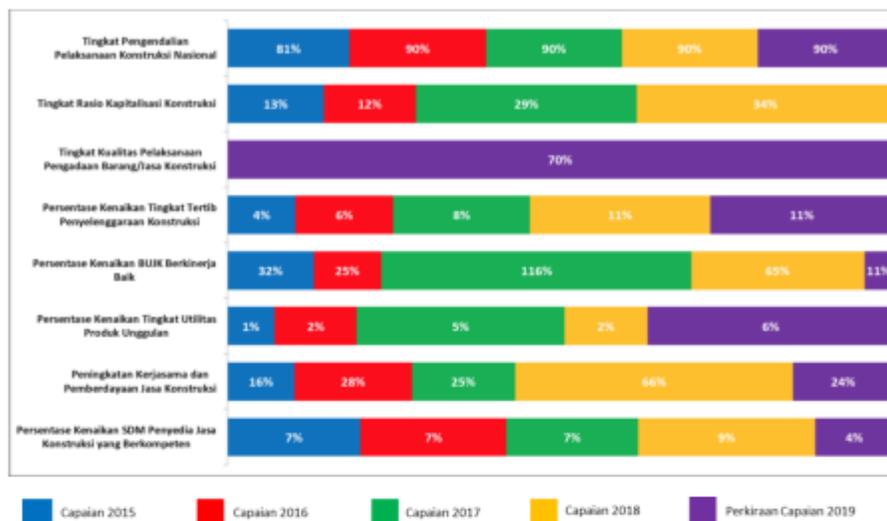
B. CAPAIAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global.

Dalam upaya peningkatan kapasitas serta kualitas keterampilan pekerja konstruksi, Kementerian PUPR cq Ditjen Bina Konstruksi terus melakukan program pelatihan dan sertifikasi. Sepanjang periode 2015-2018 Balai-Balai Ditjen Bina Konstruksi telah menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi dengan realisasi 207.581 orang dan target untuk tahun 2019 adalah 212.000 orang. Berdasarkan data LPJKN, secara nasional jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat hingga tahun 2018 adalah 632.693 orang (7,6% dari total Tenaga Kerja Konstruksi).

Sasaran pembinaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antar pemerintahan, dan antar daerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi wilayah. Secara keseluruhan, capaian pembinaan konstruksi TA 2015-2018 dapat dilihat pada diagram batang berikut ini:



Gambar 1.2 Target dan Capaian Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Konstruksi

Pembinaan konstruksi diarahkan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang lebih baik dan siap menghadapi perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi. Perubahan dinamika serta perkembangan dunia konstruksi ke depan semakin terbuka dan memerlukan kesiapan industri konstruksi nasional yang memiliki struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Capaian Indikator Kinerja pada tahun 2018 tersebut berdasarkan kontribusi dari pencapaian 6 (enam) indikator kinerja Program yang terdiri dari: 1) Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi sebesar 33,99 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) %; 2) Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi sebesar 11 (sebelas) %; 3) Persentase Kenaikan BUJK Berkinerja Baik sebesar 64,75 (enam puluh empat koma tujuh puluh lima) %; 4) Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan sebesar 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) %; 5) Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi sebesar 66,21 (enam puluh enam koma dua puluh satu) %; dan 6) Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Berkompeten sebesar 9,05 (sembilan koma nol lima) %.

Untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah, periode dari tahun 2015 hingga akhir semester dua tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi, yang meliputi pengaturan, pembinaan teknis, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Dari aspek pengaturan, telah diterbitkan sejumlah peraturan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi
- Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Peraturan Menteri PUPR No 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri PU No 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- Peraturan Menteri PUPR No 45 Tahun 2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia
- Peraturan Menteri PUPR No 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR No 10 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Peraturan Menteri PUPR No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
- Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*)
- Peraturan Menteri PUPR No 19 Tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri PUPR No 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- Peraturan Menteri PUPR No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri PUPR No 18 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan
- Peraturan Menteri PUPR No 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri PUPR No 24 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan
- Peraturan Menteri PUPR No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

- Peraturan Menteri PUPR No 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Pemberdayaan *stakeholders* dan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan SDM Konstruksi dan penerapan teknologi konstruksi. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga telah dilaksanakan, baik kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beserta Asosiasi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), dan BUMN. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi telah dilaksanakan terutama pada aspek peningkatan tertib penyelenggaraan dan kontrak konstruksi, maupun peningkatan mutu hasil konstruksi.

1.2.2 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR Mendukung Ketahanan Air, Kedaulatan Pangan dan Energi

Sesuai dengan Tujuan 4 Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yaitu menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, dan sasaran strategis "Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi", maka arah kebijakan untuk mendukung pembangunan sektor unggulan difokuskan kepada penguatan ketahanan air, kedaulatan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan, kedaulatan energi berbasis sumber energi fosil dan terbarukan, kelautan dan kemaritiman sebagai daya ekonomi serta industri dan pariwisata dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri.

A. CAPAIAN DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 untuk dukungan kedaulatan pangan dan energi diarahkan pada: (1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan. Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015 sampai Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2018 yang memuat sasaran peningkatan ketersediaan pangan yang didukung pula oleh terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah.

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang SDA selama periode tahun 2015-2018 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan serta ketahanan energi nasional melalui peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas tampung air, peningkatan debit layanan air baku, serta peningkatan pengendalian daya rusak air, dan lain sebagainya diharapkan akan dapat meningkatkan produksi padi serta pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.

Capaian peningkatan dukungannya kedaulatan pangan dan energi tentunya akan berdampak besar terhadap kedaulatan pangan energi nasional serta selanjutnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Berikut diuraikan secara singkat capaian dari masing-masing target peningkatan dukungan kedaulatan pangan terkait dengan infrastruktur pendukung. Adapun capaian dukungan kedaulatan pangan dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Dibandingkan dengan target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, capaian pembangunan bendungan yang dapat diselesaikan sampai pada tahun tahun 2019 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah bendungan, antara lain Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Teritip, Bendungan Paya Seunara, Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Logung, Bendungan Rotiklot, Bendungan Sindang Heula dan Bendungan Sei Gong. Target Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 berupa terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 9,89 (sembilan koma delapan puluh sembilan) juta ha, dan terlaksananya rehabilitasi 3,01 (tiga koma nol satu) juta ha jaringan irigasi untuk mengembalikan layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang dapat dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 311.420 (tiga ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2018, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019 adalah seluas 42.599 (empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) ha, meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah dan irigasi tambak. Sedangkan capaian target pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi melalui DAK selama kurun sampai dengan tahun 2018 adalah seluas 553.973 (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) ha. Sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka mengembalikan layanan irigasi, merupakan target nasional melalui anggaran Kementerian PUPR serta melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, tambak dan rawa dilaksanakan melalui APBN Kementerian PUPR mencakup luas layanan seluas 1.212.201 (satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus

satu) ha yang telah tercapai selama kurun waktu 2015-2018, ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019 adalah seluas 120.281 (seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh satu) ha sehingga total menjadi 1.332.482 (satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua) ha. Sedangkan capaian target rehabilitasi melalui DAK selama kurun waktu 2015-2018 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019 adalah seluas 1.438.623 (satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) ha, sehingga ada GAP antara target sebesar 139.525 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima) ha.

Tabel 1.1 Capaian Tujuan Pembangunan Bidang PUPR Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI				PERKIRAAN REALISASI 2019	TOTAL REALISASI
				2015	2016	2017	2018		
Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, tambak dan rawa	Juta ha	8,90	9,89	0,15	0,05	0,06	0,04	0,04	0,33
DAK pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah, dan rawa	Juta ha			0,12	0,09	0,16	0,19	0,09	0,65
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa	Juta ha	2,71	3,01	0,49	0,29	0,26	0,16	0,12	1,33
DAK rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah, tambak dan rawa	Juta ha			0,685	0,291	0,295	0,165	0,25	1,69
Pembangunan waduk (baru)	buah	21	49	13	8	6	12	10	49
Pembangunan waduk (lanjutan)	buah	16	39	16	24	30	34	41	16
Pembangunan waduk (selesai)	buah		29	5	2	2	5	15	29

B. CAPAIAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

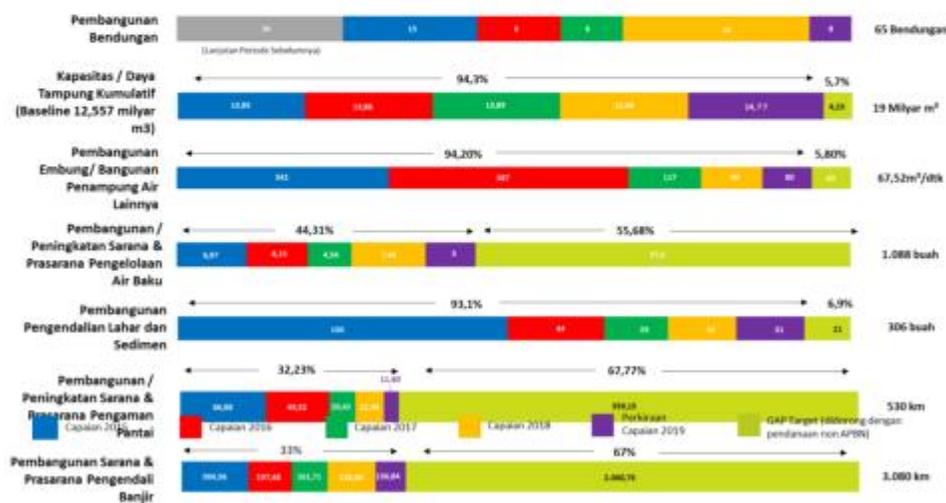
Arah kebijakan yang diterapkan untuk peningkatan ketahanan air pada RPJMN 2015-2019 meliputi lima pilar, yaitu: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air.

Di dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, ketahanan air digambarkan sebagai kondisi dari keterpenuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk seluruh kehidupan, serta kemampuan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh air. Secara prinsip ketahanan air mencakup dua hal yaitu: (1) Keterpenuhan air secara layak, baik kuantitas maupun kualitas serta berkelanjutan bagi kehidupan dan ekosistemnya; dan (2) Kemampuan mengurangi risiko daya rusak air. Ketahanan air diselenggarakan dalam bentuk kegiatan konservasi dan pembangunan infrastruktur. Ketahanan air menjawab kebutuhan masyarakat akan air seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan sebagai respon terhadap perkembangan kondisi bencana terkait air yang sering terjadi.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, sasaran pokok ketahanan air oleh Kementerian PUPR meliputi : kapasitas air baku nasional, pembangunan waduk, ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, kapasitas/daya tampung, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan non struktural banjir.

Peningkatan kapasitas air baku nasional yang telah dicapai Kementerian PUPR dalam kurun waktu 2015-2018 dan perkiraan capaian pada akhir 2019 yaitu 29,92 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh dua) m³/detik dari target Renstra sebesar 67,17 (enam puluh tujuh koma tujuh belas) m³/detik. Apabila angka ini dikumulatifkan dari *baseline* tahun 2014 sebesar 51,44 (lima puluh satu koma empat puluh empat) m³/detik, perkiraan capaian hingga 2019 yaitu 81,36 (delapan puluh satu koma tiga puluh enam) m³/detik dari target 118,6 (seratus delapan belas koma enam) m³/detik. Sisanya merupakan kerja keras bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat untuk sisa target sebesar 37,24 (tiga puluh tujuh koma dua puluh empat) m³/detik melalui skema pembiayaan lain serta kerja bersama. Kapasitas air baku nasional ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target SDGs 100 (seratus) %.

Capaian dukungan ketahanan air selama kurun waktu 2015-2018 dan perkiraan capaian 2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.4 Hasil Evaluasi Akhir Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Ketahanan Air. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk yang telah dicapai (secara akumulatif) dalam kurun waktu 2015-2018 dan perkiraan capaian pada akhir 2019 yaitu 14,28 (empat belas koma dua puluh delapan) % dari target Renstra sebesar 19 (sembilan belas) %. Sisanya merupakan kerja keras untuk sisa target sebesar 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) %.

Kapasitas daya tampung yang telah dicapai pada periode 2015-2018 dan perkiraan capaian pada akhir 2019 seiring dengan selesainya 29 (dua puluh sembilan) bendungan. Diperkirakan kapasitas daya tampung akan meningkat dari 13,85 (tiga belas koma delapan puluh lima) miliar m³ pada tahun 2014

menjadi 15 (lima belas) miliar m³ pada tahun 2019. Sisa targetnya sebesar 4 (empat) miliar m³ perlu keras untuk mencapainya.

Pencapaian kapasitas desain banjir sesuai target adalah penting karena perubahan pola hujan yang menunjukkan intensitas tinggi dalam waktu pendek telah memberikan dampak banjir perkotaan, sebagai contoh seperti yang terjadi di Kota Bandung. Namun demikian, penyiapan desain dengan kapasitas desain yang lebih tinggi memerlukan waktu dan persiapan yang lama serta data *series* hidrologi yang lebih panjang, sehingga dalam tahun 2015 dan 2016 masih belum menunjukkan hasil desain yang signifikan dengan kala ulang lebih panjang. Target RPJMN 2015-2019 untuk pengendalian banjir belum tercapai dengan optimal karena rata-rata kapasitas sungai untuk pengendalian banjir baru dapat dipenuhi dengan kapasitas Q2-50. Isu terjadinya banjir di perkotaan disebabkan antara lain adanya penambahan populasi penduduk yang mengokupasi daerah retensi banjir, banjir juga dipengaruhi oleh perencanaan pengendalian banjir yang belum terupdate dengan mempertimbangkan faktor pengaruh *climate change* dan perubahan tata guna lahan. Selama ini desain pengendalian banjir dilaksanakan baru pada spot-spot yang urgent. Pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir belum dilakukan secara terintegrasi secara menyeluruh satu kesatuan daerah aliran sungai. Hambatan yang sering terjadi saat pelaksanaan yaitu pembebasan lahan dan masih adanya permasalahan sosial.

Perwujudan peningkatan kapasitas desain banjir tersebut dilaksanakan antara lain melalui pembangunan sarana prasarana pengendalian daya rusak. Untuk pengendalian banjir pada periode 2015 hingga tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 sebagai perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir, telah selesai dibangun prasarana dan sarana pengendali banjir sepanjang 1.019,25 (seribu sembilan belas koma dua puluh lima) km, telah direhabilitasi sepanjang 253,97 (dua ratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tujuh) km.

Untuk perlindungan kawasan dari abrasi pantai pada periode tahun 2015 hingga 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, telah selesai dibangun sarana prasarana pengaman pantai sepanjang 170,87 (seratus tujuh puluh koma delapan puluh tujuh) km, telah direhabilitasi sepanjang 1,42 (satu koma empat puluh dua) km.

Untuk perlindungan kawasan dari debris, lahar, dan sedimen pada periode 2015 hingga 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 dibangun cekdam dan sabo dam sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) buah, telah direhabilitasi sebanyak 45 (empat puluh lima) buah.

Selanjutnya notifikasi capaian dukungan ketahanan air dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Capaian Dukungan Ketahanan Air Pembangunan Sektor Unggulan

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI				PERKIRAAN REALISASI	TOTAL REALISASI
				2015	2016	2017	2018	2019	
Kapasitas Air Baku Nasional	m ³ /dtk	51,44	118,6	58,41 (6,97)	64,56 (6,13)	68,90 (4,34)	76,36 (7,46)	81,36 (5)	81,36 (29,92)

Pembangunan Waduk (kumulatif 5 tahun)	buah	16	49	13	8	6	12	10	65
Ketersediaan Air Irigasi yang bersumber dari Waduk	%	110	20	11	12	12,4	12,16	14,34	14,34
Kapasitas/daya tampung (kumulatif)	miliar m ³	12,357	13,85	13,86	13,89	13,96	14,77	14,77	14,77
Rata-rata kapasitas desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir	tahun	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30	2-30

1.2.3 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR Mendukung Konektivitas Nasional

Sesuai dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, “Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional pada penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime”, yang akan dicapai melalui sasaran strategis, “Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing”, yang didukung dengan Sasaran Program “Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan”, maka arah dukungan terhadap peningkatan konektivitas nasional akan dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan, preservasi jalan, dan pembinaan kepada penyelenggaraan jalan daerah.

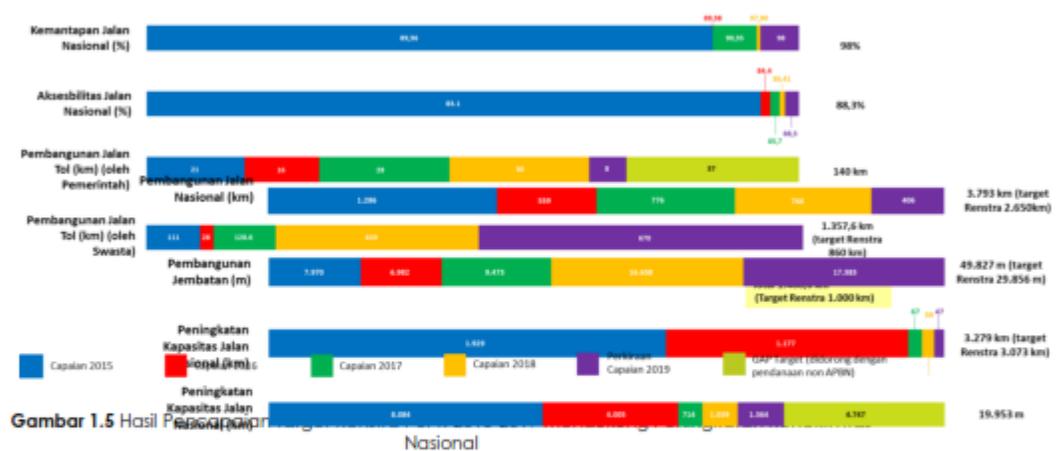
Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Agenda pembangunan transportasi yang utama adalah meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan. Fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: (1) Mempercepat dukungan pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang handal; (2) Mempercepat dukungan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia; (3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; (4) Membangun untuk dukungan sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non

koridor ekonomi; (5) Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas diarahkan pada: peningkatan kemantapan dan aksesibilitas jalan untuk mendukung konektivitas serta produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional dalam rangka penguatan daya saing nasional melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang jalan selama periode renstra diarahkan fokus pada peningkatan aksesibilitas jalan untuk mendukung konektivitas nasional melalui pembangunan jalan baru, sedangkan kemantapan jalan mengalami penurunan karena bertambahnya jalan daerah yang meningkat statusnya menjadi jalan nasional dengan kondisi kerusakan yang cukup tinggi. Capaian dukungan peningkatan konektivitas selama kurun waktu 2015-2019, dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Beberapa indikator penting diharapkan dapat dicapai pada tahun 2019, seperti tingkat kemantapan jalan nasional, pembangunan jalan tol, dan jalan baru non tol. Pembangunan jaringan jalan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan nasional dalam mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan wilayah. Capaian utama dari tahun 2015 hingga tahun 2018 untuk pembangunan jalan baru sepanjang 3.793 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) km, dan pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 782,6 (tujuh ratus delapan puluh dua koma enam) km.

Dari target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km selama kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR telah membangun jalan baru sepanjang 3.793 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) km hingga akhir tahun 2018. Kegiatan pembangunan jalan baru tersebut terdiri atas kegiatan pembukaan badan jalan dan kegiatan pembentukan perkerasan badan jalan. Koridor utama dalam pembangunan jalan baru tersebut antara lain pada koridor paralel perbatasan Kalimantan-Malaysia, perbatasan NTT-RDTL, perbatasan Papua-Papua Nugini, Trans Papua, dan

pantai selatan Jawa. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberikan dan meningkatkan akses jalan kepada Kawasan pariwisata seperti akses menuju KSPN Labuan Bajo, KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan kawasan Mandeh; akses jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangkei, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, KEK Malay-Batuta-Trans Kalimantan, dan KEK Bitung; akses jalan menuju Kawasan Industri (KI), seperti KI Tanggamus dan KI Batulicin; serta akses jalan menuju Kota Baru Maja.

Selama kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR juga telah membangun konektivitas berupa jembatan bentang panjang dan jembatan gantung. Jembatan bentang Panjang yang telah terbangun antara lain Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Jembatan Ir. Soekarno di Kota Manado, dan Jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini Kementerian PUPR juga tengah membangun Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua dan Jembatan Teluk Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan jembatan bentang panjang tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah serta menurunkan waktu tempuh pada wilayah tersebut sehingga biaya logistik dapat diturunkan. Selain bertujuan mengurangi biaya logistik, Kementerian PUPR juga berinisiatif untuk memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir berupa pembangunan jembatan gantung.

Pada akhir tahun 2014, kemandapan jalan nasional sudah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan jalan nasional sepanjang 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Pada tahun 2015, terbit Keputusan Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sehingga panjang jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (bertambah 8.448 km). Penambahan panjang jalan nasional tersebut berimplikasi menurunnya target kemandapan jalan nasional menjadi 86 (delapan puluh enam) % mantap dikarenakan banyak ruas jalan provinsi dan kabupaten yang berubah status menjadi jalan nasional berada dalam kondisi rusak.

Target kemandapan jalan nasional pada tahun 2015 adalah 86 (delapan puluh enam) % mantap sesuai dengan kondisi baseline setelah penetapan status jalan nasional baru. Namun demikian, alokasi pendanaan Ditjen Bina Marga pada TA 2015 sesuai dengan kebutuhan Renstra, pencapaian kemandapan jalan nasional melebihi target, yaitu sebesar 89,36 (delapan puluh sembilan koma tiga puluh enam) % mantap. Sementara itu, target kemandapan jalan nasional di tahun 2016 sebesar 91 (sembilan puluh satu) % tidak tercapai disebabkan oleh adanya *self blocking* sehingga alokasi anggaran untuk preservasi jalan nasional turun cukup signifikan. Hal tersebut berimplikasi pada realisasi kemandapan jalan nasional yang hanya sebesar 89,38 (delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan) % mantap. Pada tahun 2017 realisasi kemandapan jalan nasional sebesar 90,35 (sembilan puluh koma tiga puluh lima) % mantap (di bawah target 94% mantap). Sedangkan pada tahun 2018 tercapai 91,9 (sembilan puluh satu koma sembilan) % mantap dari target renstra sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) % mantap. Untuk mencapai target

kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap sesuai dengan target RPJMN 2015-2019, dibutuhkan kerja keras dan pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam kegiatan preservasi dan manajemen aset jalan juga diupayakan terkait dengan kebijakan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan jalan di daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam hal melaksanakan tugas preservasi jalan daerah agar selalu dalam kondisi mantap, handal, nyaman, dan aman karena kondisi kemantapan jalan nasional perlu didukung oleh kondisi kemantapan jalan daerah.

Target pembangunan jalan tol dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sepanjang 1.000 (seribu) km. Guna mempercepat pembangunan jalan tol dengan tingkat kelayakan yang masih rendah, Pemerintah membantu sebagian pembiayaan pembangunan jalan tol melalui skema *viability gap funding* (VGF) pada 5 (lima) ruas jalan tol sepanjang 140 (seratus empat puluh) km yang meliputi ruas jalan tol Medan-Kualanamu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung. Dukungan pemerintah pada ruas jalan tol Medan-Kualanamu pada tahun 2017 sudah PHO (*Partial Hand Over*), sedangkan pada ruas jalan tol Solo-Kertosono dan Balikpapan-Samarinda direncanakan untuk PHO pada tahun 2018, serta ruas jalan tol Cisumdawu dan Manado-Bitung direncanakan untuk PHO pada tahun 2019.

Melihat tren pembangunan jalan tol saat ini, BPJT memproyeksikan selama kurun waktu 2015-2019 dapat dioperasikan jalan tol baru sepanjang 1.461 (seribu empat ratus enam puluh satu) km (melebihi target RPJMN 2015-2019 sepanjang 1.000 km jalan tol).

Selanjutnya notifikasi capaian dukungan konektivitas nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI				PERKIRAAN REALISASI 2019	TOTAL REALISASI
				2015	2016	2017	2018		
Kondisi mantap jalan nasional	%	94	98	89,36	89,38	90,35	91,90	98	98
Panjang jalan nasional yang dipreservasi	km	38.570	45.592	35.437	45.715	46.573	44.749	46.867	47.017
Pembangunan jalan baru sejak 2010 (kumulatif)	km	-	2.650	1.286	559	776	766	406	3.793
Pembangunan jalan tol	km	807	1.000 (kumulatif)	21	16	28	30	8	103
				111	28	128,6	420	670	1.357,6 (1.460,6 kumulatif)

Tabel 1.3 Capaian Dukungan Konektivitas Nasional Tujuan 3 Kementerian PUPR

Kementerian PUPR mengakomodasi perubahan program akibat adanya dinamika perubahan lingkungan strategis atau kebijakan pemerintah periode tahun 2015 hingga 2018 yang di antaranya adalah isu peningkatan konektivitas, yakni pengelolaan jalan nasional dan pembinaan jalan daerah, mendukung berbagai inisiatif baru seperti: mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, pembangunan kawasan

pariwisata, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan laut, pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, pembangunan kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, pembangunan daerah lumbung pangan, pembangunan ekonomi kreatif maupun transportasi kota-kota besar, serta dukungan-dukungan lainnya.

Koridor utama pembangunan jalan baru pada tahun 2015-2019 di antaranya yaitu jalan paralel/sejajar perbatasan darat di Pulau Kalimantan, Provinsi NTT, dan Provinsi Papua

Koridor utama lainnya dalam rencana pengembangan jaringan jalan nasional tahun 2015-2019 yaitu Trans Papua yang melintasi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Total penanganan jalan Trans Papua pada tahun 2015-2019 mencapai 4.330,45 (empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma empat puluh lima) km, yang meliputi 1.071 (seribu tujuh puluh satu) km jalan di Provinsi Papua Barat dan 3.259,45 (tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh lima) km jalan di Provinsi Papua. Sementara itu, ruas Trans Papua di Provinsi Papua ditargetkan telah tembus keseluruhan pada akhir tahun 2019. Manifestasi dari adanya jalan Trans Papua akan memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di pulau Papua pada umumnya terutama pada kawasan Pegunungan Tengah Papua. Dengan terwujudnya jalan Trans Papua, persoalan mendasar dari sekitar 16 (enam belas) kabupaten di Pegunungan Tengah yang terisolasi dan tingginya harga diharapkan dapat teratasi. Prioritas pembangunan jalan pada koridor perbatasan negara dan Trans Papua yaitu pembukaan jalan agar dapat tersambung/tembus walaupun belum sepenuhnya fungsional.

12.4 CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR Mendukung Layanan Infrastruktur Dasar yang Layak

Selaras dengan Tujuan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua', yang dilaksanakan melalui sasaran strategis "Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan".

Dukungan Kementerian PUPR terhadap sasaran pokok RPJMN 2015-2019 pembangunan manusia dan masyarakat berupa peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan Kebutuhan air minum, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi, penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Sedangkan untuk kebijakan dukungan prioritas pembangunan nasional dalam pembangunan manusia dan masyarakat oleh Kementerian PUPR diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat (terutama masyarakat berpendapatan rendah) terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar permukiman dan perumahan yang memadai.

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman pada Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019. Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, kebijakan Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR setiap tahunnya difokuskan untuk: (1) Menurunkan angka *backlog* rumah; (2) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni; (3) Menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan; (4) Meningkatkan pelayanan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (5) Meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum. Target tahunan Rencana Kerja Kementerian PUPR disesuaikan dengan kapasitas dan sumberdaya yang tersedia.

Adapun hasil notifikasi evaluasi capaian pembangunan perumahan dan permukiman adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 Hasil Notifikasi Evaluasi Capaian Pembangunan Perumahan dan Permukiman

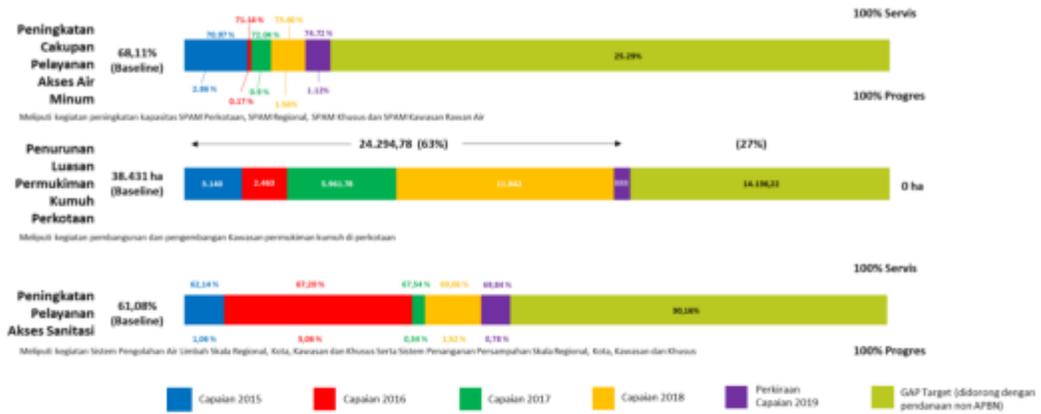
URAIAN	SATUAN	BASE LINE (2014)	TARGET RPJMN	REALISASI				PERKIRAAN REALISASI	TOTAL REALISASI
				2015	2016	2017	2018	2019	
Penurunan kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif penghuni	unit	7,6 juta	5 juta	127.331	197.995	232.777	282.920	185.861	1.026.884
• Fasilitas penyediaan hunian layak	unit		2,2 juta	37.653	14.789	20.288	22.194	17.003	111.929
• Fasilitas penyaluran bantuan hunian layak	unit			89.676	183.206	212.489	260.726	168.858	914.955
Penanganan Kumuh Perkotaan	ha	38.431	0						
• Penurunan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	ha			33.291	32.828	26.866,22	13.024,22	14.136,22*	14.136,22*
Akses Air Minum Layak	%	68,11	100	70,97	71,14	72,04	73,60	74,72	74,72
Akses Sanitasi (Layak)	%	61,08	100	62,14	67,20	67,54	69,06	69,84	69,84

Keterangan: Perkiraan realisasi melalui kegiatan regular sesuai RAKKL TA. 2019

A. CAPAIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang permukiman diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi arahan RPJPN 2010-2025 dan RPJMN 2015-2019 yang mengamanatkan akses universal terhadap air minum dan sanitasi serta perwujudan kota tanpa permukiman kumuh. Amanat ini juga sejalan dengan arahan pembangunan global yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Capaian dukungan pembangunan permukiman selama kurun waktu 2015-2018, perkiraan capaian sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada diagram

batang di bawah ini:



Gambar 1.6 Hasil Evaluasi Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Permukiman)

tanggung jawab pemerintah pusat adalah 30 (tiga puluh) %, pemerintah daerah 20 (dua puluh) %, sisanya BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2018 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019, Kementerian PUPR telah memberikan kontribusi akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibukota kecamatan, SPAM berbasis masyarakat, SPAM kawasan khusus, dan SPAM regional, serta pengembangan jaringan perpipaan atau penambahan Sambungan Rumah (SR) khususnya pada MBR, peningkatannya menjadi sebesar 73,60 (tujuh puluh tiga koma enam puluh) %. Selanjutnya, proyeksi capaian tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 74,72 (tujuh puluh empat koma tujuh puluh dua) %, sedangkan sisanya diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR. Peningkatan cakupan pelayanan air minum tersebut dilaksanakan melalui pengembangan SPAM Regional dengan kapasitas 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) liter/detik, SPAM Perkotaan dengan kapasitas 13.303 (tiga belas ribu tiga ratus tiga) liter/detik, SPAM Perdesaan dengan kapasitas 7.759 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) liter/detik, dan SPAM Kawasan Khusus dengan kapasitas 1.822 (seribu delapan ratus dua puluh dua) liter/detik. Selain itu telah memulai fasilitasi pelaksanaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU lainnya seperti SPAM Bandar Lampung dan SPAM Jatisari dapat terus dilaksanakan sesuai rencana.

Target penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga tahun 2019 dari seluas 38.431 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) ha menjadi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN atau Swasta. Selama kurun waktu 2015-2018 Kementerian PUPR telah menangani kumuh perkotaan sebesar 23.406,78 (dua puluh tiga ribu empat ratus enam ribu koma tujuh puluh delapan) ha, ditambah proyeksi capaian tahun 2019 sebesar 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) ha sehingga pada akhir 2019 akan menjadi

24.294,78 (dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan) ha. Pembangunan kawasan permukiman difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan serta untuk penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan serta kawasan khusus melalui peningkatan kualitas permukiman nelayan dan perbatasan seluas 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesuai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 7 (tujuh) kota/kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kemudian untuk target peningkatan Akses sanitasi layak (air limbah) hingga 2019 sebesar 100 (seratus) % dengan *baseline* 61,08 (enam puluh satu koma nol delapan) %, melalui peningkatan akses sanitasi layak baik akses layak maupun akses dasar, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melainkan tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat (APBN K/L lain) maupun pemerintah daerah/DAK, BUMN atau Swasta, dan masyarakat. Selama kurun waktu 2015-2018, Kementerian PUPR telah meningkatkan akses sanitasi layak sebesar 8 (delapan) %, serta diproyeksikan hingga 2019 akan tercapai sebanyak 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) % melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat dan setempat, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, dan pembangunan saluran drainase telah memfasilitasi peningkatan akses sanitasi layak sebesar 69,84 (enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) %, sisanya sebesar 30,16 (tiga puluh koma enam belas) % diproyeksikan dari pemberdayaan dan pembinaan pemangku kepentingan lain selain Kementerian PUPR.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut perlu dilakukan upaya yang tidak *business as usual* dengan melibatkan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar. Adapun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman digunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Ketiga pendekatan ini diterapkan dalam pembangunan di bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman, pengembangan kawasan permukiman,

dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pembangunan kawasan permukiman yang dilakukan Kementerian PUPR difokuskan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan, permukiman perdesaan potensial, serta kawasan khusus. Pembangunan kawasan kumuh perkotaan telah dilakukan di 23.407 (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh) ha, sedangkan pengembangan kawasan perdesaan telah meningkatkan kualitas permukiman perdesaan seluas 101.534 (seratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat) ha. Adapun untuk pengembangan kawasan permukiman khusus yang dilakukan pada permukiman nelayan dan perbatasan telah meningkatkan kualitas permukiman di 4.611 (empat ribu enam ratus sebelas) ha. Di samping itu, Kementerian PUPR juga telah merintis inkubasi Kota Baru sesuai arahan kebijakan pembangunan perkotaan nasional di 9 (sembilan) kota kabupaten. Untuk mendukung penanganan kawasan kumuh perkotaan, penataan kawasan permukiman berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) telah diselenggarakan pada 11.067 (sebelas ribu enam puluh tujuh) kelurahan.

Kementerian PUPR telah melakukan penyelenggaraan bangunan Gedung serta penataan bangunan dan lingkungan seluas 10.946.574 (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh empat) m². Kegiatan penyelenggaraan bangunan Gedung serta penataan bangunan dan lingkungan dilaksanakan diantaranya meliputi kegiatan-kegiatan strategis yaitu dukungan terhadap ASIAN GAMES XVIII di Jakarta dan Palembang melalui pembangunan 16 *venue* serta penataan Kawasan sekitar, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES), rehabilitasi Istana Kepresidenan, Pembangunan Monumen Kapsul Waktu, Penataan Bangunan Kawasan Sail, Penataan Bangunan Kawasan Lembata, Penataan Kawasan Menara Salib Wamena.

B. CAPAIAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

Sasaran pembangunan infrastruktur bidang perumahan selama periode tahun 2015-2017 diarahkan untuk mendukung layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dilakukan melalui penyediaan rumah susun, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) perumahan umum, dan rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui pelaksanaan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

RPJMN menargetkan penurunan angka *backlog* perumahan sebesar 2,2 (dua koma dua) juta pada periode tahun 2015-2019. Untuk menyelesaikan target tersebut, telah dicanangkan Program Sejuta Rumah oleh Preseiden pada tanggal 29 April 2015 dengan target dan misi program adalah ketersediaan rumah layak huni, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kemudahan memperoleh rumah, dan menysasar semua kalangan. Program Sejuta Rumah dicapai melalui 3 strategi yaitu pembangunan rumah oleh pemerintah pusat dan daerah, pengembang dengan bantuan subsidi pemerintah, dan

keswadayaan masyarakat/non-subsidi. Proporsi strategi pembangunan rumah oleh pemerintah (APBN/APBD) sebesar lebih kurang 30%, sementara lebih kurang 70% dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat dan pengembang. Dalam pelaksanaannya, komposisi target Program Sejuta Rumah sebesar 60-70% untuk MBR dan 30-40% untuk non-MBR. Dari target tersebut, 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) unit menjadi tanggung jawab Pemerintah (Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, dan K/L lain) dan pemerintah daerah. Pencapaian penyediaan hunian layak pada tahun 2015 hingga 2018 adalah sebanyak 94.926 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam) unit. Angka tersebut merupakan output kegiatan yang diselenggarakan melalui sumber pembiayaan APBN, Kementerian PUPR. Disamping itu, juga terdapat suplai perumahan oleh BUMN dan Pengembang. Capaian penyediaan perumahan selama kurun waktu 2015-2018, perkiraan capaian 2019, dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.7 Hasil Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Penyediaan Perumahan)

Selama kurun waktu 2015-2018 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pengembangan perumahan sebanyak 111.929 (seratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) unit, melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, pembangunan baru rumah swadaya, dan rumah khusus, serta memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 914.955 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit. Dengan demikian, total penurunan *backlog* yang dicapai melalui pelaksanaan pengembangan perumahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan mencapai 1.026.884 (satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat) unit.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, selama kurun waktu 2015 - 2018 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan stimulan peningkatan kualitas sebanyak 701.424 (tujuh ratus satu ribu empat ratus dua puluh empat) unit dari target penanganan 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juta unit hingga akhir tahun 2019.

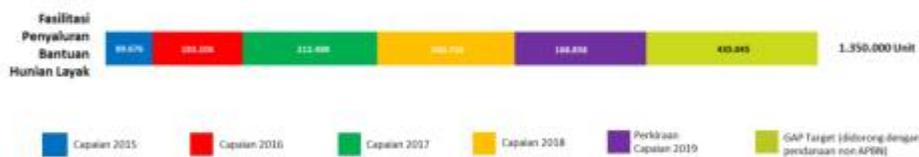
Capaian penyediaan perumahan melalui Program Sejuta Rumah selama kurun waktu 2015-2018 mencapai 3.542.318 unit dengan rincian 699.770 unit pada tahun 2015, 805.169 unit pada tahun 2016, 904.758 unit pada tahun 2017

dan 1.132.621 unit pada tahun 2018. Pada tahun 2019, ditargetkan hunian terbangun sebanyak 1.250.000 unit, sehingga total perkiraan capaian Program Sejuta Rumah tahun 2015-2019 sebesar 4.792.318 unit.

Adapun dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan tersebut diatas dilakukan melalui melalui upaya-upaya antara lain; (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (2) Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman yang difasilitasi pembangunannya, pembangunan rumah khusus, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTT-Timor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); (3) Program Pro- Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya; serta (4) Dukungan penyelenggaraan *Asian Games XVIII* melalui pembangunan Wisma Atlet Kemayoran yang terdiri dari 10 (sepuluh) Tower dengan ketinggian hingga 24 (dua puluh empat) lantai dan Wisma Atlet Jakabaring di Palembang yang terdiri atas 2 (dua) Tower dengan jumlah 5 (lima) lantai serta perbaikan sarana dan prasarana luar bangunan seperti gerbang, loket, pedestrian, parkir, pagar, tempat duduk, toilet, penanda kawasan, *food court, playground, outdoor gym*, dan tempat sampah.

C. CAPAIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Capaian dukungan pembangunan perumahan melalui pembiayaan perumahan selama kurun waktu 2015-2018, perkiraan capaian 2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.8 Hasil Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup (Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan)

Total penurunan *backlog* rumah MBR adalah 2,2 (dua koma dua) juta, melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak adalah sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, tetapi juga pemerintah baik pusat (APBN K/L lain). Selama kurun waktu 2015-2018 ditambah dengan perkiraan capaian di tahun 2019, Kementerian PUPR telah memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan sebesar 914.955 (sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) unit.

Pada periode dari tahun 2015 hingga tahun 2018 telah dilakukan upaya-upaya antara lain (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk pembiayaan perumahan; dan (2) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Perumusan skema subsidi baru selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yaitu Subsidi Selisih Bunga, Subsidi Bantuan

Uang Muka (SSB, BUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan mendorong beroperasinya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)

1.2.5 CAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR

Sesuai dengan Tujuan Kementerian PUPR menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan sasaran strategis, "Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR".

Maka sasaran-sasaran terkait tatakelola sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dievaluasi untuk mengetahui manfaat yang diperoleh.

A. CAPAIAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Capaian Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Tahun 2015-2018, serta perkiraan capaian Tahun 2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Sasaran dari program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2018 diarahkan untuk mendukung peningkatan tatakelola penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam rangka daya saing infrastruktur, layanan dasar perumahan dan permukiman serta pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian *intern*.

Adapun untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian *intern* dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang PUPR periode dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2018 telah dilakukan upaya-upaya antara lain melalui

peningkatan *Level Internal Audit Capability Model* (IACM), pelaksanaan diklat keteknikan dan non keteknikan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan dengan bekerja sama dengan BPKP dan YPIA maupun lembaga lainnya.

Sampai dengan tahun 2018, disusun peta risiko melalui kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) di beberapa unit kerja dalam rangka pengendalian dan pengawasan di lingkungan Kementerian PUPR yang dilakukan secara bersinergi dengan BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Adapun produk yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain adalah:

- (1) Teknologi litbang yang **dihasilkan** sebanyak 72 (tujuh puluh dua) teknologi, terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) teknologi bidang SDA, 10 (sepuluh) teknologi bidang jalan dan jembatan, serta 13 (tiga belas) teknologi bidang perumahan dan permukiman;
- (2) Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) rekomendasi terdiri dari 12 (dua belas) naskah pemetaan kebutuhan teknologi, 43 (empat puluh tiga) rekomendasi kebutuhan rencana bisnis penerapan teknologi, 24 (dua puluh empat) dokumen replikasi perdana, dan 58 (lima puluh delapan) naskah/rekomendasi kebijakan;
- (3) NSPM litbang sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) terdiri dari 51 (lima puluh satu) NSPM bidang SDA, 119 (seratus sembilan belas) NSPM bidang jalan dan jembatan, dan 68 (enam puluh delapan) NSPM bidang perumahan dan permukiman;
- (4) Melayani advis teknik sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) terdiri dari 61 (enam puluh satu) advis teknik bidang SDA, 69 (enam puluh Sembilan) advis teknik bidang jalan dan jembatan, 7 (tujuh) advis teknik bidang perumahan dan permukiman, dan 10 (sepuluh) advis teknis bidang kebijakan dan penerapan teknologi;
- (5) Melayani sebanyak 302 (tiga ratus dua) pengujian terdiri dari 42 (empat puluh dua) pengujian bidang SDA, 224 (dua ratus dua puluh empat) pengujian bidang jalan dan jembatan, serta 36 (tiga puluh enam) pengujian bidang perumahan dan permukiman.

Capaian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2018, perkiraan capaian Tahun 2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 1.10 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Peningkatan Inovasi Teknis Terapan

Beberapa hasil litbang aplikatif yang dapat diterapkan dan diadopsi oleh masyarakat umum, institusi, swasta, maupun Kementerian dan Lembaga yang terkait antara lain:

1. Produk Teknologi Sumber Daya Air
 - o Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)
 - o Penyediaan Air Baku melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)
 - o Sistem Jaringan Hidrologi secara *Real Time*
 - o Sistem Perpipaan Irigasi Lahan Miring dan Datar
 - o Peringatan Dini Bencana Lahar Dingin
 - o Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
 - o Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor
 - o Teknologi Lining Saluran dan *Box Tersier* Berbahan Ferosemen
 - o Teknologi Bangunan Pengendali Paras Muka Air di Lahan Gambut (*Drainpile*)
 - o Konsep Restorasi Sungai
 - o Sistem Modular Infrastruktur Sumber Daya Air: Sabodam Mikro, Teknologi Bendung Blok Beton Terkunci, Teknologi Blok Beton Berkait (3B)
 - o Teknologi Revitalisasi Danau tempe
 - o Teknologi Blok Beton Terkunci sebagai Bendung Modular
 - o Teknologi Pengaman Pantai Berkait, Berongga, Bertangga (Blok Beton 3B)
 - o Penyediaan Air Baku di Lahan Gambut
 - o Penerapan Aplikasi Sungai Kita
 - o Teknologi Beton Serat Baja sebagai Selimut Sabo Dam
 - o Teknologi Ring Net Barrier untuk Pengendalian Aliran Debris
 - o Teknologi Bangunan Sabo Dam Modular
 - o Teknologi Pengaman Pantai Pulau Terluar
 - o Teknologi Jaringan Suplesi Air Tanah untuk Irigasi Lahan Rawa
 - o Teknologi Irigasi Mikro
 - o Teknologi Embung Sederhana
 - o Teknologi Pengendali Muka Air (Hydraulic Elevator Dam)
 - o Teknologi Bangunan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Modular

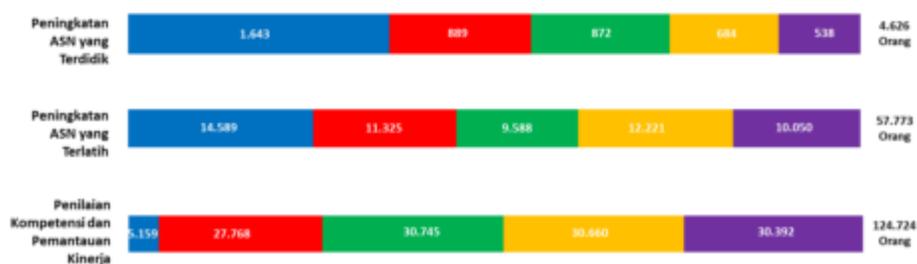
2. Produk Teknologi Jalan dan Jembatan
 - o *Hot Mix Lawele Granular* Asbuton (HLGA)
 - o Teknologi Material Lokal: Batu Kapur
 - o Teknologi Material Lokal: *Sandbase*
 - o *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA)
 - o Tambalan Cepat Mantap (TCM)
 - o *Butur Seal*
 - o Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ)
 - o Jalan Hijau (*Green Road*)
 - o Timbunan Ringan
 - o Jembatan untuk Desa (JUDESA)

- o SIMBAGAS
 - o Ruang Henti Khusus Sepeda Motor (RHK)
 - o Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA)
 - o Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL *Portable*)
 - o *Remote Construction Monitoring System* (RCMS)
 - o Teknologi Beton Kinerja Tinggi untuk Jembatan
 - o Teknologi Lantai Jembatan Ortotropik
 - o Teknologi *Warm Mix Asphalt* (Zeolit)
 - o Teknologi Beton Sedikit Semen dengan Pemanfaatan Abu Terbang PLTU (*Fly Ash*)
 - o Teknologi Simpangan Tidak Sebidang
 - o Teknologi Sistem Modular (*Beam* Jembatan)
 - o Teknologi Aspal Karet Padat
 - o Sistem Manajemen Lereng (SML)
 - o Sistem Manajemen Perkerasan
 - o *Corrugated* Mortar Pujatan (CMP)
 - o Teknologi Asbuton Full Ekstraksi
 - o Teknologi Perkerasan Beton Menerus dengan Tulangan (CRCP)
 - o Teknologi *Low Cost Low Volume Road* di Papua
 - o Teknologi Lapis Tipis Hotmix Aspal RAP untuk menunjang Preservasi Jalan
 - o Teknologi Aspal Plastik
 - o Teknologi Aspal Karet
 - o Teknologi Lapis Perkerasan Jalan dengan Campuran Beraspal Panas menggunakan RAP
 - o Teknologi Penilaian Tingkat Keselamatan Jalan (iRAP)
 - o Teknologi Penanganan Longsoran Lereng Jalan Pada Material Serpih *Clay Shale* dengan Mortar Busa
 - o Teknologi *Corrugated Steel Gabion* di Morotai
 - o Teknologi Fasilitas Pejalan Kaki (ECO JPO)
 - o Teknologi Terbatas Teknologi Hydroseeding
 - o Teknologi Tambalan Cepat Mantap Berbasis Air dan Asbuton
3. Produk Teknologi Perumahan dan Permukiman
- o Bahan Bangunan Alternatif Berbasis bahan Bangunan Lokal (Teknologi Papan Lapis Gwang)
 - o Teknologi Air Gambut Sistem Dinamis Bermedia Kontak dan Filter Penyerap Warna Bertekanan
 - o Teknologi Rumah Sistem Panel Instan (RUSPIN)
 - o Uprating IPA Paket
 - o Model Hunian Sub Komunal dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan
 - o Rumah Susun Modular Pracetak
 - o Teknologi PV Roof
 - o Teknologi Pengolahan Limbah Komunal dan IPLT
 - o Teknologi Pengolahan Air Limbah dengan Sistem Biofilter Phytoremediasi di Kawasan Pasang Surut
 - o Teknologi IPAL untuk Elemen Lansekap

- o Model Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan bagi MBR
 - o Teknologi Terpadu Air Minum dan Air Limbah di Permukiman Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - o Model Pengolahan Sistem Sanitasi Permukiman Tepi Danau
4. Replikasi Perdana Teknologi Hasil Balitbang
- o Replikasi Perdana Teknologi Beton Ferosemen untuk Jaringan Irigasi Tersier di Kab. Sleman
 - o Replikasi Perdana Teknologi Pemecah Gelombang Berbahan Karung Geotekstil Rangka Bambu di Kab. Demak
 - o Replikasi Perdana Teknologi Jaringan Irigasi Perpipaian Berbasis Masyarakat di Kab. Magelang
 - o Replikasi Perdana Teknologi Jembatan Untuk Desa (JUDESA) Berbasis Komunitas
 - o Replikasi Perdana Teknologi Asbuton Berbasis Komunitas
 - o Replikasi Perdana Teknologi Ruang Henti Khusus (RHK)
 - o Replikasi Perdana Teknologi TPS3R dan Teknologi IPAL Tahu Berbasis Masyarakat
 - o Replikasi Perdana Teknologi Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah (Teknologi Kolam Sanita, Menara Aerasi, Watertap Reverse Osmosis) di KSPN Danau Toba
 - o Replikasi Perdana Teknologi Pengaman Pantai Blok Beton 3B di Morotai
 - o Replikasi Perdana Teknologi Air Bersih dan Sanitasi (Teknologi Kolam Sanita, Saringan Pasir Cepat, Watertap Reverse Osmosis, Biofilter) di Daruba Pantai, Morotai
 - o Replikasi Perdana Rumah Tahan Gempa untuk mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB
 - o Replikasi Perdana Teknologi Jalan Wisata di Morotai
 - o Replikasi Perdana Teknologi Aspal Plastik
 - o Replikasi Perdana Teknologi Tambalan Cepat Mantap

C. CAPAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Capaian pengembangan SDM dalam mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 hingga tahun 2018 ditampilkan pada diagram batang berikut ini:



Gambar 1.11 Pencapaian Target Renstra PUPR 2015-2019 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan ASN yang terdidik, peningkatan ASN yang terlatih, penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja menjadi ukuran utama capaian target Renstra PUPR 2015-2019 terkait pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian 2015 untuk ASN yang terdidik yaitu sejumlah 1.643 (seribu enam ratus empat puluh tiga) merupakan capaian yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 889 (delapan ratus



delapan puluh sembilan) orang. Demikian juga di tahun 2017 dan 2018, capaian ASN yang terdidik adalah sebesar 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) dan 684 (enam ratus delapan puluh empat) orang. Perubahan capaian pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang cenderung menurun disebabkan Kementerian PUPR lebih selektif dalam memberikan rekomendasi pendidikan yaitu program pendidikan yang terkait dengan keahlian teknis bidang PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur PUPR.

Capaian ASN yang terlatih pada tahun 2015 adalah sebesar 14.589 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) orang. Trend yang sama dengan capaian ASN yang terdidik, pada tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan capaian yaitu tahun 2016 adalah sebesar 11.325 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh lima) orang dan tahun 2017 sebesar 9.588 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) orang. Penurunan capaian pada tahun 2016 dan tahun 2017 disebabkan oleh pergeseran prioritas anggaran yakni meningkatkan proporsi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana penunjang utama pelatihan. Pada tahun 2018 jumlah ASN yang terlatih kembali meningkat yaitu sebesar 12.221 (dua belas ribu dua ratus dua puluh satu) orang.

Sedangkan pada capaian penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja yang meningkat sesuai dengan perubahan volume target SDM yang dinilai kompetensi dan dipantau kinerjanya yaitu seluruh SDM Kementerian PUPR. Dalam upaya pengembangan SDM PUPR, dengan menekankan bahwa SDM merupakan subyek pelaksana percepatan pembangunan infrastruktur, sangat diperlukan akselerasi penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja sehingga pengembangan SDM dapat dilakukan tepat sasaran mengurangi gap kompetensi.

Capaian ASN yang terdidik, ASN yang terlatih, serta ASN yang dinilai kompetensinya dan dipantau kinerjanya menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan SDM. Capaian program pengembangan SDM yang diukur berdasarkan capaian tersebut, merupakan kumulatif dari capaian setiap tahunnya. Capaian program pada tahun 2016 merupakan kumulatif dari capaian tahun 2015 dan 2016. Demikian juga capaian program tahun 2017 merupakan kumulatif dari capaian program 2016 dan 2017 dan seterusnya. Pada tahun 2015 capaian program pengembangan SDM dengan indikator persentase peningkatan kompetensi SDM PUPR adalah sebesar 10 (sepuluh) %

dengan perhitungan sebanyak 5.159 (lima ribu seratus lima puluh sembilan) SDM PUPR yang meningkat kompetensinya dan baseline persentase yang digunakan adalah 21.488 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan) orang yaitu jumlah SDM PUPR pada tahun 2015. Pada tahun 2016, dengan target program yang perlu dicapai adalah sebesar 25 (dua puluh lima) %, Kementerian PUPR melalui program Pengembangan SDM berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten sebesar 30,04 (tiga puluh koma nol empat) %. Pada tahun 2017 capaiannya mencapai 43,33 (empat puluh tiga koma tiga puluh tiga) %. Secara kualitas capaian sebesar 68,79 (enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) % SDM di tahun 2018 yang kompeten dari jumlah seluruh SDM PUPR dapat dikatakan belum seimbang dengan tingginya beban kerja pembangunan infrastruktur ditambah lagi perlunya percepatan untuk mencapai target di tahun 2019 yaitu sebesar 75 (tujuh puluh lima) %.

Jumlah SDM PUPR dengan tingkat pendidikan SLTA/SLTP masih cukup banyak. Proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA atau di bawahnya adalah sebesar 44 (empat puluh empat) % (10.192 (sepuluh ribu seratus sembilan puluh dua) orang). Di samping hal tersebut, kondisi pegawai saat ini hingga beberapa tahun ke depan akan berkurang akibat purna bakti/pensiun dengan jumlah rata-rata akan pensiun per tahun sekitar 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang. Sehingga untuk menghindari terjadinya gap antara pembangunan infrastruktur PUPR dengan SDM yang melaksanakan pembangunan tersebut sangat diperlukan percepatan pelaksanaan program pengembangan SDM.

Memperhatikan kondisi diatas dimana pembangunan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berkualitas diupayakan ditingkatkan, maka harus diimbangi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kementerian PUPR.

Peningkatan kualitas SDM PUPR dilakukan melalui pengembangan kompetensi baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Ketiga kompetensi tersebut, diperlukan setiap insan PUPR untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR yang andal.

Memenuhi tuntutan peningkatan kualitas SDM dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam rangka mengisi kekurangan tenaga terampil yang professional, Kementerian PUPR menginisiasi dengan pendirian perguruan tinggi vokasi, yakni Politeknik Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2018. Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur berimplikasi pada meningkatkan kebutuhan tenaga terampil. Data Ditjen Bina Konstruksi menunjukkan bahwa setiap tambahan anggaran Rp. 1 Triliun akan menyerap 14.000 tenaga kerja konstruksi. Melalui Politeknik Pekerjaan Umum diharapkan dapat mencetak tenaga kerja konstruksi terampil sehingga mengurangi proporsi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*) yang saat ini jumlahnya mencapai 74% dari tenaga kerja konstruksi. Politeknik PU dirancang untuk menghasilkan lulusannya dengan sertifikasi yang berstandar nasional atau internasional. Dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan modern melalui pembangunan Gedung pembelajaran modern (*smart classroom*),

fasilitas teknologi informasi, laboratorium, bengkel kerja (*workshop*) dengan kurikulum yang adaptif dengan industri 4.0, diharapkan dapat menjadikan Politeknik PU berkelas internasional.

D. CAPAIAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

Capaian Dukungan Manajemen, Sarana, dan Prasarana dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada diagram batang di bawah ini:



Dalam pemberian dukungan manajemen serta sarana dan prasarana kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, pencapaian Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut:

• Opini WTP atas Laporan Keuangan dari BPK

Kementerian PUPR berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi dalam mempertahankan WTP cukup baik karena dinilai telah berhasil dalam melakukan rasionalisasi aset saat terjadi penggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan opini menjadi WTP diantaranya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk diimplementasikan secara menyeluruh, dikembangkan aplikasi target dan Realisasi PNB (TRPNBP) sebagai alat bantu pembinaan akuntansi dan perbendaharaan, pendataan kembali dan inventarisasi BMN, serta verifikasi dan layanan pengguna Barang dan jasa yang lebih baik pada Kementerian PUPR.

• Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2018 atas Kementerian PUPR memperoleh nilai 72,19 (tujuh puluh dua koma sembilan belas) atau predikat BB dari tahun sebelumnya yaitu 71,59 (tujuh puluh satu koma lima puluh sembilan) di tahun 2017 dan 70.99 (tujuh puluh koma sembilan puluh sembilan) di tahun 2017. Penilaian tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian PUPR telah menunjukkan hasil yang baik.

Sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja telah diterapkan secara konsisten di lingkungan Kementerian PUPR. Keseluruhan tahapan penerapan sistem AKIP tersebut tercermin pada berbagai dokumen meliputi: Rencana Strategis, Rencana Kinerja/Renja, Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran dan monev pencapaian kinerja, Laporan Kinerja serta laporan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja unit kerja yang dilakukan oleh APIP.

Kementerian PUPR berusaha meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan target nilai 90 (sembilan puluh) di Tahun 2019 atau dengan kategori "AA". Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan revaluasi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik, memperbaiki kualitas pelaporan kinerja, mengoptimalkan hasil evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh APIP, dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

• **Nilai Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, indeks Reformasi Birokrasi kementerian PUPR adalah 73,42 (tujuh puluh tiga koma empat puluh dua) menurun 2,35 (dua koma tiga puluh lima) poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu 75,77 (tujuh puluh lima koma tujuh puluh tujuh). Beberapa upaya yang telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian PUPR selama tahun 2018, terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti:

- a. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sebagian besar rencana kerja (rencana aksi dan tindak lanjut) melalui aktivitas PMPRB sehingga terbukti mampu mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Tata laksana Kementerian PUPR sudah semakin baik, yang dilihat dari sudah mulai disusunnya SOP didasarkan kepada peta proses bisnis, implementasi e-Government dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan publik, serta penerapan keterbukaan informasi publik;
- c. Sistem manajemen SDM Kementerian PUPR terus menerus dilakukan penataan ke arah yang lebih baik. Namun perlu ditingkatkan dengan memperluas pengembangan pegawai berbasis kompetensi dan melakukan redistribusi pegawai

Opini WTP atas Laporan Keuangan dan Nilai A atas SAKIP Kementerian PUPR harus diupayakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk mencapai target Reformasi Birokrasi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel menuju tunjangan kinerja pegawai sebesar 100 (seratus) %.

- **e-Government**

Dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian (*e-Government*) perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, sehingga diterbitkan Permen PUPR Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian PUPR dengan tujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan *e-Government* Kementerian.

Sekretariat Jenderal memegang peran penting dalam penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dengan demikian, upaya penerapan teknologi informasi telah dilakukan mulai dari tahap perencanaan (*ePlanning*), pemrograman (*eProgramming*), penganggaran (*eBudgeting*), pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Hingga tahun 2016, telah disusun dan diimplementasikan sistem informasi pelelangan (*eProcurement*), pemantauan (*eMonitoring*), dan evaluasi kinerja (*ePerformance*). Sementara itu sedang disusun pula sistem penganggaran (*eBudgeting*) yang secara bertahap mulai diterapkan pada tahun 2017. Ke depannya masih perlu dikembangkan sistem informasi perencanaan (*ePlanning*) dan pemrograman (*eProgramming*).

Proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*eProcurement*) telah dilakukan sejak tahun 2002. Pelaksanaan *eProcurement* melalui SPSE dilakukan secara bertahap dari sisi penerapan transaksi elektronik dan wilayah cakupan implementasinya. Implementasi disesuaikan dengan kondisi Sumber Daya Manusia dan infrastruktur teknologi komunikasi di suatu wilayah. Dengan adanya *eProcurement* tersebut, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik (*eMonitoring*) dikembangkan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan bidang PUPR. Sistem *eMonitoring* tersebut berisikan data progress pelaksanaan kegiatan secara *real time* dan akuntabel yang tersebar Satker Kementerian PUPR di seluruh Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker kepada pimpinan unit organisasi maupun dari pimpinan unit organisasi kepada Menteri PUPR. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan oleh Menteri kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem *eMonitoring* tidak hanya diterapkan untuk memantau dana APBN, namun juga memantau penggunaan dana alokasi khusus (DAK) di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sistem *eMonitoring* DAK dapat diakses oleh publik di *website* Kementerian PUPR sehingga masyarakat dapat memantau secara transparan baik pagu maupun progress per provinsi dan kabupaten/kota, per subbidang, dan per paket pekerjaan.

Tidak hanya pemantauan yang berbasis elektronik, namun proses evaluasi kinerja juga dilakukan berbasis elektronik (*ePerformance*). Pimpinan dapat memantau capaian kinerja masing-masing unit organisasi sesuai dengan target yang diperjanjikan di awal tahun anggaran. Dengan adanya sistem informasi tersebut, pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat segera dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian dan unit organisasi.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan dukungan administrasi kepegawaian dan dalam rangka menerapkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *Information and Communication Technology (ICT)* di lingkungan Kementerian PUPR, Sekretariat Jenderal telah mengembangkan sistem *Electronic Human Resources Management (eHRM)*. Dengan adanya sistem tersebut pengelolaan kepegawaian dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan. Namun, tentunya ke depannya sistem tersebut perlu terus menerus di-*upgrade* mengikuti perkembangan teknologi dan informasi serta menyesuaikan kebutuhan pegawai.

- **Pembinaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal (lelang dini) sebagai wujud komitmen kepada masyarakat bahwa Kementerian PUPR bekerja lebih cepat. Dengan lelang dini, diharapkan infrastruktur dapat terbangun lebih cepat dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Selama ini pelelangan baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan dengan proses hingga 4 (empat) bulan sehingga pekerjaan baru efektif mendekati tengah tahun anggaran. Dengan adanya proses lelang dini dan *readiness criteria* (pembebasan lahan, kematangan lokasi, DED, *Feasibility Study*, dokumen AMDAL, dll) telah disiapkan di tahun anggaran sebelumnya, diharapkan pekerjaan sudah dapat dimulai di awal tahun anggaran berjalan dan percepatan anggaran dapat segera dilakukan.

Selama ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) melekat pada unit kerja masing-masing dengan kapasitas dan kualitas SDM yang terbatas. Namun pada tahun 2017 telah disosialisasikan mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Jabatan tersebut diberikan kepada PNS yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

Dengan demikian kompetensi SDM sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dapat terjamin.

Selain itu, sejak tahun 2016, ULP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu ULP Percontohan Program Modernisasi Pengadaan Fase 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) ULP lainnya yang ada di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/institusi. Tiga sasaran utama melalui ULP Percontohan yakni peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan. Ketiga sasaran utama ini dicapai dengan melakukan pelatihan, pendampingan, serta bantuan teknis bagi seluruh ULP Percontohan. Penguatan kelembagaan ULP juga berkaitan dengan efisiensi belanja negara, khususnya pada peningkatan belanja modal, serta untuk memastikan agar barang dan jasa publik yang dibelanjakan oleh pemerintah tepat mutu, tepat waktu dan tepat guna.

Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Sistem Informasi ULP dan telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh admin ULP di Kementerian PUPR. Pengembangan sistem ini memungkinkan Satker untuk mengusulkan penugasan Pokja melalui sistem tanpa perlu harus menyampaikan dokumen fisiknya secara langsung, begitu pula sebaliknya untuk ULP bisa mengeluarkan SK Penugasan dan Token Kepanitiaan langsung melalui sistem.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakibatkan perubahan fungsi Unit Layanan Pengadaan yang selama ini melekat pada unit kerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi bagian unit kerja pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Langkah tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam melaksanakan Reformasi Organisasi Pengadaan Jasa Konstruksi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Selain itu ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, dibentuk 34 (tiga puluh empat) Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi sehingga diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dilakukan proses seleksinya pada masing-masing unit organisasi dapat dialihkan tanggung jawabnya pada Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang Jasa (UPTPBJ). Organisasi ini diharapkan dapat menjadi sebuah pusat keunggulan (*center of excellence*) yang memegang prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di Kementerian PUPR.

- **Penyusunan Produk Hukum dan Advokasi Hukum**

Salah satu peranan Sekretariat Jenderal adalah melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kebutuhan akan penetapan peraturan perundang-undangan di Kementerian PUPR sangat tinggi karena terkait proses

penyusunan RUU Sumber Daya Air dan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada Tahun 2015-2019 telah ditetapkan peraturan di bidang konstruksi sebanyak 14 Peraturan Menteri, 3 Keputusan Menteri, 1 Instruksi Menteri, dan 1 Surat Edaran.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum, Sekretariat Jenderal telah melakukan pendampingan untuk mengatasi *bottleneck* penyelesaian kasus hukum terkait pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Selain itu, sebagai bentuk dukungan penyebarluasan peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka telah dikembangkan jaringan dokumen dan informasi hukum melalui website birohukum.pu.go.id. Namun mengingat semakin banyaknya pekerjaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan alokasi anggaran yang sangat besar, ke depannya diperlukan lebih banyak SDM yang berkompeten untuk melakukan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum.

- **Layanan Informasi Publik**

Sekretariat Jenderal juga memegang peran sangat penting dalam pembentukan *branding* dan citra positif Kementerian PUPR serta memberikan keterbukaan informasi publik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya layanan informasi publik kepada masyarakat untuk membuktikan kerja nyata yang dilakukan Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur untuk negeri. Pada tahun 2018, telah terlaksana sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) peliputan, 103 (seratus tiga) publikasi baik di media elektronik maupun media cetak, dan pemenuhan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) permintaan informasi.

Tahun 2016, Kementerian PUPR mendapatkan hasil Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat setiap tahun yaitu 95,87 (sembilan puluh lima koma delapan puluh tujuh) dari skala 100 (seratus) sehingga menduduki posisi pertama dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Hingga saat ini penilaian ini menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, telah dilakukan pembenahan secara eksternal melalui penyebarluasan kuesioner terkait hasil pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR secara *online* melalui www.surveikita.com. Secara singkat, hasil dari survei tersebut adalah mayoritas responden menganggap informasi tentang program Kementerian PUPR menarik untuk dikonsumsi dan responden memberikan penilaian “Baik” untuk kinerja Kementerian PUPR. Sementara dari hasil survei persepsi media diperoleh penilaian bahwa pemberitaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menduduki posisi 12 (dua belas) dalam ekspos berita kementerian Kabinet Kerja dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) serta sentimen pemberitaannya lebih banyak netral dan positif daripada negatif sehingga mendapatkan nilai 94 (sembilan puluh empat).

1.3 KONDISI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Pelaksanaan kebijakan Renstra Kementerian PUPR tentunya tidak dapat dilepaskan dari isu global. Selama kurun waktu 2015-2018 telah terjadi perkembangan-perkembangan global yang perlu untuk dicermati.

1.3.1 KONDISI INTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Isu-isu strategis di dalam kondisi internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu dicermati dalam penetapan kebijakan dan strategi, antara lain sebagai berikut:

1. Akselerasi proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR
2. Perluasan skema dan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang lebih efisien dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat melalui perubahan fungsi Ditjen Pembiayaan Perumahan menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Rekomendasi penyederhanaan prosedur pengadaan Pembangunan Infrastruktur bidang PUPR (sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang berorientasi kepada hasil melalui perubahan Fungsi Direktorat Bina Investasi menjadi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi.
4. Dukungan dan jaminan melalui pembiayaan pengadaan tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), *Availability Payment*, *Viability Gap Fund*, serta penugasan langsung kepada BUMN, selain menggunakan APBN Kementerian PUPR
5. Keterlibatan aktif Kementerian/Lembaga, Pemda, Badan Usaha/Swasta dan masyarakat dalam Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, sebagai contoh tanpa peran serta aktif Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan dalam pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur sulit dilaksanakan.
6. Koordinasi investasi Kementerian PUPR dengan K/L lain, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta.
7. Amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar melalui terbentuknya Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Balai Prasarana Permukiman.
8. Koordinasi pendanaan infrastruktur daerah melalui terbentuknya Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah.
9. Koordinasi kecepatan dan ketepatan penanganan bencana melalui Penambahan Fungsi Tanggap Bencana pada Pusat Data dan Informasi Teknologi.
10. Peningkatan SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui

- pembentukan Politeknik Pekerjaan Umum.
11. Pengembangan dan penerapan hasil riset teknologi terbaru dalam sektor Hasil riset dan pengembangan dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR.
 12. Leadership pimpinan kelembagaan yang melaksanakan pembangunan infrastruktur PUPR.
 13. Analisis dampak manfaat pembangunan yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas program pembangunan bidang PUPR.
 14. Perkuatan tata kelola, perangkat manajemen, serta pengendalian mutu internal secara efektif agar pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilaksanakan dengan kualitas mutu yang tinggi
 15. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR secara optimal agar dapat dicapai pembangunan infrastruktur yang konsisten, koheren, dan transparan.
 16. Harmonisasi dan deregulasi yang luas untuk memastikan agar peraturan perundangan sejalan dengan prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu disempurnakan adalah Peraturan terkait mekanisme pengadaan bagi kerjasama pemerintah dengan badan usaha/ swasta hingga turunannya di Kementerian PUPR.

1.3.2 KONDISI EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI

Perkembangan-perkembangan global yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR dalam pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang perlu untuk dicermati, antara lain: (1) Masih belum pulihnya krisis di kawasan Eropa (masih dalam posisi *mild recovery*) selama beberapa tahun terakhir ini yang kondisinya dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) Masih cenderung menurunnya harga komoditas dunia dan adanya indikasi berakhirnya *era supercycle* yang juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; serta (3) Antisipasi perubahan kebijakan luar negeri pasca kepemimpinan baru dan proses normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang ditandai dengan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* pada tahun-tahun berikutnya, serta kesepakatan internasional tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang mensyaratkan adanya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga keberlanjutannya, meskipun pembangunan berkelanjutan sudah menjadi elemen strategis dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang saat itu masih dalam tahap permulaan. Pasca deklarasi SDGs, dilakukan penyesuaian antara tujuan SDGs dengan prioritas pembangunan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 serta pengarusutamaan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya adalah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang juga mempengaruhi kebijakan Renstra 2015-2019. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, serta memungkinkan terjadinya aliran bebas untuk barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Peningkatan integrasi ini akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi hal ini menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi. Dalam tingkat Asia, perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek.

Berbagai perkembangan global dan regional tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan depresiasi rupiah tentunya berdampak pada kinerja pembangunan bidang PUPR. Guna merespon kondisi tersebut, Kementerian PUPR telah mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan bidang PUPR.

Kebijakan pembangunan bidang PUPR tersebut diarahkan pada pembangunan bidang PUPR untuk mendukung prioritas nasional dalam rangka meningkatkan daya saing, meningkatkan fasilitas berusaha, dan memperluas akses ekonomi masyarakat dengan menjaga laju sektor riil, meningkatkan daya saing industri, menarik investasi, dan memperlancar logistik. Fokus utama kebijakan bidang PUPR adalah kebijakan mendukung tujuan dan sasaran Kementerian PUPR serta prioritas nasional.

Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran melalui (1) Penyusunan struktur program kegiatan berbasis kinerja dengan kerangka logika: anggaran (*input*), *output* dan *outcome* program; (2) Melaksanakan optimalisasi internal/penghematan mendukung Inpres Nomor 2/2015, Nomor 4/2016, dan Nomor 8/2016, yang meminta K/L untuk mengambil langkah-langkah penghematan atas belanja pembangunan yang tidak penting; (3) Meningkatkan peranan aparat pengawas *intern* pemerintah (APIP) Kementerian PUPR dalam melakukan telaah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR guna menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel; (4) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program anggaran dan kinerja.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, dinamika kondisi pembangunan nasional terkait dengan masih melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta ketimpangan pemerataan pembangunan yang masih terjadi di beberapa wilayah menyebabkan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan perubahan lingkungan strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pembangunan bidang PUPR perlu dievaluasi agar dapat mengetahui kondisi capaian serta bagaimana strategi untuk menyelesaikan sisa target yang diproyeksikan menjadi harapan yang akan dicapai hingga akhir tahun periode perencanaan.

Dari aspek ekonomi, angka pertumbuhan ekonomi yang belum dapat mencapai target sasaran RPJMN tahun 2015-2019 terus diupayakan untuk ditingkatkan, oleh karena itu sebagai contoh telah diberlakukan kebijakan percepatan pembangunan proyek strategis agar mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Disisi lain struktur ekonomi Indonesia yang secara spasial masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia diupayakan agar dapat merata ke pulau/kepulauan lain dengan telah diberlakukannya kebijakan yang mengarah kepada pemerataan pembangunan. Tentu saja bukanlah hal yang mudah melaksanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus disisi lain melaksanakan pemerataan pembangunan.

Agar *multiplier effect* dari hasil pembangunan nasional yang diharapkan sesuai target sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dapat berimbas terhadap penurunan persentase tingkat kemiskinan, Pemerintah mendorong untuk melakukan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat mewujudkan harapan tersebut.

Kementerian PUPR sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara juga harus menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Strategis agar dapat berhasil mewujudkan Prioritas Nasional serta tujuan dan sasaran Kementerian PUPR. Adapun penyesuaian dengan Perubahan Lingkungan Strategis tersebut adalah:

Pertama. Memasuki tahap ketiga pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2015–2019), tatanan Kementerian PUPR telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUPR untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi Kementerian PUPR dalam Peraturan Presiden tersebut adalah: (i) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; (ii) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iii) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (iv) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (v) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; (vi)

pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (vii) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (viii) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan (ix) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun dengan adanya beberapa penyesuaian dinamika lingkungan strategis untuk menuju organisasi yang *right sizing* serta dengan dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, untuk tugas dan fungsi semua Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR dalam rangka mendukung terwujudnya Keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah; kedaulatan pangan dan energi; konektivitas nasional; dan layanan dasar infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pembiayaan dan penyediaan perumahan dilakukan perubahan yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 diubah diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat beberapa perubahan/penyesuaian dan penambahan nomenklatur berikut tugas dan fungsinya yang berimplikasi pada perubahan Struktur Program dan Kegiatan. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan Kementerian PUPR untuk menyesuaikan struktur program kegiatan terkait perubahan atau tambahan tugas dan fungsi kelembagaan tersebut, demikian juga dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang harus disesuaikan.

Kedua. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembagian bidang urusan pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Urusan Pemerintahan *Absolut* (Pemerintah Pusat) dan Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintah Daerah) terkait urusan wajib urusan pelayanan dasar; maka Kementerian PUPR harus dapat bersinergi dengan Pemerintah daerah serta melaksanakan turbinwas (pengaturan, pembinaan dan pengawasan) terkait urusan Pemerintahan Wajib dalam bidang PUPR yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Meskipun demikian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PUPR tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR semata, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kementerian PUPR berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh pemerintah daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan maupun amanat undang-undang dapat dicapai serta menyediakan SPM bidang

PUPR pada level kabupaten/kota agar Infrastruktur bidang PUPR yang terbangun dapat memadai sesuai dengan standar yang disyaratkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini telah menjadi prioritas utama dalam RPJPN untuk RPJM Tahap III (2015–2019), dimana untuk bidang PUPR dinyatakan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Peningkatan tersebut ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar dengan kondisi yang baik dan layak di semua tingkatan pemerintahan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Kondisi yang baik adalah kondisi dimana infrastruktur yang telah tersedia berfungsi sesuai peruntukan dan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kondisi layak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mendapatkan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal terkait akses terhadap pelayanan infrastruktur yang meliputi akses jalan/transportasi darat, akses terhadap sumber air, baik air bersih maupun air baku, serta akses pelayanan kepada prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang layak, termasuk terlindungi dari resiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Ketiga. Dengan diberlakukannya kebijakan tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis beserta lampiran *list* proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka Renstra Kementerian PUPR perlu disesuaikan.

Keempat. Dengan skenario pendanaan tahun 2016 dan 2017 yang disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta kebijakan terkait penghematan besar anggaran seperti Inpres Nomor 4 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 yang berbeda dengan proyeksi Renstra Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (untuk Tahun Anggaran 2015 relatif sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tidak ada perbedaan) serta belum berjalannya skema pembiayaan selain APBN sesuai dengan yang diharapkan, maka Kementerian PUPR diproyeksikan akan memiliki gap yang lebih besar terkait *Outcome* dan *Impact* untuk dicapai hingga akhir periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR di tahun 2019.

Kelima. Dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penerapan penganggaran berbasis kinerja diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L, yang mengharuskan Kementerian/ Lembaga untuk

melakukan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA K/L dan digunakan mulai penganggaran Tahun Anggaran 2016.

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengamanatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi serta menyusun format klasifikasi, dan sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L, maka diluncurkan Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang mulai digunakan dalam penganggaran tahun anggaran 2018 yang dilakukan di tahun 2017. Dengan kata lain Aplikasi KRISNA merupakan sistem informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi sebagai tindak lanjut amanat Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, serta merupakan hasil kesepakatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN dan RB, sebagai sebuah keniscayaan yang harus diterapkan. Kementerian PUPR sebagai salah satu Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah harus menyusun struktur kinerja seperti format struktur dalam sistem *database* Renja K/L dan RKAK/L tersebut. Format struktur program kegiatan yang tertuang pada Aplikasi KRISNA harus sesuai dengan format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 sebagai acuan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sehingga format lampiran matriks Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 perlu disesuaikan. Pada dasarnya logika di dalam Aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dengan Aplikasi KRISNA sama, namun terdapat perbedaan signifikan pada terminologi Sasaran Kegiatan. Jika di dalam ADIK (demikian juga di dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019) Sasaran Kegiatan merupakan *Output* sebagai keluaran akhir Kegiatan Unit Kerja Eselon II atau unit kerja mandiri, namun di dalam Aplikasi Krisna Sasaran Kegiatan merupakan manfaat yang diberikan atau *Outcome* Kegiatan Unit Kerja Eselon II/Unit Kerja Mandiri sebagai *Intermediate Outcome* (*Outcome* Antara) menuju *Outcome* Unit Organisasi Eselon I yang membawahinya.

Diharapkan dengan disesuaikannya Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 terhadap Perubahan Lingkungan Strategis ini akan memaksimalkan kontribusi Kementerian PUPR dalam mewujudkan semua prioritas nasional pada sasaran-sasaran dalam Dimensi Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sehingga Visi dan Misi Indonesia Tahun 2015-2019 akan dapat terwujud.

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, dapat memanfaatkan potensi antara lain sebagai berikut:

- Pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia

pada Tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 (empat puluh tiga koma delapan) %, sementara pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 (tiga puluh empat koma satu) %;

- Adanya pergeseran pusat ekonomi dunia, terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik;
- Perkembangan Kerjasama ekonomi global yang berkembang ke arah kerjasama ekonomi yang lebih luas melalui pembentukan Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*). Mega Blok Perdagangan ini diperkirakan akan mempengaruhi arsitektur perdagangan dan investasi global. Diperkirakan aliran modal asing ke negara berkembang akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku proses produksi dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk terus berbenah menuju infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, juga menghadapi tantangan berat antara lain sebagai berikut:

- Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat resiko bencana yang tinggi di dunia, yaitu letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor karena secara geografis Indonesia merupakan kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik;
- Indonesia merupakan jalur perdagangan strategis dan jaringan strategis lalu lintas perkapalan internasional lainnya karena Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) memiliki posisi yang strategis dan merupakan bagian dari jalur perdagangan dan pelayaran sumber daya alam global. Posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan dan transportasi lalu lintas terpadat di dunia dapat menjadi sumber devisa di bidang perekonomian sekaligus ancaman karena posisinya yang terbuka bagi negara lain memasuki wilayah Indonesia. Karena posisi silang Indonesia tersebut menempatkan Indonesia berada dalam dua arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar dan kekuatan budaya yang bertarung di tengah arus globalisasi;
- Pada aspek pertahanan, sistem pertahanan maritim di selatan, dan sistem pertahanan kontinental di utara mengapit Indonesia berada sehingga posisi Indonesia memungkinkan terpengaruh dari interaksi dan interelasi dengan lingkungan eksternalnya, baik lingkungan global dan regional, serta lingkungan nasional;
- Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati, bonus demografi yaitu kondisi yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sehingga penduduk usia kerja terus meningkat. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia menyumbang sekitar 38 (tiga puluh delapan) % dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain

meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi negara- negara yang proporsi penduduk usia kerja menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia. Beberapa fokus dalam SDGs yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Pasca 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti pengurangan kemiskinan, mengatasi kelaparan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan pemahaman gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antarnegara; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air, sanitasi, dan energi; (iii) menjaga pertumbuhan ekonomi inklusif yang menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan dengan fokus mitigasi terhadap perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Dengan demikian pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan sangat perlu diperhatikan melalui perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan;

- Berdasarkan laporan World Economic Forum 2018, indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI), Indonesia berada di peringkat 45 (empat puluh lima) dari 140 (seratus empat puluh) negara dengan nilai 64,9 (enam puluh empat koma sembilan) (dari skala 0 – 100). Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 52 dengan nilai 4,5 (empat koma lima). Demikian pula dengan indeks daya saing infrastruktur Indonesia menurun dibandingkan tahun 2017 dari 52 (lima puluh dua) menjadi 71 (tujuh puluh satu). Jika dilihat dari aspek infrastruktur jalan, indeks kualitas jalan di Indonesia berada pada peringkat 75 (tujuh puluh lima). Angka ini menurun dibandingkan tahun lalu ketika kualitas jalan Indonesia berada di peringkat ke-64. Hal ini terjadi karena GCI 4.0 fokus pada institusi, kebijakan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi produktivitas dengan berdasarkan pada Fourth Industrial Revolution(4IR);
- Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi dan menjadi tantangan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi yang telah disahkan oleh DPR pada 12 Januari 2017 diharapkan pembinaan sektor jasa konstruksi dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal;
- Kementerian PUPR harus dapat menciptakan teknologi dan inovasi di dalam pembangunan infrastruktur sehingga lebih murah biayanya, lebih cepat proses pengerjaannya, serta lebih ramah lingkungan dan berkualitas seperti Rumah Apung sebagai solusi ramah lingkungan yaitu dengan teknologi apung, listrik tenaga surya, dan sanitasi biofil. Selain itu juga dibangun Jembatan Antapani dengan menggunakan teknologi *Corrugated Mortarbusa Pusjatan* (CMP) yang memiliki kelebihan masa konstruksi lebih cepat 50 (lima puluh) %, konsumsi bahan alam jauh lebih rendah, anggaran bisa

lebih hemat 50 (lima puluh) – 70 (tujuh puluh) %, dan pelaksanaan konstruksi CMP tidak mengharuskan penutupan jalur kendaraan sehingga meminimalkan kemacetan;

- Kebutuhan mendesak untuk Prioritas Nasional seperti misalnya Asian Games XVIII untuk penataan kawasan dan rehabilitasi di Gelora Bung Karno (GBK) dan Jakabaring, antara lain: 1). Rehabilitasi 14 (empat belas) venues di GBK; 2). Penataan *landscape* di GBK; 3). Renovasi venue dayung di Jakabaring. Pembangunan wisma atlet dan penataan kawasan di Kemayoran 10 (sepuluh) tower rusun;

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR di dalam mewujudkan infrastruktur bidang PUPR yang handal di level global dan internasional, antara lain sebagai berikut:

- Dalam meningkatkan ketahanan air masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti: pertama, dampak negatif perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air yang terjadi diantaranya karena dinamika masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya upaya mitigasi dan adaptasi. Kedua, masih terjadinya kerusakan pada *catchment area*, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim. Sementara itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, masih terdapat permasalahan yaitu jaringan irigasi masih mengalami kerusakan serta perlunya pembangunan waduk dan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah;
- Dalam upaya meningkatkan konektivitas bagi penguatan daya saing masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: 1) Logistik nasional yang masih cenderung menggunakan modal transportasi jalan darat, sehingga masih diperlukan penguatan sistem logistik nasional 2011-2025 agar pada akhir periode 2015-2020 biaya logistik nasional dapat turun 4 (empat) % dari Tahun 2015; 2) Kondisi kemantapan jalan nasional di Indonesia yang masih perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan secara berkala agar kemantapan jalan nasional tetap terjaga; 3) Pembangunan jalan baru dan jalan bebas hambatan tidak hanya pada kawasan Barat namun juga di kawasan Indonesia Timur serta kawasan terisolir, perbatasan, dan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk meningkatkan konektivitas nasional, yang hingga saat ini masih sering terhambat karena proses pengadaan tanah;
- Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100 (seratus) %, penanganan permukiman kumuh di perkotaan untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, serta pemenuhan 100 (seratus)% akses sanitasi layak pada akhir tahun 2019, saat ini masih jauh dari target karena beberapa permasalahan antara lain: 1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; 2) Perlunya peningkatan peran pemerintah daerah terkait pembangunan hingga tahap pemeliharaan asset;

3) Kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan 4) Terbatasnya APBN sehingga perlu mencari skema- skema pembiayaan non APBN;

- Dalam pengelolaan pembangunan bidang PUPR, yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama ini belum dapat maksimal memberi hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. *Multiplier effect* dari hasil pembangunan bidang PUPR, sebagaimana yang diharapkan di dalam sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, belum dapat berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang akan berakibat pada penurunan persentase tingkat kemiskinan. Pembangunan bidang PUPR yang dilaksanakan oleh semua Unit Organisasi Eselon I yang berada di bawah Kementerian PUPR, belum dapat maksimal memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah agar dapat menikmati hasil pembangunan bidang PUPR;
- Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah belum dapat memaksimalkan pemanfaatan potensi dan pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan infrastruktur terkait pengendalian daya rusak terutama kekeringan, banjir, kenaikan permukaan laut, dan longsor yang merupakan bahaya akibat perubahan iklim yang akan berdampak pada masyarakat miskin yang tinggal di pesisir pantai dan bergantung pada pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai sumber penghasilan mereka.

Secara detil, potensi dan permasalahan pada masing-masing tugas dan fungsi di Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pembangunan infrastruktur bidang SDA dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Ketersediaan air di Indonesia mencapai 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) triliun m³/tahun, namun yang dapat dimanfaatkan baru sekitar 691,3 (enam ratus sembilan puluh satu koma tiga) juta m³/tahun (baru sekitar 17,69 (tujuh belas koma enam sembilan) %). Dari air yang dapat dimanfaatkan tersebut hanya sekitar 32,2 (tiga puluh dua koma dua) % yang sudah dimanfaatkan, utamanya sekitar 80,5 (delapan puluh koma lima) % untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada air cukup besar yang belum dimanfaatkan. Namun disisi lain, ketersediaan air tersebut juga tidak merata. Pulau Kalimantan merupakan pulau dengan ketersediaan air terbesar (28,5 (dua puluh delapan koma lima) %), sedangkan Pulau Jawa (6,3 (enam koma tiga) %) dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki ketersediaan air terkecil setelah Bali dan Nusa Tenggara (1,3 (satu koma tiga) %) dan Pulau Maluku (2,9 (dua koma sembilan) %) Selain untuk pemanfaatan domestik, perkotaan, dan industri, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2015-2034, pada Tahun 2019 diperkirakan kebutuhan tenaga listrik di Indonesia mencapai 347 (tiga ratus

empat puluh tujuh) TWh dengan konsumsi mencapai 1.293 (seribu dua ratus sembilan puluh tiga) kWh per kapita. Sementara, hingga Tahun 2014, total kapasitas terpasang pembangkit nasional adalah sebesar 53.065 (lima puluh tiga ribu enam puluh lima) MW, diantaranya adalah sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air/PLTA (5.059 (lima ribu lima puluh sembilan) MW); Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/PLTM (140 (seratus empat puluh) MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 (tiga puluh) MW);

- Pengembangan waduk di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Beberapa waduk yang berpotensi dikembangkan PLTA yaitu: Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Jatigede (Kab. Sumedang, Jabar), Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jatim), Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Lolak (Kab. Bolmong, Sulut), Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim). Potensi sumber energi lainnya dalam bentuk kecil adalah pengembangan PLTMH yang sesuai untuk kawasan pelosok di Indonesia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang SDA juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Dukungan terhadap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), masih didasarkan pada kesesuaian lokus program, belum berdasarkan development plan pada masing-masing WPS;
- Target kinerja Direktorat Jenderal SDA naik hingga 3 (tiga) kali lipat dibandingkan Renstra sebelumnya, sementara alokasi penganggaran tahun 2015-2017 cenderung tetap dan hanya mencakup sekitar 50 (lima puluh) % dari kebutuhan;
- Perencanaan dan persiapan pelaksanaan, terutama menyangkut *readiness criteria* program: dokumen teknis (FS, Desain, LARAP, dll), dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dll), pengadaan tanah, dll. Dukungan terhadap Kedaulatan Pangan dan Energi hingga Tahun 2016 baru mencapai 53 (lima puluh tiga) % dari target yang ditetapkan. Peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi untuk mendukung pemenuhan produksi pangan dengan upaya peningkatan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi maupun penambahan jaringan irigasi air permukaan setiap tahun terus dilakukan. Dukungan terhadap Ketahanan Air, hingga Tahun 2016 baru sebesar 42,61 (empat puluh dua koma enam puluh satu) % dari target yang ditetapkan.
- Akibat pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2015) sehingga pengelolaan SDA kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, meskipun substansinya tetap mencakup tiga pilar pengelolaan SDA, yang meliputi:
 - Konservasi sumber daya air: pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya;

- Pendayagunaan sumber daya air: penyediaan dan pengelolaan air baku serta pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa air dan jaringan pengairan lainnya;
- Pengendalian daya rusak air: pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai;

Namun diperlukan segera UU pengganti beserta turunannya

- Adanya tambahan tugas untuk pengendalian lumpur Sidoarjo, pasca pembubaran BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo).

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pembangunan infrastruktur bidang SDA, antara lain sebagai berikut:

- Daya tampung air sangat dipengaruhi oleh masalah sedimentasi. Hal ini menjadi penyebab menurunnya kapasitas tampung air hampir di seluruh waduk, embung, maupun situ. Laju sedimentasi dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan DAS;
- Menurunnya kualitas air akibat kerusakan DAS;
- Menurunnya kondisi bangunan sumber daya air, baik karena umur bangunan ataupun karena bencana;
- Adanya tantangan kondisi alam yang harus diantisipasi (seperti debit fluktuatif, masalah kualitas dan kuantitas air);
- Pendanaan yang terbatas, sehingga perlu penetapan skala prioritas;
- Perlunya alternatif sumber pendanaan lainnya, seperti: pinjaman, hibah, atau sukuk, keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan masih perlu ditingkatkan;

B. PENYELENGGARAAN JALAN

Pembangunan infrastruktur bidang jalan dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Momentum percepatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang handal, mantap, nyaman dan aman karena mobilitas penduduk makin tinggi dan tekanan terhadap kompetisi efisiensi ekonomi juga makin membesa;
- Infrastruktur jalan mempunyai peran penting sebagai salah satu pendorong perekonomian karena merupakan prasarana yang menghubungkan produsen, pasar, dan konsumen;
- Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu syarat pertumbuhan investasi dan industri yang efektivitas dan efisiensi kegiatannya dipengaruhi oleh kondisi jalan. Sehingga, penyediaan jalan merupakan sebuah syarat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, pembangunan infrastruktur bidang Jalan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembangunan jalan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap pembangunan nasional. *Multiplier effect* dalam proses pembangunan jalan (melibatkan banyak sektor, mulai dari sektor yang berkaitan langsung terhadap pembangunan jalan seperti perencana, kontraktor, industri aspal

dan furnitur jalan, hingga sektor yang tidak berkaitan namun mendapatkan manfaat dari kegiatan penyediaan infrastruktur jalan, seperti industri makanan, akomodasi, pusat pelatihan, sebagai pemenuhan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut, berarti membuka banyak lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja lokal), serta *multiplier effect* setelah dibangun membuka lapangan kerja pada sektor jasa transportasi seperti jasa logistik maupun jasa angkutan penumpang. Sektor angkutan darat (khususnya angkutan jalan) menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan angkutan-angkutan lainnya;

- Dengan adanya jalan, diharapkan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan akan terbuka sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan karena Infrastruktur transportasi khususnya jalan merupakan salah satu magnet investasi. Pembangunan jalan akan menarik perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga mampu membuka lapangan kerja di bidang industri. Semakin ramainya kegiatan perindustrian dapat berpotensi mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Harus diakui terdapat beberapa proyek jalan yang belum dapat dilaksanakan setelah dilakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*), adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- Pembebasan tanah;
- Skema dan sumber pembiayaan lainnya;
- Belum intensnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan jaringan jalan.

C. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Berdasarkan proyeksi BPS, Bappenas dan UNFPA (United Population Fund) diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 271 Juta penduduk. Lebih dari separuh penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Perkotaan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi nasional dan pusat inovasi dan penerapan teknologi. Adanya konsentrasi penduduk di perkotaan berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Meskipun demikian, kebutuhan akan sarana dan prasarana permukiman bagi penduduk perkotaan begitu besar, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan infrastruktur. SDGs dan NUA: Pada tahun 2015, negara-negara dunia menyepakati Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru menggantikan MDGs. SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) Tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target, termasuk di dalamnya tujuan terkait air bersih dan sanitasi serta kota berkelanjutan. Di Indonesia, pengarusutamaan SDGs dalam pembangunan dituangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di samping itu, Kementerian PUPR juga berperan aktif dalam perumusan New Urban Agenda yang merupakan hasil dari Konferensi Habitat III. NUA erat kaitannya dengan TPB/SDGs terutama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan sehingga implementasinya perlu dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Indonesia

berkomitmen mengintegrasikan pencapaian SDGs dan NUA dalam kebijakan, rencana, dan program nasional yang dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur permukiman. SDGs dan NUA ini juga dapat menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal sehingga tercipta kemitraan yang baik. Kemitraan antar pemangku kepentingan: Badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat perlu ditingkatkan partisipasinya dalam pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur permukiman mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan dan kelembagaan yang dimiliki pemerintah. Badan Usaha dapat berkontribusi melalui skema KPBU atau *Business to Business* untuk kegiatan yang *cost-recovery* atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan *non-cost recovery*. Saat ini skema-skema tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga tahun 2017, Kementerian PUPR telah memfasilitasi pelaksanaan KPBU air minum yaitu SPAM Tangerang dan SPAM Umbulan. Diharapkan beberapa proyek KPBU seperti SPAM Bandar Lampung dan SPAM Jatisari dapat diselesaikan proses transaksinya pada tahun 2019. Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Permukiman: Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai arahan pengembangan wilayah dan basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR. Dengan adanya keterpaduan program diharapkan pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan daya ungkit yang lebih besar terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk infrastruktur permukiman, keterpaduan selain mengacu pada WPS juga mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) yang kemudian didetailkan aspek pembiayaannya melalui Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya.

Permasalahan: Desentralisasi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa hampir semua lingkup tugas pelaksanaan pembangunan di bidang permukiman merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat berperan dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan (TURBINWAS) serta tugas lain dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Standar Pelayanan Minimum. Namun, keterbatasan kapasitas yang dimiliki Pemda mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Hal ini tercermin dari rendahnya kontribusi Pemda dalam pendanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Padahal, urusan pekerjaan umum serta perumahan dan permukiman merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah. Pencemaran Lingkungan dan Perubahan Iklim: Kurangnya kesadaran masyarakat dengan paradigma *not in my back yard* (NIMBY) telah menyebabkan sampah dan air limbah yang belum diolah mengalir ke badan air sehingga terjadi pencemaran. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan fisik infrastruktur saja tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, tetapi juga diperlukan adanya perubahan sikap masyarakat yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Perubahan iklim merupakan suatu tantangan yang nyata terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca adalah TPA Open Dumping yang menghasilkan gas metana (CH₄). Untuk itu, UU Nomor 28/2008 tentang pengelolaan persampahan mengamankan perubahan TPA

menjadi sanitary landfill. Di samping itu bangunan gedung juga menghasilkan emisi GRK pada tahap konstruksi dan operasi. Oleh karena itu, Kementerian PUPR telah menerbitkan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan gedung berkelanjutan. Kemiskinan: Faktor kemiskinan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap pelayanan air minum dan perumahan. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di kawasan permukiman kumuh yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dan aksesibilitas infrastruktur permukiman yang tidak baik. Untuk itu, Kementerian PUPR memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada peningkatan layanan infrastruktur permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti Sanimas, Pamsimas dan Kotaku.

D. PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pembangunan infrastruktur bidang Perumahan menghadapi tantangan berat diantaranya karena laju pertumbuhan penduduk (Berdasarkan data BPS Tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia sebesar 261,89 juta penduduk) yang begitu tinggi sehingga kebutuhan akan penyediaan perumahan bagi penduduk menjadi begitu besar.

Untuk menjawab tantangan tersebut terdapat potensi yang besar dalam usaha penyediaan perumahan yaitu dengan meningkatkan Kemitraan dan Koordinasi antarpemangku kepentingan agar dapat saling bersinergi. Selain dengan pemerintah (Kementerian/ Lembaga lain) dibutuhkan pula kemitraan dan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara, Daerah, Swasta, Perbankan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui skema KPBU atau Business to Business untuk kegiatan yang *cost-recovery* atau *Corporate Social Responsibility* bagi kegiatan non-cost recovery). Selain KPBU juga perlu dikembangkan skema pendanaan lainnya sebagai potensi penyediaan perumahan seperti Dana Desa dan CSR.

Teknologi juga menjadi potensi dalam meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Beberapa inovasi seperti beton pra-cetak dan RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) juga dapat membantu suplai perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Inovasi – inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh lagi sehingga memberikan dampak signifikan berupa pengurangan biaya pembangunan perumahan.

Walaupun sudah banyak inovasi yang dihasilkan dalam konstruksi perumahan, namun belum banyak teknologi dan inovasi yang sudah diterapkan. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penyediaan perumahan. Namun selain itu terdapat faktor lainnya yang menghambat penyediaan perumahan salah satunya adalah faktor kemiskinan yang menyebabkan keterbatasan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya rumah tidak layak huni dan munculnya permukiman kumuh. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan demand perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, juga turut andil dalam peningkatan permukiman kumuh.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga memiliki keterbatasan kapasitas

Sumber Daya Manusia serta keterbatasan pembiayaan pembangunan sehingga peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan bagi masyarakatnya menjadi tidak optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Ditjen Penyediaan Perumahan membentuk Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) di setiap provinsi. Pokja PKP berfungsi untuk mensinergikan program bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu terdapat pula permasalahan yaitu tidak maksimalnya kewenangan daerah untuk melaksanakan pembangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keterbatasan tidak hanya dialami oleh Pemerintah Daerah namun juga pihak pengembang. Ruang gerak pengembang (developer) menjadi terbatas karena kurangnya kebijakan yang bersifat insentif dalam proses pembangunan perumahan.

Ketersediaan lahan juga turut menghambat penyelenggaraan penyediaan perumahan. Luas dan jumlah lahan yang terbatas menyebabkan terbatasnya pembangunan perumahan di beberapa daerah. Di wilayah perkotaan, selain keterbatasan lahan, harga lahan menjadi faktor penentu penyediaan perumahan. Harga lahan di perkotaan tidak terkontrol dan cenderung melonjak tinggi sehingga diperlukan usaha dan strategi yang lebih inovatif untuk dapat memanfaatkan lahan yang di perkotaan.

E. PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Perubahan Permen PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menjadi Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki beberapa potensi antara lain sebagai berikut:

- Sumber-Sumber Pembiayaan murah dan jangka panjang yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui kerangka kelembagaan yang terintegrasi;
- Operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk mendukung peningkatan akses MBR terhadap sistem pembiayaan perumahan;
- Adanya pengembangan skema dan pola subsidi perumahan, salah satunya ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyaluran bantuan subsidi yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menjadi dasar dalam pelaksanaan kerjasama Kementerian PUPR dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR.

- Potensi pembiayaan infrastruktur bidang perumahan, permukiman, sumber daya air serta jalan non tol masih cukup besar.

Selain itu, Pembiayaan Perumahan juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Terbatasnya akses MBR terhadap sumber pembiayaan perumahan;
- Daya beli MBR tidak sesuai dengan kenaikan harga rumah bersubsidi, sehingga memerlukan dukungan pemerintah;
- Keterbatasan stok dan supply rumah bersubsidi tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan MBR, sehingga masih banyak MBR yang tidak mempunyai rumah;
- Belum tersedianya danaan murah jangka panjang untuk mendukung sistem pembiayaan perumahan murah dan berkelanjutan;
- Keterbatasan kewenangan dan kapasitas Pemda mengakibatkan kurangnya kontribusi Pemda dalam pembiayaan perumahan.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, antara lain sebagai berikut:

- Kementerian PUPR masih minim pengalaman dalam melakukan kerjasama pembiayaan non APBN. Saat ini baru sektor jalan dan air minum yang sudah melaksanakan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- Sebagian besar sektor PUPR merupakan *Public Goods* yang kurang menarik bagi investasi;
- Sebagian besar proyek KPBU yang ditawarkan sebagian besar belum siap;
- Sebagian besar mitra dan pemangku kepentingan masih belum mengenal skema KPBU;
- Keterbatasan pendanaan dan pembiayaan dalam skema KPBU;
- Pelaksana Proyek KPBU didominasi oleh BUMN;
- Komitmen yang tidak memadai dari PJKP (terutama untuk pemerintah daerah).

F. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan serta mengombinasikan faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Sementara, faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain;
- Konsep pengembangan wilayah dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Pengembangan wilayah memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik serta menciptakan pusat-pusat produksi. Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal;

- Pengembangan wilayah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Potensi dan keunggulan kawasan dapat memberikan nilai tambah dan kapasitas produksi unggulan di kawasan;
- Kepadatan penduduk di Pulau Jawa-Bali merupakan yang tertinggi. Proporsi penduduk miskin yang tinggi terdapat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Distribusi ekonomi nasional didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali;
- Pemberdayaan masyarakat, yang berpotensi mendorong akselerasi investasi industri melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga, dapat lebih memperoleh dukungan. Selama ini, masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin kesulitan memasarkan produknya. Kuantitas produk mereka pun relatif rendah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan Infrastruktur Wilayah, antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah masih belum terpadu dan sinergis;
- Keterpaduan antarprogram/antarsektor yang berbeda sumber pendanaan masih belum optimal;
- Minimnya akses serta anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan pada kawasan yang baru bertumbuh;
- Rencana Tata Ruang belum dimanfaatkan sebagai basis pembangunan wilayah. Belum adanya penetapan kawasan yang akan dikembangkan dan dukungan fungsi yang dibutuhkan;
- Belum terbangunnya sistem pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan baik industri maupun pariwisata;
- Belum terpadunya pengelolaan dan pembangunan kawasan;
- Kurangnya dukungan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemerintahan terkait kompleksitas kawasan;
- Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan yang tinggi.

G. PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembinaan Konstruksi dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi “baru” di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan sebagai transformasi dari organisasi Badan Pembinaan Konstruksi. Cakupan pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal secara normatif jauh lebih luas dari pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh

sebuah Badan. Hal ini memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas yang dapat meliputi seluruh aspek pembinaan konstruksi dan dengan jangkauan yang juga lebih luas. Namun demikian keberadaan organisasi “baru” tersebut menjadi sebuah tantangan, karena membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (*business process*) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Kondisi tersebut harus diikuti pula dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih kompeten dan memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi;

- Pembinaan konstruksi secara nasional sudah memiliki perangkat kelembagaan yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah. Kelembagaan tersebut tidak hanya didukung oleh keberadaan perangkat daerah yang didanai oleh APBD di masing-masing daerah, akan tetapi juga didukung oleh organisasi mitra pembinaan konstruksi, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan berbagai asosiasi jasa konstruksi;
- Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memberikan banyak kemudahan bagi berlangsungnya aktivitas pembinaan konstruksi, baik dalam penyebarluasan informasi, pengumpulan, dan pengolahan data yang cepat dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan, kemudahan akses informasi bagi masyarakat, maupun pengembangan inovasi teknologi dan pembinaan di sektor konstruksi;
- Pada tahun 2017, bidang jasa konstruksi telah memiliki payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan sektor konstruksi dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penerbitan UU tersebut juga merupakan salah satu keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika penyelenggaraan konstruksi. Dalam UU tersebut, tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembagian peran/kewenangan/ tanggung jawab stakeholders, mekanisme pembinaan dan pengawasan serta seluruh aspek yang terkait dengan jasa konstruksi telah memiliki kepastian hukum, sehingga semakin mudah dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur. Penerbitan UU yang baru tersebut juga membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun petunjuk pelaksanaan (NSPK) dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh karenanya ke depan dibutuhkan upaya-upaya menyusun atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan UU yang baru tersebut.

Selain itu, Pembinaan Konstruksi juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Pembagian tanggung jawab dan kewenangan pada setiap tingkatan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi sudah jelas sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, namun demikian implementasi atas pembagian tanggung jawab dan wewenang tersebut memerlukan upaya koordinasi dan sinergi yang lebih baik agar tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tercapai;

- Ketersediaan dan pembaharuan (*updating*) data dan informasi serta penyajian dan kemudahan akses terhadap perkembangan sektor konstruksi belum memadai, baik akses bagi masyarakat luas dalam rangka pelayanan informasi publik dan transparansi informasi maupun sebagai bagian dari upaya pemantauan terhadap efektivitas penerapan kebijakan/regulasi sektor konstruksi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pembinaan Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

- Mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi masih belum memadai, sehingga penyelenggara jasa konstruksi masih kurang memahami urutan proses penyelenggaraan yang benar; proses pengadaan (*procurement*) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor; terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan;
- Masih terbatasnya daya saing sektor konstruksi bidang PUPR baik produktivitas dan efisiensi maupun kreativitas dan inovasi. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur, baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti perbandingan keuntungan bersih (*net profit*) dan nilai penjualan (*annual sales*) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktivitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.

H. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Komitmen terhadap pemberantasan KKN, peningkatan kualitas infrastruktur dan perlindungan pada pelaksana yang telah bekerja dengan baik dan benar;
- Perlunya peningkatan kualitas hasil pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada masing-masing unit kerja perlu ditingkatkan;
- Peningkatan sistem Pengendalian Internal di masing-masing unit kerja.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas, antara lain sebagai berikut:

- Besarnya target pembangunan infrastruktur Bidang PUPR berbanding lurus dengan peningkatan pengawasan internal sehingga berdampak pada kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan;

- Sehubungan dengan butir pertama di atas diperlukan penyesuaian dan perubahan pada nomenklatur serta target Indikator Kinerja Program dan kegiatan dalam Renstra Itjen PUPR;
- Masih perlunya sinkronisasi antara Renstra dengan ADIK/KRISNA dan RKA-K/L, dimana beberapa nomenklatur dan target pada indikator kinerja program dan kegiatan dalam ADIK/KRISNA dan RKA-K/L Itjen PUPR TA. 2016-2018 berbeda dengan Renstra Itjen PUPR 2015-2019. Hal ini mengakomodir penyederhanaan nomenklatur dalam anggaran berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor SE.04/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Arahan Presiden tentang Penyederhanaan Nomenklatur dalam Anggaran.

I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Saat ini dan ke depan, kegiatan Penelitian dan Pengembangan memiliki peluang besar antara lain karena:

- Kebutuhan teknologi siap pakai/ aplikatif dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di Indonesia semakin meningkat;
- Badan Litbang PUPR merupakan institusi pemerintah yang memiliki peran strategis sebagai pendorong kemajuan penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui dukungan-dukungan teknologinya. Sehingga, diharapkan akan mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan baik terhadap ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi, konektivitas nasional, layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah, pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, serta penanganan kawasan rawan bencana guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- Lembaga/ Badan Litbang berupaya menjadi lembaga penelitian dan pengembangan yang kompeten didukung oleh 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) SDM yang terdiri dari 144 (seratus empat puluh empat) pejabat struktural (tidak ada rangkap jabatan), 174 (seratus tujuh puluh empat) jabatan fungsional peneliti, 55 (lima puluh lima) jabatan fungsional perekayasa, 105 (seratus lima) jabatan fungsional lainnya, 521 (lima ratus dua puluh satu) jabatan fungsional umum.

Selain daripada itu, kegiatan penelitian dan pengembangan juga menghadapi tantangan - tantangan antara lain:

- *Business as usual* masih menjadi karakter yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan saat ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk melahirkan inovasi - inovasi teknologi yang nyata dan instan. Hal ini dimaksudkan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan solusi-solusi riil atas persoalan yang terjadi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan antara lain:

- Masih rendahnya penggunaan/ pemanfaatan/ penerapan teknologi lokal/ domestik oleh *stakeholder*;
- Keterbatasan interaksi antara pengembang dan pengguna teknologi produk litbang;
- Sindrom “menara gading” masih terjadi;
- Rendahnya kapasitas adopsi/ difusi/ penyerapan teknologi oleh industri;
- Belum optimalnya fungsi lembaga/ institusi intermediasi;
- Pembangunan IPTEK belum berbasis sumber daya lokal/ domestik;
- Belum efektifnya regulasi dan kebijakan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa; anggaran, dan fasilitas riset).

J. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan Pengembangan SDM dapat memanfaatkan potensi, antara lain sebagai berikut:

- Sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan juga sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya.

Selain itu, Pengembangan SDM juga menghadapi tantangan berat, antara lain sebagai berikut:

- Hingga saat ini perhatian terhadap sumber daya manusia bidang PUPR masih sangat kecil apabila dilihat dari segi investasi penganggaran dan kelembagaannya;
- Investasi pengembangan SDM dalam 5 (lima) tahun ke sebelumnya rata-rata hanya 2 (dua) permil dari anggaran pembangunan infrastruktur.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam Pengembangan SDM, antara lain sebagai berikut:

- SDM (pelaku pembangunan infrastruktur) yang kompeten belum mendukung pencapaian visi pembangunan nasional tersebut;
- Belum semua Aparatur Kementerian PUPR terpetakan potensi dan kompetensinya, sehingga penempatan aparatur belum sesuai dengan kondisi ideal “*the right man on the right place*”, yang menyebabkan kinerja SDM belum mencapai tahap maksimal;
- Belum maksimalnya perubahan pola pikir (*mindset*) aparatur yang sebelumnya “berorientasi proses menjadi berorientasi outcome”;
- Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian dan keterampilan dalam suatu jabatan tertentu;
- Model pengembangan SDM belum mengarah pada standar kompetensi tertentu. Pengembangan kompetensi yang selama ini dilakukan, walaupun sudah mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan dan perilaku, belum secara spesifik mengarah untuk suatu kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, Oleh karena itu implementasi sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi merupakan tantangan yang perlu segera diselesaikan dalam mewujudkan SDM aparatur Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berintegritas, professional dan visioner.

K. DUKUNGAN MANAJEMEN, SARANA DAN PRASARANA

1) Potensi

Kementerian PUPR berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan baik antara lain melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel; perencanaan dan pelaksanaan program yang transparan; penguatan akuntabilitas kinerja; pemberian advokasi hukum; penciptaan kelembagaan yang efektif, efisien, dan sinergis; penyediaan data dan teknologi informasi; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; dan peningkatan pelayanan publik.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR dirasa telah menunjukkan prestasi yang baik diantaranya: 1) mendapatkan opini WTP yang memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan belanja negara di Kementerian PUPR dinilai baik dan *on the right track*, 2) mendapatkan kategori BB untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang memperlihatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik; dan 3) mendapatkan kategori BB untuk penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang memperlihatkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Capaian ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras, akuntabel, dan profesional di tahun-tahun berikutnya, terutama dalam mengelola keuangan negara yang diamanahkan untuk pembangunan infrastruktur PUPR. Harapannya, di tahun 2019 opini WTP dapat terus dipertahankan serta nilai A untuk pelaksanaan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan SAKIP sehingga tunjangan kinerja pegawai PUPR dapat mencapai 100 (seratus) % yang tentunya diimbangi dengan peningkatan kerja nyata pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

2) Permasalahan:

- Masih belum terdapat SOP yang mengatur tentang seluruh metode dan sistem kerja yang baku dalam penyelesaian suatu kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- Optimalisasi pemanfaatan aset-aset terindikasi *idle* dan/atau BMN *idle*. BMN berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan sehingga berpotensi diokupasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, sedangkan di sisi lain terdapat beberapa Unit Organisasi yang masih memerlukan tanah atau bangunan untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- Masih banyaknya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, mendorong untuk melakukan peningkatan kualitas dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu dilaksanakan

peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar atau izin belajar sesuai jurusan yang dibutuhkan maupun diklat-diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

- Dengan ketersediaan dana yang terbatas, pelaksanaan komunikasi publik harus menyiasati dengan memilih kegiatan yang sesuai dengan strategi komunikasinya sehingga dapat tepat sasaran, dalam pengertian kesesuaian antara target *audience*, sasaran komunikasi, serta kegiatan komunikasi.
- Produk hukum telah banyak yang dihasilkan namun masih banyak pula yang diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur PUPR.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 – 2019. Oleh karena itu visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah:

**“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL
DALAM Mendukung INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Infrastruktur PUPR yang **handal** diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur PUPR yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Infrastruktur PUPR yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2.2 MISI

Misi Kementerian PUPR yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PUPR sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat

RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
- e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.3 TUJUAN

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian PUPR secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur PUPR dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

- kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
 5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Goals Kementerian PUPR (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh *stakeholders* yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu:

“Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat”.

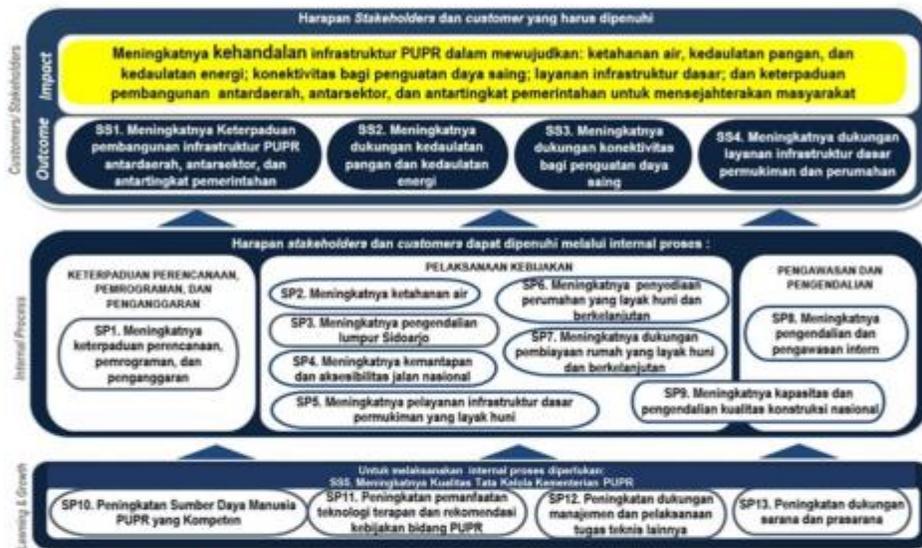
Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian PUPR sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk arah untuk mencapai visi.

Di dalam Peta Strategi sebelumnya pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019, seluruh sasaran yang strategis menjadi Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Sedangkan hasil Revisi Renstra kali ini sasaran-sasaran yang strategis tersebut distrukturkan menjadi 5 Sasaran Strategis Kementerian PUPR, selebihnya menjadi Sasaran Program pada Program-program di unit-unit organisasi Eselon I di bawah Kementerian PUPR.

Peta strategi hasil Revisi Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 menggambarkan semua Sasaran Kementerian PUPR yang strategis, baik Sasaran Strategis level Kementerian yang selanjutnya disebut **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** maupun sasaran strategis level Unit Organisasi Eselon I yang selanjutnya di sebut **Sasaran Program**. Ada 4 perspektif di dalam peta strategi Kementerian PUPR, perspektif *stakeholder* merupakan **Goals** besar yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR memenuhi harapan *stakeholder*, kemudian perspektif *Customers* merupakan **Sasaran Strategis Kementerian PUPR** yang akan dicapai memenuhi ekspektasi *Customers*, selanjutnya perspektif *Internal Process* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada

Kementerian PUPR guna terpenuhinya ekspektasi *Customers*. Sedangkan perspektif *Learning and Growth* merupakan **Sasaran-Sasaran Program Unit Organisasi Eselon I** yang secara horisontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung manajemen pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yang seluruhnya dibungkus bersama dengan sasaran program pengendalian dan pengawasan di dalam satu **Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR”**.

Adapun peta strategi Kementerian PUPR sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.1:



Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai ilustrasi, agar kebutuhan *customers* dapat terpenuhi (dapat di *deliver*) untuk memenuhi harapan *stakeholders*, maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya pengendalian Lumpur Sidoarjo.
4. Meningkatnya kemantapan dan aksesibilitas Jalan Nasional.
5. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni.
6. Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan.
7. Meningkatnya dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan.
8. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
9. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern.

Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan *stakeholders* dan ekspektasi *customers* tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses *Learning and Growth*, yang meliputi :

1. Peningkatan sumber daya manusia PUPR yang kompeten.

2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR.
3. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
4. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
"Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan".
2. **Tujuan 2 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
"Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi;"
3. **Tujuan 3 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: "Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing"
4. **Tujuan 4 :** Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dicapai melalui sasaran strategis: "Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan".

- 5. **Tujuan 5 :** Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
"Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR"

1.6. IKU (Indikator Kinerja Utama)

PP No. 8/2006 tentang Peran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan kinerja sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja terukur dengan menggunakan indikator, baik indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan IKU.

Pengertian Indikator Kinerja Utama dalam Perpres No. 29/2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU dibutuhkan untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja. Setiap K/L diminta untuk menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tingkat K/L dengan menggunakan IKU K/L. IKU sebagaimana indikator kinerja lainnya disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip: SMART (spesific, measurable, agreeable, reliastic, time-bound). Sebagai tindak lanjut dari Peraturan tersebut, Kementerian PUPR menerbitkan Permen No. 09/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Untuk kepentingan evaluasi pelaksanaan AKIP, Kementerian PANRB menerbitkan PermenPANRB No. 25/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan IKU diperlukan sebagai salah satu bagian dalam lembar kriteria evaluasi LAKIP. Pemenuhan Renstra memiliki bobot 2,5 (dua koma lima) % dari total 12,5 (dua belas koma lima) % bobot dokumen Renstra sebagai bagian dari perencanaan kinerja (35%). Renstra yang telah menyajikan IKU memiliki penilaian berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 2.1 Lembar Kriteria Evaluasi AKIP Pusat

PERENCANAAN KINERJA 35%		
Dokumen Renstra		12.5%
Pemenuhan Renstra		2.5%
	Dokumen Renstra telah ada	
	Dokumen Renstra Es. 1 telah ada	
	Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	
	Renstra telah menyajikan IKU	

Sumber: PermenPANRB No. 25/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun kriteria lebih lanjut sesuai Permen tersebut yaitu:

- A, Bila lebih dari 80% IKU yang telah diformalkan dimanfaatkan untuk mengukur tujuan/sasaran dalam Renstra
- B, Bila $60\% < \text{pemanfaatan IKU} \leq 80\%$
- C, Bila $40\% < \text{pemanfaatan IKU} \leq 60\%$
- D, Bila $20\% < \text{berorientasi hasil} \leq 40\%$
- E, Bila pemanfaatan IKU dalam Renstra $\leq 20\%$

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Kementerian PUPR menyusun IKU dengan mengacu pada Sasaran Strategis yang terdiri atas IKU Kementerian PUPR dan IKU Unit Organisasi Eselon 1 (lampiran).

BAB III

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang saat ini telah sampai pada RPJMN tahap ketiga dan diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Tantangan utama pembangunan 2015-2019 diantaranya adalah perekonomian yang harus dapat tumbuh rata-rata 6 (enam)-8 (delapan) % pertahun hingga tahun 2019, dimana realisasi hingga paruh waktu RPJMN tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5 (lima)-5,2 (lima koma dua) % per tahun; selain itu juga ditantang untuk percepatan pemerataan pembangunan dan keadilan serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, dua sisi yang saling bertentangan antara pemerataan dan pertumbuhan dimana wilayah yang pertumbuhannya meningkat pasti akan menyebabkan wilayah lain berkurang pertumbuhannya. Tantangan lainnya adalah menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Oleh karena itu, sasaran utama pembangunan Indonesia dalam rancangan RPJMN 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi yang didukung kemampuan SDM berkualitas, infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Selain itu, kesejahteraan rakyat yang ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan

hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geopolitik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional.



Gambar 3.1 Tahapan Pembangunan Nasional

Pertama. Norma Pembangunan,

Sesuai dengan Norma Pembangunan Nasional yang meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang semakin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem

Kedua. Dimensi Pembangunan,

Selain norma pokok pembangunan tersebut di atas, Strategi Pembangunan Nasional dirumuskan pula dalam Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwins* program lainnya sebagai berikut:

1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan.

Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan

untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

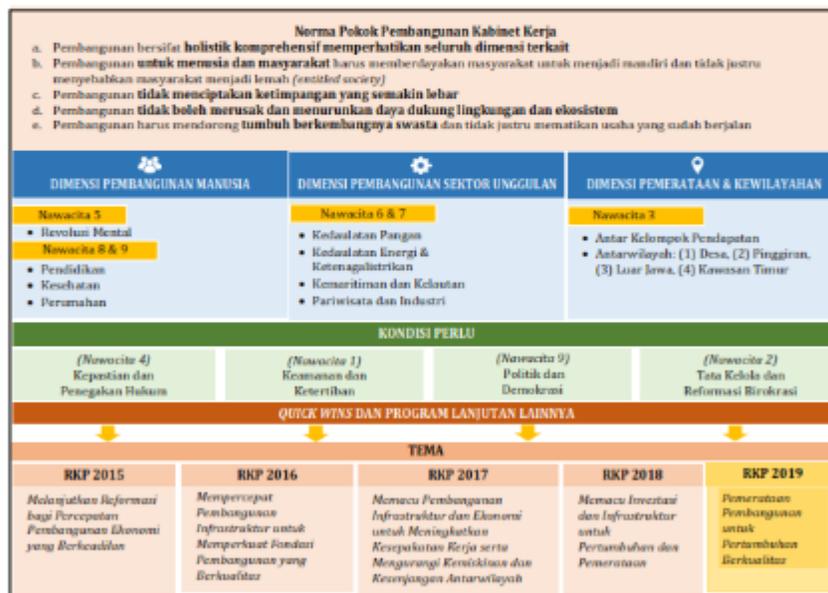
Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antarkelompok pendapatan, maupun antarwilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

4) Kondisi perlu sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil.

Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

5) *Quickwins*.

Quickwins dilakukan agar *output* pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.



Gambar 3.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaannya sejak tahun 2016 dan kemudian diterapkannya pada RKP tahun 2019 Pendekatan Pembangunan Nasional adalah (1) Pendekatan holistik-tematik, (2) Pendekatan integrative, (3) Pendekatan spasial.

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk

mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakteristik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui

strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.

4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan. Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.1.2 AGENDA PRIORITAS NASIONAL

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1 Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
- 2 Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
- 3 Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
- 4 Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antarkelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
- 5 Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antarwilayah.
- 6 Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

Dalam mengupayakan terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan dan memberlakukan kebijakan, diantaranya diberlakukannya kebijakan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta lampiran list proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG PUPR

Arah Kebijakan Kementerian PUPR tahun 2015-2019 secara umum harus mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis seiring dengan upaya-upaya mengejar ketertinggalan pencapaian target prioritas nasional serta mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM KEMENTERIAN PUPR

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwin*, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu meliputi:

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru maupun yang sudah berjalan.

Kedua. Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung, diarahkan dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

Ketiga. Setiap langkah penyusunan rencana, program dan kegiatan prioritas mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan

etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.

Keempat. Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta pencapaian kinerja yang terukur.

Kelima. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di sinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun 2015-2019.

Keenam. Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019.

Hingga paruh waktu periode RPJMN 2015-2019, pencapaian semua dimensi pembangunan secara keseluruhan sampai dengan juni tahun 2017 adalah 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) % tercapai/ *on track/ on trend*, sisanya 40,41 (empat puluh koma empat puluh satu) % masih memerlukan kerja keras dan 13,48 (tiga belas koma empat puluh delapan) % sulit untuk dari *over all total*. Untuk dapat merealisasikannya hingga 100% tercapai/ *on track/ on trend* pada tahun 2019 merupakan tantangan yang besar. Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan sisa target RPJMN tahun 2015-2019 hingga akhir periode tahun 2019, diantaranya dengan membentuk *task force* untuk mengawal sasaran pokok RPJMN yang sulit tercapai serta percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional sesuai amanat Perpres Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tantangan besar lainnya adalah alternatif skema dan sumber pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah mendorong mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, terutama Kerjasama Pemerintah Swasta agar dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta badan usaha melalui peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT.SMI dan anak perusahaannya PT.IIF dan PT.PII serta Swasta yang masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur serta mekanisme pemberian insentif bagi PJKP dalam melaksanakan kerjasama.

A. ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

Pertama. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan,

peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,

Kedua. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemandirian dan konektivitas jalan nasional untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama, serta peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;

Ketiga. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Keempat. Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kelima. Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Keenam. Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan

pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEMENTERIAN PUPR

Tujuan dari pembangunan wilayah adalah untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi/keunggulan dan daya dukung pengembangan wilayah.

Potensi/keunggulan wilayah terdiri dari potensi/keunggulan komperatif dan potensi/keunggulan kompetitif. Sedangkan pengembangan wilayah dapat dilihat dari adanya produktivitas, daya saing dan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi/keunggulan wilayah dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut.

- **Pertama.** Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas;
- **Kedua.** Pengembangan tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil;
- **Ketiga.** Pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan;
- **Keempat.** Pembangunan infrastruktur strategis: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya; serta
- **Kelima.** Optimalisasi pariwisata daerah: destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.

Dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah, terdapat enam hal yang harus diperhatikan, yaitu: peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan peningkatan kualitas SDM/tenaga daerah, perbaikan kualitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat termasuk UMKM/Koperasi, serta penguatan promosi daerah dan kerjasama antardaerah.

Peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur baik

kewenangan Pusat maupun Pemerintah Daerah, memfasilitasi percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis, serta memberikan kemudahan bagi investor swasta dan BUMN yang tertarik melakukan investasi di bidang infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR dalam paruh waktu Renstra Kementerian PUPR hingga akhir 2018, menghadapi banyak permasalahan dan tantangan sehingga ke depan disisa waktu hingga periode perencanaan tahun 2019 perlu diarahkan untuk tidak hanya dititikberatkan pada dukungan pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*) saja, namun perlu juga memperhatikan pemerataan serta lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur bidang PUPR sebagai infrastruktur dasar utama disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada ahirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Arah Kebijakan Kementerian PUPR dalam pembangunan wilayah tahun 2015-2019 untuk mewujudkan prioritas nasional dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PUPR adalah:

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang terpadu, bersinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

Kedua. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Ketiga. Pengelolaan pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR menggunakan pendekatan WPS, antar WPS pada Pulau/Kepulauan. Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya

wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang di dalamnya melingkupi kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim serta berdasarkan pada tema atau potensi masing-masing wilayah dan pulau/kepulauan, sebagai berikut:

A. Pulau Sumatera.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan). Pulau Sumatera terdapat 6 (enam) WPS yang terdiri dari 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Sumatera sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland Sabang - Banda Aceh -Langsa.
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan - Tebing Tinggi - Dumai - Pekanbaru
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam - Tanjung Pinang
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga - Padang - Bengkulu
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi - Palembang - Pangkal Pinang -Tanjung Pandan
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak - Bakauheni - Bandar Lampung - Palembang -Tanjung Api-api (MBBPT)

B. Pulau Jawa.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Pulau Jawa terdapat 8 (delapan) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan sedang Berkembang, 4 (empat) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Jawa sebagai berikut:

- a. WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Sedang Berkembang Jakarta - Bogor -Ciawi - Sukabumi
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta - Bandung - Cirebon - Semarang
- c. WPS Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta - Solo - Semarang

- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang
- g. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang – Surabaya – Bangkalan
- h. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi

C. Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri mangan, dan tembaga. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung – Mataram – Mandalika
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sumbawa Besar – Dompu – Bima
- d. WPS Pertumbuhan Baru Waingapu – Labuan Bajo – Ende – Maumere
- e. WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan Kupang – Atambua

D. Pulau Kalimantan.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa. Pulau Kalimantan terdapat 4 (empat) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, serta 1 (satu) WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan. WPS di Pulau Kalimantan sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas
- b. WPS Pertumbuhan Baru Temajuk – Sebatik
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

E. Pulau Sulawesi.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Sulawesi sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo – Kotamobagu
- c. WPS Pertumbuhan Baru Palu –Banggai
- d. WPS Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-Pare – Mamuju

F. Kepulauan Maluku.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, terdiri dari:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi

G. Pulau Papua.

Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat. Pulau Papua terdapat 4 (empat) WPS Pertumbuhan Baru, terdiri dari:

- a. WPS Pertumbuhan Baru Sorong – Manokwari
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Biak – Manokwari – Bintuni
- c. WPS Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena
- d. WPS Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antarkawasan maupun antar WPS. Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dapat digambarkan pada gambar 3.3



Gambar 3.3 Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

Pertama. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan,

daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;

Kedua. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:

1. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
2. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan;
3. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan.

Ketiga. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali;

Keempat. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Kelima. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.

Keenam. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 (tiga puluh lima) WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

Ketujuh. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian

ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

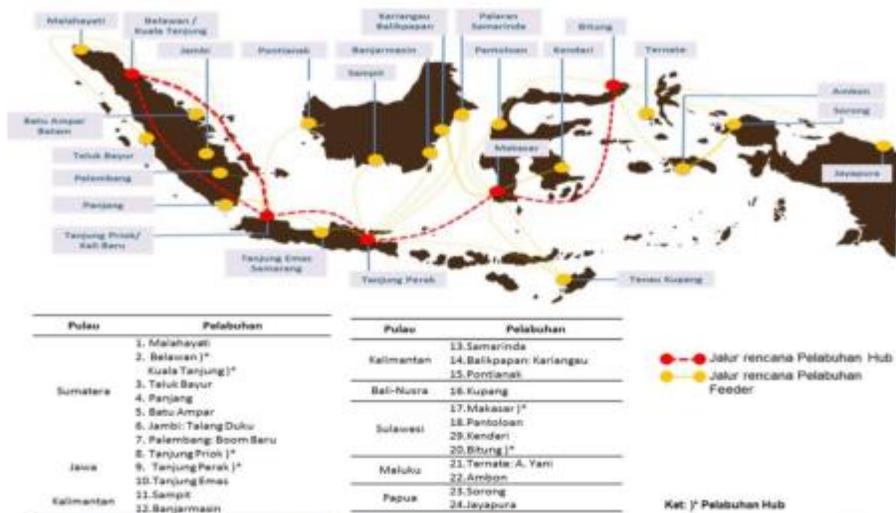
Pertama, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau lainnya.

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan *hub* dan pelabuhan *feeder*) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Baru); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Ilustrasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5. Dalam hal ini, setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok WPS, yaitu: Kelompok WPS Pusat pertumbuhan terpadu; Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan Kelompok WPS Pertumbuhan baru. Ke 35 WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan kepulauan.



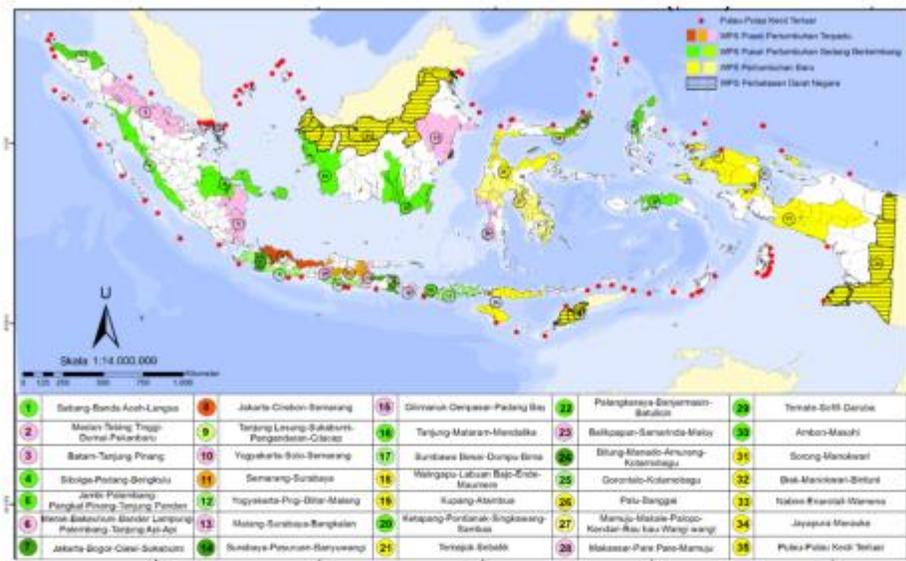
Gambar 3.4 Jalur Rencana Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder (Sumber: RPJMN 2015-2019)

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait diantaranya: pengurangan *gap* pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Informasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS pada Lampiran.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

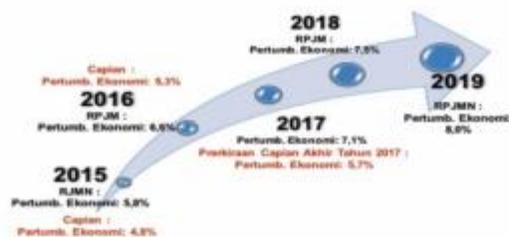
Pada awal periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dijelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional. Dimana kesenjangan antarwilayah masih sangat tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang menyebabkan arah kebijakan pembangunan nasional kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6, sebaran pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDB masing-masing wilayah pulau / kepulauan yang kesenjanganannya sangat signifikan.



Gambar 3.5 Wilayah Pengembangan Strategis

Hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN periode tahun 2015-2019 capaian sampai dengan tahun 2018 mencerminkan masih cukup tingginya kesenjangan wilayah yang selalu menjadi problematika klasik dari pembangunan Indonesia. Hal yang sangat mendasar dan terlihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, rata-rata pendapatan perkapita yang masih relatif rendah, kurangnya ketersediaan fasilitas infrastruktur dasar di wilayah-wilayah di Timur Indonesia, kurang memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, kurang optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalaman; serta kurang meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.

Trend pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga kuartal satu menunjukkan bahwa target pertumbuhan hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 sebesar 8 (delapan) % memerlukan kerja yang sangat keras serta sangat sulit tercapai.



Gambar 3.6 Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019 RPJM dan Capaiannya

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,17 (lima koma tujuh belas) %,

lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 5,07 (lima koma nol tujuh) %, bahkan yang tertinggi sejak tahun 2014 (BPS). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,48 (lima puluh delapan koma empat puluh delapan) %, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 (dua puluh satu koma lima puluh delapan) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,20% (delapan koma dua puluh) (data BPS).



Gambar 3.7 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Pada Pulau-Pulau/ Kepulauan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut diatas berdampak terhadap dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR, sementara disisi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi karget sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan *gap* yang sangat tinggi Kementerian PUPR perlu melakukan efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi pembangunan bidang PUPR (optimalisasi internal) serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Dengan kata lain diperlukan skema dan sumber pendanaan alternatif lainnya untuk dapat merealisasikan target sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung sasaran-sasaran pokok prioritas nasional pada tiga dimensi pembangunan, yang meliputi:

Pertama, DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA, yaitu Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang meliputi Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian, Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung, Peningkatan Ketersediaan Air Baku, Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi serta Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi.

Kedua DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN, yaitu (1). Pembangunan Kedaulatan Pangan, yang meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan waduk dan pembangunan embung serta pencetakan sawah baru, (2). Pembangunan Kedaulatan Energi yang meliputi PLT Matahari, Mikrohidro dan Tenaga Angin, (3). Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan,

yang meliputi peningkatan taraf hidup nelayan, pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (4). Pembangunan Pariwisata yang meliputi pembangunan sarana prasarana transportasi dan pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan, (5). Pembangunan Industri/KEK, yang meliputi Ketersediaan Energi dan Infrastruktur serta Konektivitas/aksesibilitas.

Ketiga, DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN, yaitu (1). Pemerataan Antarkelompok Pendapatan yang meliputi penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya, perkuatan basis perekonomian perdesaan, perluasan pelayanan dasar, serta pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bansos), (2). Pembangunan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, yang meliputi (a). Pembangunan Perbatasan Negara, antara lain membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM, dan ekonomi perbatasan, pembangunan 7 PLBN terpadu, pengembangan 10 PKSN dan Perdagangan Lintas Batas Negara, (b). Pembangunan Daerah tertinggal, antara lain peningkatan aksesibilitas/konektivitas dan pemenuhan Pelayanan Dasar Publik, (3) Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi (a). Pembangunan Perdesaan, yang antara lain pemenuhan standar pelayanan minimum desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa dan kota serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (b). Pembangunan Perkotaan, yang antara lain mewujudkan sistem perkotaan, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman dan layak huni serta tertata baik, mewujudkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana, mengembangkan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, serta meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota, (4). Pengembangan Konektivitas Nasional, yang antara lain pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah dan pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Massal Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Umum Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sisa target prioritas pembangunan nasional dari seluruh dimensi pembangunan yang mengacu kepada RPJMN tahun 2015 - 2019 secara terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, serta peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan proyek prioritas nasional, dilaksanakan dengan strategi:

1. **Mengawal target sasaran yang telah ontrack/ telah tercapai**, yang meliputi penyiapan *readiness criteria*, pemanfaatan alternatif sumber pendanaan selain APBN Kementerian PUPR dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Usaha baik BUMN maupun swasta serta masyarakat.
2. **Menyelesaikan target sasaran yang diperkirakan dapat tercapai namun dengan kerja sangat keras**, yang meliputi fokus pada kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PUPR serta berkoordinasi dan membina Pemerintah Daerah, terutama untuk target-target yang membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

3. **Memprioritaskan target sasaran yang diperkirakan tidak akan tercapai**, yang meliputi *re-focusing* terhadap lokasi, diutamakan yang *urgents* diantara yang *importants* pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan dan sudah siap *readiness criteria*-nya serta penuntasan pekerjaan yang sedang berjalan.

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS

Tujuan Pertama Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Sesuai dengan arah pengembangan wilayah pada RPJMN tahun 2015-2019 yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, peningkatan keterpaduan pembangunan, maka arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah dan berkelanjutan didukung dengan industri konstruksi yang berkualitas, difokuskan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan.

Adapun arah kebijakan dan strategi pencapaian sasarannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan, meliputi:

A.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG PUPR YANG TERPADU

Arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah antardaerah, antarsektor dan antarpemerintahan difokuskan kepada keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional. Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyediaan dan penerapan NSPK keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan baik kawasan strategis non perkotaan maupun kawasan strategis perkotaan;
2. Memastikan penyediaan dan penerapan Rencana Induk per

Pulau/Kepulauan, Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan/ WPS dan Antar WPS serta Rencana *Asset Management* yang mendukung pembangunan; kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan;

3. Memastikan pelaksanaan fasilitasi percepatan pengadaan tanah dan percontohan/ inkubasi pengembangan kawasan;
4. Memastikan dukungan pada semua dimensi pembangunan nasional yang difokuskan pada: kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2018, serta perkiraan capaian hingga tahun 2019, Kementerian PUPR melalui BPIW telah melaksanakan:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR
 - a. Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR antarsektor yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, 2017 sebanyak 7 (tujuh) dokumen, 2018 sebanyak 6 (enam) dokumen.
 - b. Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen, tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) dokumen dan 2018 sebanyak 12 (dua belas) dokumen.
2. Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan
 - a. Program jangka pendek dan tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 50 (lima puluh) dokumen. Peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan tersebut pada tahun 2015 telah mencapai 12 (dua belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) dokumen, tahun 2017 sebanyak 9 (sembilan) dokumen dan 2018 sebanyak 8 (delapan) dokumen.
 - b. Layanan data dan informasi kinerja kebijakan dan program keterpaduan antara pengembangan wilayah dan infrastruktur bidang PUPR ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Dalam capaian realisasi yang telah dicapai dari tahun 2015 hingga 2018 sebanyak 16 (enam belas) dokumen dengan capaian setiap tahun sebanyak 4 (empat) dokumen dari tahun 2015-2018. Sisa target yang akan dicapai hingga tahun 2019 sebanyak 4 (empat) dokumen.
3. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis
 - a. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan serta pedoman teknis perencanaan dan pemrograman kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah tercapai sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen yang dilaksanakan pada tahun

- 2015-2018 dengan capaian pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 8 (delapan), tahun 2017 sebanyak 2 (dua) dokumen dan 2018 sebanyak 2 (dua) dokumen.
- b. Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di kawasan strategis dan antarkawasan strategis pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) dokumen, tahun 2016 sebanyak 6 (enam) dokumen, tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen dan 2018 sebanyak 6 (enam) dokumen.
 - c. Anjungan cerdas yang dibangun pada kawasan strategis untuk Area inkubasi pada kawasan strategis dan antarkawasan strategis yang dibangun yang telah terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lokasi, tahun 2017 sebanyak 2 (dua) lokasi dan 2018 sebanyak 2 (dua) lokasi.
4. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan
- a. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditargetkan hingga tahun 2015-2019 sebanyak 60 (enam puluh) dokumen dengan capaian tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) dokumen.
 - b. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang telah terealisasi capaian target 2015-2019 hingga tahun 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebanyak 14 (empat belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 5 (lima) dokumen, tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen dan 2018 sebanyak 2 (dua) dokumen.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Kebijakan pembinaan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan, diarahkan bagi terwujudnya konstruksi yang berkualitas yang difokuskan pada pembinaan konstruksi terutama di kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional serta dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan dan kewilayahan, pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan dan energi, dan peningkatan konektivitas nasional. Secara umum strategi yang akan ditempuh adalah memastikan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi konstruksi, ketersediaan sumber daya konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian mutu konstruksi, peningkatan kapasitas jasa konstruksi, serta pendayagunaan dan pengelolaan aset material dan peralatan konstruksi. Adapun strategi operasional yang akan ditempuh terdiri dari:

1. Memastikan peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR;
2. Memastikan mutu hasil konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi

infrastruktur melalui peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, peningkatan penerapan K3 Konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi;

3. Memastikan peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui penataan regulasi dan perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi, pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri dan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;
4. Memastikan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi dan produktifitas kerja konstruksi melalui penyediaan standar dan materi kompetensi, peningkatan penerapan kompetensi dan produktifitas, pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan, serta peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi.

Adapun strategi pencapaian sarannya terdiri dari:

- 1) Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
 - a. Perumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa dan sistem pelaksanaan yang baik.
 - b. Pembinaan dan advokasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi.
 - c. Peningkatan kapasitas *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - d. Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.
- 2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - e. Penyederhanaan dan peningkatan transparansi sistem pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
 - f. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
 - g. Pembaharuan regulasi yang dibarengi dengan intensitas dan kualitas pemantauan dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - h. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - i. Peningkatan sosialisasi dan kesadaran publik terhadap pentingnya penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
 - j. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
- 3) Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi.
 - a. Peningkatan pengelolaan, updating data dan integrasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Pusat (Nasional), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat digunakan sebagai media pengambilan keputusan yang kredibel bagi *stakeholders* jasa konstruksi.

- b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi yang meliputi pengelolaan perijinan, sistem informasi, dan penguatan regulasi jasa konstruksi.
 - c. Penguatan peran bagi kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Industri Konstruksi, Asosiasi Profesi dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - d. Peningkatan fasilitasi bagi upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - e. Peningkatan fasilitasi dan penyebarluasan informasi bagi penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis Ijin Usaha Jas Konstruksi Asing (IUJKA).
 - f. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan bagi terlaksananya kepatuhan prosedur dan mekanisme kerjasama Badan Usaha Konstruksi Asing (BUJK) pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi penyelenggaraan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi, termasuk database dan sistem registasi.
 - h. Penyelenggaraan forum dan promosi penggunaan produk-produk unggulan industri konstruksi dalam negeri.
 - i. Peningkatan pemantauan atas penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
 - j. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga litbang dalam rangka pengembangan dan pemilihan teknologi terapan dan siap pakai dalam usaha jasa konstruksi.
 - k. Pengembangan pola penjaminan resiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.
- 4) Peningkatan Manajemen SDM Konstruksi.
- a. Pembaharuan secara berkelanjutan terhadap modul dan materi diklat konstruksi yang responsif terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan strategis usaha jasa konstruksi.
 - b. Penataan ulang pembinaan penyelenggaraan diklat konstruksi serta peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan konstruksi percontohan.
 - c. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan diklat konstruksi, sertifikasi dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat lainnya.
 - b. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.
 - c. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan terhadap penerapan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seluruh stakeholders jasa konstruksi.
 - d. Mendorong terbentuknya regulasi atas pengakuan dan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi.
 - e. Peningkatan kerjasama pengelolaan SDM jasa konstruksi dengan seluruh
 - f. stakeholders.

3.3.2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Tujuan Kedua Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan sektor unggulan yang ditujukan untuk ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, difokuskan pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui pengelolaan SDA dan pengendalian lumpur Sidoarjo dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, mengarahkan kebijakan umum pembangunan infrastruktur bidang SDA yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Adapun strategi pencapaian sasarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengelolaan SDA berbasis wilayah sungai yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah berdasarkan pola dan rencana pengelolaan SDA serta rencana pengembangan WPS/ antarWPS yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung prioritas Nasional dan percepatan proyek strategis pembangunan nasional serta pencapaian sasaran Kementerian PUPR melalui keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply* yang berkeadilan serta antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang.
2. Menyeimbangkan pemenuhan *demand* dan *supply* kebutuhan air baku jangka pendek dan jangka panjang melalui upaya konservasi sumber air yang berkelanjutan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan kapasitas air baku nasional.
3. Mengendalikan pemanfaatan air tanah agar ketersediaan air tanah dapat sinergis dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya penyediaan air baku dari air permukaan.
4. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi yang fokus pada upaya mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, menjaga fungsi serta mengembalikan fungsi jaringan irigasi seperti semula melalui peningkatan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan pada daerah irigasi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
5. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka memenuhi

kebutuhan air baku untuk air bersih yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga (domestik) terutama wilayah yang menjadi prioritas nasional serta sasaran Kementerian PUPR.

6. Meningkatkan pengendalian banjir dalam rangka pengendalian daya rusak air dengan pendekatan struktural dan non struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan diutamakan pada kawasan - kawasan strategis baik perkotaan maupun non perkotaan yang berpenduduk padat serta area konektivitas antarpusat ekonomi dan kawasan strategis.
7. Meningkatkan pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah nasional.
8. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
10. Menata kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui penataan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pemangku kepentingan serta pembagian peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah.
11. Menata dan menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi pengelolaan SDA yang terpadu.
12. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah bidang Sumber Daya Air dengan prioritas keterpaduan mengacu kepada 35 (tiga puluh lima) WPS serta antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia.

A.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya penguatan kedaulatan pangan berkelanjutan serta kedaulatan energi, difokuskan kepada dukungan infrastruktur bidang SDA terutama pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional, melalui :(1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan; Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat

maupun daerah dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah. Adapun strategi pencapaian sarannya adalah sebagai berikut:

- 1 Peningkatan jaringan irigasi serta peningkatan pembagian peran pusat dan daerah dalam melakukan:
 - a. Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta Ha yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak serta jaringan irigasi air tanah kewenangan pusat yang dibangun serta jaringan irigasi kewenangan daerah melalui pendanaan DAK.
 - b. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta Ha (rehabilitasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah kewenangan pusat, serta jaringan irigasi kewenangan daerah melalui pendanaan DAK.
 - c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi kewenangan pusat seluas 3,9 (tiga koma sembilan) juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, dan OP Jaringan Irigasi Tambak).
- 2 Pembangunan waduk untuk meningkatkan suplai air irigasi dari waduk yang semula sebesar 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi).
- 3 Mitigasi bencana (mitigasi risiko gangguan ketahanan pangan) akibat daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air diantaranya dengan penguatan kelembagaan.

B.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan domestik (rumah tangga), pertanian dan industri berkelanjutan dalam upaya meningkatkan nilai tambah untuk mendorong perekonomian nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya air, melalui lima pilar: (1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air

Adapun strategi pencapaian sarannya adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan Konservasi yang meliputi:
 - a) Konservasi fisik:
 - (1) Pembangunan 49 (empat puluh sembilan) bendungan/ waduk baru dan 16 (enam belas) bendungan/ waduk lanjutan sehingga totalnya adalah 65 (enam puluh lima) waduk.

- (2) Restorasi 4 (empat) sungai, revitalisasi danau prioritas dan konservasi kawasan rawa.
- (3) Pembangunan pengendali sedimen (*check dam*).
- (4) Upaya operasi dan pemeliharaan bendungan dan embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
- (5) Upaya pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami.
- (6) Upaya konservasi air tanah yang difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
- (7) Upaya mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 Menteri pada 9 Mei 2015, dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 2017 oleh tiga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b) Konservasi non fisik adalah sebagai berikut:

- (1) Upaya sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
 - (2) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air adalah difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
 - (3) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
 - (4) Pembinaan pemerintah daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber- yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
 - (5) Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.
2. Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air baku untuk irigasi, industri dan kebutuhan rumah tangga, melalui:
- 1) Pembangunan dan pengembalian fungsi dan kondisi sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku.
 - 2) Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana penyediaan dan pengelolaan air baku.
 - 3) Suplai irigasi waduk dari 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi permukaan).
 - 4) Layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta ha yang meliputi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah kewenangan pusat yang dibangun.
 - 5) Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta ha (rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, jaringan irigasi

- rawa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi air tanah kewenangan pusat).
- 6) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 (tiga koma sembilan) juta ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, OP Jaringan Irigasi Tambak).
- 3 Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non struktural.
- 1) Struktural :
- (1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
 - (2) Normalisasi sungai dan pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
 - (3) Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai
 - (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali lahar gunung .
 - (5) Penanganan drainase utama perkotaan.
- 2) Non Struktural:
- (1) Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya kawasan tertentu.
 - (2) Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah sungai.
 - (3) Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
 - (4) Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase utama perkotaan, dan pencemaran air.
 - (5) Penetapan sempadan sungai dan sumber- sumber air lainnya.
 - (6) Pembuatan atau *up dating* peta rawan bencana (*flood risk map*).
 - (7) Pengoperasian *flood forecasting warning system* di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini kejadian banjir.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan, yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan.
- 1) Strategi keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut:
- (1) Pemenuhan sisa target penyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai.
 - (2) Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (3) Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - (4) Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA.
 - (5) Rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA.
- 2) Strategi peningkatan peran *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut :
- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA
 - (2) Optimalisasi peran *stakeholder* pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA/TKPSDA pada masing-masing WS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antarinstansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - (3) Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewangannya.
 - (4) Pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama.
 - (5) Penataan kelembagaan dan *benchmarking* antarlembaga PSDA penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA
 - (6) Pemberian bimbingan/bantuan teknis.
- 3) Strategi peningkatan Sistem informasi dan Data SDA yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- (1) Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Website ini didukung oleh pemantapan *website*.
 - (2) Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air.

Berdasarkan capaian dan kendala yang ada pada pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Ketahanan Air perlu menerapkan beberapa strategi pendekatan untuk mempercepat pencapaian target yang diharapkan, diantaranya: (1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan SDA untuk mempercepat/memperlancar proses implementasi target fisik pengelolaan SDA di unit kabupaten/kota yang melibatkan berbagai *stakeholders* dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian akses legal, akses pembiayaan dan akses pasar kepada masyarakat; (2) Kebijakan pelibatan berbagai *stakeholders* (sektor lain baik dari kementerian/lembaga, mitra pembangunan maupun swasta/CSR dan Kemitraan) dalam upaya pencapaian target kegiatan pengelolaan SDA; dan (3) Melaksanakan percepatan kegiatan pengelolaan SDA dengan dukungan pendanaan yang bersifat memadai.

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka diperlukan upaya yang lebih dari sekedar mengandalkan pembangunan bendungan dan *water conveyance* sebagai berikut: (1) Pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan memanfaatkan air laut (*reverse osmosis/desalinasi*) perlu dikembangkan untuk memenuhi daerah-daerah yang jauh dari sumber air; dan (2) Masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan air hujan (*rain water harvesting*) untuk menambah ketersediaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk akan dilakukan melalui: (1) Persiapan dan percepatan penyusunan desain jaringan irigasi dan air baku yang memanfaatkan tampungan air dari waduk; dan (2) Penyelesaian 29 (dua puluh sembilan) waduk untuk meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 19 (sembilan belas) miliar m³ di tahun 2019.

Untuk memenuhi target Renstra Kementerian PUPR tersebut, selain Ditjen SDA memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan penyelesaian sisa target berkoordinasi dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat melalui skema serta kerja bersama.

Selain itu, untuk menanggulangi dampak daya rusak air, diperlukan: (1) Penataan wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, mengembalikan fungsi sarana dan prasarana pengaliran air seperti drainase, kanal, dan daerah resapan (*catchment area*) yang beralih fungsi; (2) Percepatan penyusunan desain pengendalian struktural dan nonstruktural banjir dengan meningkatkan kala ulang yang tetap mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan pelaksanaan konstruksi; dan (3) Diperlukan juga peran serta pemerintah daerah untuk juga konsisten terhadap pengelolaan SDA diwilayahnya.

Untuk kelembagaan, diperlukan sinkronisasi program/kegiatan terkait pengelolaan SDA melalui penetapan indikator yang disepakati bersama. Hambatan tentang kewenangan yang lebih rinci, pelaksanaan target fisik infrastruktur dan vegetatif ke depan agar berada pada wilayah yang saling terkait dari hulu ke hilir sehingga hasil yang ditimbulkan lebih maksimal. Untuk pendanaan, diperlukan konsistensi penganggaran, baik APBN maupun APBD dalam mendukung pencapaian target dengan menjadikan Ketahanan Air sebagai prioritas nasional yang sangat berpengaruh pada pencapaian target sektor-sektor lain sehingga penganggarannya perlu diutamakan.

3.3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG Mendukung KONEKTIVITAS NASIONAL

Tujuan Ketiga Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan konektivitas nasional dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai keseimbangan serta meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing, difokuskan pada kawasan/ wilayah prioritas nasional guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan, selain itu fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui penyelenggaraan jalan.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan percepatan proyek strategis pembangunan transportasi nasional yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan jalan nasional melalui pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional), manajemen jaringan jalan nasional dan dukungan manajemen jaringan jalan daerah yang mengedepankan faktor keselamatan dan faktor lingkungan dengan pendekatan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor jalan yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan berbasis WPS dan Pulau yang mengacu penataan ruang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan ekonomi serta mendorong investasi di wilayah Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus/ Kawasan Industri, dan pusat- pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi, serta KSPN sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di masing-masing wilayah dengan menggali potensi dan keunggulan wilayah yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
3. Mendukung keseimbangan pembangunan KBI-KTI, antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis

- pembangunan nasional.
4. Menyelenggarakan jalan nasional yang terintegrasi, terpadu dan terhubung dengan baik untuk menciptakan konektivitas serta mendukung sistem logistik nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*) yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
 5. Menyelenggarakan jalan nasional sebagai upaya membangun sistem dan jaringan transportasi dalam konteks pelayanan intermoda dan SISTRANAS yang terintegrasi baik darat maupun maritim untuk menjamin efisiensi pelayanan transportasi (mendukung tol laut, pelabuhan penyeberangan, bandara baru, serta intermoda dengan KA) serta upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
 6. Menyelenggarakan jalan nasional di kawasan perkotaan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap transportasi massal perkotaan dengan menata kembali jaringan jalan di kawasan perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional agar dapat memenuhi kebutuhan pergerakan perkotaan dan mendukung pengembangan transportasi publik.
 7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional (optimalisasi internal) serta kepastian ketersediaan pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional non APBN bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis nasional.
 8. Memperkuat kinerja sistem jaringan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

Adapun strategi pencapaian sasaran dukungan peningkatan konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

- 1 Sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2018, investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan jalan tol telah terbangun dan beroperasi sepanjang 782,8 (tujuh ratus delapan puluh dua koma delapan) km jalan tol baru. Apabila mengacu pada target RPJMN 2015 – 2019, maka sisa panjang pembangunan jalan tol adalah 217,2 (dua ratus tujuh belas koma dua) km. Berdasarkan hasil kajian BPJT, panjang jalan tol baru yang dapat beroperasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sepanjang 1.000 (seribu) km.
- 2 Sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, Kementerian PUPR diproyeksikan telah membangun 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) km jalan baru dengan fokus pengembangan jalan baru di kawasan perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, Trans Papua, pantai selatan Jawa, dan pembangunan jalan lingkar perkotaan untuk mengurai kemacetan di perkotaan. Walaupun target RPJMN 2015 – 2019 hampir terealisasi, Kementerian PUPR berkomitmen

untuk menuntaskan pembangunan jalan baru pada fokus-fokus strategis sebagaimana disebutkan di atas hingga tahun 2018 jalan terbangun sepanjang 3.387 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) km.

Salah satu dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan wilayah yaitu pembangunan jalan akses menuju kawasan-kawasan strategis, antara lain: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti akses menuju KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan KSPN Toraja; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, dan KEK Sorong; serta Kawasan Industri (KI) Prioritas seperti KI Landak dan KI Morowali. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung integrasi transportasi multimoda seperti akses jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok, akses Bandara Kertajati, akses Pelabuhan Patimban, akses Bandara Sibisa, serta akses bandara baru Kulonprogo NYIA (*New Yogyakarta International Airport*).

Sesuai dengan misi Presiden RI, pemerataan pembangunan harus diarahkan lebih besar ke wilayah tertinggal, seperti kawasan timur Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar fokus pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi manfaat dari pembangunan tersebut dapat juga dirasakan oleh masyarakat tertinggal di wilayah Indonesia. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Kementerian PUPR berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan di wilayah terluar seperti pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan yang ditargetkan tembus pada tahun 2019; pembangunan jalan perbatasan NTT yang tembus pada tahun 2018; serta pembangunan jalan Trans Papua yang ditargetkan tembus pada tahun 2019. Sementara itu, untuk pembangunan jalan perbatasan Papua, saat ini sudah terbuka. Pembangunan jalan perbatasan Papua tersebut diperkirakan memerlukan waktu lebih lama dari tahun 2019, dikarenakan sulitnya medan yang harus dilalui (berupa pegunungan) sehingga memerlukan rekayasa teknis yang sangat saksama dan pembiayaan yang sangat besar. Setelah pembangunan jalan pada wilayah-wilayah terluar tersebut dituntaskan oleh Kementerian PUPR, pemerintah harus mulai memikirkan rencana pengembangan wilayah yang dilalui oleh koridor jalan tersebut sehingga investasi pemerintah pada pembangunan jalan tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikandaya ungkit yang signifikan bagi perekonomian nasional. Program pembangunan jalan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di Indonesia. Konektivitas yang memadai akan memudahkan para pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi, serta menyatukan ujung timur dengan ujung barat Indonesia.

- 3 Selain mengembangkan jaringan jalan baru, Kementerian PUPR tetap berupaya untuk menjaga kondisi jaringan jalan nasional eksisting agar tetap dalam kondisi optimal guna menunjang pergerakan penumpang dan barang serta mendukung distribusi logistik antarwilayah. Target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sesuai dengan RPJMN

2015 – 2019 adalah 98 (sembilan puluh delapan) % mantap. Pada akhir periode RPJMN 2010 – 2014 kondisi jaringan jalan nasional telah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan panjang jaringan jalan nasional 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Setelah terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jaringan jalan nasional bertambah 8.448 (delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) km sehingga total panjang jaringan jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km.

Selama periode tahun 2015 – 2018, Kementerian PUPR telah berupaya meningkatkan kondisi ruas jalan nasional baru yang sebelumnya rusak tersebut menjadi mantap dengan mempertahankan kondisi jalan nasional eksisting tetap dalam kondisi optimal melalui penanganan preventif. Namun, karena keterbatasan pendanaan, target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2018 sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) % mantap tidak tercapai dengan realisasi hanya 91,9 (sembilan puluh satu koma sembilan) % mantap. Guna mengejar target kemantapan jalan nasional sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap pada akhir tahun 2019, diperlukan pendanaan yang memadai dan program preservasi jalan yang sesuai untuk mengatasi segala kondisi kerusakan jalan nasional.

Salah satu skema pemeliharaan jalan nasional yang saat ini akan diujicobakan adalah skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) melalui layanan ketersediaan (*availability payment*) pada ruas jalan nasional di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Melalui skema tersebut, investor/badan usaha melaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas jalan pada masa konstruksi dengan menggunakan pembiayaan badan usaha tersebut. Apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, pemerintah baru akan membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pada masa konstruksi dan masa pemeliharaan melalui pembayaran cicilan yang dilaksanakan selama masa konsesi. Apabila kualitas jalan yang dipelihara oleh badan usaha tidak memenuhi standard pelayanan minimal yang disepakati, pemerintah berhak untuk memotong nilai pembayaran cicilan kepada badan usaha yang memegang hak konsesi pada ruas jalan tersebut. Manfaat dari skema ketersediaan layanan ini adalah mengurangi beban pembiayaan pemerintah di masa awal konstruksi dan meningkatkan kualitas layanan jalan bagi masyarakat selama masa konsesi

- 4 Panjang jalan di Indonesia secara keseluruhan adalah 537.838 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km (sumber: BPS, 2017) di mana panjang jalan nasional hanya 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (8,74%), panjang jalan provinsi 55.416 (lima puluh lima ribu empat ratus enam belas) km (10,30%), serta panjang jalan kabupaten sebesar 435.405 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima) km (80,95%). Realisasi kondisi jaringan jalan nasional pada akhir 2018 mencapai 91,9 (sembilan puluh satu koma sembilan) % mantap. Sementara itu, kondisi jalan provinsi dan jalan kabupaten hanya berkisar

antara 60 (enam puluh) % – 70 (tujuh puluh) % mantap. Melihat kondisi tersebut secara umum, kondisi jaringan jalan di Indonesia belum dapat dikatakan mantap karena masih banyak jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak. Kemampuan pendanaan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk memelihara secara optimal kondisi jalan daerah yang berada di wilayahnya serta kemampuan pendanaan APBN pun sangat terbatas. Skema utama yang digunakan untuk memelihara jalan daerah melalui sumber pembiayaan APBN adalah pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelemahan dari skema DAK adalah pemeliharaan ruas-ruas jalan daerah yang sebetulnya tidak memiliki dampak signifikan bagi penguatan konektivitas maupun dukungan logistik dikarenakan keterbatasan kapasitas pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara terperinci semua usulan DAK yang berasal dari pemerintah daerah.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan ujicoba skema hibah pemeliharaan jalan daerah melalui program *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) yang didanai dari hibah Pemerintah Australia. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah mengusulkan ruas-ruas jalan daerah yang akan dipelihara atau ditingkatkan kondisinya melalui pembiayaan APBN. Ruas-ruas jalan daerah yang dimaksud harus memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah di sekitarnya dan pemerintah daerah harus membiayai pemeliharaan jalan tersebut terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria teknis yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Apabila penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kriteria teknis yang disepakati, barulah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diganti oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah dalam tahap menerapkan skema pembiayaan hibah tersebut di beberapa wilayah di Indonesia.

- 5 Pada periode tahun 2018-2019 diharapkan tersedia pembiayaan bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan jalan daerah, cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, mengarusutamakan skema KPBU serta penguatan pengambilan keputusan kebijakan KPBU, dan mengimplementasikan prinsip *Value for Money* (VfM).

3.3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG Mendukung LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG LAYAK

Tujuan keempat Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan

untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui (a). **Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni:** cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;

(b). **Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta (c). **Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1 Pendekatan dalam Strategi Pelaksanaan

Pendekatan	Strategi Pelaksanaan
Membangun	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (IPA Regional atau

sistem	SPAM Regional). 2) Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar).
Fasilitas pemda	1) Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, Perda/SK Kumuh dsb. 2) Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 3) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Kawasan seperti fasilitas PDAM, fasilitas kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat melalui kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan Kotaku. 2) Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat.

Pada dasarnya untuk bidang permukiman, hampir semua tugas pembangunan dikerjakan bersama pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka keterpaduan pembangunan, Perencanaan infrastruktur permukiman pada tingkat kabupaten/kota mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) bidang Cipta Karya. RKP merupakan amanat PP Nomor 14 Tahun 2016 dan berfungsi sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dokumen tersebut terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman; rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan; rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman. RKP kemudian didetailkan kegiatan dan pendanaannya melalui RPIJM yang juga mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengatasi gap pendanaan, maka sumber-sumber pendanaan alternatif dari para pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya perlu meningkatkan komitmen sehingga kontribusi pendanaannya

meningkat. Sektor swasta juga akan didorong kontribusi pendanaannya melalui skema KPS, B to B, atau CSR. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam pembangunan infrastruktur bidang permukiman melalui pengaturan mekanisme dan penyiapan program yang baik.

Dalam hal pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR memfokuskan keterpaduan pembangunan pada pengembangan wilayah strategis untuk mendukung pencapaian sasaran nasional antara lain:

1. Mendukung pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 yaitu 7 (tujuh) kawasan metropolitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 3 (tiga) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019);
2. Mendukung keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis, (BPIW, 2015);
3. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan dengan membangun 7 (tujuh) Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 (sembilan) Kawasan Permukiman Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015);
4. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 30 (tiga puluh) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (DJCK, 2014);
5. Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII Tahun 2018 (Inpres No. 2 Tahun 2016);
6. Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 10 (sepuluh) lokasi.

Arah kebijakan dukungan infrastruktur bidang permukiman terhadap memiliki keterkaitan dengan dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi sektor unggulan diarahkan pada pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan pariwisata, serta pembangunan industri/KEK, yang meliputi :

1. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- a. Dukungan pembangunan perumahan dan permukiman.
Dukungan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada kegiatan peningkatan kontribusi akses air minum dan sanitasi layak serta peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- a. Dukungan pembangunan kedaulatan pangan dan pembangunan kedaulatan energi.
Dukungan terhadap industri pengolahan hasil pertanian dan agropolitan difokuskan pada kegiatan peningkatan akses air minum, peningkatan akses sanitasi layak, pembangunan jalan lingkungan dan drainase, serta infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi lainnya.
- b. Dukungan pembangunan kedaulatan kemaritiman dan kelautan.
Dukungan terhadap pembangunan kemaritiman dan kelautan difokuskan pada kegiatan pengembangan SPAM Khusus permukiman nelayan, serta

penataan 11 (sebelas) kawasan permukiman nelayan tradisional antara lain Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu) dan Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

c. Dukungan pembangunan pariwisata.

Dukungan pembangunan infrastruktur permukiman dilakukan dengan Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pada kawasan tersebut dukungan terhadap pembangunan pariwisata difokuskan pada kegiatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak serta penataan kawasan yang meningkatkan daya Tarik wisata kawasan.

d. Dukungan Pembangunan Industri/ KEK.

Dukungan terhadap pembangunan industri/ KEK difokuskan pada pemenuhan akses air minum, sanitasi, permukiman yang layak bagi permukiman pekerja pada kawasan industri/KEK tersebut.

3. Dukungan Dimensi Pemerataan dan Pembangunan Kewilayahan

a. Dukungan terhadap Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

Dalam pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR turut menciptakan lapangan kerja yang dapat memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang fokus pada MBR seperti Pamsimas, Sanimas, Kotaku, serta Hibah air minum dan sanitasi.

b. Dukungan Pengembangan Daerah Tertinggal

Dukungan terhadap pengembangan daerah tertinggal dilakukan melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi pada 100 (seratus) kawasan rawan stunting (kekurangan gizi pada bayi) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Di samping itu, pengembangan kawasan permukiman dan sistem air minum juga dilakukan pada pulau-pulau kecil terpencil/terdepan untuk meningkat kesejahteraan warga akibat keterisolasian.

c. Dukungan Kawasan Perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Intinya, membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat. 7 (tujuh) PLBN tersebut terdiri dari Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

d. Dukungan Pembangunan Perdesaan

Dukungan pembangunan infrastruktur permukiman yang diberikan pada perdesaan berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan air minum, serta pengembangan kawasan permukiman untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh di luar perkotaan. Kementerian PUPR juga melakukan pembinaan dan sinergi dengan program desa terkait akses air minum, sanitasi dan permukiman layak termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum desa.

e. Dukungan Pembangunan Perkotaan

Kontribusi pembangunan infrastruktur permukiman dalam pencapaian sasaran pembangunan perkotaan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur pada skala perkotaan (*city-wide*) maupun penataan kawasan di beberapa kota yang menjadi fokus perhatian pembangunan perkotaan nasional yaitu 7 (tujuh) kawasan metropolitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 10 (sepuluh) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru. Diharapkan melalui pembangunan perkotaan yang dilakukan dapat tercipta kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP); kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; dan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Program yang berkaitan antara lain inkubasi kota baru (Pontianak, Tanjung Selor, Makassar, Palembang, dan Manado) serta pengembangan kawasan tematik perkotaan.

4. Dukungan pengarusutamaan lainnya

Dukungan terhadap pengarusutamaan gender difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

B.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau

terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berkelanjutan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi-sistem pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan pembiayaan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan perumahan sesuai dengan tugas fungsi meliputi (1) Pengendalian perumahan komersial, (2) Penguatan perumahan umum, (3) Pemberdayaan perumahan swadaya, dan (4) Fasilitasi perumahan khusus;
4. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia, diarahkan pada peningkatan kualitas hunian yang ada agar menjadi layak, serta pemenuhan kebutuhan rumah umum dan komersil, rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan akses pembiayaan perumahan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional;
5. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh stakeholders melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai stimulan bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan;
6. Perluasan akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan melalui fasilitas likuiditas, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;
7. Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik)

dengan dukungan pembiayaan;

8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas (optimalisasi internal) dengan pemanfaatan inovasi teknologi terapan dan bahan bangunan yang aman dan murah serta mengembangkan skema dan sumber pembiayaan lain untuk mengatasi gap pembiayaan pembangunan perumahan.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan *stimulant* dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas;
2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
3. Revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan;
4. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
5. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR;
6. Mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembiayaan perumahan;
7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf;
8. Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian;
9. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*);
10. Mengintegrasikan penyediaan dan pengembangan perumahan dengan penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak;
11. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan;

12. Mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah” melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) unit meskipun belum masuk di dalam target RPJMN 2015-2019;
13. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR;
14. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai *provider*;
15. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
16. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;
17. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;
18. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);
19. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
20. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
21. Meningkatkan keterpaduan pembangunan perumahan dengan menguatkan perencanaan pembangunan perumahan pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
22. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan lain;
23. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan;
24. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah;
25. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan

- rumah susun di perkotaan);
26. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf;
 27. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan;
 28. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
 29. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta dan difasilitasi oleh Kementerian PUPR melalui bantuan PSU rumah umum dengan target 676.950 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) unit (telah terlaksana 104.512 (seratus empat ribu lima ratus dua belas) unit), serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
 30. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dari target 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) unit (telah terlaksana dari Tahun 2015-2018 sebanyak 29.762 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua) unit), pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari target 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) unit telah terlaksana dari Tahun 2015-2018 sebanyak 464.407 (empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh) unit fasilitasi bantuan *stimulan* : Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;
 31. Pembangunan Rumah Khusus Tahun 2015-2018 sebanyak 22.006 (dua puluh dua ribu enam) unit dari target 50.000 (lima puluh ribu) unit di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan, dan perbatasan negara;
 32. Pembangunan Rumah Susun Sewa Tahun 2015-2018 sebanyak 43.158 (empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan) unit dari target 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) unit yang merupakan kewajiban Pemerintah di tingkat pusat dan daerah;
 33. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan;
 34. Standarisasi perijinan;
 35. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 36. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

**C.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN
PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN**

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan *demand management* dengan prioritas nasional, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Penataan dan Peningkatan Peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
3. Peningkatan keterpaduan perencanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
4. Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium PUPR;
5. Pengembangan skema dan sumber pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan;
6. Peningkatan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum baik untuk rumah tapak maupun rumah susun;
7. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan rakyat;
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*);
10. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP Tapera;
11. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai

berikut:

1. Menyusun Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NPK) di bidang pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan, termasuk rumusan atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan;
2. Melaksanakan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU
3. Menyusun Rencana Umum dan Roadmap proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN
4. Melaksanakan pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif dan berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas manfaat pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur.
6. Memperluas kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum
7. Memperluas skema pembiayaan perumahan baik di sisi *demand* maupun di sisi *supply* guna meningkatkan MBR yang dapat mengakses pembiayaan perumahan;
8. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan
9. Melaksanakan fasilitasi pengembangan pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
10. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) unit;
11. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) unit;
12. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
13. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit Konstruksi sebanyak 6.000 (enam ribu) unit;
14. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR Swadaya sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) unit;
15. Melaksanakan bantuan uang muka sebanyak 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu) unit;

3.3.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR

Tujuan kelima Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia (SDM), pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR difokuskan pada pemenuhan kondisi perlu dalam rangka pencapaian sasaran Kementerian PUPR serta sasaran pembangunan prioritas nasional dan proyek strategis nasional melalui pengembangan SDM, peningkatan pengendalian dan pengawasan, dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana prasarana serta penelitian dan pengembangan. Adapun arah kebijakan masing-masing program pendukung adalah sebagai berikut:

A.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PUPR

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengendalian dan pengawasan intern kementerian PUPR terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, melalui: (a) Peningkatan Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) (b) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan, difokuskan dan diarahkan pada:

- 1 Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian PUPR;
- 2 Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bebas KKN;
- 3 Peningkatan kualitas hasil pengawasan kinerja dan keuangan.

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1 Selama kurun waktu tahun 2015-2016 level *Internal Audit Capability Model* (IACM) mencapai level 2, meningkat menjadi 3 di tahun 2017 dan 2018 berdasarkan *self assessment* dan direncanakan capaian tahun 2019 bertahan di level 3.
- 2 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR merupakan target baru yang didasarkan pada capaian kumulatif kualitas pengawasan pada masing-masing wilayah pengawasan di Inspektorat Jenderal dan juga dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Penilaian kualitas pengawasan ditinjau dari beberapa aspek,

antara lain; rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas, rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti tepat waktu, jumlah unit kerja/satker yang bersih dari penyimpangan materiil, evaluasi rencana PKPT terhadap realisasi pelaksanaan PKPT, Skor Hasil *Peer Review Internal proses AREPP* dan penilaian terkait implementasi SPIP dan hasil evaluasi SAKIP. Capaian tahun 2018 sebesar 82,31% dan tahun 2019 diharapkan bertahan di atas 80%. Sehingga strategi yang akan dilakukan adalah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan persentase kualitas pengawasan kinerja dan keuangan minimal 80%.

Strategi operasionalisasinya untuk meningkatkan dua hal tersebut diatas meliputi:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PUPR;
2. Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR;
3. Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;
5. Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR;
6. Pelaksanaan review laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai opini BPK wajar tanpa pengecualian;
7. Peningkatan koordinasi antar aparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

B.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SERTA PROGRAM SARANA DAN PRASARANA

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran program: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi, adalah:

1. Peningkatan kualitas administrasi (modernisasi kesekretariatan)

Peningkatan kualitas administrasi yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kecepatan pelayanan dan keterbukaan informasi dan transparansi menjadi fokus utama untuk membenahan demi peningkatan kualitas administrasi.

2. Penataan Sumber Daya Manusia (SOP kepegawaian, PNS bebas narkoba, kepatuhan laporan LHKPN, dll)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pembinaan bagi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menciptakan aparat yang profesional, memiliki integritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pembinaan karakter harus dilakukan secara terus menerus pada seluruh jajaran, khususnya pada aparatur generasi muda PUPR yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan Kementerian PUPR di masa yang akan datang.

Strategi dari arah kebijakan yang telah di sebutkan di atas meliputi:

1. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Biro Umum) dicapai melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - b. Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistem Aplikasi Tata Naskah Elektronik Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistem Kearsipan Elektronik.
 - c. Peningkatan dukungan ketersediaan ruangan kerja/gedung, pemutakhiran *hardware* dan *software* guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai.
 - d. Revitalisasi pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik.
 - e. Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PUPR.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan bidang keuangan kementerian (Biro Keuangan), dicapai melalui strategi:
 - a. Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan.
 - b. Penggunaan Sistem Informasi.
 - c. Pembinaan SDM Pengelola Keuangan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.
 - d. Penatausahaan Perbendaharaan dan PNBPN.
 - e. Evaluasi Data yang meliputi data PNBPN, dan data hasil rekonsiliasi.
 - f. Rekonsiliasi neraca antara Biro Keuangan dengan Biro PBMN dan LP.
 - g. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan.
 - h. Komitmen pimpinan beserta jajarannya untuk meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan.
3. Peningkatan citra positif kementerian (Biro Komunikasi Publik), dicapai melalui strategi:

- a) Peningkatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan infrastruktur melalui berbagai media.
 - b) Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
 - c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan kementerian.
 - d) Peningkatan integrasi data/informasi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Layanan pengadaan barang dan jasa (Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di bidang penatausahaan dan pengelolaan BMN dan sistem pengadaan secara elektronik.
 - b) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.
 - c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN.
 - d) Fasilitasi proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penilaian, penatausahaan, dan penghapusan BMN pada Kementerian PUPR.
 - e) Fasilitasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang / jasa di Kementerian PUPR.
 - f) Optimalisasi BMN dan pemberdayaan BMN untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum (Biro Hukum), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan kualitas SDM bidang hukum.
 - b) Penyebarluasan peraturan perundangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, serta peraturan terkait.
 - c) Peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara/masalah hukum.
 - d) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - e) Peningkatan pelayanan administrasi dan penyebarluasan informasi terkait rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.
 - f) Penyusunan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai wadah pendayagunaan atas dokumen hukum bidang PUPR secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian PUPR.
6. Pengelolaan data spasial, statistik dan audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian (Pusat Data dan Teknologi Informasi), dicapai melalui :
- a) Penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang andal.

- b) Pengelolaan data dan informasi spasial, statistik, audio visual serta kebencanaan.
 - c) Penyediaan sistem informasi pengambilan keputusan (*Decision Making Tools*).
7. Penciptaan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis (Biro Kepegawaian dan Ortala), dicapai melalui strategi:
- a) Penyempurnaan struktur organisasi sebagai upaya perampingan struktur untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien.
 - b) Penajaman tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan untuk memperkuat landasan bisnis proses sampai dengan level unit pelaksana.
 - c) Pembenahan regulasi dan kebijakan melalui sinkronisasi peraturan di bidang manajemen kepegawaian.
8. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit (Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), dicapai melalui strategi:
- a) Perencanaan komposisi dan kebutuhan pegawai secara akurat.
 - b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang obyektif, transparan, kompetitif dan berbasis IT.
 - c) Penempatan pegawai dengan penempatan kesesuaian kompetensi.
 - d) Penerapan sistem promosi secara kompetitif.
 - e) Penerapan sistem manajemen kinerja individu.
 - f) Penguatan sistem informasi bidang kepegawaian.
 - g) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
9. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
- a) Internalisasi dengan didukung komitmen penegakan disiplin pegawai.
 - b) Perumusan/pengembangan model penetapan pemberian penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi para pegawai.
 - c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.
 - d) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
10. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
- a. Internalisasi dan penegakan disiplin pegawai.
 - b. Perumusan/pengembangan model penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi.
 - c. Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.

11. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Biro Komunikasi Publik), dicapai melalui strategi:
 - a) Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi.
 - b) Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - c) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik.
 - d) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
 - e) Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.
12. Peningkatan transparansi pelaksanaan program (Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, dicapai melalui strategi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi penganggaran yang tepat waktu.
 - b. Peningkatan kualitas data pelaporan dan penyelenggaraan SAKIP agar memperoleh nilai akuntabilitas kinerja >90 (sembilan puluh) dengan kategori AA.
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama luar negeri yang transparan.
 - d. Pelaksanaan pemantauan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Jenderal serta pelaporan yang lengkap, akurat, dan terkini.
 - e. Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan *road map* dengan Renstra).
 - f. Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran.
13. Mekanisme Proses Pengusulan DAK Yang Transparan (Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah), dicapai melalui strategi:
 - a. Bidang Irigasi, Mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi yang menambah luas layanan maupun indeks tanam, dan upaya menjaga kondisi jaringan irigasi dengan rehabilitasi jaringan irigasi
 - b. Bidang Jalan
 - ii. Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Mewujudkan integrasi dan konektivitas fungsi jaringan jalan;
 - iii. Meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pertanian, pelabuhan, bandar udara, transmigrasi, dan KSPN); dan
 - iv. Membuka daerah terisolir (Daerah terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar).
 - c. Bidang Air Minum, Mewujudkan pemenuhan 100 (seratus) % akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target

- Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- d. Bidang Sanitasi, Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah.
 - e. Bidang Perumahan
 - v. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan Perumahan dan Permukiman layak di kawasan permukiman kumuh melalui DAK Reguler; dan
 - vi. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman (beserta PSU) layak di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat melalui DAK Afiriasi.
14. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, dicapai melalui strategi:
- a. Penguatan kebijakan *e-government*.
 - b. Penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi.
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan dan kompetensi SDM.
 - d. Penetapan *quick wins* penerapan *e-government*.
 - e. Pengendalian pengembangan sistem dan infrastruktur *e-government*.

C.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, *qualified*, dan berintegritas.

Program percepatan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, maka akan memperlancar pembangunan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu terobosan untuk mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2019, yakni percepatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung percepatan

pembangunan infrastruktur. Secara garis besar, beberapa kebijakan pengembangan sumber daya manusia antara lain:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang *problem solver*.
- Fokus pada peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- Pengembangan jabatan fungsional.
- Penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja yang terarah dan akurat.

Dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka strategi program pengembangan SDM difokuskan dan diarahkan pada :

1. Peningkatan Kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan)

a. Perancangan Kebutuhan Pelatihan

Pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas pelatihan dilakukan bersama antara Badan Pengembangan SDM bersama dengan Unit Organisasi terkait. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut antara lain :

- 1) Pencapaian target Renstra 2015-2019 dan Program Prioritas Nasional.
- 2) Permasalahan dilapangan termasuk hasil temuan.
- 3) Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
- 4) GAP Kompetensi Hasil *Assesment* sebagai bahan materi pelatihan bidang Manajemen.

b. Perancangan Metode Pendidikan dan Pelatihan

Metode pendidikan dan pelatihan dirancang sehingga lebih *applicable*. Penentuan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kurikulum yang dirancang secara *tailor made* sesuai kebutuhan Unit Organisasi.
 - 2) Program pendidikan vokasi yang dapat menghasilkan tenaga-tenaga terampil siap di lapangan ataupun para *Professional Master*
 - 3) Penentuan topik riset yang berkaitan dengan tugas dalam organisasi.
- Sedangkan metode pelatihan, dilaksanakan dengan komposisi 40-70% *on job experiece*, 10-20% mentoring dan *coaching*, serta 10-20% pelatihan di kelas, *e-learning*, ataupun *blended learning*.

c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan didukung pula dengan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Pemanfaatan NSPK yang dibuat Unor sebagai modul pelatihan.
- 2) Peningkatan kapasitas Widyaiswara/tenaga pengajar.
- 3) Pemanfaatan pakar/*expert* dari luar sebagai pengajar pendamping pelatihan/*guest iecturer* (Sektor Swasta, Lembaga Dalam dan Luar Negeri)
- 4) Sertifikasi keahlian profesi berstandar nasional setelah pelatihan (kerjasama dengan asosiasi profesi antara lain HATHI, KNBB, HPJI).

2. Peningkatan Akurasi Penilaian Kinerja

Pengembangan Talenta Pegawai dilaksanakan dengan mengukur 11 (sebelas) nilai potensi pada individu. Beberapa metode dalam peningkatan akurasi penilaian kinerja dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan *Integrated Assesment*
- 2) Pengembangan *Multirating 360°*

3. Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional dalam suatu organisasi merupakan motor penggerak terselenggaranya program-program untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Peningkatan Jabatan Fungsional dilakukan pada 2 (dua) aspek, yaitu :

a. Kualitas Jabatan Fungsional

- 1) Pemetaan Jabatan Fungsional (Jafung) PUPR sesuai dengan jenis, kebutuhan Unor dan Prioritas pembangunan infrastruktur PUPR
- 2) Optimalisasi fasilitasi dan tunjangan jafung.
- 3) Peningkatan kapasitas jafung.
- 4) Penempatan Jafung/WI dibawah Eselon II, III, dan IV, dan langsung berada di UPT Balai (Jafung di Balai Teknis dan WI di Balai Diklat).
- 5) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Jafung sebagai pelaporan monitoring kinerja.
- 6) *Knowledge Sharing Forum* sebagai wadah bertukar pengangalaman antara profesional dengan para Jafung/WI.

b. Kuantitas Jabatan Fungsional

Peningkatan kuantitas Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui Penetapan Program Magang di BUMN/Swasta yang saat ini melaksanakan proyek pembangunan PUPR.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Arah kebijakan Badan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional difokuskan pada pentingnya peran penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Dalam hal ini, adalah peran dalam hal penciptaan dan pengembangan teknologi serta penyiapan rekomendasi kebijakan mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Oleh sebab itu, maka diperlukan:

1. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai **scientific backbone** penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Menghasilkan teknologi yang siap pakai dan memberikan masukan dalam kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur sub-bidang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman. Badan Litbang PUPR mendukung Direktorat Jenderal dalam akselerasi dan penjaminan mutu penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui terobosan kebijakan dan penerapan teknologi hasil litbang.
2. Penguatan Badan Litbang sebagai **technostructure** dan **prime mover** dalam standarisasi, alih teknologi serta advis teknis guna memecahkan masalah-masalah di lapangan. Peran sebagai **technostructure** dan **prime**

mover akan menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampuserapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk jaminan mutu infrastruktur, Badan Litbang menyediakan layanan teknis berupa sertifikasi, inspeksi teknis dan layanan uji laboratorium.

3. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai **clearing house** terhadap kebijakan dan penerapan teknologi dari dunia industri maupun lembaga litbang lain baik dari dalam / luar negeri.

Dukungan teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh sumber daya konstruksi yang tersertifikasi serta SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas dan terpadu antarsektor dan wilayah serta didukung dengan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan yang akuntabel akan meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR khususnya dalam konteks pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas, pembangunan bendungan untuk peningkatan ketahanan pangan, air dan energi serta pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sarana dan prasarana umum, sarana air minum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan memenuhi infrastruktur dasar permukiman.

Guna mencapai sasaran yang dimaksud diatas, maka Badan Litbang PUPR menetapkan strategi pencapaian sasarannya melalui target-target sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi bidang PUPR sebesar 67 (enam puluh tujuh) % pada TA 2015; 69 (enam puluh sembilan) % pada TA 2016, dan 71 (tujuh puluh satu) % pada TA 2017, 73 (tujuh puluh tiga) % pada tahun 2018, dan 75 (tujuh puluh lima) % pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tahun 2015-2018, Badan Litbang telah mampu melampaui target yang ditetapkan yakni berturut turut dari TA 2015 adalah 85 (delapan puluh lima) %, 100 (seratus) %, 74,07 (tujuh puluh empat koma nol tujuh) % dan 101,44 (seratus satu koma empat empat) %.
2. Peningkatan kualitas layanan teknis Balitbang kepada stakeholder sebesar 72 (tujuh puluh dua) % pada tahun 2015, 74 (tujuh puluh empat) % pada tahun 2016, 76 (tujuh puluh enam) % pada tahun 2017 dan 78 (tujuh puluh delapan) % pada tahun 2018.

Pencapaian target tersebut dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas diseminasi yang lebih masif melalui kegiatan; **(1) Diseminasi Terpadu**, **(2) Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi**, dan **(3) Home Doctor**, dan **(4) Forum Bisnis**, kepada target grup yang jelas yaitu kepada **unsur pemerintah dan mitra**. Hal ini tidak lain agar hasil/produk litbang dapat lebih dikenal dan diterapkan.

Target grup **Pemerintah Pusat dan Mitra** dilakukan melalui **Diseminasi Terpadu Regional** bagian dari rangkaian kegiatan **Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR** Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kepada unsur Unit Organisasi, Balai/Balai Besar, Satker, Kontraktor/

Konsultan pelaksana pekerjaan Kementerian PUPR. Sedangkan Target grup **Pemerintah Daerah dan Mitra** dilakukan melalui **Diseminasi Terpadu Regional dan Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi** bagian dari rangkaian kegiatan **Rapat Kerja Dana Alokasi Khusus (Raker DAK) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Bimbingan Teknis DAK** kepada SKPD/ Dinas/ Badan/ UPTD, Kontraktor/ Konsultan pelaksana pekerjaan DAK/ Dekon/ TP.

3.4 KERANGKA REGULASI

Penyusunan kebutuhan kerangka regulasi pada Renstra tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target prioritas nasional Nawacita pada RPJMN 2015-2019. Kerangka regulasi akan memastikan terpadu dan terintegrasinya program dan kegiatan dalam kerangka pembangunan, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah, sejalan dengan agenda prioritas pada pencapaian semua dimensi pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional. Saat ini efektivitas regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ada belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyesuaian dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas.

Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah. Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke dalam dokumen perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana **pada Lampiran**.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 memerlukan keberlanjutan penguatan kerangka kelembagaan yang merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta SDM aparatur agar mampu melaksanakan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran mewujudkan pemerintah yang efektif, akuntabel dan sinergis. Arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan dalam *Review* Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 ini bertitik tolak pada Kerangka Kelembagaan yang telah disusun dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

1. Mengoptimalkan kelembagaan Kementerian PUPR yang saat ini, namun bila diperlukan dapat membentuk kelembagaan pengelolaan/koordinasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.
Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui:
 - 1) Penguatan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan Kementerian PUPR, yang dikoordinasikan oleh Setjen;
 - 2) Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian PUPR untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
2. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi;
 - 1) Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antarlembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 - 2) Penyediaan SDM aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi;
 - 3) Penguatan kelembagaan pengelola program prioritas pembangunan.
3. Penguatan kelembagaan Kementerian PUPR dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kelembagaan Kementerian PUPR yang diperkuat sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - 2) Memiliki keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
 - 3) Analisis biaya dan manfaat secara cermat sehingga hasil penataan kelembagaan lebih transparan, efektif, dan efisien.

Penguatan kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang PUPR, akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita. Adapun kegiatan kerangka kelembagaan dari masing-masing elemen

dalam Nawacita dituangkan dalam lampiran Matriks Kegiatan Kerangka Kelembagaan yang terdiri dari program, kegiatan, sasaran, indikator, target, dan unit organisasi eselon 1 pelaksana.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian PUPR yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (*merger*) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut diatas juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan egergi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun berdasarkan kepada hubungan internal dan antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Sepanjang 2015 – 2019, dalam aspek sumber daya manusia, telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IA) yang akan menangani peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik

dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya dan pembentukan Politeknik Pekerjaan Umum melalui Permen No. 06/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang infrastruktur lainnya, telah dibentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta perubahan fungsi Direktorat Bina Investasi menjadi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan pembentukan Balai Jasa Konstruksi. Adapun fungsi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi.

Tidak kalah penting telah dibentuk pula Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Eselon IA) untuk menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis pengembangan wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, terdapat perubahan Fungsi Ditjen Pembiayaan Perumahan Menjadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Sekretariat Jenderal juga terbentuk Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Dan Penambahan Fungsi Tanggap Bencana pada Pusat Data dan Informasi Teknologi. Di Ditjen Cipta Karya juga terbentuk Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Balai Prasarana Permukiman.

Oleh karena itu struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program mendefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di Kementerian PUPR secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan definisi kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PUPR yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan *eksternal*), yaitu:

1. **Program Pengelolaan SDA** meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen SDA;
 - b. Pembinaan Penatagunaan SDA;
 - c. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA;
 - d. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
 - e. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
 - f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak;
 - g. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
 - h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
 - i. Dukungan Manajemen DSDAN;
 - j. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan;

- k. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
 - l. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
 - m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
 - n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak;
 - o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA;
 - p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu.
2. **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
 - b. Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo.
3. **Program Penyelenggaraan Jalan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
 - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan;
 - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan;
 - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan;
 - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan;
 - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan;
 - g. Pengaturan dan Pembinaan Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan;
 - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol.
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman;
 - f. Penyelenggaraan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - h. Dukungan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar.
5. **Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Peningkatan layanan perencanaan penyediaan perumahan;
 - b. Peningkatan layanan fasilitasi pengembangan rumah umum dan komersial serta pembangunan PSU;
 - c. Peningkatan penyediaan rumah khusus dan PSU;
 - d. Peningkatan layanan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan kualitas rumah swadaya;

- e. Peningkatan penyediaan rumah susun dan PSU;
 - f. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
6. **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan;
 - b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan;
 - c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan;
 - d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan;
 - e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan;
 - f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
 - g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN);
 - h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999).
7. **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi;
 - b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
 - d. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - e. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
 - f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi.
8. **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR;
 - c. Pengembangan Kawasan Strategis;
 - d. Pengembangan Perkotaan;
 - e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- B. Program Generik**, merupakan program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan *internal* untuk mendukung pelayanan aparaturnya dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan *internal*), yaitu:
- 1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
 - b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
 - c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;

- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
 - e. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR; dan
 - f. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya;
 - b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR; dan
 - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman.
 3. **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang SDA;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
 - d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi;
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
 4. **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III;
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V.
 5. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;

- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai Target Kinerja Sasaran, baik Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target Kinerja Sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Target Kinerja Sasaran baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada Tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode Tahun 2010-2014. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa fokus target hingga akhir periode perencanaan pembangunan tahun 2019 selain untuk mendorong pertumbuhan akan banyak dicurahkan untuk mengatasi ketimpangan antardaerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antardaerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa agar pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia. Target Sasaran Strategis Kementerian (*outcome-impact*), Sasaran Program (*outcome*), dan Sasaran Kegiatan (*output*) yang sebagian merupakan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Lampiran.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Pembangunan infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Kunci sukses pembangunan infrastruktur terletak pada kesiapan perencanaan pembangunan yang matang, pendanaan pembangunan yang efisien, dan pola kelembagaan dan kerja sama yang efektif. Untuk mencapai manfaat yang optimal maka diperlukan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan infrastruktur yang bernilai tambah (*value for money*). Perencanaan berbasis nilai tambah ini yang secara langsung akan memengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan infrastruktur bidang PUPR oleh pemerintah- badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta. Keterlambatan

pembangunan infrastruktur membuat Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga dalam hal biaya logistik dan daya saing (*competitiveness*).

Target RPJMN Tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 (delapan) % sampai akhir periode perencanaan Tahun 2019, memerlukan kerja yang sangat keras dan tampaknya sulit tercapai dengan melihat *trend* pertumbuhan ekonomi nasional serta keterbatasan ruang fiskal saat ini. Untuk mencapai angka pertumbuhan 8 (delapan) %, dibutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp. 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) triliun, yang diproyeksikan pendanaannya akan dapat dipenuhi di semua sektor infrastruktur jika *debt to GDP ratio* dinaikkan, (saat ini 23 (dua puluh tiga) % - 24 (dua puluh empat) %), dan Kerjasama Pemerintah Swasta diatas 20 (dua puluh) %.

Sedangkan ruang fiskal dari APBN pemerintah hanya mampu mendanai kebutuhan investasi 25 (dua puluh lima) % atau berkisar Rp. 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) triliun. Sehingga 75 (tujuh puluh lima) % lainnya harus dicarikan pendanaan dari pihak lain seperti APBD, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat seperti yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, oleh karenanya iklim investasi dan skema pendanaan yang menarik investor diperlukan agar Sektor Swasta tertarik untuk melakukan Investasi Pembangunan Infrastruktur. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka pendanaan RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 4.796,2 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua) triliun.

Namun realisasinya sebagai ilustrasi dengan *debt to GDP ratio* yang saat ini, untuk Tahun 2017, pengeluaran negara totalnya sebesar Rp. 1.842,5 (seribu delapan ratus empat puluh dua koma lima) triliun, dan Pemerintah hanya dapat menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 206 (dua ratus enam) triliun di semua Sektor Infrastruktur, dengan demikian harus dapat dilakukan terobosan untuk pendanaan.

Penyelesaian permasalahan pendanaan infrastruktur akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, karena infrastruktur merupakan *input* pada aktifitas perekonomian yang besar dan merupakan pemicu penting dalam pertumbuhan. Pendanaan pembangunan infrastruktur melonjak drastis sejak awal pemerintahan Presiden RI ke-tujuh.

Dari sisi APBN pendanaan infrastruktur sudah semakin berkembang. Sampai dengan tahun 2019 dialokasikan Rp. 554 (lima ratus lima puluh empat) triliun atau 60 (enam puluh) % dari total APBN. Namun karena besarnya kebutuhan investasi infrastruktur tersebut, maka keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari keterlibatan Pemda, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat. Skema KPBU (Kerjasama

Pemerintah Badan Usaha) menjadi alternatif, meskipun di negara lain skema ini jarang dilakukan.

Agar dapat terwujud, Presiden memandang perlunya model pendekatan; pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas nasional yang berbasis maritim. Keempat, yaitu perlu adanya 'big picture' dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta.

Selama periode Tahun 2015-2019, Bappenas (2016) memproyeksikan total kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur bidang PUPR mencapai Rp. 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) triliun yang berasal dari APBN, APBD, dan Non-APBN. Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur jalan adalah sebesar Rp. 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 468 (empat ratus enam puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 265 (dua ratus enam puluh lima) Triliun), infrastruktur air bersih penanganan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 403 (empat ratus tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) Triliun serta Non-APBN Rp. 74 (tujuh puluh empat) Triliun), infrastruktur perumahan rakyat sebesar Rp. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 228 (dua ratus dua puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 100 (seratus) Triliun), dan infrastruktur SDA sebesar Rp. 451 (empat ratus lima puluh satu) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 264 (dua ratus enam puluh empat) Triliun serta Non-APBN 187 (seratus delapan puluh tujuh) Triliun). Total kebutuhan tersebut diatas diharapkan dapat dipenuhi melalui kontribusi dari seluruh *stakeholders*, yaitu Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya), Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/ Swasta.



Gambar 4.1 Kontribusi Dalam Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sedangkan kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra

Kementerian PUPR selama periode Tahun 2015-2019, untuk infrastruktur bidang PUPR dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 931,164 (sembilan ratus tiga puluh satu koma seratus enam puluh empat) triliun yang meliputi pengelolaan SDA sebesar Rp. 316,56 (tiga ratus enam belas koma lima puluh enam) triliun, penyelenggaraan jalan sebesar Rp. 278,17 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) triliun, pengembangan permukiman sebesar Rp. 128,1 (seratus dua puluh delapan koma satu) triliun, pengembangan perumahan sebesar Rp. 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam puluh enam) triliun, serta pengembangan pembiayaan perumahan sebesar Rp. 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) triliun.

Dalam realisasi pendanaan pembangunan bidang PUPR hingga Tahun 2019 ini, pemanfaatan modal swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan konsep Kerja Sama Pemerintah - BUMN/Swasta yang melibatkan BUMN/Swasta untuk turut berperan aktif mendanai infrastruktur dengan menjaminkan aset untuk mendapat tambahan modal, mengajukan pinjaman dengan syarat keuntungan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur telah mulai dilaksanakan meskipun belum dapat berjalan dengan baik karena kendala diantaranya kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung atau diterapkan, serta tidak semua infrastruktur bidang PUPR secara ekonomi dapat menarik minat investor; selain itu, untuk pemanfaatan skenario pembangunan yang lebih moderat dipertajam dalam Revisi Renstra ini.

Dengan begitu, Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang *ready* diantara yang *urgent* untuk mendukung pencapaian Sasraan Prioritas Pembangunan Nasional.

Kementerian PUPR akan melaksanakan pendekatan :

Pertama. Infrastruktur bidang PUPR dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan melalui dukungan infrastruktur PUPR bagi semua dimensi pembangunan nasional;

Kedua. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan semua sektor dan tidak parsial;

Ketiga. Perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan mempertimbangkan konektivitas nasional yang berbasis maritim melalui dukungan konektivitas baik darat, udara, maupun laut;

Keempat. Kementerian PUPR menyiapkan '*big picture*' dalam pengelolaan infrastruktur melalui keterpaduan antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam kerangka pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR pada 35 WPS serta antar WPS;

Kelima. Pengelolaan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan

potensi Swasta.

Kementerian PUPR juga berupaya menerapkan perencanaan berbasis nilai tambah (*value for money*), yang diharapkan akan langsung mempengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan proyek infrastruktur bidang PUPR, dan pada bulan Februari 2019 telah ditetapkannya Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menjadi Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta manfaat yang optimal akan dapat diwujudkan melalui penerapan perencanaan infrastruktur yang inovatif dan bernilai tambah serta efektivitas pola pendanaan untuk dapat meningkatkan kelayakan finansial pembangunan infrastruktur bidang PUPR, diperlukan skema kerja sama aliansi strategis antara Kementerian PUPR dengan Swasta yang tidak hanya menempatkan Kementerian PUPR sebagai penanam modal (*sunk cost*), tetapi juga dapat mengikutsertakan BUMN bahkan BUMD, di dalam satu kelembagaan *joint venture* dengan pihak Swasta untuk berbagi tanggung jawab atas pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur bidang PUPR beserta pembagian pendapatan yang dihasilkan.

Meskipun tidak mendapatkan keuntungan sebesar pihak Swasta, dana bagi hasil yang didapatkan dengan pola kerja sama dan kelembagaan ini, dapat digunakan untuk modal investasi tambahan bagi pembangunan infrastruktur bidang PUPR selanjutnya. Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian Sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang meliputi:

Pertama. Pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR berasal dari APBN Kementerian PUPR yang meliputi APBN murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dari APBN Kementerian lain terkait antara lain dana desa, dana kesehatan dsb, dari APBD Pemerintah Daerah terkait, serta dari penyertaan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, antara lain melalui pendanaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), *direct lending* luar negeri, dan lain sebagainya.

Optimalisasi terhadap alternatif sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pendanaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (*comparative advantage*) masing-masing

jenis pendanaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang dapat mengoptimalkan pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional.

Pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR guna mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan keterlibatan Swasta dan BUMN, pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipal Development Fund (MDF). Dengan demikian keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan infrastruktur bidang PUPR yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta risiko yang proporsional. Sedangkan pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program Kementerian PUPR, antara lain pencapaian SDGs dan penanganan perubahan iklim.

Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri dilakukan dengan selektif dan diutamakan untuk membiayai infrastruktur bidang PUPR yang produktif agar hasil yang didapat dari beroperasinya infrastruktur tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembayaran pinjaman, selain itu juga mempertimbangkan keseimbangan antarwilayah dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur prioritas di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Kawasan Indonesia Timur, untuk dapat mendorong pertumbuhan pada wilayah tersebut dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan penerusan pinjaman, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan.

Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk Program dan Kegiatan Prioritas Nasional serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment, engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan). Untuk pemenuhan sisa target Renstra Kementerian PUPR, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek strategis yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Selain itu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Municipal Development Fund* (MDF) dikembangkan mengingat sumber

pendanaan untuk membangun infrastruktur perkotaan masih sangat terbatas.

Kedua. Kebijakan alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas (belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas) serta efisiensi belanja aparatur, dan diarahkan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kementerian PUPR. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Ketiga. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting* dan prinsip *money follow program*) antara lain penguatan mekanisme penelaahan yang diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik. Alokasi pendanaan per program di dalam kerangka pendanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015- 2019 ditampilkan pada Tabel 4.1.

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)										TOTAL KENSTRA 2015-2019	TOTAL ALOKASI APBN 2015-2019	ALOKASI APBN TERHADAP KENSTRA
	2015		2016		2017		2018		2019				
	KENSTRA	APBN	KENSTRA	APBN	KENSTRA	APBN	KENSTRA	APBN	KENSTRA	APBN			
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	30.813	31.101	62.215	26.294	72.407	33.268	37.309	37.825	39.749	40.210	242.493	168.698	70%
PENYELENGARAAN JALAN	57.051	57.394	69.948	38.235	52.105	45.397	55.121	46.351	43.952	44.004	278.177	231.441	83%
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	19.798	24.201	16.219	26.855	16.890	29.668	18.634	31.552	20.287	128.106	91.828	72%
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	7.735	8.780	8.142	32.732	8.149	55.410	9.990	39.973	7.819	184.663	41.835	23%
PENGEMBANGAN PEMBAYARAN PERUMAHAN*	342	559	362	215	383	237	406	254	430	261	1.923	1.526	79%
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	723	924	639	1.144	320	1.365	338	1.187	558	5.343	2.578	48%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PUPR	599	657	726	451	768	558	640	600	703	531	3.436	2.797	81%
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR	105	105	113	108	120	105	129	104	142	99	609	521	86%
RESELIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR	516	521	520	548	565	617	612	614	1.295	541	3.508	2.841	81%
PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR	569	537	625	433	668	454	757	495	832	398	3.451	2.317	67%
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	525	949	375	1.188	256	1.303	273	1.421	228	5.387	1.657	31%
TOTAL	114.844	119.655	169.363	91.659**	308.935	106.251	221.025	115.478	181.236	114.996	857.096	548.039	64%

Tabel 4.1. Alokasi Pendanaan Kementerian PUPR Per Program Tahun 2015-2019

Catatan :

*) di luar BA 999

**) tanpa self-blocking Rp 6,98 T

Alokasi APBN Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp. 548.039 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh sembilan) miliar atau sebesar 64 (enam puluh empat) % dari total kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 857.096 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) miliar.

Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas nasional, maka harus ada skema dan sumber pendanaan lainnya. Sebagai salah satu skema Kementerian PUPR telah melaksanakan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan Sampai dengan tahun 2017 DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR sebesar Rp.108.500 (seratus delapan ribu lima ratus) miliar. Sehingga sisa kebutuhan Pendanaan untuk mencapai target Renstra Kementerian PUPR yang akan di wujudkan melalui skema dan sumber pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta seiring dengan melanjutkan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR.

Adapun secara detil pada masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Lumpur Sidoarjo**

Terdapat beberapa *output* pada RPJMN 2015-2019 adalah merupakan *outcome* (contoh: *output* jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (*outcome*), sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km(*output*), tetapi tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru; 3) terdapat pekerjaan yang merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jaringan irigasi dan bendung kewenangan daerah. Kemudian dengan masuknya program baru di bawah Ditjen SDA yaitu **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo**, kebutuhan pendanaan juga menjadi meningkat dengan adanya tugas baru tersebut.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengelolaan SDA** dan **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 31.101 (tiga puluh satu ribu seratus satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 9 (sembilan) % atau sebesar Rp. 28.294 (dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 11

(sebelas) % atau sebesar Rp. 33.268 (tiga puluh tiga ribu dua ratus ena puluh delapan) miliar, sedangkan alokasi untuk tahun 2018 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 37.309 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 39.749 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) miliar. Total alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga Tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 53 (lima puluh tiga) % atau sebesar Rp. 169.722 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua) miliar.

2. Penyelenggaraan Jalan

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Penyelenggaraan Jalan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 57.394 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) miliar atau 21 (dua puluh satu) % dari target pendanaan Renstra 2015 – 2019 yaitu Rp. 278.177 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh) miliar, Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 41.194 (empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat) miliar (15 (lima belas) %), perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.397 (empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) miliar (16 (enam belas) %), sedangkan alokasi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 46.351 (empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu) miliar (17 (tujuh belas) %), dan tahun 2019 sebesar Rp. 44.064 (empat puluh empat ribu enam puluh empat) miliar (16 (enam belas) %). Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 84% (delapan puluh dua) atau sebesar Rp. 234.400 (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus) miliar.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pencapaian target sasaran pembangunan permukiman memerlukan pendanaan sekitar Rp. 832 (delapan ratus tiga puluh dua) triliun. Hal ini merupakan target nasional yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Meskipun demikian, rencana anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya, pada Renstra PUPR berjumlah Rp. 128.106 (seratus dua puluh delapan ribu seratus enam) miliar, atau 14 (empat belas) % dari kebutuhan pendanaan. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.

Dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan permukiman, Ditjen Cipta Karya telah mengupayakan skema pendanaan non APBN, salah satunya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2015-2017, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kerjasama dengan 6 (enam) perusahaan dengan besaran dana Rp. 8 triliun yang dialokasikan untuk kegiatan fisik dan pelatihan bidang keciptakaryaan. Pendanaan bidang Cipta Karya didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor air minum dan sanitasi. Pengalokasian DAK untuk sektor air minum dan sanitasi bertujuan

untuk meningkatkan akses masyarakat di kab/kota terhadap air minum dan sanitasi. Hingga tahun 2017, alokasi DAK untuk air minum dan sanitasi mencapai Rp. 8,4 (delapan koma empat) triliun.

Adanya direktif Presiden seperti pembangunan Venue Asian Games XVIII dan pengembangan kawasan perbatasan menyebabkan terjadinya pergeseran sasaran kegiatan. Di samping itu, juga terdapat perubahan nomenklatur dan satuan output yang disesuaikan dengan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sedangkan alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk tahun 2015 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 19.798 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 17.718 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.890 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 18.634 (delapan belas ribu enam ratus tiga puluh empat) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 20.287 (dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 73 (tujuh puluh tiga) % atau sebesar Rp. 93.327 (sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh) miliar.

4. Pengembangan Perumahan

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 7.735 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar Rp. 8.142 (delapan ribu seratus empat puluh dua) miliar, alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 8.149 (delapan ribu seratus empat puluh sembilan) miliar, sedangkan pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) miliar, dan proyeksi tahun 2019 adalah sebesar Rp. 7.819 (tujuh ribu delapan ratus sembilan belas) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) % atau sebesar Rp. 41.835 (empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima) miliar.

5. Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**, (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp. 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) miliar, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp. 1.049 (seribu empat puluh sembilan) miliar. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNBP dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp. 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) miliar. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp. 164.492 (seratus enam puluh empat ribu empat

ratus sembilan puluh dua) miliar tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi.

Perubahan nama Unit Organisasi semula Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur Unit, Program, Kegiatan, Output, Suboutput, dan Komponen serta perubahan fungsi semula Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum menjadi Fungsi Ekonomi.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 29 (dua puluh sembilan) % atau sebesar Rp. 559 (lima ratus lima puluh sembilan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 224 (dua ratus dua puluh empat) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 254 (dua ratus lima puluh empat) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 261 (dua ratus enam puluh satu) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80 (delapan puluh) % atau sebesar Rp. 1.535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) miliar.

6. Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur

Pada **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur**, terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) Beberapa sasaran di dalam RPJMN yang semula pada level *outcome* disesuaikan menjadi level *output* dalam Renstra; 2) Penyesuaian sasaran dan satuan yang terdapat di dalam RPJMN dan Renstra dari sisi nomenklatur, yaitu sasaran: "Jumlah Badan Usaha" dalam RPJMN disesuaikan menjadi sasaran: "Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar" dalam Renstra. Adapun untuk target disesuaikan dengan melakukan konversi; 3) Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) miliar di dalam RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, oleh karenanya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5.743 (lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) miliar yang sudah mencakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

Realisasi pendanaan untuk Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi, untuk tahun 2015 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) milyar, tahun 2016 adalah sebesar 11 (sebelas) % atau sebesar Rp. 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) milyar, perkiraan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 6 (enam) % atau sebesar Rp. 320 (tiga ratus dua puluh) milyar, sedangkan realisasi untuk tahun 2018 adalah sebesar 6 (enam) % atau sebesar Rp. 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) milyar,

dan tahun 2019 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 558 (lima ratus lima puluh delapan) milyar. Total realisasi dan perkiraan realisasi hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 45 (empat puluh lima) % atau sebesar Rp. 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) milyar.

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pada **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, terdapat perbedaan struktur *output* dan pendanaan dalam Renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan: 1) adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 (enam) unit Eselon II menjadi sebanyak 5 (lima) unit Eselon II, hal ini berpengaruh terhadap struktur *output* dan targetnya; 2) adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah, hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 525 (lima ratus dua puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 9 (sembilan) % atau sebesar Rp. 450 (empat ratus lima) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 256 (dua ratus lima puluh enam) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 228 (dua ratus dua puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 32 (tiga puluh dua) % atau sebesar Rp. 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) miliar.

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian PUPR dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 19 (sembilan belas) % atau sebesar Rp. 657 (enam ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 453 (empat ratus lima puluh tiga) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 558 (lima ratus lima puluh delapan) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 600 (enam ratus) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 531 (lima ratus tiga puluh satu) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah

sebesar 81 (delapan puluh satu) % atau sebesar Rp. 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) miliar.

9. Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR

Pada **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat perbedaan dengan target sasaran RPJMN berdasarkan hasil penajaman yaitu terdapat beberapa penelitian yang melewati siklus penelitian dengan lengkap. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: naskah ilmiah, model sistem, model fisik, dan prototype. Beberapa teknologi dapat dihasilkan langsung dari tahapan naskah ilmiah langsung menjadi prototype, dalam kasus demikian maka akan mempercepat pencapaian output.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk tahun 2015 adalah sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) % atau sebesar Rp 521 (lima ratus dua puluh satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 0,6 (nol koma enam) % atau sebesar Rp 548 (lima ratus empat puluh delapan) miliar, alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 0,58 (nol koma lima delapan) % atau sebesar Rp 617 (enam ratus tujuh belas) miliar, sedangkan pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 0,6 (nol koma enam) % atau sebesar Rp 614 miliar (enam ratus dua belas), dan tahun 2019 adalah sebesar 0,52 (nol koma lima dua) % atau sebesar Rp 540 (lima ratus empat puluh) miliar.

10. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Pada **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat beberapa perbedaan dengan RPJMN diantaranya:

- 1) Adanya perubahan indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra Itjen matriks perubahan yang didasari hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Eselon I dengan Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Juni 2017 dimana Indikator Kinerja Itjen terlalu sempit dan sulit untuk diukur, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan kontribusi kegiatan Eselon 2. Perubahan indikator kinerja tersebut berdampak pula pada perubahan nama kegiatan level Eselon 2;
- 2) Adanya perbedaan target pendanaan antara Renstra sebesar Rp. 608,82 (enam ratus delapan koma delapan dua) milyar dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 413,80 (empat ratus tiga belas koma delapan nol) milyar, yang disebabkan Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dalam RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan hanya untuk mendanai kegiatan teknis Itjen, diluar kegiatan layanan perkantoran berupa belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2015 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 105 (seratus lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 18 (delapan belas) % atau sebesar Rp. 110 (seratus sepuluh) miliar, tahun 2017 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar 105 (seratus lima) miliar, tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 104 (seratus empat) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar 99 (sembilan puluh sembilan) miliar. Total pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 86 (delapan puluh enam) % atau sebesar Rp. 523 (lima ratus dua puluh tiga) miliar.

11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR

Untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR**, terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra sebesar Rp. 3.471 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) miliar sedangkan dalam RPJMN sebesar Rp. 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) miliar, hal ini disebabkan dalam RPJMN belum memasukan biaya pembayaran gaji, tunjangan, operasional perkantoran serta kegiatan dukungan lainnya. Selain itu terdapat perbedaan struktur nomenklatur kegiatan, sasaran kinerja, indikator serta target pada RPJMN dengan Renstra disebabkan Struktur Organisasi sekarang berbeda dengan struktur yang diusulkan pada waktu penyusunan RPJMN.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM, untuk tahun 2015 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 414 (empat ratus empat belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 454 (empat ratus lima puluh empat) miliar, sedangkan pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 495 (empat ratus sembilan puluh lima) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 67 (enam puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 2.298 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan) miliar.

BAB V

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 merupakan penajaman strategi pencapaian target-target yang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk adanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives* sampai akhir periode renstra 2019. Selain itu revisi renstra ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan organisasi Kementerian PUPR sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini sebagai acuan yang memuat arahan penyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap Unit Organisasi Eselon 1 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mencapai Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan prioritas nasional dengan memenuhi aspek akuntabilitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019 ini, memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja maksimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mencapai target-target prioritas nasional perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan

pendanaan yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (*local capacity building*) sehingga kompetensi dan kemandirian

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT ORGANISASI/ PEMRAKARSA
-----	---------------------------	--------------------------------

Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK.

Dengan penyelesaian Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 diharapkan dapat menjadi panduan bagi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR bagi internal dan eksternal Kementerian PUPR.

Rincian Renstra PUPR Tahun 2015-2019 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

1	Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2	Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Umum
3	Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya
4	Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Penyediaan Air Minum	
5	Prosedur Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	
6	Perjanjian Pendahuluan Jual Beli	Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
7	Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
8	Keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pembentukan Lembaga	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
9	Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha	
10	Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Jasa Konstruksi	

A. KERANGKA REGULASI

B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI**

TUJUAN 1: "Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardesa/raja, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan"

UNIT ORGANISASI: **DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM /OUTCOME/SASARAN KEGIATAN /OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN	CAPAIAN					ANGGARAN (dalam milyar)								
			2015		2016		2017		2018		2019					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																
SASARAN STRATEGIS																
1. Meningkatkan kemampuan pembangunan infrastruktur perdesaan, perbatasan, antar desa, dan antar tingkat pemerintahan																
Indeks nilai dukungan fisik infrastruktur perdesaan (termasuk ketepatan pembangunan kawasan)																
%																
77																
76,5																
88,9																
103,2																
100																
100																
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI																
SASARAN PROGRAM:																

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					PERUBAHAN CAPAIAN	ANGGARAN (dalam rupiah)					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN
			CAPAIAN						CAPAIAN						
			2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)	2019 (7)		2015 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)		
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
1	ISK.1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	%	0	0	0	0	70	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.143,15	46.143,15
OUTPUT KEGIATAN :															
1 - Pembinaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi															
a. Poli Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi															
							1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,15	12.147,15
OUTPUT KEGIATAN :															
2 - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi															
a. Berlomba Waktu/Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi															
		Hari	0	0	0	0	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,00	33.996,00
KEGIATAN 1.2.2 : PEMBINAAN PENYELINGGAHAAN JASA KONSTRUKSI															
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA PENYELINGGAHAAN JASA KONSTRUKSI															
1 - SK 1.2.2.1. Peningkatan Manajemen, Monitoring Mutu, Koordinasi dan Kerjasama Kerja (K3), Terbit Pengadaan dan Administrasi Kontrak															
	L	ISK2. Peningkatan Kinerja Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	41,3	5,94	8,31	11	11	40	40.808,34	29.157,36	17.495,91	14.144,68	18.400,00	120.036,31
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi														
									40.808,34	29.157,36	17.495,91	14.144,68	18.400,00	120.036,31	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN	ANGGARAN (dalam rupiah)					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN
			CAPAIAN							CAPAIAN						
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
a.	Jumlah Droit NGPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Droit NGPK	7	7	7	7	7	35	20.612,52	19.485,83	8.841,22	5.712,76	3.850,00	58.522,33		
b.	Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Droit Profil	5	5	5	5	5	25	20.225,82	9.671,55	8.634,69	8.431,92	14.550,00	61.513,96		
KEGIATAN 1.2.3 : PEMBINAAN KEBERAGAMAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI																
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA KEBERAGAMAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI																
1	SK 1.2.3.1 : Peningkatan Pemasok Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang Berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan								31.761,30	24.233,68	20.425,74	14.884,23	21.475,82	114.982,76		
	1. ISO 1. Pemasok Kendaraan BUK Berkinerja Baik	%	323	251	115,8	64,75	11	184	27.402,11	19.837,88	13.503,25	11.410,44	10749,00	82.902,67		
OUTPUT KEGIATAN :																
Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi																
	a. Jumlah Droit NGPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Droit NGPK	2	4	4	6	6	24	23.806,82	17.626,63	3.826,51	5.340,49	6.550,00	57.170,45		
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Droit Profil	4	4	4	4	5	21	3.575,29	2.211,25	9.676,74	6.069,94	4.199,00	25.732,22		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN	ANGGARAN (dalam rupiah)					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN
			CAPAIAN							CAPAIAN						
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2	ISK.2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Produk Unggulan	%	106	186	469	188	555	15	4.359.119	6.395.719	7.122.49	3.475.719	10.726.82	32.080.09		
OUTPUT KEGIATAN :																
Layanan Pembinaan Komral/Pasok dan Produk Lokal Unggulan																
a.	Jumlah Droti NSPK Pembinaan Komral Pasok dan Produk Lokal Unggulan	Droti NSPK	0	4	4	6	5	19	2.348.444	4.700.710	5.057.91	703.30	8.566.82	21.377.17		
b.	Jumlah Prodi Pembinaan Komral Pasok dan Produk Lokal Unggulan	Droti Prodi	4	4	4	4	4	20	2010.75	1.695.10	2.064.58	2.772.49	2.160.00	10.702.92		
KEGIATAN 1.2.4 : KERJA SAMA DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI																
UNIT KERJA : DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBINAAN																
1 SK.1.2.4.1 : Peningkatan Kinerja dan Pembinaan Jasa Konstruksi																
1	ISK4. Peningkatan Kinerja dan Pembinaan Jasa Konstruksi	%	161	284	244	662	24	199	188.644,3	239.807,9	67.284,29	143.070,8	228.578,7	835.408,14		
OUTPUT KEGIATAN :																
1	Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi								123.082,8	211.516,8	32.525,02	332.522,1	215.351,4	734.998,22		
a.	Jumlah Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi	Angkutan	123	218	1.808	5.073	1.842	12219	0	211.516,8	32.525,02	332.522,1	215.351,4	734.998,22		
2	Layanan Kerja Sama Lembaga Perempuan dan Masyarakat Serta Pembinaan Jasa Konstruksi								35.563,52	28.291,11	14.759,28	10.548,76	11.227,26	100.409,92		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN	ANGGARAN (dalam rupiah)					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN		
			CAPAIAN							TOTAL CAPAIAN	CAPAIAN						PERUBAHAN CAPAIAN	
			2015	2016	2017	2018	2019				2015	2016	2017	2018				2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
	d. Jumlah Droti NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pembedayaan Jasa Konstruksi	Droti NSPK	3	1	2	2	1	9	26.088,20	16.723,92	748,11	3.434,27	1.030,00	47.974,50				
	b. Jumlah Prodi Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pembedayaan Jasa Konstruksi	Prodi	3	4	4	4	4	19	9.545,32	11.567,19	14.011,17	7.114,49	10.197,26	52.435,42				
KEGIATAN 1.2.5 : PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI																		
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI																		
1.5K.1.2.5.1 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten																		
	1. Output Kegiatan : a. Jumlah Prodi Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	%	6,79	7,44	6,75	9,06	4	24,98	28.099,16	28.334,58	20.432,70	15.731,74	18.450,00	111.048,18				
	b. Jumlah Prodi Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Droti Prodi	4	3	4	4	6	20	4.632,54	9.544,62	7.648,28	9.716,58	10.990,00	42.442,03				
KEGIATAN 1.2.6 : PENYENGGAMAAN PELAYANAN TERINSI DAN ADWINSIASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI																		
UNIT KERJA : SEKRETERAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI																		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN					PERUBAHAN CAPAIAN	ANGGARAN (dalam rupiah)					PERUBAHAN CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	SK 1.2.4.1: Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya								296428,79	217439,52	146.073,50	136.309,28	224.940,55	1.021.391,64	
	L	Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	5	4	5	5	6	26	296428,79	217439,52	146.073,50	136.309,28	224.940,55	1.021.391,64	
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								23.867,59	47.754,08	30.420,49	17.801,31	19.288,20	139.151,67	
	a.	Jumlah layanan Manajemen	3	2	3	3	4	15	23.867,59	47.754,08	30.420,49	17.801,31	19.288,20	139.151,67	
2	Layanan Internal (Overhead)								200.778,03	83.622,86	39.389,42	16.406,73	87.142,41	427.339,45	
	a.	Jumlah layanan Internal	1	1	1	1	1	5	200.778,03	83.622,86	39.389,42	16.406,73	87.142,41	427.339,45	
3	Layanan Fungsional								71.763,17	86.262,58	76.263,59	102.101,25	98.696,77	435.087,35	
	a.	Jumlah layanan Fungsional	1	1	1	1	1	5	71.763,17	86.262,58	76.263,59	102.101,25	98.696,77	435.087,35	
4	Layanan Dukungan Manajemen Satek								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,17	
	a.	Jumlah layanan Keagamaan	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813,17	

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

TUJUAN 1: "Menyenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardesa/daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan"

UNIT ORGANISASI: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM REGIONAL/DITP/INDIKATOR)	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Ribu Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
1.														
SASARAN STRATEGIS														
Meningkatkan ketepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan, urbanistik dan meningkatkan pemerintahan.														
	Indikator cakupan infrastruktur PUP terhadap ketepatan pengembangan kawasan	%	77	76,59	88,94	103,24	100	100						
SP1. Meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan dan penganggaran									525.000	414.934.918	256.243.528	273.520.074	291.453.559	1.236.900.069

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/PACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
SASARAN PROGRAM :															
1.	ISPI - Tingkat Kelengkapan Kebijakan, Penencanaan, Pelaksanaan, dan Penganggaran Pembangunan Bidang PUPK	%	80,2	77,0	91,8	96,19	100	100							
KEGIATAN 1.1.1 : PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN INFRASTRUKTUR MELAYU BIDANG PUPK															
UNIT KERJA : PUSAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PERENCANAAN UMUM DAN PERUMAHAN BANGUNAN															
1.	SK 1.1.1.1: Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur wilayah bidang PUPK		72.380	56.156	36.293	32.834	35.118	236.781							
	(1) Tingkat kelengkapan perencanaan dengan pelaksanaan (sewa) atau kontrak, dan kontrak/SPK	%	80,3	80,3	95,3	100	100	100							
	(2) Tingkat kelengkapan hitungan struktur PUPK dan SPK	%	78,3	75,6	86,6	94,52	100	100							
	OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Kebijakan dan Strategi Kelengkapan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPK Antisektor / Wilayah	Dokumen Rumusan / Rencana	11	10	7	6	10	44							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACT), SASARAN PROGRAM (OUTCOME), SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAP					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYESI	TOTAL			
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	(15)		
1	a.	Jumlah dokumen numison kebijakan dan strategi, rencana/longleq portleq serlu rencana strategis kelpepuluan, perencanaan wilayah/wilayah, wleqyeh bidang PUPK, onlonektor/wleqyeh yang disusun dan difallosi	Dokumen Rencana / Rencana	11	10	7	6	10	44							
			Dokumen Rencana	13	10	11	12	13	59							
2	c.	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan hltosltuktur bidang PUPK, klpoudu onlonektor, onlonektor, pengembangan stobhlglt, onlonektor, pemertlrlan, dan onlonektor yang disusun dan difallosi ksl	Dokumen Rencana	13	10	11	12	13	59							
			Dokumen Rencana	13	10	11	12	13	59							
3			Dokumen Rencana	4	2	1	1	4	12							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACI), SASARAN PROGRAM (OUTPUT), SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAP					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYESI	TOTAL			
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018		2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
4.	Berkontribusi hasil analisis dampak dan manfaat terhadap pengembangan infrastruktur PUPK	Dokumen / Rekomendasi	4	2	1	1	4	12								
			g.	Dokumen Rencana	Dokumen Rencana	4	2	1	1	4	12					
5.	Skema Penyalangan Pengembangan yang Disusun dan Ditahsilkan	Dokumen Rancangan	1	0	1	1	3	6								
			g.	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan Mitohotkul PUPK	Dokumen / Rekomendasi	2	4	3	2	6	17					
			g.	Jumlah dokumen rancangan skema penyalangan yang disusun dan ditahsilkan	Dokumen Rancangan	1	0	1	1	3	6					
4.	Layanan Internal	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12								
			g.	Jumlah laporan layanan internal yang dibicarakan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12					

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL	
			REALISASI CAPAIAN						REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 1.1.2 : PBIUKG ATAN SIMKONVANSI PROGRAM DAN EVALUASI KETEPADUAN INFRASTRUKTUR PERBUJARAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
UNIT KERJA : PUSAT PEMBANGUNAN DAN EVALUASI KETEPADUAN INFRASTRUKTUR PERBUJARAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
1.															
	SK 1.1.2.1 : Peningkatan Siber online Program dan Evaluasi Kelempaan Infrastruktur PUPR														
(1)	Tingkat Siberisasi Program dan Evaluasi Kelempaan Infrastruktur PUPR	%	80,27	73,68	88,34	89,88	100	100							
	OUTPUT KEGIATAN :														
1.															
	Program Jangka Pendek dan Tahapan Kelempaan yang telah dilaksanakan untuk 35 WPS	Pedoman/ Dokumen Kumusan	12	9	9	8	12	50							
	a. Jumlah materi faktor siterisasi program, kelempaan pembangunan infrastruktur PUPR yang disusun dan diteliti	Pedoman	1	1	0	1	3	4							
	b. Jumlah lunasan program tahunan untuk 35 WPS yang siterisasi	Dokumen Kumusan	3	2	2	2	3	12							
	c. Jumlah layanan teknis yang dapat diakses oleh siterisasi	Dokumen	6	3	4	2	3	18							
									68.372	70.805	35.251	30.989	31.426	236.840	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/PACI)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGUP					ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYeksi	TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Jumlah dokumen pengumpulan data dan informasi kelipadan online pengembangan kawasan dan Infrastruktur PUPR yang disektorisasi	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3						
			4	4	4	4	4	4							
			20	20	20	20	20								
3	layanan intend	Bahan Layanan	12	12	12	12	12	12							
			10	10	10	10	10								

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACI)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
KEGIATAN 1.1.3 : PENINGKATAN PERENCANAAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																	
UNIT KERJA : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																	
1.	SK 1.1.3.1 : Perencanaan ketepatan pengembangan kawasan strategis								123.174	106.099	68.420	106.681	106.751	391.649			
1.	Tingkat ketepatan perencanaan dengan Pedoman (berwujud) Antarkawasan	%	78,44	76,37	90,84	100	100	100									
OUTPUT KEGIATAN :																	
1.																	
Kelengkapan ketepatan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan perencanaan lintas sektor bidang PUPK																	
			Fedman					25									
			11					8					2				
			10					5					2				
			10					2					2				
			20														
g. Jumlah pedoman teknis perencanaan dan penting untuk ketepatan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur PUPK yang disusun dan ditahap																	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/PACI)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
11	D. Jumlah kelipdian teknis kelengkapan pengembangan kawasan strategis dan antlokawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPK yang dituln dan dituln	Pedoman teknis	1	3	0	0	0	4							
			3	4	5	6	12	32							
12	C. Jumlah rencana dkl jumlah kelengkapan program	Pedoman teknis	3	5	3	4	7	22							
			0	1	2	2	5	10							
13	B. Jumlah kendaraan dda biliti infrastruktur wilayah pengabdian dan cadangan lahan untuk 35 WRS	Pedoman teknis	0	1	2	2	5	10							
			22	8	3	7	25	65							
Kerencana kelengkapan pengembangan kawasan strategis dan antlokawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPK			22	8	3	7	25	65							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/PACI)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL							ANGGARAN (Juta Rupiah)												
			REALISASI CAPAIAN					TANGGAL	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL								
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018		2019							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
4. Areal labusasi pada kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang dibangun	d. Rencanakelempoduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Pedoman teknis	22	6	3	4	30	67														
									Dokumen	3	5	3	4	7	22							
										Unit Angkutan Cerdas	0	1	2	4	5	12						
											Lokasi	0	1	2	0	5	8					
									d. Jumlah rencana bisnis area hibridasi	Dokumen	3	5	3	0	7	18						
											b. Fungsi angkutan cerdas yang dibangun pada kawasan strategis	Unit Angkutan Cerdas	0	1	2	4	5	12				
									c. Fasilitas pengisian bahan untuk area hibridasi	Lokasi			0	1	2	0	5	8				
											5. Layanan Hibrid	Sasaran Layanan	12	12	12	12	12	12				
									d. Jumlah laporan layanan hibrid yang dilaksanakan	Bulan Layanan									12	12	12	12

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					TARGET TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL				
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
KEGIATAN 1.4 : Peningkatan PENCANAAN KETERADUAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN																	
UNIT KERJA : PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN																	
1.	SK 1.4.1 : Peningkatan Perencanaan Kelayakan pengembangan kawasan perkotaan										111.903	78.485	40.391	35.233	40.810	306.822	
1.	Tingkat kelengkapan Perencanaan dengan Pelaksanaan (sewa) dalam kawasan	%	78,68	77,77	89	100	100	100									
	OUTPUT KEGIATAN :																
1.	Area terdapat pada kawasan perkotaan yang dibangun	Rencana Teknis	7	10	10	1	5	23									
			Area Inklusif	0	0	0	0	1	1								
d.		Jumlah dokumen rencana teknis area terdapat pada kawasan perkotaan yang disusun dan dilengkapkan	Rencana Teknis	6	8	10	1	5	30								
b.		Jumlah dokumen rencana teknis area terdapat pada kawasan perkotaan yang disusun dan dilengkapkan	Rencana Teknis	1	2	0	0	0	3								

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACI), SASARAN PROGRAM (OUTPUT), SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN									
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL				
1)	c.	Araa Inklusif	0	0	0	0	1	1									
			18	18	16	8	13	73									
2)	Rencana Kelempaan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen	18	18	16	8	13	73									
			Dokumen	13	18	6	4	10	51								
				Dokumen	5	0	10	4	3	22							
b.	Jumlah dokumen rencana pengembangan keteknikal kawasan perkotaan dan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan diakhisi	Dokumen	5		0	10	4	3	22								
			14	5	5	5	5	32									
3)	Kelengkapan teknis Kelempaan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Dokumen/Laporan/Fedman	14	5	5	5	5	32									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/PACI); SASARAN PROGRAM (OUTCOME); SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TANGGAL					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			REALISASI CAPAIAN						REALISASI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a. Jumlah kelengkapan teknis: kelengkapan pengembangan kawasan perkebunan dengan hiris/struktur bidang pekerjaan umum dan perumohan rakyat yang diturun dan dilakukal	Dokumen	3	3	4	1	3	14						
	b. Jumlah layanan data dan hitemasi	Dokumen	5	1	1	1	1	9						
	c. Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program kelengkapan pengembangan kawasan perkebunan dengan hiris/struktur bidang pekerjaan umum dan perumohan rakyat	Dokumen	6	1	0	1	1	9						
4	Program jangka pendek: kelengkapan pengembangan kawasan perkebunan dengan hiris/struktur bidang pekerjaan umum dan perumohan rakyat	Dokumen Kunjungan/ Laporan	7	6	6	7	4	30						
	d. Jumlah rumusan program yang diturunkan	Dokumen Rumusan	1	5	3	6	2	17						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT/OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
11	Jumlah Layanan Teknis ketetapan pengembangan kawasan perkebunan dengan nilai tukar barang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Laporan	6	1	3	1	2	13							
			12	12	12	12	12	12							
5	Layanan Periklanan	Laporan	12	12	12	12	12	12							
			12	12	12	12	12	12							
KEGIATAN 1.1.5 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA															
UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH															
1.	SK 1.1.5.1 : Peningkatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Tingkat Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	100	100	140,342	92.357	73.907	67.763	77.757	452.146	
				8	4	7	11	12	44						
1.	Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan administratif kepegawaian	Laporan	8	6	7	11	12	11.475	9.500	6.300	5.418	5.900	38.593	
				8	6	7	11	12	44						
2	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data Informasi	Laporan	7	10	11	11	12	51	10.730	11.800	6.700	5.456	13.854	48.540	
			7	10	11	11	12	51							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACI), SASARAN PROGRAM (OUTPUT), SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI CAPAIAN				TARGE T	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL			
			2015	2016	2017	2018			2015	2016	2017	2018		2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
3.	Hukum, Kebijakan dan Informasi	Laporan	10	7	12	13	4	48								
			a.	Jumlah laporan produk dan bahan hukum	3	2	2	4	4	15						
			b.	Jumlah keahlihan kerjasama	5	2	4	5	5	21	21.533	18.900	7.030	5.774	9.187	62.444
4.	Administrasi Keuangan, Umum dan BHM	Laporan	13	5	11	11	12	52								
			a.	Jumlah laporan administratif keuangan, umum dan BHM	13	5	11	11	12	52	9.660	9.100	6.420	5.639	6.595	37.414
5.	Layanan Perencanaan	Bulan Laporan	12	12	12	12	12	12								
			d.	Jumlah laporan perencanaan	12	12	12	12	12	12	86.944	46.245	49.100	43.377	42.220	267.886

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

TUJUAN 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PROGRAM/KEGIATAN	SASABAN STRATEGIS (IMPACT)/SASABAN PROGRAM (OUTPUT)/SASABAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Unit: Rp/bulan)					
			REALISASI CAPAIAN							REALISASI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET TOTAL	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASABAN STRATEGIS															
1.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi		52,67	53,14	54,51	62,94	68,32	68,32	31.101,85 0	28.294,30 4	33.267,43 1	37.309,55 2	39.749,27 4,00	169.722,61 3	
	1. Tingkat dukungan ketahanan energi	%	39,74	42,9	45,32	62,7	68,25	68,25	31.101,85 0	28.294,30 4	33.267,43 1	36.903,45 4	39.324,27 6,00	168.891,51 5	
	2. Tingkat dukungan pengendalian lumpur (3000t/3)		-	-			90,75	90,5	-	-	-	406,098	425.000,0 0	831,098	
PROGRAM 2.1 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															
SASABAN PROGRAM :															
1.	MENINGKATKAN KETAHANAN AIR NASIONAL								31.101,84 9,80	28.294,30 3,84	33.267,43 1,17	36.903,45 3,53	39.324,27 8,83	168.891,51 4,17	

241 B	KEGIATAN 2.1.1: DUKUNGAN MANAJEMEN DENGAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (PISDA)	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYEKSI 2019/00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	1	Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku	%				8,5	10							
	2	Tingkat kapasitas komponen sumber- sumber air	%				18,6	21							
	3	Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak	%				14	13,5							
	4	Tingkat ketertutupan tata kelola pengelolaan SDA	%				4,9	5							
	5	Tingkat kinerja layanan listrik	%				21,5	23,8							
	6	Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan	%				10	10							
	7	Learning & Growth													
		Peningkatan pembinaan, pemantauan, dan penguangan pengelolaan SDA	%				3	3							
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas kestrukturalnya	%				2	2							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM REGISTRASI/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT KERJA : DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL														
1.	SK 2.1.1.1 : Peningkatan Layanan Kelembagaan Dewan SDA Nasional								12.904,00	13.288,32	9.202,70	10.207,71	10.020,39	55.725,12
	1. Tingkat layanan kelembagaan Dewan SDA Nasional	%	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT KEGIATAN :													
	Kedekatan dan program pengabdian SDA nasional	Dokumen	1	1	1	1	1	5	5.410,39	1.307,06	3.718,97	3.626,56	39.43,02	18.000,00
	Layanan doba dan informasi	Layanan			1	1	1	3	4.490,95	8.437,38	2.499,18	2.986,40	2.490,00	20.911,91
	Layanan internal	Layanan							1.677,21			1.620,90	200,00	10.008,66
	Layanan dukungan manajemen seker	Layanan			1	1	1	3	2.996,67	3.540,88			1.631,44	1.430,44
	Layanan penelitian	Bulan	12	12	12	12	12	12		1.407,34	1.974,85	1.755,93		5.138,12
KEGIATAN 21.2 : PEMBINAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN SDA														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JA BINGAN SDA														
1.	SK 2.1.2.1 : Peningkatan Pemantauan, Pengukuran, dan Pengawasan Peningkatan SDA								41.790,50	70.170,17	49.702,97	43.085,01	224.445,31	509.213,96

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYeksi 2019.00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Tingkat perbaikan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengabdian SDA	%	100	100	100	100	100	100	100	100					
2	Tingkat perbaikan perencanaan, pemrograman dan penganggaran pengabdian SDA (PPLS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100					
OUTPUT KEGIATAN :															
	NSPK, perencanaan dan pemrograman SDA	NSPK/K	1							1	-	-	-		
	Layanan pemograman dan penganggaran Ditem SDA	BKMG/ BMS	22	33	33	36	34	34	34	39.296,53	35.687,30	39.495,87	55.984,11	39.785,00	210.250,81
	Layanan Internal (overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	1	5		5.058,82	3.714,44	1.100,00		9.873,26
	Layanan dukungan manajemen seker	Layanan												1.973,61,37	159.381,37
	Layanan perkantoran	Bukan	12	12	12	12	12	12	12	22.493,97	34.482,87	25.148,28	23.384,46	24.196,93	129.708,51
KEGIATAN 21.3 : PEMBINAAN PENYATAKUNGAN SUMBER DAYA AIR															
242	UNIT KERJA : DIHENTOKAT BINA PENYATAKUNGAN SDA														
0	SK 2.1.3.1 : Peningkatan Layanan Pembinaan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu														
1.										94.482,27	84.554,88	78.793,13	49.418,33	45.514,31	352.944,92

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYECTS	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1 Tingkat boyoran pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu	%	100	100	100	100	100	100						
OUTPUT KEGIATAN :														
	NSK tata kelola pengelolaan SDA terpadu	NS/P/K		9	4	0	4		2.183,74	10.980,00	5.052,38	760	300,00	19.276,12
	Pembinaan tata kelola pengelolaan SDA	BBWS/B MS	33	33	33	33	34	34	74.098,74	45.360,97	40.235,92	17.915,96	18.375,96	196.587,55
	Direktori peraturan pengelolaan SDA	Dokume n			4	4	4				8.216,00	5.947,87	5.947,87	20.111,74
	Layanan Internal (berhenti)	Layana n	1	1	1	1	1					3.538,01	864,00	4.402,01
	Layanan dukungan manajemen sektor												2712,26	2.712,26
	Layanan perkolaborasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	18.399,79	28.213,91	25.288,83	21.254,48	16.914,22	110.075,23
242	KEGIATAN 21.4: DIKUNJUNGI MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TERKES LAINNYA DIJEN SUMBER DAYA AIR													
1	UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL SDA													
1.	SK 2.1.4.1 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								545.644,78	617.224,50	659.372,78	644.380,92	582.127,83	3.041.200,81
	1 Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (SDA)	%	100	100	100	100	100	100						
	2 Tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (PLS)	%	100	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL			
			REALISASI CAPAIAN							2015	2016	2017	2018	PROYEKSI 2019/00				
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET										
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
OUTPUT KEGIATAN:																		
	Layanan dukungan monev/evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	27.944,41	35.149,03	39.945,02	35.303,76	35.303,76	173.704,14			
	Layanan internal kegiatan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5	507.700,18	582.056,47	39.122,77	13.128,36	9.554,25	1.146.531,03			
	Layanan dukungan monev/evaluasi	Layanan													1.935,36	1.935,36		
	Layanan pelaksanaan	Bukan	12	12	12	12	12	12	12						608.494,99	595.978,81	535.334,46	1.739.748,26
KEGIATAN 21.5 : PEMBINAAN IRIKASI, RAWA, DAN TAMBAK																		
242 2 UNIT KERJA : DIREKTORAT IRIKASI DAN RAWA																		
1. SK 2.1.5.1 : Peningkatan Layanan Pembinaan Bidang Iriqasi dan Rawa																		
	Tingkat layanan pembinaan/bidang Iriqasi dan rawa	%	100	100	100	100	100	100	100	172.933,68	201.857,20	190.428,98	271.097,04	257.153,10	1.093.480,00			
OUTPUT KEGIATAN:																		
	NSP/Iriqasi pembinaan, Iriqasi rawa, dan Iriqasi tambak	NSP/P/K		19	10				29	6.063,17	2.500,00	14.241,51			22.804,68			
	Layanan pembinaan Iriqasi rawa, dan tambak	BRW/S/B W6	33	33	33	33	33	34	34	117.141,15	96.482,28	70.897,43	166.993,13	164.907,63	618.423,82			
	Layanan internal kegiatan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5			400	1.230,67	1.432,67				
	Layanan dukungan monev/evaluasi	Layanan							0						2.115,62	2.115,62		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2015	2016	2017			2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan perkotaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	49.729,36	102.884,95	104.887,85	100.871,24	90.029,85	446.500,23
242	KEGIATAN 21.6: PEMERINTAH OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERTA PENANGGULANGAN DAURUAT													
3	AKIBAT BENCANA													
	UNIT KERJA 1.4 : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN													
1.	SK 2.1.6.1 : Peningkatan Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA								822.783,85	475.400,00	651.831,79	624.810,05	571.218,28	3.146.043,97
	OUTPUT KEGIATAN :													
	NSRF pemeliharaan Operasi prosasana SDA	NSRF/K	5	4	18	2	10	39	17.594,07	3.500,00	18.143,93	6.195,00	2964,16	48.417,16
	Layanan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan prosasana SDA	BW/S/B MS	33	33	33	33	34	34	86.340,13	65.000,00	65.941,17	123.086,49	88.333,53	427.720,32
	Layanan pemeliharaan pemeliharaan Operasi Pemeliharaan Daerah	Pemuda	20	20	20	34	20	114	307.894,66	250	5722,37	8.220,00	4814,54	356.531,57
	Fasilitas pemeliharaan pemeliharaan Operasi pemeliharaan	UHT			10	10	33	53		132.347,46	71.000,00	71.000,00	71.000,00	345.347,46
	Layanan terintegrasi dan terdistribusi pemeliharaan	BW/S/B MS	1	1	1	1	1	5	316.900,45	175.251,42	397.724,59	310.484,99	308.442,02	1.509.003,47
	Layanan pemeliharaan pemeliharaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	68.034,55	99.051,12	426,87	2.087,54	594,14	167.534,22
	Layanan dukungan pemeliharaan sektor	Layanan											2.131,84	2.131,84

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN						REALISASI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan perkontoran	Bulan	12	12	12	12	12	12			92.672,85	103.707,04	92.758,05	289.137,94
KEGIATAN 21.7 : PEMBINAAN PENGENDALIAN SANITASI LAHAR, PENGENDALIAN DAMPAK UTAMA DAN PENGAJARAN PANTAI (SEMULA : PEMBINAAN KONSERVASI, SUNGAI, PENGENDALIAN SANITASI LAHAR DAN PENGAJARAN PANTAI)														
242 4 PANTAI														
UNIT KERJA : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														
1.														
SK 2.1.7.1 : Peningkatan layanan Pembiayaan Bidang Sungai dan Pantai														
									122.789,24	221.346,00	139.532,26	157.329,32	199.906,18	840.922,00
	Tingkat layanan pemeliharaan bidang sungai dan pantai	%	100	100	100	100	100	100						
OUTPUT KEGIATAN :														
	NISK, pengendalian banjir, lahan gurunng berespl, dan pengimanan pantai	NISP/K		1	1	1	1	1	-	1.200,63	300	300	300,00	2.100,63
	Layanan pemeliharaan pengendalian banjir, lahan, pengendalian erosi/daerah ulir/daerah pelekakan, dan pengimanan pantai	BBWS/SBWS	33	33	33	33	34	34	48.533,62	113.428,25	40.706,48	58.388,56	115.399,97	376.456,88
	Layanan Internal (overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5		3.820,54	3.936,53	644,27	189.412,07	
	Layanan dukungan manajemen sektor	Layanan							74.255,62	106.736,11			4.088,00	4.088,00
	Layanan perkontoran	Bulan	12	12	12	12	12	12		94.705,23	94.705,23	79.453,95	268.864,41	
503 0 KEGIATAN 21.8 : DIKUNJUNG MANJAMBU BAWA/SBWS														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN DITUPA/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL			
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYeksi 2019.00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
5.035.001	NSPK ketahanan berbudaya	NSP/K	1	1	1	1	1	1	7	2.262,08	735,04	855,04	1.379,82	809,50	6.081,46	
5.035.002	Rencana dan program kejobodan Banyuwangi	Dokumen	20	33	1	2	1	1	57	8.411,95	5.285,66	368,16	446,16	554,16	15.066,09	
5.035.003	Layanan teknis kegiatan berbudaya	Instansi		35	29	33	29	29	126	0	4.892,14	7.171,61	13.399,14	19.415,50	44.878,39	
5.035.991	Layanan internal (Overhead)	Layanan			1	1	1	1	3			1.007,72	1.449,06	500,00	2.956,76	
5.035.970	Layanan dukungan manajemen sektor	Layanan							0					2.220,06	2.220,06	
5.035.994	Layanan perkontroran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	6.505,97	4.400,01	3.722,05	4.630,35	3.184,90	22.443,28	
503 KEGIATAN 21.10 : PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERAIRAN RAWA, DAN TAMBAK (SEMULA, PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI AIR TANAH RAWA DAN TAMBAK)																
6 UNIT KERJA : BAWASWIS																
1. SK 2.1.10.1 - Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi																
	Pertepatan layanan irigasi	%									8.884,275	6.273,151	9.780.831	10.054.177	9.993.054,00	44.985.488
	Jumlah luas daerah irigasi yang dibangun oleh irigasi yang dibangun	hektar	273.532,00	136.661,00	227.748,00	225.433,00	140.008,50	1.005.402,50								
	Kemungkinan Ruat		135.382,00	52.519,00	63.253,00	40.267,00	42.598,50	354.019,50								
	Pembangunan irigasi irigasi pemukim		107.972,00	44.663,00	51.347,00	30.882,00	38.301,00	272.915,00								
	Pembangunan irigasi irigasi rawa		40.242,00	3.963,00	7.950,00	6.764,00	3.000,00	61.901,00								
	Pembangunan irigasi irigasi tambak		4238,00	1.850,00	1.750,00	2.511,00	700,00	11.049,00								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM REGISTRAN/CIPTA/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN							TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYeksi	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Pembangunan Jaringan Iqbal di Taman Iqbal Kemungkinan Daerah DAK		2980,00	2.043,00	2.206,00	328,00	597,50	8.154,50								
	Pembangunan Jaringan Iqbal		186.150, 00	66.142,0 0	144.495, 00	185.186, 00	97.410,0 0	651.383, 00								
	Peringatan Jaringan Iqbal		4028,00	1.718,00	6.767,00	35.274,0 0	8.442,00	56.229,0 0								
			114.122, 00	84.424,0 0	157.278, 00	148.912, 00	88.948,0 0	595.154, 00								
	2 Tingkat pembidikan Iqbal dan banyolan jaringan Iqbal	%														
	Jumlah luas daerah Iqbal yang diayahi oleh jaringan Iqbal yang diidentifikasi/ditunjuk kan	hektar	1.176,93 400	581,800, 00	560.959, 00	331.131, 00	370.281, 00	3.021,10 5,00								
	Kemungkinan Puaat		491.901, 00	291.171, 00	266.143, 00	162.986, 00	120.281, 00	1.332,48 2,00								
	Rehabilitasi/penringka tan jaringan Iqbal pelembutan		382.270, 00	244.780, 00	197.552, 00	124.044, 00	90.246,0 0	968.892, 00								
	Rehabilitasi/penringka tan jaringan Iqbal rawa		151.249, 00	28.459,0 0	49.708,0 0	21.868,0 0	23.550,0 0	274.834, 00								
	Rehabilitasi/penringka tan jaringan Iqbal lombok		33.099,0 0	13.727,0 0	17.218,0 0	9.920,00	6.205,00	80.169,0 0								
	Rehabilitasi/penringka tan jaringan Iqbal di taman		5.283,00	4.203,00	1.665,00	7.154,00	280,00	18.587,0 0								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN							TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015			2016	2017	2018	2019/00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			686.033,00	290.629,00	294.816,00	168.145,00	290.000,00	1.688,623,00							
			686.033,00	290.629,00	294.816,00	168.145,00	290.000,00	1.688,623,00							
3	Target: 100% tercapai	%	11	12	12	12	12								
OUTPUT KEGIATAN :															
	Rencana teknis dan	Dokumen	200	236	255	162	98	951		344.704	445.013	311.173	310.755,00	5.228.276	
	diuraikan, meliputi	n													
	kegiatan dan rencana														
	Jaringan ligasi	km	400	662	467,39	506,48	108,00	2163,87		1.785.743	3.293.177	3.889.334	3.447.984,00	12.416.236	
	kegiatan yang														
	Berbagai ligasi	Berdasarkan	10	16	11	6	14	57	3.797.071	6.718,17	58.961	655,022	1.106,777,00	2.991,577	
	kegiatan yang	g													
	Jaringan ligasi	km	10	30	114,12	103	21	278,12		319,531	568,732	399,567	108,489,00	1.396,339	
	kegiatan yang														
	Berbagai ligasi	Berdasarkan	0	4	6	5	2	17		101,116	278,811	180,333	68,500,00	428,760	
	kegiatan yang	g													
	Jaringan ligasi	km	318,2	195,3	343,8	220,9	2,00	1000,2	493,482	77,799	137,038	107,930	71,420,00	888,089	
	kegiatan yang	km													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM REGIARAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN						TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYECTS	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jatenggan liggal tombok yang dibangun	km	40,8	10,7	30,75	34,65	3	119,9	112,442	11,138	33,165	34,384	59.200,00	250,659	
	Jatenggan liggal pemukoon keveonngan Puati yang dihehahhah / dihehahhah	km	2441,22	1.283,60	1.503,27	746,67	156,00	6329,94		2.448.186	3.507.854	3.270.943	3.990.253,00	17.096.558	
	Bendang liggal keveonngan Puati yang dihehahhah / dihehahhah	Berdun g		3	5	21	6	35		25.599	88.479	1.608.411	101.211,0	376.090	
	Jatenggan liggal pemukoon keveonngan Daerah yang dihehahhah / dihehahhah	km		30,3	25,78	0	1,00	57,08	3.379.322	70.683	92.983	77.941	129.800,0	371.207	
	Bendang liggal keveonngan Daerah yang dihehahhah / dihehahhah	Berdun g		3		15		18		6.733		-	-	6.733	
	Jatenggan liggal rowo yang dihehahhah / dihehahhah	km	1.355,88	867,32	1.617,68	1.281,74	17,00	5.139,62	641,424	221.823	499.223	299.877	371.090,0	2.033.437	
	Jatenggan liggal tombok yang dihehahhah / dihehahhah	km	222,5	246,78	206,55	84	3	764,63	190.513	105.901	193.476	78.163	120.543,0	688.596	
	Kemangan rowo yang dihehahhah	km			10	30	0	20	-	-	-	-	-	0	
	Layanan Inhermal (Overhead)	Loyoma n		1	1	1	1	4	69.620	61.782	84.899	88.668		304.969	
	Layanan dukungan mendemen sakter	Loyoma n											106.702,3	106.702	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN					Target		REALISASI ANGGARAN				PROYECTS	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 1.1.1: PENGENDALIAN BANJIR, LAHAR, PENGECILAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMANAN PANTAI GEMULA : KONSERVASI, PENGENDALIAN BANJIR LAHAR GUNUNG BEKATI, DAN PENGAMANAN PANTAI)															
503 7 UNIT KERJA : BMS/SBMS															
1.	SK 2.1.1.1 : Peningkatan Kapasitas Pengendalian Doby Kocok Air									7.854.594	5.794.518	4.914.557	4.371.714	4.087.475 43	33.422.858
	1. Perbaikan luas kawasan yang terbancang dari doyo ruak or ruak or	%			36			36		-					
	Lumlah luas kawasan yang terbancang dari doyo ruak or oleh sanao pirosona pengendalian beari yang abongun	hektar	20343,5 5	16.098,1 1	14.921,9 4	5.282,24	5.282,24	41.923,0 8							
	Lumlah deblesi dier yang dilampung oleh sarana pirona pengendalian sediment/dier gunung beari yang abongun	[juta m3													
	Lumlah panjang panti yang dibangun oleh sarana pirona pengamanan panti yang abongun	km	64,88	49,52	20,42	22,45	11,60	170,87							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYeksi 2019/00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Target kecamatan yang terhindar dari daya ruak di prosiona pemeriksaan di buku seperti semula Jumlah luas kawasan yang kembali terhindar dari daya ruak di oleh sarana prosiona pengendalian banjir yang dihabisi Jumlah okestrasi/ahar yang dilampung oleh sarana prosiona pengendalian sederhana/ahar gantung beapil yang dihabisi Jumlah panjang parit yang diikuti oleh sarana prosiona pengamanan parit yang dihabisi	%			15			15							
OUTPUT KEGIATAN :															
	Rencana bilis dan dokumen ingkungan hidup untuk kerkulak pengendalian banjir, idhar, adinosa utama perktion, dan pengaman parit	Dokume n	-	116	198	38	0	352	4827,552	135600	200117	91735	66216,00	5353,450	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM REGISTRASI/CIPTA/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN					Tingkat		REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Sungai yang diharmaskasi dan terangul yang dibongun / dibongkakan	km		118,34	123,73	171,51	93,00	810,94		2.183,771	2.198,041	2.315,449	2.176,788 .00	8.874,049	
	Bangunan perbaikan tebing yang dibongun/dibongk kan	km		57,58	34,58	25,03	7	124,19		788,359	921,329	1.016,755	893,738,0 0	3.620,181	
	Pintu air / bendung pengendali banjir yang dibongun / dibongkakan	unit			4	1	2	7			217,213	1.180,078	1.875,840,0 0	482,851	
	Kanal banjir yang dibongun / dibongkakan	km	304,36	21,56	3,4	22,32	36,84	84,12		502,212	889,386	593,944	778,347,0 0	2.673,889	
	Stasiun pompa banjir yang dibongun / dibongkakan	unit		1	1	1	0	3		51,500	115,609	223,289	50,100,00	440,498	
	Polder / kedam relensi yang dibongun / dibongkakan	Buah		5	1	0	2	8		244,820	357,485	223,447	241,570,0 0	1.067,322	
	Saluran drainase yang dibongun / dibongkakan	km		14,9	15,24	3,1	0	33,24		106,826	156,096	41,400	38.200,00	342,522	
	Bangunan sbes yang dibongun / dibongkakan	Buah	7	5	8	17	7	44		444,617	68,510	169,745	300,878	1.309,722	
	Checkdam yang dibongun / dibongkakan	Buah	143	39	23	11	20	236		0	173,487	174,058	233,860	927,124	
	Berkawir yang dibongun / dibongkakan	km	66,88	4,27	4,94	2,95	9	88,04		1.713,122	1.200,15	129,540	173,305	300,710,0 0	2.441,692

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYEKSI 2019-00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Sesuai dan berjumlah pangan/pertani lainnya yang dihendaklasi	km	0	-	-	0,11	0	0,11	-	-	0	-	-	0
	Sungai yang dihendaklasi	Sungai	0	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-	0
	Media dr yang dibuat	Media Ar	1	1	2	1	0	4	-	1.407	11.252	4.399	-	17.056
	Layanan/Inhalasi (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	0	4	52.943	57.662	69.522	81.129	-	261.276
	Layanan dukungan manajemen sakti	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	71.289,43	71.289
KEGIATAN 112.1: PENINGKATAN TATA KELOLA PENGELOLAAN SDA TERPADU														
503														
8														
UNIT KERJA : BAW/SBWS														
1.														
SK 2.112.1: Peningkatan Keterpaduan Tata Kelola Pengelolaan SDA														
	Partisipasi Indeks RBO (Index)	Indeks	225	257	284	294		20	1.191.515	1.141.184	317.742	251.793	261.474,6 0	3.163.699
OUTPUT KEGIATAN :														
Dilakukan berdasarkan 14 indikator dan pogram BIR RBO Berorientasi yang dibagikan oleh Network of Astang River Basin Organization (NABRO)														
	Data thronmal dan komparasi publik RBWS/BWS	Layanan	34	34	34	34		170	593.364	76.613	39.616	32.246	31.972,00	1.397.436

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM REGIUN/DAERAH/ KABUPATEN DIAKOT	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN							TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015			2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Pada dan rencana pengabdian SDA MS keuntungan Puroi yang disurveiw Hidrologi dan budidaya air yang dikaldu Kembangkan pengabdian SDA yang ditugaskan kepada bany Rekamlik pemerintah SDA yang dilu Layanan Internal (Overhead) Layanan dukungan manajemen so kler	Dokume n Loyona n Lembog o Dokume n Loyona n	14	14	5	5		43		85.614	33.409	27.561	17.393,00	280.000		
			34	34	34	34		170		115.015	137.268	114.709	117.573,00	881.701		
			34	34	34	34		170		125.810	81.040	57.227	62.047,00	521.324		
			34	34	34	34		170		20.227	13.856	19.637	21.099,00	179.070		
			1	1	1	1		5		686.796	12.332	413		700.279		
													11.800,60	11.831		
KEGIATAN 1.1.1 : PENGELOLAAN BENDUNGAN, DAMA U DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA																
503 (SEMULA : PENGELOLAAN WADUK, EMBUNG, STU SERTA BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA)																
9 UNIT KERJA : 88M5/8M5																
1.																
	5K 2.1.13.1 : Peningkatan Kapasitas Tampung Sumber - Sumber Air								6.400.876	7.010.823	7.527.553	9.698.990	12.009.163,48	42.447.446		
	1. Jumlah kapasitas tampung sumber of Jumlah kapasitas tampung bangunan air bendungan, embung, bangunan penampung air identifikasi yang dibangun	%														
			101213	16.73	30.36	226.93	878.78	2166.93								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYEKSI 2019/00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Tingkat pengembangan lingkungan kopositif: tumpang sari berair prosotona pemediaan air baku seperti semula	%													
	Jumlah kapasitas tumpang bongoran air Bandung, embung bongoran pemungut air (airpot) yang dihidhidisi	[luts m3	377,00	430	544			386,74							
3	Tingkat potensi energi sumber air Bandung yang tersalur id bongoran pogo tahun berjalan	%	1012,13	16,73	86,60		750,51	1.797,97							
OUTPUT KEGIATAN :															
	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bangunan dan pemungut air Idmng	dukume n		171	142	106	3	422							
	Bandungan batu yang dibangun	bandun gan	13	8	6	12	10	49							
	Bandungan dalam tahap pelaksanaan (on going)	bandun gan	16	24	30	34	41	41	5873,839						
										1.601,641					
										3.499,182					
											5.500,855				
												7.491,133			
													9.156,355		
														126.650,0	
															28.763,562
															3.419,661
															35.164,207

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN (OUTPUT/ INDIKATOR)	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI 2019-00	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019-00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Embung dan pemungut air lainnya yang dibangun	buah	342	367	117	99	80	1025	199	996.422	822.904	656.473	1.455.613,00	7.776.399	
	Embung dan pemungut air lainnya yang diperbaiki	buah	5	5	2	2	2	16	133.292	230.915	290.366	1.47.790	120.453,00	950.174	
	Dam yang diperbaiki	damau	64	71	73	13	19	240	158.180	219.265	174.063	1.66.244	280.741,00	2.969.597	
	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	3	7	12	9	2	33	206.322	180.689	378.885	775.708	587.877,00	2.317.311	
	Layanan dukungan manajemen sektor	Layanan	1	1	1	1	0	4	29.025	43.224	46.572	73.987		266.795	
		Layanan					1	1					100.504,48	100.505	
KEGIATAN 2.1.14: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAWA (SEMULA : PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU)															
0 UNIT KERJA : BWS/SBWS															
1.	SK.2.1.14.1:Perbaikan Layanan Sema Dan Prasarana Air Baku		81.00	51.00	37.00	57.00	23.00		2.734.806	3.104.815	2.815.799	3.544.058	3.180.709,27	15.382.187	
	Tingkat layanan sama dan jumlah debit layanan sama dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun	%													
		m/d/daik	497	615	434	746	5	29,92							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN REGISTRASI/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019/00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah luas kawasan yang seluas terhitung dari daya rusak di. Oleh sarana prososono pengendalian banjir yang dipaparkan dan dipelihara	hektar	166,01	288.867,00	248.741,00			288.867,00							
	Jumlah objek/struktur yang dilampung oleh sarana prososono pengendalian sedimentasi gantung barang yang dipaparkan dan dipelihara														
	Jumlah panjang perladang yang dilindungi oleh sarana prososono pengamanan perladang yang dipaparkan dan dipelihara														
4	Terdapatnya kungul dan banyan/batang liptal	hektar	3.357,42 0,00	3.402,05 3,00	3.216,28 5,00	2.947,78 9,30	3.090,05 2,25	3.402,05 3,00	-	-	-				
5	Terdapatnya kegiatan pemadukan operal dan pemeliharaan sarana prososono SDA														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN						REALISASI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat beryaman kegiatan penarikung operasi dan pembelajaran selama prosedur SDA													
	OUTPUT KEGIATAN :													
	Jaringan Iqbal pemulihan keuntungan Pual yang dipelbora dan dipelbora	km	23.371,2 9	25.524,2 3	26.974,6 2	23.729,7 3	51.312,4 1	51.312,4 1	679.799,0 0	911.000,0 0	1.395.115 .00	1.920.093 .00	2.911.483 .00	7.817.530. 00
	Bantuan Iqbal keuntungan Pual yang dipelbora dan dipelbora	benolan g	409,00	575,00	998,00	993,00	3,00	999,00	224.242,0 0	237.028,0 0	239.519,0 0	207.500,0 0	211.067,0 0	1.131.379. 00
	Jaringan Iqbal nawa yang dipelbora dan dipelbora	km	14.770,3 7	14.402,5 3	13.811,6 6	13.811,6 6	11.855,8 4	14.770,3 7	223.804,0 0	245.349,0 0	238.730,0 0	244.189,0 0	231.222,0 0	1.203.274. 00
	Jaringan Iqbal tombak yang dipelbora dan dipelbora	km	610,10	744,72	755,31	852,49	987,59	987,59	37.436,00	42.697,00	40.892,00	36.686,00	33.916,00	191.629,00
	Urut pengalaba Iqbal yang dibunglaba	urll	-	4,00	25,00	10,00	23,00	25,00	-	-	30.813,00	4.054,00	4.114,00	38.981,00
	Tongul dan leling yang dipelbora dan dipelbora	km		4.333,00	3.731,12	3.637,09	3.746,50	4.333,00	356.792,0 0	607.530,0 0	224.657,0 0	211.440,0 0	213.867,0 0	1.614.304. 00
	Kard bonf yang dipelbora dan dipelbora	km	2490,16	112,33	198,21	165,68	2,00	165,68		42.814,00	18.661,00	22.776,00	26.810,00	111.061,00
	Stolan pompa bonf yang dipelbora dan dipelbora	urll		54,00	67,00	74,70	8,00	74,70		5.800,00	13.424,00	21.582,00	27.893,00	68.699,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN (OUTPUT/ INDIKATOR)	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp/taun Rp/bulan)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pada/kegiatan relatif yang dipaparkan dan dipelihara	Buah	-	14.00	14.00	14.00	6.00	14.00		10.741,00	8.256,00	8.393,00	8.995,00	36.385,00
	Bangunan sabo yang dipelihara	Buah		33,00	33,00	49,00	367,00	367,00		12.668,00	14.212,00	19.951,00	15.864,00	93.493,00
	Creodam yang dipelihara dan	Buah	87,00	408,00	540,00	501,00	160,00	540,00	30.806,00	41.864,00	45.756,00	36.410,00	41.788,00	165.218,00
	Bekaswati / sawad dan bangunan pengomoran perbid lainnya yang dipelihara	km	116,22	161,00	148,99	163,86	174,30	174,30	59.088,00	112.435,00	87.511,00	73.750,00	84.598,00	417.382,00
	Sungai yang dipelihara	sungai	-	157,00	334,00	337,00	20,00	337,00	-	175.339,00	232.649,00	291.862,00	272.679,00	992.509,00
	Mata air yang dipelihara	mata air	-	-	3,00	4,00	13,00	13,00	-	-	344,00	1.903,00	2.203,00	4.450,00
	Bangunan yang dipelihara dan	bandun	160,00	164,00	164,00	160,00	167,00	167,00	360.771,00	179.214,00	152.843,00	284.145,00	355.813,00	1.322.786,00
	Urit pengalaba bangunan	urit	-	9,00	15,00	13,00	82,00	82,00	-	4.428,00	6.990,00	7.408,00	8.464,00	27.290,00
	Embung dan bangunan lainnya yang dipelihara dan	Buah	832,00	860,00	1.112,00	1.034,00	1.100,00	1.112,00	-	241.186,00	209.067,00	214.398,00	195.407,00	860.056,00
	Danu yang dipelihara	danau	29,00	47,00	56,00	55,00		56,00	22.235,00	20.879,00	27.876,00	31.647,00	29.161,00	131.798,00
	Sumur air tanah untuk air baku yang dipelihara dan	titik	-	-	34,00	27,00	30,00	34,00	80.454,00	1.293,00	3.087,00	3.483,00	3.261,00	91.578,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN REGISTRASI/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI 2019.00	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Embung air baku yang diproseskan dan dipelihara	Buah	-	-	140.00	201.00	25.00	201.00	-	6.966.00	31.798.00	42.223.00	42.562.00	123.551.00
	Sumur JAT yang diproseskan dan dipelihara	titik	-	-	1.723.00	1.464.00	1.735.00	1.735.00	-	37.954.00	53.142.00	46.513.00	44.781.00	182.370.00
	Tanah yang diproseskan dan dipelihara	km	-	132.11	440.81	478.00	440.81	478.00	61.507.00	31.437.00	24.616.00	20.285.00	25.282.00	143.099.00
	Urit air baku yang diproseskan dan dipelihara	unit	34.90	60.92	100.65	320.00	183.00	320.00	-	83.658.00	68.149.00	73.327.00	81.008.00	306.142.00
	Alat-alat yang digunakan	dikumpuln	-	50.00	77.00	38.00	-	77.00	-	37.434.00	36.422.00	20.976.00	15.989.00	110.801.00
	kegiatan tanggap darurat akibat bencana	kegiatan	-	-	20.00	60.00	-	60.00	-	448.00	32.308.00	25.878.00	30.774.00	89.408.00
	Pengujian dan kalibrasi peralatan O&P yang diproseskan dan dipelihara	unit	-	-	286.00	443.00	28.00	443.00	-	33.675.00	29.722.00	38.971.00	49.311.00	151.679.00
	Konsumsi tenaga yang dipelihara	Konsumsi	-	-	3.00	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-
	Layanan Injendi (Overhead)	Bulan	-	-	7.00	7.00	72.00	12.00	25.143.00	83.085.00	104.350.00	118.740.00	-	331.318.00
	Layanan dukungan manajemen satek	Layanan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	127.647.63	127.647.63
530 1	KEGIATAN 21.16: PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA (SEMUA : PEMBINAAN WADUK, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA) UNIT KERJA : PUSAT BENDUNGAN													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		PROYeksi 2019/00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	SK 2.1.14.1 : Peringkasan Layanan Pembinaan Bidang Bendungan, Damau, dan Bangunan Pemungup Air lainnya									4.493	29.822	27.942	37.522	27.251,72	129.248
	1 Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, damau, dan bangunan pemungup air lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100						
	OUTPUT KEGIATAN :														
	NSK, bendungan dan bangunan pemungup air lainnya	NRP/K	1	8	2	2	2	2	15	0	5.442	2.027	30849	-	38.316
	Layanan pembinaan bendungan, damau, pemungup air lainnya	BW/SIB WS	33	33	33	33	34	34	34	4.031	16.133	18.699	2824	20.246,00	61.965
	Layanan (misal lovehead)	Layanan			1	1	1	1	3		3.357	1.000		46,00	15.290
	Layanan dukungan manajemen sektor	Layanan							1	2.641	8.247			4.107,72	4.108
	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12			3.859	2859	2853,00	9.571
530	KEGIATAN 2.1.17: PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR BAKU (SEMULA : PEMBINAAN PENGELOLAAN AIR BAKU DAN AIR TANAH)														
2	UNIT KERJA : PUSAT AIR TANAH DAN AIR BAKU														
1.	SK 2.1.17.1 : Peringkasan Layanan Pembinaan Bidang Air Tanah dan Air Baku									4.294	33.814	23.709	25.624	22.374,21	109.815,21

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN					TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	OUTPUT KEGIATAN :														
	5.302.001	NSR/air tanah dan air baku	NSR/K	1	14	1	1	1	16	-	12672	2000	1124	1124,00	16921
	5.302.002	Layanan pemeliharaan air tanah dan air baku	BBWS/BWS	33	33	33	33	34	34	1.953	11769	15720	20165	16.806,00	69771
	5.302.951	Layanan Internal (overhead)	Layanan			1	1	1	3			1.399	1877	1.399,00	5114
	5.302.970	Layanan dukungan manajemen daerah	Layanan					1	1					1041,21	
	5.302.994	Layanan pekerjaan	Bulan	12	12	12	12	12	12	2.340	9.373	4.630	2.457	2071,00	21.256
PROGRAM 2.2. PENGENDALIAN LUMPUR SPOKALJO															
SASARAN PROGRAM :															
1. MENINGKATKAN PENGENDALIAN LUMPUR SPOKALJO															
	1	Tingkat layanan pengendalian lumpur SPOKALJO	%				85,75								
	2	Learning & Growth Peningkatan pemeliharaan, pemrograman, dan pemantauan pengendalian SDA	%				2								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM REGIUN/DIPT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL			
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019/00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
UNIT KERJA : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO																
1. SK 2.2.1 : Peningkatan layanan Sarana Prasarana Pengendalian Lumpur Sidarjo																
1	Tingkat layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidarjo	%												316.455	338.936,0 0	455.392
	Tingkat pengembangan and layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidarjo															
	Jumlah panjang tongki dan instuktur benang yang ditinggikan dihendikal/dtingka kan															
	Teiloganng kngil layanan sarana prasarana pengendalian lumpur sidarjo															
	Jumlah panjang tongki dan instuktur benang yang dipaparkan dan dipelihara															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM REGISTRASI/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Terdikornya luapan Lumpur ke kali Perang													
	Jumlah volume luapan Lumpur yang dididkan ke kali perang													
	Terdikornya kawasan di luar PAI													
	Jumlah luas kawasan di luar PAI yang dilibas													
OUTPUT KEGIATAN :														
2408.001	Rencana teknis untuk pengendalian Lumpur 3600d/p	Dokumen				200						4.113,00	11.276,00	15.829,00
2408.002	Luapan Lumpur yang dikurangi	Juta m ³			100,00	33,97						150.046,00	157.184,00	307.251,00
2408.003	Tongkol dan infrastruktur lainnya yang dibangun	km				1,77						52.022,00	36.201,00	88.723,00
2408.004	Tongkol dan infrastruktur lainnya yang diperhalus/ditingkatkan	km				4,15						98.394,00	107.525,00	145.921,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					Target	REALISASI ANGGARAN				PROYECTS	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019		TOTAL	2015	2016	2017			2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2408.005	Tongkol dan Infrastruktur lainnya yang dipelihara	km				13,50		13,50					17.984,00	12000,00	29.984,00
2408.006	Kawasan id luar PAJ yang dilidat	Hektar				1000		1000					33.875,00	13.708,00	47.583,00
2408.007	Pendidikan dan kaltika penakung yang dipopori dan dipelihara	UHT													-
2408.951	Layanan Internal (overhead)	Layanan				1,00		1,00							-
2408.970	Layanan dukungan manajemen sakti	Layanan				1,00		1,00						100,00	100,00

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

TUJUAN 3: "Menyeleenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk kesetimbangan pembangunan antardaeerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan"

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPCU)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1 Meningkatkan dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing nasional														
1	Tingkat konektivitas Jalan Nasional	%	86,9	87,4	88,1	89,7	94,1	94,1						
PROGRAM 1.1 : PENYELANGGARAAN JALAN														
SASARAN PROGRAM														
1 Meningkatkan kemampuan dan Aksesibilitas Jalan Nasional														
1	Tingkat memori/porsi/Iden Nasional	%	89,36	89,38	89,7	91,5	98	98						
2	Tingkat aksesibilitas jalan Nasional	%	83,1	84,4	85,7	87	88,3	88,3						
									53.348.442	34.429.904	42.419.521	41.393.241	40.318.726	211.850.264

PROGRAM/KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPACT)/SARAN PROGRAM (OUTCOME)/SARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3	Pembinaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional	km	38.673	47.541	47.430	45.616	47.331	54.286							
			m	370,47	393,76	490,89	888,8	518,31	888,8						
			5	0	6		9								
			35.437	45.715	46.573	44.749	46.867	47.017							
			384,42	382,27	488,70	486,73	499,67	446,87							
			1	3	9	7	1	5							
			1.929	1.177	67	9	47	3.278							
			8084	4.005	714	1039	1.364	15.206							
5	Porang jalan yang dibangun	km	1.286	539	776	786	406	3.793							
6	Porang jembatan yang dibangun	m	7.970	6.962	9.473	16.638	17.283	58.346							
7	Porang jalan bebas hambatan yang dibangun khusus cakupan pemeliharaan	km	21	16	28	30	8	103							
8	Dukungan jalan daerah	km	0	74	7	11	3	95							
KEGIATAN 3.1.2 : DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGAWASAN															
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL															
1	SK 3.1.2.1 : Peningkatan Dukungan Manajemen Koordinasi, Pengaturan, Pembiayaan, dan Pengawasan								798.515	541.225	349.341	230.703	256.141	2.215.946	
OUTPUT KEGIATAN :		%	100	100	100	100	100	100							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga															
1	Jumlah laporan kepegawaian dan ethics	Dokumen	3	3	3	3	3	3							
2	Jumlah laporan keuangan dan umkm	Dokumen	3	3	3	3	3	3							
3	Jumlah Dokumen perencanaan/ anggaran penelitian/pendampingan/pembinaan/pilakan dan penelitian/bantuan teknis	Dokumen	3	3	3	3	3	3							
4	Jumlah Dokumen Pengelahan Barang Milik Negara	Dokumen	3	3	3	3	3	3							15
2. Pengelolaan administrasi/Perencanaan															
1. Jumlah laporan pengelahan administratif															
		Bulan	12	12	12	12	12	12							12
2. Jumlah Isian Isipem (Publik/Prive)															
		Bulan	12	12	12	12	12	12							12
3. Peningkatan bencana alam															
1. Jumlah bantuan tanggap darurat/kebutuhan mendesak yang didudukkan															
		Paket Bantuan	33	33	33	33	33	33							165
KEGIATAN 1.3 : PENGALIRAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN															

PROGRAM/KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPACU)/SARAN PROGRAM (OUTPUT/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				Treyekal	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018			2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	3.1.3.1 : Peningkatan Fasilitas dan Fasilitas Pengembangan Jaringan Jalan Tingkat Pengalihan dan Pembangunan Jaringan Jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	111.360	42.835	111.895	122.237	144.457	553.284
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Fasilitas, pembinaan, pemantauan, pemrograman, pembiayaan dan evaluasi kinerja														
	1	Jumlah Dokumen Kelengkapan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10					
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5					
	3	Jumlah Dokumen Analisis Dampak dan Pengembangan Sistem	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10					
	4	Jumlah Dokumen Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10					
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10					
2	Fasilitas administrasi/fasilitas														
	1	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perencanaan	Laporan	12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 3.1.4 : PENGAJIBAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN															

PROGRAM/ KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPACT)/SARAN PROGRAM (OUTCOME)/SARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN														
SK 3.1.4.1 : Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan														
- Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan														
1. OUTPUT KEGIATAN :														
- Peningkatan Partisipasi dan Peningkatan Pembangunan Jalan														
- Teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemen lereng jalan														
1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Dokumen Managemen Konstruksi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Dokumen Geometrik, Perkerasan dan Drainase	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Dokumen Geoteknik dan Manajemen Lereng	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Peningkatan administrasi Perencanaan														
1. Jumlah Laporan Pengeloaan Administrasi Perencanaan														
1	Jumlah Laporan Pengeloaan Administrasi Perencanaan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN 3.1.5 : PENGALIHAN DAN PEMBINAAN PRESERVASI JALAN														
			REALISASI						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015						2015					
			2016						2016					
			2017						2017					
			2018						2018					
			2019						2019					
			TOTAL						TOTAL					
			38.817						38.817					
			34.739						34.739					
			41.817						41.817					
			38.445						38.445					
			172.898						172.898					
			328.586						328.586					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN				TOTAL			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
UNIT KERJA : DIREKTORAT PRESERVASI JALAN																
SK 3.1.5.1 : Peningkatan Pemeliharaan dan Pembaikan Persewal Jalan																
1	1	Tingkat Perbaikan dan Pembaikan Persewal Jalan	%	100	100	100	100	100	100	100						
OUTPUT KEGIATAN :																
1. Pengabdian, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan																
	1	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2						
	2	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Peringatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2						
	3	Jumlah Dokumen Teknik Rekonstruksi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2						
	4	Jumlah Dokumen Teknik Pemeliharaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2						
	5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2						
2. Peningkatan administratif/kelembagaan																
	1	Jumlah Laporan Pengelolan Administratif	Laporan	12	12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 3.1.6 : PENGIKHTIRAN DAN PEMBINAAN PENANGANAN JEMBATAN																
UNIT KERJA : DIREKTORAT JEMBATAN																
SK 3.1.6.1 : Peningkatan Pemeliharaan dan Pembaikan Pemangonan Jembatan																
1											18.439	181.216	219.904	338.546	769.958	1.527.963

PROGRAM/ KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPACT)/SARAN PROGRAM (OUTCOME)/SARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
OUTPUT KEGIATAN :															
1. Fengedaraan, pemeliharaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus															
1. Jumlah Dokumen Standar dan Rencana															
2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemrograman															
3. Jumlah Dokumen Teknik Jembatan															
4. Jumlah Dokumen Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus															
5. Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Evaluasi															
2. Fengedaraan administratif pemerintahan															
1. Jumlah Laporan Penghasilan Administratif Pemerintah															
KEGIATAN 3.1.7: PENGAJARAN DAN PEMBINAAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PEMOTAKAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PEMOTAKAN															

PROGRAM/KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPC/CI)/SARAN PROGRAM (OUTCOME)/SARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI CAPAIAN				TOTAL	REALISASI ANGGARAN				TOTAL				
			2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017		2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
58.3.1.7.1 : Pengaturan dan Pembinaan Jalan Bebas Hambatan dan Perkolatan Tanah	Tingkat Penyelesaian dan Pembinaan Jalan Bebas Hambatan dan Perkolatan Tanah	%	100	100	100	100	100	100	4446.814	1.843.296	537.287	970.136	415.052	8.232.685		
		OUTPUT KEGIATAN :														
		Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan, Perkolatan dan Kota Besar serta Pengadaan Tanah	Dokumen	1	2	2	2	2	2	6						
				Jumlah Dokumen Menajemen dan evaluasi jalan daerah												
				2												
3	Jumlah Dokumen pelaksanaan jalan perkolatan dan kota besar															
4	Jumlah Dokumen Pembinaan jalan bebas hambatan															
5	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan															

PROGRAM/KEGIATAN	SARANA STRATEGIS (MPACT)/SARAN PROGRAM (OUTCOME)/SARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL	
			REALISASI CAPAIAN						TOTAL	REALISASI ANGGARAN					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol	Dokumen	2	2	2	2	2	10							
	Jumlah laporan: Kelengkapan, Keunggulan, Keuangan, Hukum dan Humas	Dokumen	3	3	3	3	3	15							
	Jumlah Dokumen Perjanjian Layanan Danu Bangkai untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1	1	1	5							
	Jumlah laporan Mentoring dan Evaluasi Layanan Danu Bangkai untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1	1	1	5							
	Jumlah laporan Pengelolan Danu Hasil Pengusahaan Jalan Tol (BLU)	Dokumen	1	1	1	1	1	5							
	Jumlah laporan Layanan Perawatan (BLU)	Dokumen	1	1	1	1	1	5							

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERUMKIMAN**

TUJUAN 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "Infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi : **Direktorat Jenderal Cipta Karya**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meratkannya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman													
	1	Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan pemukiman	%	80,46	79,95	92,6	95,75	95	95					
PROGRAM 4.1 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERUMKIMAN														
SASARAN PROGRAM :														
1.	Meratkannya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni								19.798,06	17.718,70	14.873,51	18.434,19	23.631,35	84.651,107
	1	Persentase pelayanan infrastruktur dasar permukiman	%	192,1	205,08	230,8	244,1	285,88	285,88	9,562	9,408	5,023	0,049	1,702

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
			yang layak huni													
			Presentase peningkatan kualitas fasilitas solid dan fasilitas umum yang layak						100	100						
KEGIATAN 4.1: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.	SK 4.1.1 : Peningkatan koefisien nilai pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat										6.635.005	4.366.552	4.037.074	5.111.514	2.682.304	22.832.449
	1. Perentase peningkatan kualitas permukiman di kawasan perkotaan, pedesaan, dan khusus	%	25,8	44,6	70,97	98,57	122,73	122,73								
	OUTPUT KEGIATAN :															
	Layanan Perumahan															
	a.	Jumlah bulanan layanan perumahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12						
1.	Pembinaan Pengembangan Kawasan Permukiman															
	a.	Jumlah NSPK Bidang pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	NSPK	2	2	2	2	2	2	10						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. Pembinaan dan Penguasaan Pengembangan Kawasan Perumahan	a. Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguasaan pengembangan kawasan permukiman	Keb/Ko Rd	507	507	507	508	508	508						
			246	3	5.961,78	11,84	888	24.295						
3. Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Perkotaan	a. Luas peningkatan kawasan permukiman di daerah perkotaan	Ha	3.140	246	5.961,78	11,84	888	24.295						
			246	3	5.961,78	11,84	888	24.295						
4. Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	a. Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di daerah pedesaan.	Ha	47.530	28.135	15.644	10.225	2.236	103.770						
			28.135	15.644	10.225	2.236	103.770							
5. Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Khusus	a. Luas pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan khusus	Ha	266	438	1.351,85	2.555	738	5.349						
			438	1.351,85	2.555	738	5.349							
6. Indikator Berbasis Masyarakat	a. Jumlah kelahiran dan luas kawasan yang	keluarga	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067						
			11.067	11.067	11.067	11.067	11.067	11.067						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
	mendapatkan pendampingan masyarakat	Hg	-	-	*	*	7.927	7.927						
7.	Penelitian Inkubasi Koba Baru													
	a. Jumlah kota/kab yang dilakukan penelitian inkubasi koba baru	Kota/Kab	-	2	3	4	-	9						
Catatan:														
Proyeksi capaian Saranan Kegiatan diatas 100% disebabkan output pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan dan khusus telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Direktorat Jenderal Cipta Kerja Tahun 2015-2019														
KEGIATAN 4.1.2: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENYATAAN BANGUNAN DAN UNGKUNGAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT BINA PENYATAAN BANGUNAN														
1.	SK 4.1.2.1 : Peningkatan kontribusi penyelenggaraan bangunan gedung serta pendanaan bangunan dan lingkungan								1.369.084	2.404.370	3.739.303	3.322.507	4.949.662	15.694.926
	1. Peningkatan Perencanaan Bangunan Gedung dan Perbaikan Bangunan Lingkungan	%	70,577	76,78	86,654	89,205	107,231*	107,231*						
	OUTPUT KEGIATAN :													
1.	Layanan Perkiraan													
	a. Jumlah bulanan layanan perkiraan	Bulan	12	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. Bantuan Dan Pengawasan Bangunan Gedung	a. Jumlah pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di kotabakab	Kad/Ko b	507	507	507	507	507	507						
			TOTAL	507										
3. Penataan Perencanaan Bangunan Lingkungan	a. Jumlah NSPK Peraturan Perencanaan Bangunan dan Lingkungan	NSPK	0	4	2	2	1	9						
			TOTAL	9										
4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung	a. Luas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	m ²	10,49 8	210, 107	288,9 62	60,91 7	807,67 5	1,378,1 59						
			TOTAL	1,378,1 59										
5. Penyelenggaraan Perencanaan Bangunan Dan Lingkungan	a. Luas Penyelenggaraan Perencanaan Bangunan dan Lingkungan	m ²	9.000, 000	206, 899	439,7 56	188,7 0,2	348,22 0	10.383, 577						
			TOTAL	10.383, 577										
6. Facilitasi Pengembangan Kawasan Perkotaan	a. Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terbahasilai pemenuhan SPP dan pengembangan kota Layak Huni, Kota Hijau dan Kota Cerdas	Kawasan n	0	105	53	53	27	288						
			TOTAL	288										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Fasilitas Ruang Terbuka Publik Revolusi Mentri													
a.	Jumlah kecamatan pencanbaban fasilitas ruang terbuka publik revolusi mentri	Kecam dikan	0	6	66	0	0	72						
8.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Peminaan Kawasan PLSN													
a.	Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan peminaan kawasan PLSN	m2				318,9 10	731,95	392,10 5						
9.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Peminaan Kawasan Pendukung Asiam Games													
a.	Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan peminaan kawasan pendukung ASI/ANI GAMES	m2				21,79 6		21,796						
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dan Peminaan Kawasan PION Papua XX**													
a.	Luas penyelenggaraan bangunan gedung dan peminaan kawasan PION Papua XX**	m2					417,90	417,90						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Ket: Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Pemeliharaan Kawasas PLBN dan ASIAN GAMES merupakan output baru (2018-2019) yang penghitungannya sebelumnya masuk ke dalam output Penyelenggaraan BG dan Penyelenggaraan PL

Catatan: Capaian Sasaran Kegiatan diatas 100% disebabkan output Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Kawasas Bangunan dan Lingkungan telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019

KEGIATAN 4.1.3: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHAATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.	SK 4.1.3.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan sanitasi yang layak bagi masyarakat (PPUP) 1. Persentase kontribusi pemenuhan sanitasi layak bagi masyarakat	%	42,14	47,2	47,54	49,06	49,84	49,84	3.158.222	3.147.459	2.471.955	3.133.398	1.721.940	13.833.174
			12	12	12	12	12	12						
1.	Layanan Perumahan		Bulan	12	12	12	12	12						
	a. Jumlah bulanan/layanan perkecamatan													
2.	Pembinaan Dan Penguasaan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman													
	a. Jumlah kad/kecamatan yang mendapatkan pembinaan dan penguasaan pengembangan penyehatan	Kad/Ke td		507	507	507	507	507						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	lingkungan perumahan													
3.	Penataan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman													
	a. Jumlah NSPK, peraturan pengembangan penyehatan lingkungan perumahan	NSPK	3	3	15	4	1	26						
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah													
	a. Jumlah Kepala keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan Infrastruktur layanan air limbah	KK	1.149. 550	304. 900	415,5 47	478,6 08	145,68 0	2.714,2 85						
5.	Sistem Pengelolaan Pemasokan													
	a. Jumlah Kepala keluarga (KK) yang terlayani melalui pembangunan Infrastruktur layanan pemasokan	KK	2.713. 590	678. 350	2.054. 574	1.791. 060	251,00 0,00	7.488,5 64						
6.	Sistem Pengelolaan Dinahase													
	a. Luas Genangan Terlayani	Hq	2.650	850	533	607,8 9	25	4.666						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 4.1.4 : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
UNIT KERJA : DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
1.	SK 4.1.4.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat (PSPAM)								6.435.005	3.506.536	3.746.644	5.072.095	3.985.853	22.946.133	
	1. OUTPUT KEGIATAN :														
	1. Layanan Perkontoran														
	a. Jumlah bulanan layanan perkontoran	Bulan	12	12	12	12	12	12							
	2. Pengemburan, Pembinaan, Pengembangan Pengembangan Air Minum														
	a. Jumlah kbd/kola yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan pengembangan SPAM	Kbd/Ko td	507	507	507	507	507	507							
	3. Pembinaan Pengembangan SPAM														
	a. Jumlah NSPK peraturan pengembangan SPAM yang disusun	NSPK	5	6	4	3	5	23							
4.	Pembangunan indikator SPAM Regional	L/d	0	300	750	18,5	19,5	1.430							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
5.	Pembangunan infrastruktur SPAM Perkotaan	L/d	4.843	3.184	3.078	1.395	803	13.303						
6.	Pembangunan infrastruktur SPAM Perdesaan	L/d	1.449	0	1811	2.569	1.930	7.759						
7.	Pembangunan infrastruktur SPAM DI Kawasan Khusus	L/d	1.059	75	146	348	195	1.822						
8.	Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan Terdistribusi	Kawasa n	617	231	142	0	0	1.010						
	SPAM Terdistribusi	Kawasa	0	0	0	245	108	353						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)														
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL									
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]									
9. SPAM Non PDAM Terfasilitasi	d. Jumlah kawasan Perkolatan yang dikembangkan/ditingkatkan	n																					
															a. Jumlah kawasan yang terfasilitasi	n	246	0	0	0	0	0	246
															Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air Terfasilitasi								
Pembangunan Jaringan Perpipaan Kawasan Khusus	b. Jumlah kawasan Rawan Air yang dikembangkan/ditingkatkan	n	Kawasa	0	22	0	24	0	46														
															c. Jumlah kawasan khusus yang dikembangkan/ditingkatkan	n	0	0	28	0	4	32	
															Kegiatan 4.1.5 : PELAYANAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMAN								
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA																							
1. SK 4.1.5.1 : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	109	95	99	100	100	100	227.899	227.289	322.125	538.090	205.117	1.520.520									
															OUTPUT KEGIATAN :								
1. Layanan Perkonoran		Bulan	12	12	12			12															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	a. Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan			5	5	1	11						
3. Penyelenggaraan Habitat	a. Jumlah laporan penyelenggaraan habitat	Laporan	0	9	10	6	0	25						
5. Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya	a. Jumlah laporan pembinaan teknis bidang Cipta Karya	Laporan		91	39	1039	690	1.859						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MISAL) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)									
			2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.	Layanan Internal (Overhead)																
	a. Jumlah layanan internal	Layanan						3	1	1	5						
7.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Gedung/Kantor																
	a. Jumlah paket penyediaan sarana dan prasarana gedung/kantor	Paket	15 unit	1 tahun							29						
KEGIATAN 4.1.6 : PENYELENGGARAAN KETEPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN																	
UNIT KERJA : DIREKTORAT KEPERADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN																	
1.	SK 4.1.6.1 Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur bidang keipoleksyas 1 Tingkat akuntabilitas kinerja	%	82,93	72,81	73,38	75	79,65	79,65	244.533	243.112	234.146	223.196	142.328	1.087,315			
OUTPUT KEGIATAN :																	
1.	Layanan Perumahan																
	a. Jumlah bulan layanan perumahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12								
2.	Perencanaan Dan Kerjasama Infrastruktur Perumahan																
	a. Perencanaan dan Kerjasama Infrastruktur Perumahan	Laporan	14	10	7	7	2	40									
3.	Pembayaran Infrastruktur Perumahan	Laporan	24	9	7	7	2	49									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
4.	a. Pelaksanaan Infrastruktur Permukiman	Laporan	10	8	9	9	3	39						
5.	a. Pemantauan Dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman	Laporan	10	8	6	6	2	32						
6.	a. Pengelolaan Dana Dan Pengembangan Sistem Informasi	Laporan	10	12	8	8	2	40						
7.	a. Perencanaan Dan Pengembangan Program Bidang Permukiman*	Laporan	71	68	64	68	0	271						
8.	a. Penyenggaraan Habitat**	Laporan	0	0	0	0	1	1						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Catatan: *Output Perencanaan dan Pengembangan Program Bidang Perumukiman tidak dilaksanakan pada tahun 2019 disebabkan perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan Permjen PUPR No. 3/PR/2019 dan Permjen PUPR No. 5/PR/2019 **Output Penyelenggaraan Habitat dilaksanakan oleh Direktorat KIP disebabkan terdapat perubahan pelaksanaan tugas penyelenggaraan habitat yang sebelumnya terdapat pada kegiatan Pelayanan Manajemen Bidang Perumukiman															
KEGIATAN 4.1.7 : DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
UNIT KERJA : BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SPAM															
1.	SK 4.1.7.1 : Peningkatan kontribusi pemenuhan air minum yang layak bagi masyarakat									57.464	3.156	47.643	52.919	51.408	212.590
	1. OUTPUT KEGIATAN :	%	70,97	71,14	72,04	73,6	74,72	74,72							
	1. Layanan Perumahan														
	a. Jumlah bulan layanan perbaikan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12						
2.	Kebijakan Dan Pedoman Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Pedoman				3			3						
	a. Jumlah konsep pedoman yang disusun														
3.	Penyusunan SPK														
	a. Jumlah Standar/Pedoman/Krite ria yang disusun	SPK	5	-	5	-	-	-	10						
4.	Pendampingan Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan SPAM Oleh BUNM/BUAMD	PDAM	-	-	-	48	30	79							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
5.	Pemantauan Dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM	Laporan n	2	-	5	-	-	7						
			a.	Jumlah laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM										
6.	Fasilitas Peringkasan Dukungan Investasi Dalam Penyelenggaraan SPAM	PDAM	-	-	-	14	14	28						
			a.	Jumlah PDAM yang dibekali fasilitas dukungan investasi dalam penyelenggaraan SPAM										
7.	Fasilitas Peringkasan Keseluruhan Keperluan Antara Penyelenggaraan SPAM Dan Pelanggan	Laporan n	22	-	27			49						
			b.	Jumlah laporan fasilitas peringkasan dukungan investasi dalam penyelenggaraan SPAM										
		PDAM	-	-	-	20	17	37						
			d.	Jumlah PDAM yang dibekali fasilitas peringkasan keperluan antara penyelenggaraan SPAM dan pelanggan										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]		
KEGIATAN 4.1.8 : DUKUNGAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, OLAHRAGA, DAN PASAR																
UNIT KERJA : PUSAT PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, OLAHRAGA, DAN PASAR																
SK 4.1.8.1: Peningkatan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum																
1	Persentase jumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dibangun	%						100,00	100,00						6.534.000	6.534.000
Layanan Perumahan																
1.	a. Jumlah bulan layanan perumahan		Bulan													
Pembinaan Dan Rengasasan Pemukiman Dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, Olahraga, Dan Pasar																
2.	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan pemukiman dan rehabilitasi prasarana pendidikan, olahraga dan pasar		Kab./kota													
a.			173	173												
Rehabilitasi dan Rengasasan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah			Sekeloh													
			1.949	1.949												

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MIPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
d.	Jumlah bangunan sekolah dasar dan menengah yang direhabilitasi dan renovasi	Sekolah					195	195						
5.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Prasana Sarana Perguruan Tinggi Negeri	Lemba ga					40	40						
6.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan UIN	Lemba ga					9	9						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (M/ACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
7.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Bangunan Gedung dan Perumahan Kawasan Olahragaga	Unit					0	0						
8.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendukung PON dan Perumahan Kawasan	Unit					6	6						
9.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Bangunan Gedung dan Perumahan Kawasan Pasir	Pasir					8	8						

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**

TUJUAN 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Luva Rp/bln)				
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1.	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan													
	1. Tingkat pelayanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	92,6	95,75	95	95	6.672.243	7.487.747	7.687.303	9.500.653	7.218.666	36.166.612
PROGRAM 4.2 : PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
SASARAN PROGRAM :														
1.	Memenuhi a kecukupan tempat tinggal (backlog) dan perumahan rumah layak huni													
	1. Perentase penurunan keluar orang tempat tinggal (backlog) berdasarkan peringkat/menghuni	%	443	1.74	239	261	1.73	129						
	2. Perentase penurunan rumah layak huni	%	410	646	738	13.02	156	44.12						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Luas Ekuivalen)				
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 4.2.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN														
1.														
SK 4.2.1.1 : Perencanaan, Pemograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan														
1	Tingkat Perencanaan, Perograman, dan Pengendalian Penyediaan Perumahan	(%)	23	20	20	18	20	100	60.663	141.757	124.431	128.010	120.398	575.279
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Kelengkapan Pengembangan Perumahan														
1	Jumlah Dokumen Ketersediaan Perencanaan	Dok	9	9	5	6	4	33						
2	Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hunian	Dok	7	3	7	5	8	30						
3	Jumlah Dokumen Kemiskinan dan Kelangkaan	Dok	5	5	5	5	5	25						
4	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Dok	6	6	6	4	6	28						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Luas Ekuivalen)					
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	8	7	7	7	7	36							
6	Jumlah Layanan Hibrid	Laporan	1	1	1	1	1	5							
7	Jumlah Bulan Layanan Pektanban	Laporan	12	12	12	12	12	12							
KEGIATAN 4.2.2 : PENYEDIAAN RUMAH SUSUN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT RUMAH SUSUN															
1.	SK 4.2.2.1 : Peningkatan Pemediaan Rumah Susun Sewo yang Dilengkapi PSU yang Layak														
	1	Tingkat pemediaan Rumah Susun Sewo yang dilengkapi PSU yang layak	%	51,20	51,60	8,28	7,07	3,63	100,00	3.738.035	4.248.716	3.228.045	4.635.485	2.621.329	18.471.610
OUTPUT KEGIATAN :															
1. Pemecanaan, Pembinaan, Bantuan, dan Pemeyediaan Rumah Susun															
	1	Jumlah Dokumen Pemecanaan Teknik	Dok	14	7	3	2	3	15						
	2	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dok	14	14	4	4	4	22						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Luas Ekuivalen)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015		2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah Dokumen Penykopon dan Perencanaan Pelaksanaan	Dok	6	8	28	10	2	10						
4	Jumlah Dokumen Penghurban dan Pengelolan Rumah Suan	Dok	7	7	1	1	2	10						
5	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dok	13	6	3	10	2	10						
6	Jumlah Layanan Hlental	Laporan	1	1	1	1	1	5						
7	Jumlah Bukan Layanan Pelaksanaan	Laporan	12	12	12	12	12	12						
2.	Rumah Suan untuk MBK yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya													
1	Jumlah Rumah Suan yang Dibangun	UHF	10.497	77.40	13.251	11.670	506.842	550.000						
2	Jumlah Rumah Suan yang Didefinisi	Tower	85	78	335	37	103	354						
KEGIATAN 4.2.3 : PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS														
UNIT KERJA : DIREKTORAT RUMAH KHUSUS														

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1.	SK 4.2.3.1 : Peningkatan Penyediaan Rumah Khusus Khusus di daerah pasca bencana/korban, korban dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU Pendukung	%	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			87,46	120,84	50,37	36,69	15,66	100,00	1.529.059	1.280.241	2.203.715	786.567	590.250	6.151.832	
			OUTPUT KEGIATAN :												
			Peencanaan, Pembinaan, dan Penyediaan Rumah Khusus												
			1	Jumlah Dokumen Peencanaan Teknik	Dok	6	7	7	4	5	29				
2	Jumlah Dokumen Standar dan Pedoman	Dok	13	6	4	2	4	29							
3	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pendampingan Pelaksanaan	Dok	10	4	4	6	3	27							
4	Jumlah Dokumen Pengelolaan Rumah Khusus	Dok	11	4	4	3	3	25							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(1)	(2)	(3)													
1	Tingkat penyelenggaraan pembangunan baru berbasis swadaya masyarakat	%	103,78	448	333	663	703	100,00							
2	Tingkat penyelenggaraan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis swadaya masyarakat	%	122,96	93,60	31,64	39,34	47,4	100,00							
1. OUTPUT KEGIATAN :															
Kewadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/rusun yang layak dan terjangkau bagi Misk dalam lingkungan yang aman, sehat, utuh, dan wajar															
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknik	Dok	3	3	4	3	4	17							
2	Jumlah Dokumen Data dan Verifikasi	Dok	3	3	3	3	3	15							
3	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kemitraan	Dok	3	3	3	3	3	15							
4	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pelaksanaan Bantuan	Dok	3	3	3	3	3	15							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Luas Budget)							
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2	Fasilitasi rumah dan peningkatan	5	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Evaluasi	Dok	3	3	3	3	3	15							
					6	Jumlah Layanan Hibrid	Laporan	1	1	1	1	1	5				
		7	Jumlah Bulan Layanan Pektoran	Laporan	12	12	12	12	12	12							
		1															
		Fasilitasi rumah dan peningkatan															
		1	Jumlah Rumah Swadaya yang Dibangun Baru	Unit	20.756	1.007	2.000	5.999	220.238	250.000							
		2	Jumlah Rumah Swadaya yang Didukung Kualitasnya	Unit	61.469	96.681	110.732	195.305	1.035.593	1.500.000							
KEGIATAN 4.2.5 : PEMBINAAN DAN PENGEMANGAN RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL																	
UNIT KERJA : DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL																	
1																	
SK 4.2.5.1 : Peningkatan Pembiayaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial																	
1	Tingkat pembiayaan rumah umum melalui fasilitas PSU	%	73,6	64,01	9,59	16,00	5,80	100,00	192.764	194.712	124.469	215.544	123.800	851.289			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. OUTPUK KEGIATAN :														
Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Koperasi														
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis, Pendataan, Evidensi, dan Pelaporan Rumah Umum dan Koperasi	Dokumen	8	7	5	6	7	33						
2	Jumlah Dokumen Pengaturan dan Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Rumah Umum dan Koperasi	Dokumen	6	7	8	5	7	33						
3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum	Dokumen	7	8	5	7	8	35						
4	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pelaksanaan Hubungan Berimbang	Dokumen	6	3	4	4	6	23						
5	Jumlah Dokumen Hasil Kelengkapan, Pendataan, dan Pemantauan Penyediaan Tanah	Dokumen	6	3	4	5	7	25						
6	Laporan Layanan Penerimaan	Laporan	12	12	12	12	12	12						
2. Rumah Umum Topak Layak Hutan yang Dikeluarkan Melalui Bantuan Rumah Umum (RSU)														

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAIAN					TARGET	*TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Rumah Urutn Tepok Layok Huru yang terdistribusi Melalui Bantuan Rumah Urutn (RUU)	URH	29.956	26.684	17.266	30.406	57.238	676.950						
2	Laporan Layanan Penerimaan	Laporan	12	12	12	12	12	12						
KEGIATAN 4.2.6 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TENNIS LAINNYA														
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN														
SK 4.2.6.1 : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tennis Lainnya														
1	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tennis Lainnya	%	30,77	17,95	15,38	17,95	17,95	100,00	111.646	102.433	97.651	127.801	115.850	555.381
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Layanan Dukungan Manajemen Penyediaan Perumahan														
	Jumlah Layanan Kepegawaian, Organisasi, Tata Laksana	Laporan	11	6	5	7	7	36						
	Jumlah Layanan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Laporan	6	6	5	7	7	33						
	Jumlah Layanan Hukum dan Komunikasi Publik	Laporan	16	9	6	6	6	47						
	Jumlah Layanan Urutn dan Penyalahgunaan Barang Milik Negara	Laporan	11	4	2	5	5	27						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	REALISASI/CAPAHAN					TARGET	*TOTAL	ANGGARAN (Luas Ekuivalen)				
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Jumlah Layanan Hibrid	Layanan	2	1	6	1	1	11						
6	Jumlah Bulan Layanan Perkotaan	Bulan	12	12	12	12	12	12						

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)						
		REALISASICAPAIAN					TARGET	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN STRATEGIS															
1 Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman															
1 Tingkat pelaksanaan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	%	80,46	79,95	92,6	95,75	95	95								
PROGRAM 4.3 : PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN															
SASARAN PROGRAM :															
1															
Meningkatnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak melalui bantuan subsidi pendanaan dan pembiayaan perumahan	%	1,3	3,11	3,6	4,42	2,86	15,29	6.145.823	6.236.844	4.178.799	6.349.375	10.814.993	33.725.455		

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASABAN PROGRAM (OUTPUT)/SASABAN KENDALIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Luas Ekuivalen)							
			REALISASI CAPAHAN					REALISASI ANGGARAN							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Menyusunnya kekurangan tempat tinggal (bocok) modal bahan pendidikan dan pembiayaan perumahan (SA 999.03 dan SA 999.07)	%	3,48	8,33	9,66	11,85	7,68	41	6.145.823	4.236.864	4.178.799	4.349.375	10.814.593	33.725.455	
2	Tingkat peningkatan kualitas perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	3,48	8,33	9,66	11,85	7,68	41	6.145.823	4.236.864	4.178.799	4.349.375	10.814.593	33.725.455	
KEGIATAN 4.3.1 : DIKUNJINGAN MANAJEMEN PENYELENGA BAAK PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN UMUM DAN PERUMAHAN															
1.	5K.4.3.1.1 : Terelemparannya Layanan Dukungan Manajemen Ekelon I														
	Tingkat Layanan Dukungan Manaj emen Ekelon I	%			100	100	100			37.910	69.292	61.635	61.038	67.600	297.475
OUTPUT KEGIATAN :															

1.	(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI	TOTAL
				REALISASI CARAPAN						REALISASI ANGGARAN						
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
Layanan Dukungan Manajemen Berkelanjutan																
1	Jumlah laporan pendidikan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	Laporan	25	29	30	28	29	141	14.432	15.985	18.519	18.408	20.000	87.344	9.480	
2	Jumlah laporan perencanaan, pemeliharaan dan manajemen kepegawaian	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.885	2.399	2.371	2.328	2.400	11.376		
3	Jumlah laporan keuangan	Laporan	3	4	5	4	6	22	589	1.114	3.400	3.666	4.255	13.024		
4	Jumlah laporan pemeliharaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	Laporan	5	6	5	5	5	26	2.395	3.065	2.193	3.000	2.400	13.863		
5	Jumlah laporan pertimbangan opini hukum dan pendampingan hukum	Laporan	4	4	4	4	4	20	1.926	1.413	2.140	1.833	1.800	9.332		
6	Jumlah laporan ketunahan dan kepegawaian	Laporan	5	5	5	5	5	25	5.933	3.498	3.446	3.469	3.745	20.091		
7	Jumlah dokumen anggaran bidang pelayanan publik dan pelayanan umum dan pelayanan	Dokumen	1	2	2	1	1	7	284	1.535	1.196	861	900	4.776		
8	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Laporan	1	2	2	2	2	9	75	582	1.414	1.239	2.100	5.410		
Layanan Internal			0	2	3	3	3	11	0	2.452	2.079	1.424	2.100	8.257		
1	Jumlah Pengendali Pengaduan Data Dan Komunikasi	Layanan	0	1	1	1	1	4	0	1.410	1.098	937	800	4.245		

(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					TOTAL		
			REALISASI CAPAIAN						TOTAL	REALISASI ANGGARAN					TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018			2019
2	Jumlah Pengadaan Perbaikan Fasilitas	Layanan	0	1	1	1	1	4	0	1.042	576	99	690	2.609		
3	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	Layanan	0	0	1	1	1	3	0	403	590	410	1.403			
Layanan Perbaikan		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	23.478	50.855	41.037	41.004	45.500	201.874		
1	Jumlah layanan perbaikan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	23.478	50.855	41.037	41.004	45.500	201.874		
KEGIATAN 4.3.2 : PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KEBERSAMAAN, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA																
UNIT KERJA : DIREKTORAT PERUMISAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI																
1.	SK 4.3.2.1 : Terasumnya kebijakan, program dan anggaran, kegiatannya, data/informasi serta evaluasi kinerja pelaksanaan pembinaan															
1	Tingkat kualitas kebijakan, program dan anggaran, kegiatannya, data/informasi serta evaluasi kinerja pelaksanaan Instruksi/Petunjuk Umum dan perundangan	%			100	100	100	100	9.456	13.262	18.900	19.733	28.840	90.222		

1	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)						
			REALISASI/CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI	
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi dan NSPK, Penyediaan Infrastruktur, Penelitian Umum dan Perencanaan	Draft Juknis dan NSPK	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.000	1.000
3	Jumlah Profil Risiko Penyediaan Infrastruktur Perumahan	Profil Risiko	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3.200	3.200
4	Jumlah Pengalokasian Dana dan Kermial Penyediaan Infrastruktur Penelitian Umum dan Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	450	450
5	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyediaan Infrastruktur Penelitian Umum dan Perumahan	Laporan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	700	700
OUTPUT KEGIATAN :															
Kerjasama, studi, analisis mako, program dan sistem formal pembiayaan infrastruktur penelitian umum dan perumahan		Dokumen	11	16	12	18	23	80	7.407	9.527	13.872	14.871	18.190	63.917	

(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					TOTAL		
			REALISASI/CAPAHAN						TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN					TOTAL	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			2015	2016	2017	2018			2019
1	Jumlah dokumen kebidikan dan strategi bidang pembiayaan infrastruktur perundang dan perundangan	Dokumen	3	3	4	3	6	19	2.277	1.945	2.844	2.331	3.050	12.447		
2	Jumlah Dokumen Analisis Makro Bidang Pembiayaan Infrastruktur perundang umum dan perundangan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	664	732	1.065	1.037	900	4.406		
3	Jumlah dokumen rumusan standar dan kriteria bantuan dan kemitraan	Dokumen	1	1	1	2	3	8	536	663	1.319	1.476	1.700	5.694		
4	Jumlah dokumen perencanaan bidang pembiayaan infrastruktur perundang dan perundangan	Dokumen	2	3	2	4	4	15	1.156	2.208	3.290	4.265	3.090	14.006		
5	Jumlah dokumen atau pengembangannya sistem informasi bidang pembiayaan infrastruktur perundang umum dan perundangan	Dokumen	1	5	1	4	5	16	2.421	3.242	2.968	3.394	4.150	18.175		
6	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur perundang umum dan perundangan	Laporan	3	3	3	4	4	17	354	717	2.466	2.368	3.300	9.204		
2	MOU kerjasama pembiayaan perumahan	MOU	23	51	67	71	84	296	1.110	2.696	4.210	3.854	4.200	16.070		

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI	
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					TOTAL	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
1	Jumlah MOU kerjasama dengan lembaga keuangan pemerintah daerah	MOU	23	50	66	69		292	533	1.360	1.841	1.572		4.200	9.506
		MOU	0	1	1	2	84	4	577	1.336	2.369	2.283		4.200	6.565
2	Jumlah MOU kerjasama luar negeri bidang pembangunan infrastruktur perkeretaapuran dan perhubungan	MOU	0	1	1	2		4							
		MOU	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.000	1.000
3	Kebijakan, Strategi dan NSRF Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapuran Umum dan Perhubungan	Draft NSRF	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.000	1.000
		Draft NSRF					2	2						1.000	1.000
4	Manajemen Risiko Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapuran Umum dan Perhubungan	Profil Risiko	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3.200	3.200
		Profil Risiko					4	4						3.200	3.200
5	Pengelembaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapuran Umum dan Perhubungan	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	450	450
		Dokumen					1	1						450	450

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Lula Rupiah)				
			REALISASI/CAPAAN				TARGET	TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah dokumen Pengelolaa Dats dan Informasi Penyalayan Instansi/ukur Pakej/loan Umum dan Perumahan	Dokumen					1	1					450	450
6	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyalayan Instansi/ukur Pakej/loan Umum dan Perumahan	Laporan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	700	700
7	Jumlah dokumen Pengelolaa Dats dan Informasi Penyalayan Instansi/ukur Pakej/loan Umum dan Perumahan	Laporan					1	1					700	700
		Layanan perantara	Bulan layanan	12	12	12	12	12	12	939	1.039	747	1.009	1.100
	Jumlah laporan perantara	Bulan layanan	12	12	12	12	12	12	939	1.039	747	1.009	1.100	4.834
KEGIATAN 4.3.3 : PENJAJAGUN AAN SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN														
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBAY AAN INFRASTRUKTUR SUMBER DA YA AIR														
1.	SK 4.3.3.1 : Terselenggaranya Pengelolaa dan Pendayagunaan Sumber-sumber pembiayaan													

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI	
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					TOTAL	TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Thicket penyelenggaraan pengabdian dan pengabdian sumber sumber pembiayaan	%			100	100	100	100	5.391	12.502	13.996	14.526	19.550	45.965	
2	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.100	
3	Jumlah Pembiayaan Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	700	
4	Jumlah Pembiayaan Dukungan Kelola Sistem Investasi Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Jumlah Pkda dan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekord Pembayar dan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.325	
6	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.000	
OUTPUT KEGIATAN :														1	

1.	(1)	(2)	(3)	TARGET					ANGGARAN (Lula Rupiah)																
				REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL											
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL										
Layanan Pengembangan Sumber Pembiyasan Primer dan Tabungan Perumahan dan Pembiyasan Lainnya													Lembog ^o	5	34	44	72	110	265	847	3.843	4.447	4.847	5.200	19.425
1	Jumlah hibanga jasa keuangan yang dialokai untuk memiliki portofolio pembiyasan perumahan		Lembog ^o	5	22	25	32	35	119	163	1.743	1.972	1.449	1.450	6.376										
2	Jumlah hibanga jasa keuangan lainnya yang dialokai untuk memiliki portofolio pembiyasan perumahan		Lembog ^o	0	3	15	24	20	62	156	444	936	1.098	1.175	3.809										
3	Jumlah hibanga jasa keuangan yang dialokai untuk memiliki tabungan perumahan		Lembog ^o	0	8	0	6	20	34	149	631	378	550	625	2.334										
4	Jumlah hibanga jasa keuangan yang dialokai untuk memiliki produktif/program pembiyasan swadaya masyarakat		Lembog ^o	0	1	4	10	10	25	107	459	925	400	600	2.490										

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Kupon)					
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(15)	
5	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk mengobolokan dana CSR untuk pembiayaan perumbuhan	Perusahaan	0	0	0	0	25	25	272	586	456	1.350	1.350	4.014
2. Layanan Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Sekunder		Lembaga	15%	25,75 %	13,97%	24,52 %	33 Lembaga gp	24% / 33 Lembaga gp	890	1.981	2.241	2.345	1.875	9.332
1	Jumlah prosen bsa portofolio dana jangka panjang BPJS, dana pensiun, asuransi dan bapartaurunfNB untuk pembiayaan pembangunan perumahan	% / Lembaga	1%	1,20%	6,80%	1,57%	10 Lembaga gp	9% / 2 Lembaga gp	776	346	647	600	650	3.019
2	Jumlah prosen bsa penyalangan pembiayaan sekunder perumahan untuk pembiayaan perumahan	% peningkatan dan pfrigma inkludibsa	6%	28,72 %	26,97%	23,10 %	-	6%	113	1.636	1.594	1.745	1.225	6.313

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Luta Kupon)					TOTAL
			REALISASI/CAPAAN					TARGET	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Pembinaan Perempuan		Dokumen	7	6	9	5	9	36	3.269	5.606	4.348	4.325	4.150	27.698
1	Jumlah dokumen rencana pendayagunaan sumber pembinaan perempuan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.266	365	794	715	1.650	4.790
2	Jumlah rumusan NSPK pendayagunaan sumber pembinaan perempuan	Rumusan NSPK	2	2	2	1	2	9	325	590	765	1.399	1.300	4.379
3	Jumlah dokumen rencana perbaikan terkait pelaksanaan pembinaan perempuan	Rencana Perbaikan	1	0	0	0	0	1	163	4616	-	-	-	4.279

5.	(1)	(2)	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Lula Kupon)					TOTAL
				REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur SDA		Dokumen	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	2.425	2.425
	1	Jumlah Pengembangan Terminal Pembangkit Listrik SDA	Dokumen	0	0	0	0	2	2					1.100	1.100
	2	Jumlah Pelaksanaan Terminal dan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur SDA	Dokumen	0	0	0	0	1	1					1.325	1.325
6.	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA		Laporan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1.000	1.000
	1	Jumlah Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	0	0	1	1					500	500
	2	Jumlah Penyusunan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	0	0	1	1					500	500
	3	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur SDA	Laporan	0	0	0	0	0	0					-	0

7.	Layanan perikanan	Sasaran Strategis (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Lulu Rupiah)						
				REALISASI/CAPAIAN					REALISASI/ ANGGARAN						
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	385	1.052	739	1.009	1.100	4.284
		Indikator Output/Kegiatan :													
		1	Jumlah layanan perikanan	12	12	12	12	12	12	385	1.052	739	1.009	1.100	4.284
KEGIATAN 4.3.4 : PENGEMBANGAN POLA PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBINAAN PERUMAHAN															
1.															
		SK 4.3.4.1 : Tersedianya skema pembiayaan serta terselenggaranya penyediaan bahan pembiayaan perumahan bagi MBR													
		1	Indikator ketersediaan skema pembiayaan perumahan serta terselenggaranya penyediaan bahan pembiayaan perumahan bagi MBR	%						73.531	504.804	2.310.888	3.251.349	4.440.233	10.982.425

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Kupon)						
			REALISASI/CAPAAN					TARGET	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2018	2017	2018	2019	TOTAL	
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat fasilitas Pembiayaan Perumahan	Rumah Tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Perumahan Kelangkaan dan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	Jukstira	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	425	425
4	Jumlah Perumahan Kelangkaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan	Draft NSRF	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	840	840
5	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	859	859
6	Jumlah Penyediaan Investasi dan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	420	420

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI	TOTAL
			REALISASI/CAPAIAN						2015	2016	2017	2018	2019		
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7	Jumlah Paket Pembinaan Perumahan	Paket Pembinaan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	420	420
	8	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Perumahan Serta Kemudahan dan/atau Bantuan Pembinaan Perumahan	Laporan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	840	840
OUTPUT KEGIATAN :															
1. Misi/ Terasi Pengembangan Pada Pembinaan Perumahan															
			Materi Teknis	12	9	9	9	10	49	4.596	4.893	5.157	5.723	6.650	27.019
	1	Jumlah Materi Teknis: Rencana Strategi Pengembangan Pada Pembinaan Perumahan	Materi Teknis	3	4	4	4	5	20	1.016	626	1.495	1.499	2.350	6.985
	2	Jumlah Rumusan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pada Pembinaan Perumahan	Materi Teknis	0	0	1	1	1	3	197	341	1.144	1.199	1.100	3.981

(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Kupon)					TOTAL		
			REALISASI/CAPAHAN						TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN					TOTAL	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)			(13)
		Rumasan NSEPK	1	1	1	1	1	5								
3	Jumlah Mochil Tekris Pengembangan Rumah Topok dan Rumah Saun	Mochil Tekris	3	2	2	2	2	11	1.298	1.374	869	946	1.300	5.788		
4	Jumlah Mochil Tekris Pengembangan Rumah Swadaya	Mochil Tekris	2	1	1	1	1	6	486	865	694	636	500	3.381		
5	Jumlah mochi tekris pengembangan pada pembiyoran mikro	Mochil Tekris	2	1	1	1	1	6	698	812	572	749	700	3.531		
6	Jumlah mochi tekris pengembangan pada investasi perumahan	Mochil Tekris	2	1	1	1	1	6	701	875	383	694	700	3.353		
Rumasan Ropemen Pola Pembiayaan dan Investasi Perumahan			Ropemen	4	4	5	4	4	21	1.172	1.552	1.851	2.232	2.800	9.609	
1	Jumlah rumasan ropemen pada pembiyoran rumah topok dan rumah saun	Ropemen	1	1	2	1	1	6	360	534	690	733	700	3.016		
2	Jumlah rumasan ropemen pada pembiyoran rumah swadaya	Ropemen	1	1	1	1	1	5	279	264	381	500	700	2.124		

(1)	(2)	(3)	TARGET					ANGGARAN (Lula Rujukan)					PROYEKSI	
			REALISASI/CAPAAN					REALISASI/ANGGARAN					2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2018	2017	2018		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
3	Jumlah rujukan Ropeman pdg pembiyon miko	Ropeman	1	1	1	1	1	5	266	255	389	500	700	2111
4	Jumlah rujukan ropeman pdg/medikal perumahan	Ropeman	1	1	1	1	1	5	267	499	391	499	700	2356
Layanan Bantuan Pembangunan		Rumah Tangga							67.059	499.240	2.302.914	3.242.292	4.420.154	10.531.879
1	Jumlah Layanan Operasional Bantuan Pembangunan Perumahan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	307	3.070	4.356	5.083	9.500	22.316
	Dana operasional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	307	3.070	3.598	4.000	3.500	14.445
	Dana operasional untuk mendukung pelaksanaan PHN	Bulan Layanan	-	-	12	12	12	12	0	0	768	1.083	4.000	7.851
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan umkm yang bersumber dari PHN	Rumah Tangga	-	-	-	3	312	315	0	0	0	89	10.000	10.089
3	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan subsidi bantuan umkm ke BIA (999.07)	Rumah Tangga	200	75.933	206.596	207.812	237.000	757.541	0	300.732	826.384	931.248	948.000	3.029.364

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI	
			REALISASI/CAPAAN					TARGET	REALISASI/ ANGGARAN				2019	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
4	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Subsidi Satis Rumah (SR)	Rumah Tangga	13.187	124.737	188.726	202.787	100.000	629.437	66.752	192.458	1.472.174	2.285.872	3.450.654	7.469.10	
4. Perencanaan Kerja Sama dan Pembinaan Pembinaan Pemukiman			Jumlah	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	434	859
1	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Sistem Pembinaan Pemukiman	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Perencanaan Kerja Sama Pemukiman Pemukiman	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	434	434
3	Jumlah Perumusan Kebijakan dan Program Pengembangan Pemukiman Pemukiman		0	0	0	0	1	1					425	425	
5. Pelaksanaan Investasi Pemukiman			Paket Pemukiman	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	840	840
1	Jumlah Penyediaan dan Pelaksanaan Kerja Sama Investasi Bidang Pemukiman Pemukiman	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	420	420

(1)	(2)	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Lula Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
2	Jumlah Pengembangan dan Perdompungan Investasi Perbiyasan Perumahan	Paket Perbiyasan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	420	420
6.	Penunjan Kelengkapan & kemudahan dan/atau Bantuan Perbiyasan Perumahan	Droit NSPK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	840	500
1	Jumlah Penunjan Penunjan Kelengkapan dan Bantuan Perbiyasan Perumahan dan Perbiyasan Jumlah Umum dan Swadaya	Droit NSPK	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	500	500
2	Jumlah Perbiyasan perunggu kepantiangan pelaksana kemudahan dan/atau bantuan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergisasi Perbiyasan Perumahan												340	
7.	Perumahan dan Evaluasi Inyeksi perumahan serta & kemudahan dan/atau Bantuan Perbiyasan Perumahan	Laporan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	840	840
1	Jumlah Perumahan dan Evaluasi Pelaksanaan Perbiyasan Perumahan	Laporan	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	840	840

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					PROYEKSI				
		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL				
														(4)	(5)	(6)	(7)
8. Layanan Fasilitas Pembinaan Perumahan	Rumah Tangga																
1	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Koordinasi Fasilitas Pembinaan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Topan	Rumah Tangga															
9. Layanan Perkotaan	Layanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	704	1.100	744	1.122	1.250	4.942	
1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Direktorat	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	5	485	49	91	135	150	1.150	
2	Jumlah Layanan Perumahan	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	12	12	19	1.000	475	947	1.100	3.791	
KEGIATAN 4.3.5 : PENINGKATAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN																	
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN																	
1.	SK 4.3.5.1 : Terselenggaranya pembinaan sistem pembiayaan perumahan																

1.	Layanan diemban sistem pembayaran per emban	Dokumen	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)						
			SATUAN	REALISASI/CAPAAN					TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI TOTAL	
				2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018		2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR														
	1	Tingkat Penyelenggaraan pembinaan sistem pembayaran per emban	%				100	100	100	11.266	12.245	12.536	11.790	16.900	64.757
	2	Jumlah Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen				1	1	1					1.500	1.500
	3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diemban NERK Penyediaan Perumahan Milyard	Dokumen				1	1	1					3.000	3.000
	4	Jumlah Penyediaan dukungan kegiatan investasi/infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen				1	1	1					750	750
	5	Jumlah Paket Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Paket Penyediaan				1	1	1					1.800	1.800
	6	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan				3	3	3					1.750	1.750
	OUTPUT KEGIATAN :														
	TOTAL						40	40	40	5.886	4.431	4.836	3.720	4.000	22.884

(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Luas Ekuivalen)					TOTAL			
			REALISASI CAPAIAN						TOTAL	REALISASI ANGGARAN					TOTAL		
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018			2019	
			4	4	4	4	4	20									
			5	5	5	5	5	25									
Indikator Output Kegiatan																	
1	Jumlah modul elektronik/dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran sistem pembelajaran	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.339	1.426	1.676	925	1.100	6.462			
2	Jumlah modul elektronik/dokumen pedoman pembelajaran sistem pembelajaran/perencanaan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	2.192	1.373	1.041	956	1.100	6.662			
3	Jumlah laporan pelaksanaan di tingkat NSFK pembelajaran per umbaran di wilayah I	Laporan	1	1	1	1	1	5	700	460	572	500	500	2.732			
4	Jumlah laporan pelaksanaan di tingkat NSFK pembelajaran per umbaran di wilayah II	Laporan	1	1	1	1	1	5	650	427	571	500	500	2.649			
5	Jumlah laporan pelaksanaan di tingkat NSFK pembelajaran per umbaran di wilayah III	Laporan	1	1	1	1	1	5	650	423	568	500	500	2.640			
6	Jumlah laporan evaluasi kempus digitalisasi	Laporan	2	2	2	2	2	10	355	322	409	350	300	1.736			

2.	Layanan pembinaan dan bantuan teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pemerintah provinsi dan pemerintah daerah	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luas Ekuivalen)						
			REALISASICAPAIAN						REASIASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Indikator Output/kegiatan														
1	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LJK/LJKB / Provinsi/ Kab/ Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 258 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	26 LJK/LJKB, 13 Provinsi dan 99 Kab/Kota	1.500	2.074	4.838	5.459	1.000	14.871
2	Jumlah lembaga jasa keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	LJK/LJKB / Provinsi/ Kab/ Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	10 LJK/LJKB, 11 Provinsi dan 88 Kab/Kota	1.500	2.300	1.138	741	1.000	6.677	

(1)	(2)	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Lula Rupiah)				
				REALISASI/CAPAHAN				TARGET	TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(15)	
3		Jumlah lembaga (ada keuangan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah II yang memperoleh pembinaan dan bantuan teknis	URB/URB / Provinsi/ Kab/ Kota	6 URB/URB 88,10 Provisi dan 72 Kab/Kota O/D	6 URB/URB 88,10 Provisi dan 72 Kab/Kota O/D	6 URB/URB 88,10 Provisi dan 144 Kab/Kota O/D	6 URB/URB 88,10 Provisi dan 144 Kab/Kota O/D	10 Provinsi	6 URB/URB 8,10 Provisi dan 144 Kab/Kota O/D	1.400	2.300	976	850	1.000	6.406
3		Penyiapan dan Kerja Sama Investasi Informatika Jaban dan Jembaban	Dokumen	0	0	0	0	3	3	-	-	-	-	5.250	5.250
1		Jumlah Perencanaan Penyediaan Informatika Jaban dan Jembaban	Dokumen	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	1.500	1.500
2		Jumlah Penyediaan Investasi Informatika Jaban dan Jembaban	Dokumen	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	3.000	3.000
		Jumlah Penyediaan Dukungan Kerja Sama Investasi Informatika Jaban dan Jembaban		0	0	0	0	1	1					750	750

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Lulu Ripen)						
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2018	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4. Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jdan dan Jembatan		Paket Pembay dan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	1.800	1.800
			1. Jumlah pengembangan konstruksi pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokume n	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-
2. Jumlah pelaksanaan konstruksi dan pandemiring pembayon Infrastruktur jalan dan jembatan		Paket Pembay dan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	1.000	1.000
			2. Jumlah pelaksanaan konstruksi dan pandemiring pembayon Infrastruktur jalan dan jembatan	Paket Pembay dan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-
5. Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jdan dan Jembatan		laporan	0	0	0	0	3	3	-	-	-	-	-	1.750	1.750
			1. Jumlah Penyipaan dan Pelaksanaan Perbaikan Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	laporan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-
2. Jumlah Penyipaan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Laporan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	800	800
			2. Jumlah Penyipaan dan Pelaksanaan Evaluasi Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-

1.	58.4.3.4.1 : Terealisasi anggaran pengendalian pelaksanaan dan pemeliharaan pemeliharaan bagi MBK	Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBK	%	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)					
				REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
3	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	150	150	
6.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	1000	1040	750	1009	1100	4919	
		Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	1000	1040	750	1009	1100	4919
KEGIATAN 4.3.6 : PENGENDALIAN KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN															
1.															
58.4.3.4.1 : Terealisasi anggaran pengendalian pelaksanaan dan pemeliharaan pemeliharaan bagi MBK															
1	Tingkat penyelenggaraan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBK	%	TARGET						ANGGARAN (Lula Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI	
2	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	150	150	
6.	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	1000	1040	750	1009	1100	4919	
		Jumlah layanan perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	1000	1040	750	1009	1100	4919

1	2	3	TARGET							ANGGARAN (Lula Rupiah)									
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2018	2017	2018	2019							
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			SASARAN STRATEGIS (IMPACT) SASARAN PROGRAM (OUTPUT) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT/INDIKATOR)	SATUAN															
			1	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah II	Laporan	2	3	3	3	3	14	1.696	2.433	2.170	1.539	3.040	10.899		
			3	Jumlah laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan wilayah IV	Laporan	2	3	3	3	14	1.315	2.210	1.871	1.609	3.000	10.005			
			4	Jumlah laporan evaluasi kinerja dikektorat	Laporan	2	2	2	2	2	10	120	197	300	130	530	1.117		
			5	Rencana pelaksanaan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1.903	1.832	1.940	1.001	2.480	9.286		
			Indikator Output Kegiatan :																
			1	Jumlah Dokumen Rencana Pelaksanaan dan Bantuan Perencanaan Perumahan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1.903	1.832	1.941	1.001	2.480	9.286		
			Fenomena dan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Perumahan		Dokumen	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1.950	1.950		
			1	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	350	350		

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luas Ekuivalen)									
		REALISASI/CAPAHAN					TOTAL	REALISASI/ ANGGARAN				PROYEKSI 2019	TOTAL				
		2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2	Jumlah Penyediaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	800	800		
	Jumlah Penyediaan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	0	0	0	0	1	1						800	800		
4	Peltaksanaan Investasi Infrastruktur Permukiman	Paket Penyediaan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1.800	1.800		
			1	Jumlah pengembangan teknis penyediaan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	900	900
			2	Jumlah pelaksanaan teknis dan pendampingan penyediaan Infrastruktur Permukiman	Paket Penyediaan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	900	900
5	Pemanfaatan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Dokumen	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1.400	1.400		
			1	Jumlah penyediaan dan pelaksanaan Permukiman dan Edukasi Investasi Infrastruktur Permukiman	Laporan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	800	800

1.	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luas Ekuivalen)						
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI	
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
2	Jumlah penyediaan dan pelaksanaan Evaluasi Investasi/Infrastruktur Permukiman	Laporan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	800	800
3	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pelaksanaan/Perencanaan Infrastruktur Permukiman	Laporan					0	0							
4	Layanan perkonkoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	480	832	951	1.009	1.100	4.572	
	Indikator Output/Kegiatan:														
1	Jumlah layanan perkonkoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	480	832	951	1.009	1.100	4.572	
KEGIATAN 4.3.7 (PUB): DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PENYALURAN PERUMAHAN															
UNIT KERJA : PADAT PENGOLAHAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN (PU)															
1.															
SK 4.3.7.1 : Terelempornya dukungan penyediaan dan pengalokasian bantuan pembiayaan perumahan															

1	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Luas Ekuivalen)								
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
1	Tingkat penyalangan dan dukungan penyulutan dan pengalihan bantuan pembiayaan perumahan	%			100	100	100	100	100	100	14.143	44.939	66.029	74.483	67.750	287.344
OUTPUT KEGIATAN:																
1	Layanan promotif, perencanaan dan bantuan hukum Pusi Pengabdian Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Dokumen	28	21	35	34	31	149	1.562	27.517	9.094	10.762	8.000	56.936		
1	Jumlah laporan pediklanan promotif dan sosial	Dokumen	1	10	11	5	14	41	349	17.480	6.512	5.765	4.500	34.607		
2	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusi Pengabdian Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Dokumen	3	2	11	2	9	27	971	8.662	2.312	4.891	3.154	20.190		
3	Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum	Dokumen	24	9	13	27	8	81	242	1.175	220	107	346	2.140		
2	Layanan kejosmas dan rekonsiliasi LK	Lembaga	47	47	49	83	84	330	245	1.011	8.083	2.858	4.942	17.139		
1	Jumlah berbagai yang bekerjasama dengan Pusi Pengabdian Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Lembaga	23	27	33	43	40	166	37	150	1.303	1.466	1.700	4.726		

	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Luas Kupon)						
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI		
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Jumlah rekrutasi dengan LK	Lembaga	24	20	36	40	44	164	208	860	6.730	1.372	3.242	12.412
3	Laporan informal, evaluasi, pembinaan, dan dukungan manajemen Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembangunan Perumahan (BLU)	Laporan Bulan Layan	19	29	31	12	31	122	5.015	11.287	14.218	12.372	18.402	61.494
1	Jumlah laporan keuangan Kinerja PPOPP	Dokumen	10	9	13	2	12	46	256	1.115	1.851	1.281	4.833	11.357
2	Jumlah verifikasi permohonan pencadangan dana dari LK	Ranah Tengah	76.489	38.469	23.763	57.939	48.858	285.518	-	289	608	537	1.550	2.965
3	Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informal yang terintegrasi	Dokumen	1	2	9	2	3	17	366	3.466	5.924	1.851	2.303	13.910
4	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi penyajian bantuan pembangunan perumahan	Dokumen	2	2	4	2	4	14	2.177	1.292	3.139	4.204	2.567	13.399
5	Jumlah dokumen pemertuan SDM yang berlaku ke	Dokumen	1	1	1	1	4	8	661	1.916	1.163	2.184	1.374	7.299
6	Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembangunan Perumahan BLU	Dokumen	1	1	2	1	4	9	1.473	2.121	881	1.997	3.354	9.826

	(1)	(2)	(3)	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Lula Rupiah)					TOTAL		
				REALISASI CAPAIAN						TOTAL	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI	TOTAL
				2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	7	Jumlah dokumen BANI	Dokumen	3	13	1	2	2	21	82	878	144	192	275	1.592		
	8	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1	5	-	230	466	126	305	1.147		
4.	Layanan Internal (overhead)		Layanan	1	1	1	1	1	1	578	488	4.570	6.019	2.303	13.918		
	1	Jumlah Perangkoan Pengabdian Desa Komunitas	Unit								334	5.179	2.153				
	2	Jumlah Perorotan Fasilitas Perorotan	Unit	1	1	1	1	1	1	598	488	4.176	900	150	13.918		
5.	Layanan perorotan		Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	6.723	24.637	30.124	43.520	33.903	138.907		
	1	Jumlah Perorotan Pengabdian Desa Komunitas	Layanan	12	12	12	12	12	12	6.723	24.637	30.124	43.520	33.903	138.907		
	2	Jumlah Perorotan Fasilitas Perorotan	Layanan	12	12	12	12	12	12								
KEGIATAN 4.3.8 (BA 999.03) : PENYALURAN SANTUAN PEMBAYARAN PERUMAHAN																	
UNIT KERJA : PADAT PENGOLAHAN DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BU)																	
1.	SK 4.3.8.1 : Terelempangnya dukungan penyediaan bantuan penbiayaan perumahan																

1.	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEDAIAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Lula Rupiah)								
			REALISASI/CAPAHAN					PROYEKSI								
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		
		%			100	100	100	100	100	100	4.055.232	5.627.539	2.706.624	5.895.207	7.100.000	27.384.614
	1	Tingkat penyelenggaraan dukungan permodalan bantuan pembiayaan perumbuhan			100	100	100	100	100	100	4.055.232	5.627.539	2.706.624	5.895.207	7.100.000	27.384.614
OUTPUT KEGIATAN :																
1. Bantuan pembiayaan perumbuhan ke bank pedesaan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah																
		Umlt Rumah/Susunan	76.489	58.449	23.743	57.939	48.868	285.518	4.055.232	5.627.539	2.706.624	5.895.207	7.100.000	27.384.614		
	1	Jumlah urut KPR sejalihna topok yang difasil ksil bantuan pembiayaan	Urut Rumah	76.489	58.449	23.743	57.939	48.868								
	2	Jumlah urut KPR satuan yang difasil ksil bantuan pembiayaan	Urut Satuan	0	0	0	0	0								
	3	Jumlah urut KPR sewa beli untuk satuan yang difasil ksil bantuan pembiayaan	Urut Satuan	0	0	0	0	0	285.518	6.055.243	5.627.539	2.706.624	5.895.207	7.100.000	27.384.614	
	4	Jumlah urut Kredit Konstruksi yang difasil ksil bantuan pembiayaan	Urut Rumah	0	0	0	0	0								

(1)	(2)	(3)	TARGET						ANGGARAN (Lula Kupon)						
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI		
SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
							(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Jumlah unit KPR Swadaya yang dikalisi ban lunas pembiayaan	Unit Rumah	0	0	0	0	0								

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TUJUAN 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPOT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN							TARGET TOTAL	REALISASI ANGGARAN				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015		2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN STRATEGIS															
1	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR														
	1	Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	%	Terge + baru	Terge + baru	Terge + baru	90	100	100						
PROGRAM 5.1 : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR															
SASARAN PROGRAM :															
1	Peringkat pemantauan teknologi terapan dan rekamansi kebijakan bidang PUPR														
	0	Tingkat Pemantauan Teknoid terapan dan Rekomendasi Kebijakan Olen Stakeholders	%	85	100	74,07	101,4	75	75						
										521.407	547.864	532.599	886.810	952.707	3.541.467

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN				TARGET	TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Juriah Pilot Project	UHI	0	2	11	13	8	34	0	2.025	39.242	56.368	94.293	191.927
3	Rekomendasi Kebijakan													
1	Juriah Naskah Permelahan Kebuliahan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Juriah Rekomendasi Rencana Bisnis Percepatan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Juriah Dokumen Resolusi Perdana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Juriah Naskah/Rekomendasi Kebijakan	Naskah	5	1	0	0	0	6	2.586	510	0	0	0	3.096
5	Juriah Perumusan SPM (R-3)	Naskah	11	12	11	10	7	51	2.974	2.969	2.577	2.604	2.983	14.107
4	Layanan Teknis dan Aliah Teknologi													
1	Juriah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pamflet	Proseding Dpp	5	2	1	1	1	10	3.857	2.005	1.485	2.209	1.341	10.846
2	Juriah Layanan Advis Teknis dan Fendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	23	31	82	2	2	140	1.291	1.250	3.142	3.443	2.474	11.600
3	Juriah Layanan Rengjian Laboratorium	Laporan hasil uji	10	8	8	12	4	42	3.713	4.233	14.983	6.157	3.914	33.020
4	Juriah Layanan Delta dan Informasi	Delta-Informasi	9	13	8	8	8	46	5.382	9.012	12.092	7.126	7.315	40.926
5	Juriah Layanan Jasa	Rupiah	2.122	1.647	5.000	2.441	1.391	12.60	21.39	2.246	4.900	2.391	1.089	12.766

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REASUSI CAPAIAN					TARGE T	REASUSI ANGGARAN					PROYEK SI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5			Layanan Dukungan Manajemen												
1	Juriah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Juriah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	8	6	6	6	1	27	2.561	2.435	2.016	1.511	3.673	12.795	
3	Juriah Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.411	1.955	1.658	1.698	1.768	8.499	
4	Juriah Pengelolan dan Pelaksanaan Keuangan	Dokumen	12	1	1	1	1	16	1.605	1.145	327	327	524	3.928	
5	Juriah Pengelolan BHMN	Dokumen	6	6	1	1	1	15	1.514	1.696	1.096	936	1.948	7.190	
6	Juriah Penyelenggaraan Tata Peraturan, Keasaban dan Kehumasan	Dokumen	6	1	1	1	1	10	392	200	964	873	865	3.294	
7	Juriah Pengembangan SDM	Dokumen	1	2	1	1	1	6	417	1.940	2.591	701	4.017	9.666	
8	Juriah Pengelolan Administrasi kepegawaian	Dokumen	5	6	1	1	1	14	852	1.252	540	2.114	1.650	6.409	
9	Juriah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Lokaana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Juriah Penyelenggaraan Kelolaana	Dokumen	1	1	1	1	1	5	421	700	527	471	1.323	3.641	
11	Juriah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	TARGET 2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI 2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12	Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hiburan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Fasilitas Pengelolaan HUK	Dokumen	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	397	397
14	Jumlah Administrasi Keatletan	Dokumen	7	6	0	6	6	25	2.222	2.349	0	3.910	11.211	19.492
15	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dokumen	21	9	5	4	6	45	14.636	4.541	3.827	3.059	31.406	57.470
16	Jumlah layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	58.581	64.614	72.798	63.967	69.211	329.112
17	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	16	18	8	10	2	54	4.708	2.497	3.745	1.596	4.196	18.741
18	Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	4030	109	2.627	2.177	500	9443	4.927	342	7.178	9.822	43.940	66.210
KEGIATAN 5.1.2 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATAN														
UNIT KERJA : PUSUTBANG JALAN & JEMBATAN														
1	SK 5.1.2.1 : Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan bidang Jalan dan Jembatan yang siap pakai	%	85	100	100	100	75	75						
1	Indeks peningkatan inovasi teknologi terapan siap pakai bidang Jalan dan Jembatan													

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REASUISI CAPAIAN					TARGE T	REASUISI ANGGARAN					PROYEK S	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan teknis bidang Jalan dan Jembatan	%	72	76,3	83,66	88,15	90	90	171.500	166.511	119.724	139.493	499.517	1.096.744	
1	1. Jurniah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)	Teknologi	6	1	1	1	1	10	40.804	21.175	12.026	24.561	12.905	111.471	
2	2. Penerapan Teknologi Terbias														
1	1. Jurniah Pilot Project	Unit	0	8	9	8	3	28	0	54.803	53.958	20.761	25.045	384.647	
3	3. Rekomendasi Kebijakan														
1	1. Jurniah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2. Jurniah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	3. Jurniah Dokumen Kelembagaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4. Naskah/Rekomendasi Kelembagaan	Naskah	2	2	0	0	0	4	775	340	0	0	0	1.116	
5	5. Jurniah Perumusan PSM (R-3)	Naskah	25	25	21	40	8	119	3.558	1.053	1.824	2.329	2.216	10.990	
4	4. Layanan Teknis dan Alih Teknologi														

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit: Rupiah)							
			REASUSI CAPAIAN					TARGET TOTAL	REASUSI ANGGARAN					PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pameran	Prosedur Gpp	18	7	2	2	1	30	7426	3.090	31.373	2.552	23.915	68.556	
2	Jumlah Layanan Advis Teknis dan Pendampingan Teknis	Rekomendasi Teknis	19	10	36	2	2	69	10.549	6.590	764	16.154	72.196	106.253	
3	Jumlah Layanan Bimbingan Laboratorium	Laporan hasil uji	5	4	4	0	4	17	1.325	829	1.590	0	3.927	7.410	
4	Jumlah Layanan Delta dan Informasi	Data-Informasi	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1.051	3649	4.700	
5	Jumlah Layanan Jasa Utibang (PNBB)	Rupiah	6.500	6.500	4.979	3.446	14.443	35.868	6.370	6.370	4.979	3.446	11.210	32.375	
5	Layanan Dukungan Mandiri														
1	Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	5	1	2	1	1	10	1.790	2.672	1.239	234	7.851	13.786	
3	Jumlah Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	11	14	2	1	1	29	10.008	12.099	800	1.207	3.083	27.697	
4	Jumlah Pengelolaan dan Pelaksanaan Keuangan	Dokumen	6	1	2	1	1	11	897	785	1.727	440	3.718	7.568	
5	Jumlah Pengelolaan BMN	Dokumen	3	4	6	1	1	15	492	1.316	685	592	462	3.548	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASABAN PROGRAM (OUTCOME)/SASABAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit Rupiah)					
			REASUSI CAPAIAN					TARGE T	REASUSI ANGGARAN				PROYEK SI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Juriah Penyelenggaraan Taha Perawatan, Kesehatan dan Kehumasan	Dokumen	2	0	1	1	1	5	439	0	500	129	2.467	3.734
7	Juriah Pengembangan SDM	Dokumen	4	1	2	2	0	9	2.477	2.372	1.539	3.648	2.092	12.128
8	Juriah Pendidikan Administrasi Keperawatan	Dokumen	1	4	1	0	1	7	555	0	203	0	469	1.227
9	Juriah Penyelenggaraan Organisasi dan Taha Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Juriah Penyelenggaraan Keperawatan	Dokumen	9	4	1	1	1	16	1.673	1.304	597	489	2.555	6.637
11	Juriah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Juriah Fasilitas Layanan Teknis dan Hilukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Juriah Fasilitas Pendidikan HKI	Dokumen	1	1	0	0	0	2	79	216	0	0	0	295
14	Juriah Administrasi Keperawatan	Dokumen	4	4	7	2	1	18	2.042	1.873	1.900	1.667	1.486	8.968
15	Juriah Pengembangan Sarana dan Prasarana Librang	Dokumen	4	3	2	2	0	11	1.616	1.193	695	3.144	1.455	8.103
16	Juriah Layanan Perbaikan	Bukan Layanan	12	12	12	12	12	12	40.421	45.168	2.749	52.024	64.941	205.302
17	Juriah Pengadaan Sarana dan Prasarana Karlier	UHI	6	1	2	2	2	13	33.638	1.146	98	994	8.212	44.088

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN					TARGET	TOTAL	REALISASI ANGGARAN					PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
3	1	Rekomendasi Kebijakan dan Rencanakan Teknologi	UHI	0	1	9	8	4	22	0	7.323	30.717	24.297	94.293	156.629	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	1	Layanan Teknis dan Arah Teknologi	UHI	15	10	22	12	9	68	1.452	1.312	1.179	1248	2.291	7.481	
				10	7	1	6	10	34	6.037	4.434	4.959	4.095	7.427	26.962	
				1	2	2	1	1	7	1.973	1.195	3.142	4.988	2.269	13.567	
				4	9	8	10	13	44	1.513	2.514	5.425	3.831	2.874	16.157	
				0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	300	300	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
			REALISASI CAPAIAN						REALISASI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	TARGET 2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI 2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Jumlah Layanan Jasa Lainnya (RNP)	Rupiah	2.500	3.853	4.757	4.131	7.151	22392	2.411	2.940	4.998	4.047	7.498	21.894
5 Layanan Dukungan Manajemen														
1	Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	5	4	4	4	1	18	860	1.088	1.014	830	4.887	8.679
3	Jumlah Pembaruan, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	9	7	1	1	1	19	1.728	2.724	2.010	1.145	5.067	12.674
4	Jumlah Pengelakan dan Pelaksanaan Keuangan	Dokumen	6	5	1	2	1	15	548	572	1.147	286	310	2.863
5	Jumlah Pengelakan BMN	Dokumen	4	4	1	1	1	11	526	600	392	349	1.209	3.076
6	Jumlah Penyelenggaraan Tata Perawatan, Keorsipan dan Kehumasan	Dokumen	6	6	1	3	1	17	2.922	2.539	1.205	974	6.298	13.938
7	Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jumlah Pengelakan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	8	1	5	1	25	2.066	2.528	1.665	1.204	3.144	10.608
9	Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Penyelenggaraan Kelembagaan	Dokumen	6	4	1	1	1	13	1.641	2.449	223	44	17.481	21.839
11	Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REASUSI CAPAIAN					REASUSI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	TARGET 2019	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI 2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12	Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hiburan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Haki	Dokumen	0	1	1	1	1	4	0	0	71	66	133	270
14	Jumlah Administrasi Keahlian	Dokumen	5	4	4	4	4	21	1.470	1.546	2.828	2.548	2.248	10.560
15	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Litbang	Dokumen	12	15	12	9	13	61	2.792	3.020	2.735	3.092	4.717	16.356
16	Jumlah layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	38.498	39.889	45.966	42.546	46.973	233.874
17	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	17	8	4	8	3	40	11.332	8.243	1.531	1.497	5.647	28.249
18	Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	880	2.380	880	129	1.631	5900	1.000	8.033	509	190	2.051	11.782
KEGIATAN 5.1.4 : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI														
UNIT KERJA : PUSITBANG KEBIJAKAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI														
1	SK 5.1.4.1 : Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi yang dimanfaatkan													
1	Persentase jumlah teknologi yang diterapkan	%	85	100	100	100	75	75						
2	Persentase jumlah rekomendasi kebijakan bidang PUPR yang	%	85	100	100	100	75	75						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Teknologi Terapan													
	1	Jumlah Teknologi (dari komponen teknologi : Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penerapan Teknologi Terbatas													
	1	Jumlah Pilot Project	0	0	9	5	10	24	0	0	15.716	36.737	220.55	74.508
3	Rekomendasi Kebijakan dan Pemantauan Teknologi													
	1	Jumlah Naskah Pemetaan Kebutuhan Teknologi	0	3	3	3	3	12	0	2.400	3.242	1.868	0	7.510
	2	Jumlah Rekomendasi Rencana Bisnis Penerapan Teknologi	0	12	9	10	12	43	0	4.058	5.172	2.664	2.821	16.715
	3	Jumlah Dokumen Replikasi Penderita	0	0	9	4	11	24	0	0	0	0	1774	1.774
	4	Naskah/Rekomendasi Kebijakan	19	6	9	7	5	46	11.911	3.318	5.545	5.587	30.78	29.439
	5	Jumlah Perumusan SPM (R-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Layanan Teknis dan Alih Teknologi	Naskah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Unit: Rupiah)					PROYEKSI 2019	TOTAL	
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
11	22	33	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			1	1	2	3	2	9	456	433	1.090	3.174	1.466	6.809	
			2	1	1	9	4	15	0	750	901	648	5845	8.144	
			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	0	0	1	1	1	3	0	0	599	199	1.654	2.452
5	Layanan Jasa Hibung (PNBP)	Rupiah	703	598	735	610	885	3531	615	599	600	610	622	3.045	
			Layanan Dukungan Manajemen												
			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	1	1	1	1	5	440	761	890	755	1.450	4.296	
			3	2	1	1	1	6	577	588	920	717	1005	3.808	
4	2	2	1	1	7	451	315	360	350	500	1.977				
5	4	1	1	1	1	8	1.132	305	360	330	0	2.127			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASABAN PROGRAM (OUTCOME)/SASABAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
			REASUSI CAPAIAN					TARGE T	REASUSI ANGGARAN				PROYEK SI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Juriah Penyelenggaraan Tata Peraturan, Keputusan dan Keputusan	Dokumen	5	1	1	1	1	9	1.415	325	500	420	700	3.560
7	Juriah Pengembangan SDM	Dokumen	1	1	1	1	1	5	293	781	959	973	1.100	4.105
8	Juriah Pendidikan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	4	1	1	1	10	878	713	300	230	200	2.321
9	Juriah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	0	0	3	293	284	0	0	0	577
10	Juriah Penyelenggaraan Kelembagaan	Dokumen	4	6	1	1	1	13	1.402	1.404	387	350	300	3.843
11	Juriah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Juriah Fasilitas Layanan Teknis dan Hilukum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Juriah Fasilitas Pendidikan HKI	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Juriah Administrasi Kelembagaan	Dokumen	4	4	4	4	4	20	1.260	1.315	3.198	2.423	2.572	10.968
15	Juriah Pengembangan Sarana dan Prasarana Hibang	Dokumen	7	7	3	3	1	21	1.454	985	1251	866	230	4.986
16	Juriah Layanan Pelembagaan	Bukan Layanan	12	12	12	12	12	12	15.990	18.258	21.231	20.210	18.874	94.564
17	Juriah Pengadaan Sarana dan Prasarana Karlier	UHI	16	3	8	8	8	43	3.034	459	1.480	575	350	5.947

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REASUSI CAPAIAN						REASUSI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
18	Jumlah Peringkat Bar Gedung/Bangunan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 5.1.5 : DIKUNGAN MANAJEMEN DAN DIKUNGAN TERKIN LAINNYA BADAN UTBANG															
UNIT KERJA : SEKRETARIAT BALITBANG															
1 SK 5.1.5.1 : Meningkatkan hasil dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Libong															
OUTPUT KEGIATAN :															
1. Meningkatkan nilai implementasi SAKIP Eselon I Badan Libong PUPP			N/A	78	78	80	80							
2. Meningkatkan status laporan keuangan			WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP							
Layanan Teknis dan Ahli Teknologi															
1. Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi, Publikasi dan Pamflet			Prosedur Dpp	2	1	1	1	1	6	4.334	6.289	6.424	6.893	23.580	47.300
2. Jumlah Layanan Advisi Teknis dan Pendampingan Teknis			Rekomendasi teknis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Jumlah Layanan Rengjian Laboratorium			Laporan hasil uji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Jumlah Layanan Data dan Informasi			Data-Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jumlah Layanan Jasa			Rupiah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.500			33.500	35.317	35.259	36.699	84.199	224.973							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
			REASUSI CAPAIAN					TARGET TOTAL	REASUSI ANGGARAN					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	PROYEKSI TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2 Layanan Dukungan Manajemen														
1	Jumlah Penyusunan Program Jangka Menengah	Dokumen	1	1	1	1	1	5	708	1.125	1.337	1.668	3.482	8.520
2	Jumlah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	577	940	1.568	1.582	3.383	8.050
3	Jumlah Penilaian, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.422	1.910	1.861	1.903	5.629	12.725
4	Jumlah Pengelompokan dan Pelaporan Keuangan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	986	1.692	1.236	1.222	4.014	9.150
5	Jumlah Pengelompokan BMN	Dokumen	1	1	1	1	1	5	866	1.028	1.404	1.376	1.477	6.150
6	Jumlah Penyelenggaraan Tata Perustoran, Keasbhan, dan Kehumasan	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.084	878	992	837	1.254	5.045
7	Jumlah Pengembangan SDM	Dokumen	1	1	1	1	1	5	3.328	2.611	2.505	2.188	4.568	15.200
8	Jumlah Pengelompokan Administrasi kepegawaian	Dokumen	2	1	1	1	1	6	1.175	996	742	666	1.142	4.721
9	Jumlah Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	3	1	1	1	1	7	1.035	935	908	1.080	2.602	6.560
10	Jumlah Penyelenggaraan Kelengkapan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.099	554	445	228	1.232	3.558
11	Jumlah Fasilitas Pengembangan Standar, Pedoman, Manual	Dokumen	1	1	1	1	1	5	1.409	1.443	986	774	3.374	7.986

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDICATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)						
			REASUSI CAPAIAN					TARGE T	REASUSI ANGGARAN					PROYEK	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
12	Jumlah Fasilitas Layanan Teknis dan Hiburan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	234	469	0	552	1.250	2.505	
13	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Hki	Dokumen	1	1	1	1	1	5	100	100	599	0	199	998	
14	Jumlah Administrasi Keahlian	Dokumen	1	1	1	1	1	5	631	599	630	0	2.390	4.250	
15	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Libong	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
16	Jumlah Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	12	12	1.2045	13.368	13.422	15.731	23.794	76.360	
17	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Unit	1	1	0	0	2	4	2.467	400	0	198	830	3.895	
18	Jumlah Peningkatan Gedung/Bangunan	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR

TUJUAN 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kecekterintahan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT															
SASARAN STRATEGIS															
1.	Meningkatkan Tata Kelola Kementerian PUPR														
	1	Indeks/tingkat tata kelola Kementerian PUPR	Tor get Dorr U	Tor get Dorr U	Tor get Dorr U	90	100	100							
PROGRAM 5.2 : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR															
SASARAN PROGRAM :															
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten								521.407,00	547.264,00	632.699,00	886.810,00	952.707,00	3.541.487,00	
	1	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	%	10	25	40	55	75	75	547.709,00	442.868,00	478.575,00	495.044,00	558.909,00	2.543.125,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARA N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang komperlen													
KEGIATAN 5.2.1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYENGGARAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI UNIT KERJA : SEKRETARIAS BADAN														
1.	SK 5.2.1.1 : Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya								242.895,84	232.169,31	173.492,81	139.289,69	129.197,02	917.044,67
	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Laporan	50	51	1	1	1							
	OUTPUL KEGIATAN :													
1.	Dukungan Manajemen	Laporan	50	51				101						
	1	Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	2	2			4						
	2	Jumlah Laporan Kelengkapan	Laporan	13	15			28	16.211,39	22.090,19				
	3	Jumlah Laporan Pengelolan Keuangan dan Umum	Laporan	13	13			26						38.301,56

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Jumlah Laporan Produk Hukum dan Kepegawaian Bidang SDM	Laporan	6	6				12						
5	Jumlah Laporan Layanan PNBSP	Laporan	11	11				22						
6	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan dbh dan informasi	Laporan	1	1				2						
7	Jumlah Laporan Solidisasi/Penyeba ran Luasan Informasi	Laporan	1	1				2						
8	Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyenggaraan	Laporan	1	1				2						
9	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi	Laporan	1	1				2						
10	Jumlah Laporan Pencapaian	Laporan	1	0				1						
2.	ASN yang Terdidik	Orang	894	0	0	0	0	894						
1	Jumlah ASN yang mendikuti Pendidikan Dalam Negeri/Luar Negeri	Orang	894					894	14.647,94	-	-	-	-	14.647,94

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Dokumen	5	4	3	0	0	12	3.706,25	6.172,96	-	-	-	9.879,21
		Jurusan Dokumen Pengembangan dan pengelolaan SIM	Dokumen	5	4	3			12					
4.	ASN yang Terlatih	Orang	11,1	10,1	8,32	0	0	29,6						
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	11,1	10,1	8,32			29,6	72.333,92	73.643,72	56.639,04	-	-
5.	Pelatihan Kompetensi, Assessment dan Pemeliharaan Kinerja	Orang	5,15	10,7	0	0	0	15,8						
		Jumlah PNS yang terpelatihan yang dinilai melalui assessment center dan unjuk kerja	Orang	5,15	10,7				15,8	11.099,34	26.341,23	-	-	-
6.	Pembangunan, Peringkasan, Renovasi Sarana dan Piasarana	M=	32,2	3,75	0	0	0	35,9						
		Jumlah Pembangunan, Peringkasan, Renovasi Sarana dan Piasarana	M=	32,2	3,75				35,9	40.948,99	6.972,31	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARAN PROGRAM/ (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.	Pendidikan dan Penanggulangan	Unit	401	2.48				649						
			3	2				5						
	1	Unit	401	2.48				649	25.634,95	11.078,24	-	-	-	36.713,69
			3	2				5						
8.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan			1	1	1	3			20.570,27	20.376,43	21.293,28	62.239,97
9.	Layanan Internal (Overhead)	Layanan			10	10	10	30			26.100,50	40.766,55	34.882,40	101.719,46
10.	Layanan Periklanan	Bulan	12	12	12	12	12	12	58.303,07	85.870,17	70.184,00	78.146,71	73.051,34	365.555,29
KEGIATAN 5.2.2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
UNIT KERJA : PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA														
1.	SK 5.2.2.1 : Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemeriksaan Kinerja													
			1	9,45	8,63	7,00	25,0							
			2	17,0	23,0	23,0	23,0		86,0					
			3	53	00	00	00		53					
OUTPUT KEGIATAN :		orang	-	-	8,50	4,00	12,5	25,479,10	39.255,91	62.185,96	58.186,83	43.719,68	228.837,48	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1. Dukungan Manajemen	1 Jumlah Laporan Pencapaian Umum, Program dan Anggaran	Laporan	7	19				26							
		2 Jumlah Laporan Peningkatan Profesionalisme Assessor, pemanfaatan dan evaluasi	Laporan	5	17			22	2086,32	8.518,97					10.605,29
		2. Dokumen Kebijakan teknis/NSPK penilaian, kompetensi, pengelolaan kinerja dan pemeriksaan karir ASN PUPR	Dokumen	22	18	0	0	40							
2.	Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK penilaian kompetensi ASN/PUPR	Dokumen	11	12			23	21.038,21	21.622,38	17.316,21	11.336,28	6.661,00	77.974,08		
		2 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pengelolaan kinerja ASN/PUPR	Dokumen	3	4			7							
		3 Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK pemeriksaan karir ASN PUPR	Dokumen	8	2			10							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARA (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN		TAR GET		TOTAL	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4) 201 5	(5) 201 6	(6) 201 7	(7) 201 8	(8) 201 9	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1 Jumlah SDM Pujare Bidang SDM dan Konsultasi yang ditingkatkan Kompetensinya	orang	477	465	730	519	335	10.2 24	32.488,78	46.157,48	59.070,55	77.372,68	72.698,46	287.987,95
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Dukungan Manajemen	Laporan	14	12				26						
	1 Jumlah Laporan Peneracunan Umum, Program dan Anggaran	Laporan	5	3				8						
	2 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi, Pekambihan dan Seras	Laporan	3	1				4	33.72,29	3292,54	-	-	-	6.664,84
	3 Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar	Laporan	1	0				1						
	4 Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	5				6						
	5 Jumlah Laporan Pencapaian	Laporan	1	1				2						
	6 Jumlah Laporan Monev Pelitihan	Laporan	3	2				5						
2	ASN yang Terlatih	Orang	22	0	263	480	324	832						
	1 Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Didam Negeri/luar	Orang	22	0	263	480	324	870	316,42	-	542,12	26.065,64	25.497,01	52.421,20

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Negeri													
3. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Keahlian	Dokumen	Dokumen	12	24	36	18	23	115						
			1	2	1	0	0	7	10					
			2	10	23	26	9	9	77	4998,20	131,38,59	23,624,70	11,482,01	12,792,53
4. ASN yang Terdidik	Dokumen	Dokumen	0	0	12	9	7	28						
			1	455	465	467	390	119	189					
			1	455	465	467	390	119	189	11,266,46	17,294,89	13,779,72	10,789,89	7,520,49
5. Pengembangan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Peralatan	M ²	M ²	287	1,30				417	5,839,71	4,379,84	-	-	-	10,219,55
			1	4	0				4					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROYEKSI	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
6.	Penelitian dan Pengembangan	Unit	1027	243				1270							
		Jumlah Perdatan dan Pelaksanaan	1027	243				1270	3.919,87	693,92	-	-	-	-	4.613,80
7.	Layanan Internal (Overhead)	Layanan			2	2	2	6							
8.	Layanan Perkantoran	Bulan	1	1	1	1	1	1	2.975,83	7.357,69	13.259,88	14.777,63	13.198,37	51.569,40	
KEGIATAN 5.2.4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN															
PEMBUKUAMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH															
UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERUMUKAMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH															
1.	SK 5.2.4.1 : Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah yang dilibatkan kompetensinya													
			Orang	502	298	866	3.064	3.309	8.039						
OUTPUT KEGIATAN :															
Dukungan Monevmen			Laporan	13	16	0	0	0	29	36.498,45	51.061,74	79.255,41	94.657,63	87.486,09	348.979,31
Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran Serta Evaluasi			Laporan	8	9				17	3.802,70	3.912,42	-	-	-	7.715,12

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARAN (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pusat													
	Jumlah laporan Pengkajian Administrasi Pelaksanaan dan Siparis	Laporan	1	1				2						
	Jumlah laporan Pembinaan Tenaga Pendidik	Laporan	0	0				0						
	Jumlah laporan KAD	Laporan	1	1				2						
	Jumlah laporan Pencapaian dan Pelibihan	Laporan	1	0				1						
	Jumlah Laporan Monev Pendidikan dan Pelibihan	Laporan	2	5				7						
2	ASN yang Terlatih	Orang	316	0	550	294	294	645						
	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	316	0	550	294	294	645	3.739,64	-	-	18.376,00	23.535,33	45.870,97
3	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Keahlian	Dokumen	17	26	36	43	27	149						
	Jumlah Dokumen Pola dan Teknik	Dokumen	4	0	3	3	0	10	7.251,92	16.708,29	27.533,37	25.082,69	20.409,67	97.005,93

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARA N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019		TOTAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Kediktian	Dokumen	13	26	13	12	11	75							
			0	0	20	28	16	64							
4.	ASN yang Terdidik	Orang	186	298	316	220	369	1389							
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Dalam Negeri/Luar Negeri	Orang	186	298	316	220	369	1389	7.403,90	19.364,77	14.915,20	10.493,03	6.100,00	58.276,90
5.	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Piasarana	M ²	500	1.000				1500							
	1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Piasarana	M ²	500	1.000				1500	43.45,46	19.49,64	-	-	-	6.295,10
6.	Pelatihan dan Peningkatan	Unit	329	25				354							
	1	Jumlah Pelatihan dan Peningkatan	Unit	329	25				354	6.946,78	787,70	-	-	-	7.734,48
7.	Layanan Internal (Overhead)	layanan			3	3	3	9							
					3	3	3	9			13.745,27	14.434,00	15.171,12		43.351,19

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 5.2.5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL UNIT KERJA : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL														
8.	Layanan Perencanaan	Bulan	1	1	1	1	1	1	2.988,05	8.338,92	23.061,57	26.271,11	22.269,97	82.929,62
1. SK 5.2.5.1 : Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional														
OUTPUT KEGIATAN :			Orang	3.179	1.339	537	454	392	13,6	23				
1. Dukungan Manajemen			Laporan	13	12				24.905,98	34.857,94	29.156,91	93.288,87	65.867,96	248.077,66
1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum dan Program Anggaran			Laporan	3	4				2.377,72	2.821,85	-	-	-	5.199,57
2. Jumlah Laporan Pengabdian Administrasi Pelaksanaan dan Smpas			Laporan	3	4									

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS PROGRAM (IMPACT)/SASARA N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	3	Jumlah Laporan Pembinaan Tenaga Pengajar dan Jabatan Fungsional	Laporan	1	1			2							
	4	Jumlah Laporan KAD	Laporan	1	1			2							
	5	Jumlah Laporan Penerimaan dan Penyerapan Anggaran	Laporan	2	1			3							
	6	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan	Laporan	3	1			4							
	2	ASN yang Terlatih	Orang	307	121	448	457	387	131						
	1	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	Orang	307	121	448	457	387	131	9.242,85	6.992,85	3.366,67	63.869,75	37.490,29	120.972,41
				1	3	4	4	0	76						
3	Peningkatan Kualitas dan Mutu Kelembagaan	Dokumen	2	6	5	3	2	18							
			1	0	0	0	0	0	0	1.423,93	2.666,53	1.909,38	1.380,25	1.771,96	9.122,05
4	Peningkatan Kinerja dan Mutu Kelembagaan	Dokumen	2	6	5	3	2	18							
			1	0	0	0	0	0	0	1.423,93	2.666,53	1.909,38	1.380,25	1.771,96	9.122,05
			Orang	376	198	420	387	500	188	2.335,20	5.030,74	4.551,25	3.419,30	4.222,31	19.558,80

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOT AL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROYEKSI 2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Jumlah jabatan fungsional yang di evaluasi pengujiannya, peminorannya dan pengembangannya	Orang	376	198	420	387	500	1881							
			108	126	89	74	50	447							
5	ASN yang Terdidik	Orang	108	126	89	74	50	447							
			108	126	89	74	50	447							
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Dalam Negeri/Luar Negeri	Orang	108	126	89	74	50	447	5.408,89	5.500,08	3.921,59	3.525,57	3.097,80	21.453,93	
			0	1,50	0	0	1,50	0							
6	Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	0	1,50	0	0	1,50	0							
			0	1,50	0	0	1,50	0							
1	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	M ²	0	1,50	0	0	1,50	0							
			0	1,50	0	0	1,50	0							
7	Pendidikan dan Peningkatan	Unit	243	128				371							
			243	128				371	1.709,02	643,00	-	-	-	-	2.352,02
1	Jumlah Perawatan dan Peningkatan	Unit	243	128				371							
			243	128				371	1.709,02	643,00	-	-	-	-	2.352,02
8	Layanan Internal (Overhead)	kayanan			1	1	1	1							
					1	1	1	1							
1	Layanan Perawatan dan Peningkatan	Bulan	1	1	1	1	1	1	23.881,37	10.543,25	11.966,38	15.384,12	12.752,04	59.036,76	
			1	1	1	1	1	1	23.881,37	10.543,25	11.966,38	15.384,12	12.752,04	59.036,76	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK BIDANG PEKERJAAN UMUM														
UNIT ORGANISASI : POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM														
SASARAN KEGIATAN : Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi Konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan yang ditingkatkan Kompetensinya														
	Jumlah SDM Bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi Konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang					150	150						
1	Tingkat penambahan jumlah yang ditunjukkan menjadi pekerjaan fungsional 30% dari baseline													
2	Tingkat kesesuaian pemetaan dan penugasan jabatan fungsional 80%													
3	Tingkat pelayanan pembinaan jabatan fungsional													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS N PROGRAM (OUTCOME)/SASAR AN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOT AL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROYEKSI 2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
OUTPUT			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL							
1 Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum		Orang	5	6	7	8	9	150	-	-	-	-	1.835,13	1.835,13	
	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Bangunan Gedung	Orang					50	50							
	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Bangunan Air	Orang					50	50							
	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Jalan dan Jembatan	Orang					50	50							
2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Peneliti an	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
	1 Jumlah Penelitian bidang Pekerjaan Umum	Peneliti an					0	0							
	2 Jumlah Jurnal bidang Pekerjaan Umum	Jurnal					0	0							
	3 Jumlah Pengabdian Masyarakat	Pengab dian					0	0							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROYEKSI 2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	10.197,53	10.197,53	
4	Layanan Dukungan Manajemen Sakler	Layanan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	6.805,31	6.805,31	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	10.727,01	10.727,01	

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN

TUJUAN 5: "Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel"

Unit Organisasi: Inspektorat Jenderal

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (MPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rp/lemb)				
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT														
SASARAN STRATEGIS														
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR													
	Indeks tata kelola Kementerian PUPR	%	Targ et baru	Targ et baru	Targ et baru	Targ et baru	90	100	100					
PROGRAM 5.3 : PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR														
SASARAN PROGRAM :														
1	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan Intern													
	Level Internal Audit Capability Model	Level	2	2	dengan n catio	dengan n catio	3	3	3					
										74.616,25	88.134,14	89.666,42	95.039,54	99.642,00
														447.098,36

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA TOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015		2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Presertase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR	%	90,26	73,63	77,47	82,31	80	80						
KEGIATAN 5.3.1: LAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BIDANG PENGAWASAN														
UNIT KERJA : SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL														
1 SK 5.3.1.1 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya														
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Auditor/Auditee Yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan	3	4	5	5	5	22						
2	Nilai Kinerja Anggota Item	%	69,67	92,74	100,13	94,68	90	90						
3	Presertase SDM Inspektoral Jenderal PUPR yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	Targ et baru	Targ et baru	Targel baru	76	75	75						
4	Presertase Pemuldehan Regulasi Pengawasan Intern PUPR	%	Targ et baru	Targ et baru	Targel baru	76,36	80	80						
5	Presertase Pembayaan Gaji dan Tunjangan Kerjaga Pegawai Inspektoral Jenderal PUPR	%	100	100	100	100	100	100						
6	Presertase Penerimaan Layanan Perkhamban dan Overhead Inspektoral Jenderal PUPR	%	100	100	100	100	100	100						
OUTPUT:									46.898,28	59.919,96	60.058,55	63.955,57	60.057,56	290.889,92

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA TOR	SATUAN	TARGET					TOTA L	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Auditor dan Auditee yang Terbina	Orang	1.112	3.027	3.450	2.709	2.000	1229	9.763,56	10.729,8	14.128,8	12.149,1	10.482,2	57.273,66
2	Layanan Dukungan Manajemen Eleton I	Loyoran	1	1	1	1	1	5	10.224,0	12.295,0	8.934,64	10.963,4	9.212,47	51.629,61
3	Layanan Internal (Overhead)	Loyoran	1	1	1	1	1	5	6.461,90	8.047,99	2.281,72	2.506,48	832,03	20.130,12
4	Layanan Perkaroran	Loyoran	12	12	12	12	12	12	20.428,7	28.847,1	34.713,3	38.336,4	39.530,8	161.856,5
KEGIATAN 5.3.2: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORATI I														
UNIT KERJA : INSPEKTORATI I														
1	SK 5.3.2.1 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral I													
	Presertase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral I	%	Targ et Baru	Targ et Baru	Targ et Baru	77,82	80	80						
	OUTPUT KEGIATAN :								6.817,29	4.523,24	6.338,91	6.363,18	8.368,19	34.210,8
1	Layanan Audi Internal	Loyoran	1	1	1	0,94	1	1	6.817,29	4.523,24	6.338,91	6.363,18	8.368,19	34.210,81
KEGIATAN 5.3.3: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORATI II														
UNIT KERJA : INSPEKTORATI II														
1	SK 5.3.3.1 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral II													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA TOR	SATUAN	TARGET						TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral III	%	Tara eti Baru	Tara eti Baru	Tarpet Baru	82,55	80	80	5.500,88	4.711,30	4.015,84	4.636,18	5.909,75	24.773,95	
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	0,83	1	1	5.500,88	4.711,30	4.015,84	4.636,18	5.909,75	24.773,95	
KEGIATAN 5.3.4: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT III															
UNIT KERJA : INSPEKTORAT III															
1	SK 5.3.4.1 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral III														
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral III	%	Tara eti Baru	Tara eti Baru	Tarpet Baru	77,84	80	80	8.306,53	7.253,25	6.747,13	7.034,43	9.797,34	39.138,68	
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	0,96	1	1	8.306,53	7.253,25	6.747,13	7.034,43	9.797,34	39.138,68	
KEGIATAN 5.3.5: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT IV															
UNIT KERJA : INSPEKTORAT IV															
1	SK 5.3.5.1 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKA TOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTA L	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV	%	Tara eti Baru	Tara eti Baru	Target Baru	72,34	80	80	5.975,76	6.366,96	6.198,51	8.393,06	9.095,75	36.030,04
KEGIATAN 5.3.6: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR DI INSPEKTORAT V														
UNIT KERJA : INSPEKTORAT V														
1	SK 5.3.3.1 : Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral II													
1	Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral II	%	Tara eti Baru	Tara eti Baru	Target Baru	71,45	80	80	1.317,51	3.359,43	6.307,47	4.657,13	6.413,42	22.054,98
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	0,9	1	1	1.317,51	3.359,43	6.307,47	4.657,13	6.413,42	22.054,98

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT T/INDIKATOR	SATUAN	TARGET								ANGGARAN (Juta Rupiah)							
			REALISASI CAPAIAN				PROY ESI CAP AIAN				REALISASI ANGGARAN					PROY ESI CAP AIAN	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019					
1. Peningkatan dukungan mandemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR	1. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah 2. Opini WTP Hasil Audit BPK 3. Terealisasi Pelaksanaan Program 4. Tingkat Pengalokasian Penganggaran dan Pengantiristralan Regional 5. Tingkat Fasilitas Prosidur Hukum dan Bantuan Hukum 6. Tingkat Layanan Minimal Pasdik	Nilai	66,12	70,99	71,59	72,19	78	78	238,997	226,831	239,280	282,486	308,253	1.315,857				
			WD	WT	WTP	WTP	WTP	WT										
			P	P	P	P	P	P										
			55%	61,42%	76,33%	84,33%	100%	100%										
			70,5%	71,26%	81,27%	89,91%	100%	100%										
			124,7%	91,45%	89,34%	90,74%	100%	100%										
365,44	380,44	441,105	441,105	100%	100%													
KEGIATAN 5.4.1 : PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENMOGAKAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENYIARAN PILIN													65,760	47,679	61,534	59,878	106,753	341,604
UNIT KERJA : BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN KERJASAMA UJAF NEGERI																		
1. SK 5.4.1.1 : Meningkatkan Kelepatan Mottu Penganggaran													24,976	18,495	25,484	24,560	20,685	114,220

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
2	SK 5.4.1.2: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Keefektifan Luar Negeri	Peningkatan Dokumen Administrasi Anggaran yang tepat Waktu	Ketepatan Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				12,582	8,227	9,138	6,752	8,000	44,699							
3	SK 5.4.1.3: Meningkatkan Kualitas Data Kelapaan dan Penyelenggaraan SAKIP	Mekanisme Pengurusan Pohon, Hebat, Investasi, dan Administrasi Keefektifan Luar Negeri yang Terpadu	Tingkat Akurasi Mekanisme	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				12,963	8,274	10,093	10,459	8,250	50,089							
4	SK 5.4.1.5: Meningkatkan Kualitas Data Kelapaan Pengadaan	Data Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program yang Lengkap, Akurat dan Terkini	Kualitas data	66,12 %	70,99 %	71,59 %	72,19 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %	78,00 %
				45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
5	SK 5.4.1.4 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Fasilitas Layanan Administrasi Perkantoran OUTPUT : 1 Layanan Perencanaan 2 Layanan Keljasama Internasional 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang PUPR Lainnya 4 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5 Layanan Sarana dan Prasarana Hibrid 6 Layanan Perkantoran 7 Layanan Dukungan Manajemen Sakel	Data dan Pelaporan Pelaporan yang Lengkap, Akurat dan Terkini Kualitas data	0%	0%	0%	0%	100%	100%	15.233,9	12.268,3	16.819,9	18.007,7	24.817,7	67.595
			15	20	2	2	40	22.463,3	15.763,3	25.484,4	24.560,0	20.685,0		
			7	1	1	1	10	12.268,2	8.227,2	9.138,2	6.732,2	8.000,2		
			0	12	1	1	14	7.401,8	55.110,8	52.200,0	32.274,4	45.000,4		
			7	6	1	1	15	12.963,3	8.274,3	10.093,3	10.309,9	8.230,9		
			3	3	1	1	8	2.513,3	2.732,3	3.422,3	3.415,3	830,3		
			12	12	12	12	12	15.233,9	12.268,3	13.396,6	14.622,2	19.731,2	4.217,2	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					PROY EKSIS CAPAIAN TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROY EKSIS CAPAIAN TOTAL				
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019					
KEGIATAN 5.4.2 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAN ORGANISASI TATA LAKSANA UNIT KERJA : BIRO KEGAWALAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA													44.325	40.448	42.276	46.207	36.500	210.226
1. SK 5.4.2.1 : Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Organisasi, Individu dan Family Reformasi Birokrasi								2.027	5.063	5.690	6.144	3.550	22.474					
2. SK 5.4.2.2 : Pelaksanaan, Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian								19.598	19.878	24.498	21.896	18.458	104.329					
1. Jumlah Dokumen Organisasi, Individu, Pelaksanaan, Perencanaan Pegawai dan Reformasi Birokrasi			Dokumen	3	7	6	6	6	28									
2. Jumlah Dokumen Matrial dan Layanan Umum Kepegawaian			Dokumen	29	8	8	8	8	35									
3. Jumlah Dokumen Pengadaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai			Dokumen	13	5	5	5	5	21									

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN						
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	
3. SK 5.4.2.3 : Peningkatan Administrasi Perkantoran	(1)	Jumlah Laporan Pengelolan Administrasi Perkantoran	Laporan	4	2	2	2	2	22.700	15.527	12.527	18.177	14.492	83.423
				2	2	2	2	2						
				12	1	1	1	1						
				16										
				12										
OUTPUT	Layanan Mendirikan Organisasi	Layanan	6	6	6	6	6	2.027	5.063	5.690	6.144	3.550		
			28	12	28	64	19.598	19.878	24.498	21.896	18.458			
			4	4	4	14	1.493	542	988	2.777	300			
			12	12	12	12	21.207	14.985	11.539	15.401	12.120			
			1	1	1	1						2.072		
Layanan Dukungan Manajemen Sakter	Layanan	Layanan	12	12	12	12	12							
			12	12	12	12	12							
			12	12	12	12	12							
			12	12	12	12	12							
			12	12	12	12	12							

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)										
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN										
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
KEGIATAN 5.4.3 : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN												PROY EKSICAPAIAN TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
UNIT KERJA : BIRO KEUANGAN												PROY EKSICAPAIAN TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1.												PROY EKSICAPAIAN TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
SK 5.4.3.1 : Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian												PROY EKSICAPAIAN TOTAL	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
(1)	Jumlah SDM yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan	Orang	1.250	1.100	1.270	1.279	565	16.995	19.616	19.279	18.278	18.090	154.326					
(2)	Jumlah Laporan Penelaahan/Perbendaharaan	Laporan	6	15	6	6	39											
(3)	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	17	8	15	15	70											
(4)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Keuangan	Dokumen	2	8	2	2	16											
(5)	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Laporan	3	3	3	3	15	9.057	16.611	11.665	12.300	11.410						
	OUTPUT																	
1	Laporan Mandemen Keuangan	Laporan					3	16.995	19.616	19.279	18.278	18.090						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)												
			REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN				PROYEKSI CAPAIAN 2019								
			2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018									
			5	6	7	8	TOTAL													
3.	SK 5.4.3 : Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah OGH Hukam, Model dan Penelitian Kelicik yang Didusun	Dokumen	21	25	25	21	25	117											
			Orang	633	350	315	110	315	1723											
4.	SK 5.4.4 : Inovasi Pelayanan Rumah Negara Serta Usulan Pengalihan Sektur Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hukam yang Dibayarkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Dokumen	60	64	46	89	60	319											
			Orang	40	40	40	40	40	200											
5.	SK 5.4.5 : Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Persebaran Status Rumah Negara dan Usulan Pengalihan Sektur Rumah Negara	Laporan	50	53	80	80	0	263											
			Orang	50	53	80	80	0	263											
										7.813	7.086	10.113	10.877	10.630	46.540					

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT T/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
1.	SK 5.4.5.1 : Pengelolaan, Penawaran, dan Penjualan BNN	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penawaran BNN	Laporan	9	5	3	6	10	33	26.319	14.311	15.776	25.806	23.296	105.499
				5	3	2	8	21							
				1	6	7	10	4	28						
				0	1	1	1	6	9						
				9	3	3	7	4	26						
				9	5	3	7	7	31	1.000	77.400	9.108	571	0	16.419
2.	SK 5.4.5.2 : Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian RPK yang Akutribel	Jumlah Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa yang diatribel	Laporan	1	8	14	1	0	24						
				1	8	14	1	0	24						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET				PROY EKSICAP ALIAN TOTAL	ANGGARAN (Juta Rp/tdn)					PROY EKSICAP ALIAN TOTAL			
			2015	2016	2017	2018		2019	2015	2016	2017	2018		2019		
3	SK 5.4.5.3 : Peningkatan Administrasi Pemerintahan (1)	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan OUTPUT	Dokumen	4	4	4	4	4	20	7.681	13.503	12.816	28.616	25.204	88.020	
				1	16	26	12	1	66	26.319	14.311	15.776	25.606	23.296	105.499	
				2		14	12	0	26		7.740	9.108	544	0	17.392	
				3			3	3	1	16		889	5.076	6.147	1.030	12.943
				4												
5																
KEGIATAN 5.4.5 : PENYENGGAMAAN DAN PENYAMAAN INFORMASI PUBLIK																
UNIT KERJA : BIRO KOMUNIKASI PUBLIK																
1.																
SK 5.4.4.1 : Penyelenggaraan dan Pembiayaan Informasi Publik																
								40.432	39.081	58.059	59.455	58.000	255.327			
								25.712	29.456	46.680	46.008	45.284	193.420			

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					REALISASI ANGGARAN	TOTAL										
			2015	2016	2017	2018	2019												
	[2]	Laporan Pembinaan, Penguatan, dan Kerjasama di lingkungan Kementerian PUPR	Laporan	1	1	1	1	1	5										
				3	3	3	3	3	15										
				3	3	3	3	3	15										
	[3]	Laporan Pengelolaan Prosono dan Sarana Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR	Laporan	3	3	3	3	3	15										
				3	3	3	3	3	15										
	[1]	Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Keompok dan Toka Naskah Dirca di lingkungan Kementerian PUPR serta Pembinaan dan Pengelolaan BMM Tingkat Kabupaten/Jendral	Laporan	3	3	3	3	3	15										
				3	3	3	3	3	15										
3. SK 5.5.2.3 : Administrasi Pemerintahan	[1]	Layanan perkhawari	Layanan	12	12	12	12	12	12										
				12	12	12	12	12	12										
				94.223	90.266	116.312	148.852	145.278	594.912										

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET					PROY EKSISTENSI CAPAIAN	TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					PROY EKSISTENSI CAPAIAN	TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019			
	OUTPUT																
	1	Layanan Prokoder			1	1	1	3									10.498
	2	Layanan Umum			19	1	1	21	10.359		8.530	9.450	12.548				40.887
	3	Layanan Sarana dan Prasarana Hibrid			14	1	1	16	15.488	1.309	6.371	14.389	7.174				44.731
	4	Layanan Dukungan dan Manajemen Saklar					1	1					4.479				4.479
	5	Layanan Perbaikan			12	12	12	12	78.735	88.957	109.941	136.444	135.926				548.003
KEGIATAN 5.3: PENYEBERANGAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PUPA DAN PEMUKIMAN																	
UNIT KERJA : PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI																	
			5	5	5	5	5	25	72.719	49.548	71.443	82.236	64.832				343.080
			450	450	450	450	450	2.250	50.633	20.838	39.243	39.906	63.480				214.100
			3	3	3	3	3	15									
			3	3	3	3	3	15									
			5	5	5	5	5	25									
			12	12	13	13	13	43									
			7	7	7	7	7	28									
			4	4	4	4	4	16									
			2	2	2	2	2	10									

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)																					
			2015	2016	2017	2018	PROYEKSI CAPAIAN 2019	TOTAL	2015	2016	2017	2018	PROYEKSI CAPAIAN 2019	TOTAL															
	(1)	Jumlah NGPK pengembangan dan pelaksanaan TK di Kementerian PUPR yang disusun	NGPK	5	5	5	5	5	25																				
				(2)	Jumlah Sumber Daya Manusia TK yang ditunjuk	Orang	450	450	450	450	450	2250																	
							(3)	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	Sistem	3	3	3	3	3	15														
										(4)	Jumlah paket perangkat lunak yang diserahkan dan dipelihara	Paket	3	3	3	3	3	15											
													(5)	Jumlah buku informasi/struktur ke-PUPR yang disusun	Buku	5	5	5	5	5	25								
																(6)	Jumlah sistem aplikasi yang telah dikembangkan	Sistem	12	12	13	13	13	63					
																			(7)	Jumlah server yang telah diinstalasi Data dan Informasi Audio Visualnya	Dokumen	7	7	7	7	7	35		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)								
			REALISASI CAPAIAN					REALISASI ANGGARAN								
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL			
			5	6	7	8	PROY ESI CAP AIAN	TOTAL								
	(b)	Jumlah Informasi Audio Visual yang Dipublikasikan Setiap Bulan Melalui Codei Informasi Audio Visual	Laporan	4	4	4	4	4	20							
	(p)	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan SDM dalam Pengelolaan Data & Informasi Audio Visual	Laporan	2	2	2	2	2	10							
	SK 5.5.3.2 : Pengelolaan Administratif Perkantoran			1	1	1	1	1	5	22.08	28.70	32.40	42.40	37.22	162.80	
		Jumlah laporan pengabdian dan/atau penelitian	Laporan	1	1	1	1	1	5							
		Jumlah perencanaan dan pengabdian orang-orang	Sektor/Bidang	7	7	7	7	7	35							
		Jumlah bimbingan dan/atau pelatihan	Bulan	12	12	12	12	12	12							
	SK 5.5.3.3 : Layanan Publik PNEP	Jumlah Layanan Publik PNEP	Bulan	12	12	12	12	12	12							

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	OUTPUT												
	1. Layanan Daring dan Hibrida	Layanan	1	1	1	1	3	50,633	20,033	39,224	39,970	20,466	171,086
	2. Layanan Sertaris dan Pemasangan Hibrida	Layanan	1	1	1	1	3	1,329	1,857	6,350	14,775	22,947	47,268
	3. Layanan Pemasangan Hibrida	Layanan	12	12	12	12	12	20,757	28,851	26,051	27,449	23,418	124,726
	4. Layanan Dukungan Mendukung Sertaris	Layanan				1	1					39,920	3,920

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU Kementerian PUPR

No	Sasaran Strategis	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan
2	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi	Tingkat dukungan ketahanan air Tingkat dukungan pengendalian lumpur Sidoarjo
3	Meningkatnya konektivitas bagi penguatan daya saing	Tingkat Konektivitas Jalan Nasional
4	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Tingkat pelayanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Indeks tata kelola Kementerian PUPR

IKU Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Tingkat Keterpaduan Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman Terhadap Penganggaran Pembangunan Bidang PUPR

IKU Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR	Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Opini WTP Hasil Audit BPK Transparansi Pelaksanaan Program Tingkat Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Bantuan Hukum Tingkat Layanan Informasi Publik
2	Peningkatan dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tingkat kenyamanan bekerja Tingkat layanan data dan teknologi Informasi

IKU Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan intern	Level Internal Audit Capability Model Presentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR

IKU Direktorat Jenderal Cipta Karya

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni

IKU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya ketahanan air	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku • Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air • Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak • Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA • Tingkat kinerja layanan irigasi • Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan
2	Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat layanan pengendalian lumpur Sidoarjo

IKU Direktorat Jenderal Bina Marga

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya kemandapan dan aksesibilitas jalan nasional	Tingkat kemandapan jalan Nasional Tingkat aksesibilitas jalan Nasional

IKU Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan	Tingkat pemenuhan backlog perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah Tingkat peningkatan kualitas perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah

IKU Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan	Tingkat aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah
2	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07)	Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan

IKU Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional

IKU Badan Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan rekomendasi kebijakan bidang PUPR	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Terapan dan Rekomendasi Kebijakan Oleh Stakeholders Kualitas Layanan Teknis kepada Stakeholders penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR

IKU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Program	Uraian/IKU/Indikator Kinerja Sasaran Program
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia PUPR yang Kompeten	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO